



**PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA**



2025

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA SAMARINDA
TAHUN ANGGARAN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda dengan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan manifestasi akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda sebagai wujud dalam merealisasikan mandat pembangunan daerah. Melalui evaluasi yang objektif, LKPJ berfungsi sebagai komitmen Pemerintah Kota Samarinda atas pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi fundamen strategis bagi perencanaan pembangunan pada periode mendatang. Penyusunan dokumen LKPJ disusun berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan wujud implementasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda pada tahun 2025 sebagai bentuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang akuntabel dan transparan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah Kota Samarinda. Realisasi APBD Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2025 dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama serta indikator kinerja program yang berorientasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat serta kualitas pelayanan publik. Evaluasi pada capaian target kinerja merupakan bentuk perwujudan akuntabilitas Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara sistematis, ruang lingkup LKPJ Wali Kota



Samarinda Tahun 2025 mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta capaian pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan mencakup capaian realisasi program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta implementasi kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang menyajikan hasil tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada hasil evaluasi tahun anggaran sebelumnya sebagai wujud sinergitas penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian pembangunan dan kemajuan daerah pada tahun 2025 merupakan manifestasi dari kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Samarinda, yang didukung penuh oleh kontribusi nyata seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat Kota Samarinda. Keberhasilan ini adalah cerminan dari komitmen bersama dalam memajukan daerah.

Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa perjalanan pembangunan tidak terlepas dari berbagai kendala dan dinamika. Oleh karena itu, melalui komitmen yang kuat serta dukungan kolektif dari semua pihak, berbagai upaya strategis terus dilakukan secara maksimal untuk memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal. Akhir kata, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Samarinda Tahun 2025 ini diharapkan dapat menyajikan gambaran yang komprehensif dan objektif atas realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota Samarinda selama Tahun Anggaran 2025.



**Samarinda, 16 Maret 2026
WALI KOTA SAMARINDA**

ANDI HARUN



DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	BAB I - 1
1.1. Dasar Hukum.....	BAB I - 1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	BAB I - 2
a. Visi.....	BAB I - 2
b. Misi.....	BAB I - 5
1.3. Data Umum Daerah.....	BAB I - 16
a. Data Geografis Wilayah.....	BAB I - 16
b. Jumlah Penduduk.....	BAB I - 19
c. Pertumbuhan Penduduk.....	BAB I - 19
d. Jumlah PNS.....	BAB I - 21
e. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan.....	BAB I - 21
f. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja; dan.....	BAB I - 22
g. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan.....	BAB I - 23
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	BAB II - 1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH.....	BAB III - 1
3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	BAB III - 1
1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	BAB III - 1
2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan.....	BAB III - 10
3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.....	BAB III - 311
3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan.....	BAB III - 437
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya.....	BAB III - 454
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	BAB IV - 1
4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas – Pembantuan.....	BAB IV - 1
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Pusat/Provinsi.....	BAB IV - 1
4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya.....	BAB IV - 3
4.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian.....	BAB IV - 3
BAB V PENUTUP.....	BAB V - 1
LAMPIRAN.....	LAMPIRAN - 1



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda	BAB I - 17
Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Samarinda Per-Kecamatan Tahun 2025	BAB I - 19
Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda	BAB I - 20
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	BAB I - 21
Tabel 1. 5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya	BAB I - 22
Tabel 1. 6 Realisasi Belanja Menurut Jenisnya	BAB I - 22
Tabel 1. 7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya	BAB I - 23
Tabel 2. 1 Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025	BAB II - 1
Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2021 - 2026	BAB III - 2
Tabel 3. 2 Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2025 - 2029	BAB III - 4
Tabel 3. 3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025	BAB III - 7
Tabel 3. 4 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025	BAB III - 12
Tabel 3. 5 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025	BAB III - 64
Tabel 3. 6 Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2025	BAB III - 154
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Unsur Penunjang Tahun 2025	BAB III - 183
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Unsur Kewilayahan Tahun 2025	BAB III - 237
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025	BAB III - 303
Tabel 3. 10 Data Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2025	BAB III - 340
Tabel 3. 11 Serapan Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2025	BAB III - 351
Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran	BAB III - 402
Tabel 3. 13 Data Nilai Evaluasi AKIP se Kalimantan Timur	BAB III - 414
Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Perbaikan AKIP Pemerintah Kota Samarinda	BAB III - 421
Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Program Pendukung	BAB III - 422
Tabel 3. 16 Serapan Anggaran pada Kegiatan yang mendukung IPP Kota Samarinda	BAB III - 435
Tabel 3. 17 Kebijakan Strategis Tahun 2025	BAB III - 437
Tabel 3. 18 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2024	BAB III - 454
Tabel 4. 1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan	BAB IV - 2
Tabel 4. 2 Permasalahan dan Upaya dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025	BAB IV - 3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	BAB III - 313
Gambar 3. 2 Pembangunan Ekonomi Inklusif.....	BAB III - 316
Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi	BAB III - 317
Gambar 3. 4 Pertumbuhan Ekonomi	BAB III - 318
Gambar 3. 5 PDRB per Kapita Tahun 2025.....	BAB III - 321
Gambar 3. 6 Rasio Gini Kota Samarinda Tahun 2025	BAB III - 323
Gambar 3. 7 Laporan Expose IKLI dan IKLH Kota Samarinda	BAB III - 330
Gambar 3. 8 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH).....	BAB III - 331
Gambar 3. 9 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH).....	BAB III - 332
Gambar 3. 10 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH).....	BAB III - 335
Gambar 3. 11 Diagram Indeks Reformasi Birokrasi	BAB III - 336
Gambar 3. 12 Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi.....	BAB III - 338
Gambar 3. 13 Persentase Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi.....	BAB III - 339
Gambar 3. 14 Persentase Capaian Indikator Dampak dan Strategi Pembangunan.....	BAB III - 339
Gambar 3. 15 Tren UHH Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia	BAB III - 346
Gambar 3. 16 Data Realisasi Pendapatan Tahun 2025	BAB III - 373
Gambar 3. 17 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur.....	BAB III - 406
Gambar 3. 18 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	BAB III - 408



PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA



BAB I

PENDAHULUAN

L K P J T a h u n 2 0 2 5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 yang tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959), dimana disebutkan bahwa Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda sebagai Ibu kotanya dan sekaligus sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 tentang Pemerintahan Daerah, sebutan Kotapraja berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda;
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam Lembaran Negara Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839, sebutannya berubah kembali menjadi Pemerintah Kota Samarinda yang merupakan bagian dari Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir;



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Sebagai manifestasi cita-cita seluruh pemangku kepentingan daerah, visi dan misi pembangunan jangka menengah harus ditransformasikan secara konkret ke dalam sasaran dan arah kebijakan guna memastikan capaian kinerja yang efektif. Dalam menjalankan amanat pembangunan, Pemerintah Daerah menjadikan sasaran dan arah kebijakan sebagai acuan utama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pelaksanaannya dilakukan secara sistematis dan rasional dengan memprioritaskan penyelesaian isu strategis yang relevan bagi kemajuan daerah. Sasaran kinerja dalam kurun waktu lima tahun diwujudkan melalui tahapan capaian tahunan yang sistematis dengan arah kebijakan sebagai kerangka agenda strategis yang menjadi fokus prioritas pembangunan daerah selama satu periode kepemimpinan.

a. Visi

Berlandaskan pada kemajuan capaian pembangunan periode 2016-2021 dan analisis isu-isu strategis daerah, serta berpedoman pada visi dan misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Samarinda periode 2021-2026, Pemerintah Kota menetapkan periode 2025-2029 sebagai tahap awal pembangunan jangka panjang yang berpedoman pada RPJPD Kota Samarinda Tahun 2025-2045. Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, Bapak Dr. H. Andi Harun dan Bapak H. Saefuddin Zuhri, SE.,MM, telah ditetapkan visi pembangunan Kota Samarinda Tahun 2025–2029 adalah:

“SAMARINDA MAJU UNTUK KALTIM MAJU”

Visi **“Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju”** merepresentasikan harapan sekaligus arah pembangunan Kota Samarinda yang selaras dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur secara menyeluruh, di



mana kemajuan Kota Samarinda diharapkan mampu memberikan kontribusi strategis dan berkelanjutan bagi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Samarinda Maju mempunyai makna sebagai berikut:

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan keterampilan masyarakat agar memiliki daya saing tinggi, adaptif terhadap dinamika pasar global, serta mampu memanfaatkan peluang kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif.

Kemajuan Ekonomi diwujudkan melalui penguatan peran Kota Samarinda sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong terciptanya peluang usaha, investasi, dan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pengembangan sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, industri, pariwisata, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan.

Kesejahteraan Sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, meliputi pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan yang layak, serta lingkungan hidup yang aman dan nyaman.

Peningkatan Infrastruktur diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang modern dan berkualitas, mencakup jaringan jalan, sistem transportasi, fasilitas umum, serta teknologi informasi guna memperkuat aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan publik bagi masyarakat.

Kaltim Maju mempunyai makna sebagai berikut:

Pusat Pemerintahan dan Layanan Publik menegaskan peran Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif guna mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.



Kontribusi terhadap Provinsi Kalimantan Timur mencerminkan posisi strategis Kota Samarinda sebagai motor penggerak pembangunan daerah, di mana setiap capaian kemajuan kota diharapkan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur secara menyeluruh.

Pembangunan Berkelanjutan dimaknai sebagai upaya mewujudkan kemajuan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"MAJU" dalam konteks visi **"Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju"** yang terdiri dari singkatan **M-A-J-U** memiliki arti yang mendalam, yaitu sebagai acuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh Kota Samarinda. Berikut adalah penjelasan dari arti singkatan **M-A-J-U** tersebut:

Mandiri dimaknai sebagai kondisi Kota Samarinda yang mampu berdiri sendiri secara ekonomi, sosial, dan administrasi tanpa ketergantungan pada pihak luar dalam pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan, melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien serta penguatan kemandirian pada berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Adil dimaknai sebagai pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda yang berlandaskan prinsip keadilan dan pemerataan, tanpa menimbulkan kesenjangan antarwilayah, sektor, maupun kelompok masyarakat, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, memperoleh akses yang setara terhadap kesempatan dan sumber daya serta merasakan manfaat pembangunan secara merata.

Ber-Jaya mencerminkan harapan terwujudnya Kota Samarinda sebagai kota yang berprestasi, unggul, dan memiliki daya saing tinggi, yang ditandai dengan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor strategis seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mampu



berperan penting di tingkat regional maupun nasional dengan reputasi yang baik dalam tata kelola dan capaian pembangunan.

Unggul dimaknai sebagai upaya mewujudkan Kota Samarinda yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam berbagai aspek, termasuk pelayanan publik, pengelolaan sumber daya, kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ekonomi, sehingga mampu menjadi daerah yang berdaya tarik tinggi bagi investor, wisatawan, dan masyarakat, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif serta sistem pemerintahan yang efisien dan modern.

Dengan demikian, makna **Mandiri, Adil, Ber-Jaya, dan Unggul** mencerminkan cita-cita untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang mandiri dalam pengelolaan pembangunan dan keuangan daerah, adil dalam pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat, berjaya melalui capaian dan prestasi di berbagai sektor, serta unggul dalam seluruh aspek pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.

b. Misi

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2025- 2029 sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing;**
- 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan;**
- 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;**
- 4. Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis;**
- 5. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.**



Penjelasan dari masing-masing misi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya dan berdaya saing

Misi ke-1 merupakan arah kebijakan strategis Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diposisikan sebagai investasi jangka panjang yang menentukan keberhasilan pembangunan di seluruh sektor.

Sumber daya manusia yang unggul dimaknai sebagai masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan, kompetensi, keterampilan, dan derajat kesehatan yang memadai, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan produktif dalam proses pembangunan. Upaya mewujudkan SDM **unggul** dilaksanakan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan pada seluruh jenjang, penguatan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata, pengembangan kompetensi dan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, serta peningkatan literasi masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Pembangunan SDM juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas individu agar mampu berpikir kritis, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup.

Sumber daya manusia yang **berbudaya** mencerminkan masyarakat yang memiliki karakter kuat, menjunjung tinggi nilai moral, etika, dan kearifan lokal, serta mampu menjaga harmoni dalam keberagaman sosial dan budaya. Penguatan dimensi budaya diarahkan melalui pembangunan karakter, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, serta pengembangan sikap toleransi, saling menghargai, dan tanggung jawab sosial. SDM yang berbudaya diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadaban,



sekaligus memperkuat identitas Kota Samarinda di tengah dinamika perkembangan sosial dan modernisasi.

Sumber daya manusia yang berdaya saing diarahkan pada kemampuan masyarakat untuk bersaing dan beradaptasi dalam lingkungan yang dinamis, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Peningkatan daya saing SDM dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga kerja, pengembangan kreativitas dan inovasi, peningkatan produktivitas, serta penyiapan SDM yang responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja. **Daya saing** SDM juga mencakup kemampuan kewirausahaan, penguasaan teknologi, serta etos kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja.

Melalui pelaksanaan misi ini, Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan kompeten, sehingga mampu menjadi subjek utama pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing dan keberlanjutan pembangunan di Kota Samarinda.

2. Misi 2 : Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri dan berkelanjutan

Misi ke-2 ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi. Perekonomian yang **inklusif** diarahkan untuk menjamin akses yang adil dan merata terhadap lapangan kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta peluang berusaha bagi seluruh warga tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memiliki peluang yang setara untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.



Pelaksanaan misi ini dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan kurang beruntung, seperti masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok marginal lainnya. Pemerintah daerah mendorong penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan akses terhadap permodalan, pendampingan usaha, dan perluasan jaringan pemasaran.

Selain itu, perekonomian yang **inklusif** juga diwujudkan melalui pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah dan antar sektor, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah pinggiran, guna mengurangi kesenjangan pertumbuhan dan meningkatkan konektivitas ekonomi daerah. Pendekatan ini bertujuan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat serta mampu mendorong terciptanya struktur ekonomi daerah yang lebih seimbang dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan **kemandirian** ekonomi daerah, Pemerintah Kota Samarinda mengarahkan pembangunan pada optimalisasi potensi dan keunggulan lokal melalui pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan daya saing ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi regional dan nasional.

Selanjutnya, pembangunan ekonomi daerah juga dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip **keberlanjutan**, yaitu dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan ekonomi diarahkan agar mendukung pengembangan kegiatan usaha yang ramah lingkungan, efisien dalam pemanfaatan sumber daya, serta mampu



meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup bagi generasi yang akan datang di Kota Samarinda.

3. Misi 3 : Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

Misi ke-3 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai fondasi utama peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah. Infrastruktur diposisikan sebagai prasarana strategis yang mendukung kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Infrastruktur yang **berkualitas** dimaknai sebagai penyediaan dan pengelolaan infrastruktur fisik maupun sosial yang memenuhi standar teknis, keamanan, kenyamanan, dan ketahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Infrastruktur fisik meliputi jalan, jembatan, bangunan publik, sistem transportasi, air bersih, sanitasi, energi, serta prasarana pendukung lainnya. Sementara itu, infrastruktur sosial mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pusat layanan masyarakat yang berfungsi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung aktivitas ekonomi secara efisien, serta dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain memenuhi aspek teknis, kualitas infrastruktur juga mencakup perencanaan desain yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta didukung oleh sistem pemeliharaan yang **berkelanjutan** agar infrastruktur dapat berfungsi optimal dalam jangka



panjang. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fisik semata, tetapi juga pada keberlanjutan fungsi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam. Prinsip pembangunan berwawasan lingkungan menjadi landasan utama dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan infrastruktur. Hal ini mencakup penggunaan material yang ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah yang baik, serta upaya meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Infrastruktur yang dibangun diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga tetap mampu mendukung kualitas hidup generasi yang akan datang.

Aspek keberlanjutan juga mencakup kesiapsiagaan terhadap perubahan iklim dan risiko bencana alam. Pembangunan infrastruktur diarahkan agar memiliki ketahanan terhadap potensi bencana, seperti banjir dan kondisi lingkungan ekstrem, melalui penerapan teknologi yang tepat guna dan perencanaan yang terintegrasi. Dengan pendekatan tersebut, infrastruktur tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.

Lebih lanjut, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Pemerintah daerah mendorong terwujudnya konektivitas yang baik antarwilayah di Kota Samarinda serta dengan daerah lain di Kalimantan Timur, guna mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta memperkuat integrasi sosial dan ekonomi regional. Akses yang memadai terhadap transportasi, komunikasi, air bersih, listrik, dan sanitasi menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.



Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik mendukung kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, misi ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada pembangunan yang holistik, inklusif, dan berwawasan lingkungan demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4. Misi 4 : Mewujudkan Samarinda yang layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis

Misi ke-4 menegaskan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan Kota Samarinda yang layak huni, melalui penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBNAS), peningkatan ketahanan sosial budaya, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk menciptakan kondisi kota yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan secara berkelanjutan.

Kota yang **layak huni** dimaknai sebagai kota yang mampu menyediakan lingkungan hidup yang mendukung kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti ketersediaan hunian yang layak, akses terhadap fasilitas umum, pelayanan dasar yang memadai, serta lingkungan yang bersih, sehat, dan aman. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman, akses air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi bagian integral dalam upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang nyaman dan manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat.



Stabilitas kamtibmas menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan kota yang layak huni. **Keamanan** dan **ketertiban masyarakat** yang terjaga akan menciptakan rasa aman dan tenteram bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari, sekaligus mendukung iklim sosial dan ekonomi yang kondusif. Upaya menjaga stabilitas kamtibmas dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanganan gangguan keamanan, tindak kriminal, dan potensi konflik sosial. Pendekatan keamanan yang berbasis pada kepercayaan, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat menjadi landasan dalam menciptakan ketenteraman yang berkelanjutan.

Ketahanan sosial budaya diarahkan untuk membangun masyarakat yang tangguh, harmonis, dan berdaya dalam menghadapi dinamika sosial serta perubahan budaya. Penguatan ketahanan sosial budaya dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal, penghormatan terhadap keberagaman suku, agama, adat, dan tradisi, serta penguatan kohesi sosial antar kelompok masyarakat. Pembangunan sosial budaya juga bertujuan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan inklusivitas, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan berkeadilan. Selain itu, peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan sosial menjadi bagian penting untuk menjaga identitas budaya lokal di tengah perkembangan dan modernisasi kota.

Ketahanan ekologis merupakan aspek penting lainnya dalam mewujudkan Kota Samarinda yang layak huni. Ketahanan ekologis dimaknai sebagai kemampuan daerah dalam mengelola, melindungi, dan melestarikan lingkungan hidup serta sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pengendalian pencemaran, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, perlindungan ekosistem, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana alam, seperti banjir dan kebakaran lahan. Pembangunan daerah diarahkan agar selaras dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga tidak



menurunkan daya dukung lingkungan dan tetap menjamin kualitas hidup generasi yang akan datang.

Melalui pelaksanaan misi ini, Pemerintah Kota Samarinda berupaya mewujudkan pembangunan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dengan fokus pada.

1. Terjaganya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah kota.
2. Terbangunnya ketahanan sosial budaya yang kuat melalui penghormatan terhadap keberagaman dan penguatan hubungan sosial yang harmonis antarwarga; serta
3. terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan penguatan mitigasi bencana.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan Kota Samarinda dapat berkembang sebagai kota yang layak huni, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

5. Misi 5 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan inovatif, responsif dan adaptif yang integritas dan akuntabel.

Misi ke-5 merupakan arah kebijakan Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang inovatif, berketahanan, dan adaptif, dengan berlandaskan pada prinsip integritas dan akuntabilitas. Misi ini menempatkan penguatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang **inovatif** dilaksanakan melalui pembaruan sistem dan mekanisme kerja pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyederhanaan prosedur birokrasi guna meningkatkan



kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik. Inovasi pemerintahan diarahkan untuk mendorong efisiensi pengelolaan sumber daya, memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, serta menghasilkan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat.

Ketahanan tata kelola pemerintahan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme dan kapasitas aparatur sipil negara, serta penataan sistem manajemen pemerintahan yang mampu menjamin keberlangsungan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik dalam berbagai kondisi. Pemerintahan daerah dituntut memiliki kemampuan untuk menghadapi dinamika perubahan, risiko pembangunan, serta potensi krisis secara terencana dan terukur.

Tata kelola pemerintahan yang **adaptif** dilaksanakan melalui kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan, program, dan tata kerja terhadap perkembangan lingkungan strategis, perubahan regulasi, kemajuan teknologi, serta aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Adaptivitas pemerintahan menjadi prasyarat untuk menjaga relevansi kebijakan daerah dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Integritas dan **akuntabilitas** menjadi prinsip dasar yang melekat dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Integritas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan etika pemerintahan, serta penguatan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Akuntabilitas dilaksanakan melalui penyelenggaraan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja serta keuangan daerah yang transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan pelaksanaan misi ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, bersih, responsif, dan berorientasi



pada kinerja, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan di Kota Samarinda.



1.3. Data Umum Daerah

a. Data Geografis Wilayah

Kota Samarinda merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah perencanaan sebesar 71.678,36 Ha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2023–2042, dengan letak geografis yang terletak antara 0°19'02" Lintang Selatan dan 117°18'14" Bujur Timur dan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0°, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kota Samarinda terbagi dalam 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan. Karakteristik topografi Kota Samarinda didominasi oleh kondisi lahan yang relatif datar, dengan sekitar 27,39% wilayah memiliki kemiringan kurang dari 2 persen dan 25,47% berada pada kemiringan 2–15 persen, sementara dari aspek kedalaman tanah, sebagian besar wilayah menunjukkan kelas kedalaman lebih dari 90 cm yang mencakup area seluas 39.833 Ha atau sekitar 55,48 persen dari total luas wilayah.

Adapun batas administrasi Kota Samarinda sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Timur	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Selatan	: Kabupaten Kutai Kartanegara
Sebelah Barat	: Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda memiliki luas wilayah sebesar 716,78 km². Regulasi ini menjadi dasar hukum atas penetapan batas wilayah yang berimplikasi pada penyesuaian luas administrasi pada 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan di Kota Samarinda.



Rincian pembagian luas wilayah pada 10 Kecamatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 1 Kecamatan dan Kelurahan di Kota Samarinda

No.	KECAMATAN	KELURAHAN	
1.	Palaran	1	Rawa Makmur
		2	Handil Bakti
		3	Bukuan
		4	Simpang Pasir
		5	Bantuas
2.	Samarinda Seberang	1	Sungai Keledang
		2	Baqa
		3	Mesjid
		4	Mangkupalas
		5	Tenun Samarinda
		6	Gunung Panjang
3.	Samarinda Ulu	1	Teluk Lerong Ilir
		2	Jawa
		3	Air Putih
		4	Sidodadi
		5	Air Hitam
		6	Dadi Mulya
		7	Gunung Kelua
		8	Bukit Pinang
4.	Samarinda Ilir	1	Selili
		2	Sungai Dama
		3	Sidomulyo
		4	Sidodamai
		5	Pelita
5.	Samarinda Utara	1	Sempaja Selatan
		2	Lempake
		3	Sungai Siring
		4	Sempaja Utara
		5	Tanah Merah
		6	Sempaja Barat
		7	Sempaja Timur
		8	Budaya Pampang



No.	KECAMATAN	KELURAHAN	
6.	Sungai Kunjang	1	Loa Bakung
		2	Loa Buah
		3	Karang Asam Ulu
		4	Lok Bahu
		5	Teluk Lerong Ulu
		6	Karang Asam Ilir
		7	Karang Anyar
7.	Sambutan	1	Sungai Kapih
		2	Sambutan
		3	Makroman
		4	Sindang Sari
		5	Pulau Atas
8.	Sungai Pinang	1	Temindung Permai
		2	Sungai Pinang Dalam
		3	Gunung Lingai
		4	Mugirejo
		5	Bandara
9.	Samarinda Kota	1	Karang Mumus
		2	Pelabuhan
		3	Pasar Pagi
		4	Bugis
		5	Sungai Pinang Luar
10.	Loa Janan Ilir	1	Simpang Tiga
		2	Tani Aman
		3	Sengkotek
		4	Harapan Baru
		5	Rapak Dalam
KOTA SAMARINDA			

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Samarinda

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Database Konsolidasi Bersih (DKB) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Semester II (dua) tahun 2025 jumlah penduduk Kota Samarinda mencapai 893.385 jiwa terdiri atas 454.205 jiwa penduduk laki-laki dan 439.180 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2025 lebih banyak daripada jumlah penduduk tahun 2024 sebanyak 881.225 jiwa atau bertambah 12.160 jiwa.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Samarinda Per-Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Palaran	36.369	34.398	70.767
2	Samarinda Seberang	34.267	32.858	67.125
3	Samarinda Ulu	68.347	66.832	135.179
4	Samarinda Ilir	35.615	34.374	69.989
5	Samarinda Utara	60.620	58.382	119.002
6	Sungai Kunjang	74.533	72.394	146.927
7	Sambutan	33.702	32.314	66.016
8	Sungai Pinang	57.900	56.400	114.300
9	Samarinda Kota	15.911	15.664	31.575
10	Loa Janan Ilir	36.941	35.564	72.505
Kota Samarinda		454.205	439.180	893.385

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2025

c. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran.



Pertambahan penduduk Kota Samarinda tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Samarinda

Kecamatan	Jumlah Penduduk Th.2024	Jumlah Penduduk Th.2025	Pertumbuhan Penduduk Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Palaran	69.121	70.767	2,33%
Samarinda Seberang	66.877	67.125	0,37%
Samarinda Ulu	134.921	135.179	0,19%
Samarinda Ilir	70.137	69.989	-0,21%
Samarinda Utara	116.079	119.002	2,46%
Sungai Kunjang	143.414	146.927	2,39%
Sambutan	64.310	66.016	2,58%
Sungai Pinang	112.823	114.300	1,29%
Samarinda Kota	32.240	31.575	-2,11%
Loa Janan Ilir	71.303	72.505	1,66%
Kota Samarinda	881.225	893.385	1,36%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, 2025



d. Jumlah PNS

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan

NO	PANGKAT/ GOLONGAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV			
	Pembina Utama (IV/e)	0	0	0
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	0	1
	Pembina Utama Muda (IV/c)	19	12	31
	Pembina Tingkat I (IV/b)	80	141	221
	Pembina (IV/a)	244	421	665
2	Golongan III			
	Penata Tingkat I (III/d)	481	651	1132
	Penata (III/c)	263	369	632
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	292	714	1006
	Penata Muda (III/a)	472	563	1035
3	Golongan II			
	Pengatur Tingkat I (II/d)	262	231	493
	Pengatur (II/c)	120	117	237
	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	38	10	48
	Pengatur Muda (II/a)	43	11	54
4	Golongan I			
	Juru Tingkat I (I/d)	11	1	12
	Juru (I/c)	5	0	5
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	3	0	3
	Juru Muda (I/a)	0	0	0
Jumlah Total		2.334	3.241	5.575

Sumber : BKPSDM Kota Samarinda, 2025

e. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun anggaran 2025 pendahuluan sebelum audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), realisasi pendapatan daerah mencapai Rp.5.020.691.231.038,55 terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.1.138.616.036.776,55 dan pendapatan transfer sebesar Rp.3.867.840.624.011,00 serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 14.234.570.251,00. Realisasi pendapatan menurut jenisnya terinci sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Realisasi Pendapatan Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	PENDAPATAN	5.516.189.127.897,00	5.020.691.231.038,55	91,01
1.1	Pendapatan Asli Daerah	1.203.243.610.997,00	1.138.616.036.776,55	94,62
1.2	Pendapatan Transfer	4.298.710.946.900,00	3.867.840.624.011,00	89,97
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.234.570.000,00	14.234.570.251,00	100,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2025

f. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja; dan

Realisasi belanja daerah mencapai Rp. 5.226.614.947.077,34 yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp. 2.834.268.831.884,34. Kemudian belanja modal sebesar Rp. 2.390.484.700.651,00 dan belanja tidak terduga sebesar Rp. 1. 861.414.542,00. Realisasi belanja menurut jenisnya terinci pada tabel berikut:

Tabel 1. 6 Realisasi Belanja Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2.	BELANJA	5.800.536.976.897,00	5.226.614.947.077,34	90,10
2.1	Belanja Operasi	3.064.956.436.743,00	2.834.268.831.884,34	97,07
2.2	Belanja Modal	2.730.580.540.154,00	2.390.484.700.651,00	87,54
2.3	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	37,22

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2025



g. Realisasi Pembiayaan menurut Jenis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah mencapai Rp. 284.299.802.526,56 terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 284.299.802.526,56 dan tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan. Realisasi pembiayaan menurut jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. 7 Realisasi Pembiayaan Menurut Jenisnya

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3.	PEMBIAYAAN	284.347.849.000,00	284.299.802.526,56	99,98
3.1	Penerimaan Pembiayaan	284.347.849.000,00	284.299.802.526,56	99,98
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda, 2025



**PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA**



BAB II

**PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

L K P J T a h u n 2 0 2 5



BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG (%)
		ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
1	<u>PENDAPATAN DAERAH</u>			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.133.678.481.000,00	1.203.243.610.997,00	6,14
	Pajak Daerah	907.476.760.000,00	954.826.760.000,00	5,22
	Retribusi Daerah	160.486.606.000,00	174.299.045.332,00	8,61
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.590.115.000,00	21.226.906.597,00	-1,68
	Lain-lain PAD yang Sah	44.125.000.000,00	52.890.899.068,00	19,87
	PENDAPATAN TRANSFER	4.194.114.519.000,00	4.298.710.946.900,00	2,49
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.888.322.952.900,00	2.865.205.426.900,00	-0,80
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.305.791.566.100,00	1.433.505.520.000,00	9,78
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.000.000.000,00	14.234.570.000,00	-38,11
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.000.000.000,00	14.234.570.000,00	-38,11
	JUMLAH PENDAPATAN	5.350.793.000.000,00	5.516.189.127.897,00	3,09
2	<u>BELANJA DAERAH</u>			
	BELANJA OPERASI	3.146.104.470.136,00	3.064.956.436.743,00	-2,58
	Belanja Pegawai	1.315.863.040.583,26	1.230.604.366.685,00	-6,48
	Belanja Barang dan Jasa	1.656.416.555.422,74	1.637.127.829.403,00	-1,16



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ BERKURANG (%)
		ANGGARAN MURNI (Rp)	ANGGARAN PERGESERAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	
	Belanja Hibah	169.650.774.130,00	195.645.040.655,00	15,32
	Belanja Bantuan Sosial	4.174.100.000,00	1.579.200.000,00	-62,17
	BELANJA MODAL	2.664.688.529.864,00	2.730.580.540.154,00	2,47
	Belanja Modal Tanah	90.270.875.500,00	82.613.167.972,00	-8,48
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.529.546.394,00	254.157.898.110,00	11,70
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	864.019.832.427,00	892.281.600.880,00	3,27
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.460.575.367.043,00	1.479.462.627.692,00	1,29
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.055.908.500,00	20.336.845.500,00	1,40
	Belanja Modal Aset Lainnya	2.237.000.000,00	1.728.400.000,00	-22,74
	BELANJA TIDAK TERDUGA	40.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-87,50
	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-87,50
	JUMLAH BELANJA	5.850.793.000.000,00	5.800.536.976.897,00	-0,86
	Total Surplus/(Defisit)	-500.000.000.000,00	-284.347.849.000,00	-43,13
3	<u>PEMBIAYAAN DAERAH</u>			
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000,00	284.347.849.000,00	-43,13
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000,00	284.347.849.000,00	-43,13
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	500.000.000.000,00	284.347.849.000,00	-43,13
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Samarinda Tahun 2025



Dilihat dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah semula Rp. 5.350.793.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 165.396.127.897,00 sehingga menjadi Rp. 5.516.189.127.897,00 meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Daerah semula Rp. 1.133.678.481.000,00 bertambah sebesar Rp. 103.946.624.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 875.018.892.674,00 meliputi:
 - 1) Pajak Daerah semula Rp. 907.476.760.000,00 bertambah sebesar Rp. 47.350.000.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 954.826.760.000,00
 - 2) Retribusi Daerah semula Rp. 160.486.606.000,00 bertambah sebesar Rp. 13.812.439.332,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 174.299.045.332,00
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp. 21.590.115.000,00 berkurang sebesar Rp. 363.208.403,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 21.226.906.597,00
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah semula Rp. 44.125.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 8.765.899.068,00 sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 52.890.899.068,00
 - b. Pendapatan Transfer semula Rp. 4.194.114.519.000,00 bertambah sebesar Rp. 104.596.427.900,00 sehingga menjadi Rp. 4.298.710.946.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp. 2.888.322.952.900,00 berkurang Rp. 23.117.526.000,00 menjadi Rp. 2.865.205.426.900,00
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp. 1.305.791.566.100,00 bertambah Rp. 127.713.953.900,00 menjadi Rp. 1.433.505.520.000,00



2. Belanja Daerah semula Rp. 5.850.793.000.000,00 berkurang sebesar Rp. 50.256.023.103,00 sehingga belanja daerah menjadi Rp. 5.800.536.976.897,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Operasi semula Rp. 3.146.104.470.136,00 berkurang Rp. 81.148.033.393,00 sehingga belanja operasi setelah perubahan menjadi Rp. 3.064.956.436.743,00 meliputi:
 - 1) Belanja pegawai semula Rp. 1.315.863.040.583,26 berkurang Rp. 85.258.673.898,26 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 1.230.604.366.685,00
 - 2) Belanja barang dan jasa semula Rp. 1.656.416.555.422,74 berkurang Rp. 19.288.726.019,74 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 1.637.127.829.403,00
 - 3) Belanja hibah semula Rp. 169.650.774.130,00 bertambah Rp. 25.994.266.525,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 195.645.040.655 65,00
 - 4) Belanja bantuan sosial semula Rp. 4.174.100.000,00 berkurang Rp. 2.594.900.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 1.579.200.000,00
 - b. Belanja Modal semula Rp. 2.664.688.529.864,00 bertambah Rp. 65.892.010.290,00 sehingga belanja modal setelah perubahan menjadi Rp. 2.730.580.540.154,00 yang terdiri dari:
 - 1) Belanja modal tanah semula Rp. 90.270.875.500,00 berkurang Rp. 7.657.707.528,00 menjadi Rp. 82.613.167.972 972,00
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin semula Rp. 227.529.546.394,00 bertambah Rp. 26.628.351.716,00 menjadi Rp. 254.157.898.110,00
 - 3) Belanja modal gedung dan bangunan semula Rp. 864.019.832.427,00 bertambah Rp. 28.261.768.453,00 menjadi Rp. 892.281.600.880 880,00
 - 4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi semula Rp. 1.460.575.367.043,00 bertambah Rp. 18.887.260.649,00 menjadi Rp. 1.479.462.627.692,00



- 5) Belanja modal aset tetap lainnya semula Rp. 20.055.908.500,00 bertambah Rp. 280.937.000,00 menjadi Rp. 20.336.845.500,00
 - 6) Belanja modal aset lainnya semula Rp. 2.237.000.000,00 berkurang Rp. 508.600.000,00 menjadi Rp. 1.728.400.000,00
 - c. Belanja Tidak Terduga semula Rp. 40.000.000.000,00 berkurang Rp. 35.000.000.000,00 sehingga belanja tidak terduga setelah perubahan menjadi Rp. 5.000.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 284.347.849.000,00,- dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penerimaan Pembiayaan semula Rp. 500.000.000.000,00 berkurang Rp. 215.652.151.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 284.347.849.000,00 dimana penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Tidak terdapat Pengeluaran Pembiayaan baik sebelum maupun setelah perubahan anggaran.



**PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA**



BAB III

**HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH**

L K P J T a h u n 2 0 2 5



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 diukur berdasarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja, serta pencapaian kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan. Capaian kinerja setiap kegiatan pada tiap urusan tersebut selanjutnya dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
3. Urusan Pemerintahan Pilihan
4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan fungsi lainnya
5. Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
6. Unsur Pemerintahan Umum

1. Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan tahapan penetapan arah dan target kinerja Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis yang kemudian rencana tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda. Dalam rencana kinerja ditetapkan target capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan, yang diformalkan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Tahun 2025.

Dokumen Perjanjian Kinerja berisi uraian mengenai indikator kinerja beserta target capaian yang ditetapkan untuk jangka waktu satu tahun.



Indikator kinerja merupakan tolak ukur yang bersifat kuantitatif dan kualitatif dalam menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja. Penetapan indikator kinerja tersebut harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta didukung oleh ketersediaan data yang memadai. Indikator kinerja Pembangunan Daerah tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda tahun 2025 – 2029.

Perlu disampaikan bahwa pada Triwulan 3 Tahun 2025 telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan periode 2025-2029, sehingga sasaran dan indikator pada laporan kinerja tahun ini telah mengacu pada Perjanjian Kinerja pada dokumen perencanaan terbaru yang terdiri dari 4 Tujuan, 12 Sasaran dan 23 Indikator Kinerja.

Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025
periode RPJMD 2021 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup	Angka	75,11
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Angka	15,4
		Rata-rata lama sekolah	Angka	10,95
3	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	63
4	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	IPG	Indeks	90,68
5	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	57
6	Meningkatnya pembangunan sektor tersier	Persentase Pertumbuhan Sektor	Persentase	9,2



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB		
7	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Jumlah peningkatan kewirausahaan baru	Unit Usaha	2.500
8	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	Jumlah nilai investasi	Rupiah	18.000.000.000.000
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	20
10	Meningkatnya ketahanan pangan menuju kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	90
11	Meningkatnya kesejahteraan sosial	PDRB per kapita harga konstan	Rupiah	60.000.000
12	Meningkatnya lapangan pekerjaan	Tingkat pengangguran terbuka	Persentase	5,5
13	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3
		Indeks SPBE	Poin	3,5
14	Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel	Nilai AKIP	Nilai	66,5
		Indeks Penerapan Sistem Merit	Nilai	303
15	Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah kota	Rasio aksesibilitas antar wilayah kota	Nilai	1,01
		Persentase ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi	Persentase	74
16	Meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas	Persentase tersedianya luasan RTH	Persentase	1,1
		Persentase permukiman	Persentase	27,5



NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		yang tertata		
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,2
17	Meningkatnya kapasitas kota Tangguh	Indeks Resiko Bencana	Poin	85
		Persentase Kawasan banjir yang tertangani	Persentase	55

Sumber: LKJIP Kota Samarinda Tahun 2025

Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Perjanjian Kinerja Wali Kota Samarinda Tahun 2025 periode RPJMD 2025 - 2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83,25
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,25 – 8,00
		PDRB per kapita	Juta Rupiah	118410
		Rasio Gini	Indeks	0,325 – 0,330
3	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	73,69
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	11,4
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,63
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,3



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
7	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237
8	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	51,74
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	21,19
10	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,68 - 90,68
11	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	%	4,25
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,6 - 5,63
12	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	84,05
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	65
13	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	69,99
14	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	76,24
15	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67,5
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,9
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	74,5
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3

Sumber: LKJIP Kota Samarinda Tahun 2025

Penilaian tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025 dilakukan melalui perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran. Rincian capaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 3 Pengukuran Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83,25	83,53	100,34%	Bapperida/BPS 2025
2	Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,25 – 8,00	6,22	99,52%	BPS 2025
		PDRB per kapita	Juta Rupiah	118,41	106,624	90,05%	BPS 2025
		Rasio Gini	Indeks	0,325 – 0,330	0,312	105,45%	Bapperida/BPS 2025
3	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas	Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	73,69	73,64	99,93%	Bapperida/Brida Kaltim
4	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80	84,77	105,96%	Bagian Organisasi / Kementerian PANRB
5	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	11,4	11,04	96,84%	BPS
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,63	75,89	100,34%	BPS/Dinas Kesehatan
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	20,3	17,13	115,62%	Dinas Kesehatan



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA
7	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,237	0,243	96,84%	BPS / DP2PA
8	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	51,74	61,41	118,69%	Bapperida dan BPS 2024
9	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Indeks Kemandirian Fiskal	Indeks	21,19	22,68	107,03%	Badan Pendapatan Daerah
10	Meningkatnya kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	89,68 - 90,68	77,6	113,97%	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
11	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Kemiskinan	%	4,25	3,45	118,82%	Bapperida / BPS
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,6 - 5,63	5,31	105,18%	Dinas Tenaga Kerja/BPS
12	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	84,05	71,48	114,96%	BPBD/BNPB
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	65	77,33	118,97%	Satpol PP
13	Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	69,99	74,04	105,79%	DLH
14	Mewujudkan infrastruktur yang	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	76,24	76,24	100,00%	Bapperida bidang Rida



NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	SUMBER DATA
	berkualitas	(IKLI)					
15	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	67,5	64,57	95,66%	Bagian Organisasi / Kementerian PANRB
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,9	3,85	202,63%	Kemenpan RB
		Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	74,5	75,9	101,88%	Inspektorat/KPK
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,3	4,67	108,60%	Kepmenpan RB

Sumber: AKIP Kota Samarinda Tahun 2025



2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-masing Kegiatan Pada Setiap Urusan

2.1. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pemerintah daerah memiliki kewajiban menyelenggarakan pelayanan dasar sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib guna menjamin terpenuhinya kebutuhan mendasar masyarakat. Pelaksanaan pelayanan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Samarinda selama Tahun 2025 secara umum terlaksana dengan baik serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan tersebut pada umumnya menunjukkan capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di Kota Samarinda, dijabarkan dalam 6 Bidang urusan antara lain:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta RSUD I. A. Moeis dan UPT. Puskesmas;
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja



6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Rincian capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang termasuk dalam urusan pelayanan dasar pada Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 4 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
1	PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	82,74 Indeks	82.74	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	76,76 Nilai	76,76	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	3687 Orang /bulan	3687	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	463 Dokumen	463	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	100	56			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	204 Orang	111	54.41	Waktu Pelaksanaan Yg Bertepatan Dengan Kegiatan Rutinitas Yang lain	Menetapkan Target Sesuai dengan Waktu pelaksanaan Bimtek	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	16 Paket	16	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	35 Paket	35	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	100 Paket	95	95			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	30 Laporan	30	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48 Laporan	48	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	1	50	Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV, Terjadinya efisiensi	Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan, percepatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
										anggaran yang berdampak pada pengurangan volume pengadaan	pelaksanaan, serta optimalisasi penggunaan anggaran agar target kinerja tetap dapat tercapai	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	33 Laporan	33	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	122 Unit	122	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6 Unit	6	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Anak Usia 7-18 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (APS)	%	52,25%	52,25	100			
					Persentase Anak Usia 5-6 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (APS)	%	60,48%	60,48	100			
					Persentase Anak Usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Dasar (APS)	%	99,70%	99,07	100			
					Persentase Anak Usia 13-15 tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (APS)	%	97,52%	97,52	100			
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	%	99,79%	99,79	100			
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1 Unit	1	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	1000 Paket	7061	706,1	Pentetapan Target Yang Terlalu Rendah	Melakukan Penyesuaian Target di tahun selanjutnya	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1500	150	Pentetapan Target Yang Terlalu Rendah	Melakukan Penyesuaian Target di tahun selanjutnya	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	450 Peserta Didik	450	100			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	200 Orang	225	112,5	Penambahan Unit Sekolah Baru (Penambahan GTK)	Rekon data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	200 Orang	277	138,5	- Penambahan Unit Sekolah Baru (Penambahan GTK) - Perubahan aturan Kepangkatan - Perubahan aturan Pengelolaan Kinerja	- Penyesuaian Pembiayaan - Penyesuaian Aturan	
				Pembinaan Kelembagaan dan	Jumlah Sekolah Dasar yang	Satuan	253 Satuan	253	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Manajemen Sekolah	Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Pendidikan	Pendidikan					
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan	253	100			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	253 Satuan Pendidikan	253	100			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	15 Orang	15	100			
				Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	2 Ruang	2	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2 Ruang	2	100			
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang	200 Orang	200	100			
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	200 Orang	200	100			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	164 Dokumen	164	100			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1000	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	15 Unit	15	100			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3 Ruang	1	33,33	Rasionalisasi Anggaran	anggaran yang tersedia hanya untuk membangun 1 ruang	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	225 Satuan Pendidikan	225	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	7 Ruang	7	100			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1000 Peserta Didik	1000	100			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	3 Paket	4	133,3	ada penambahan anggaran Terhadap Kegiatan, tetapi target Kinerja tidak dilakukan Perubahan	Melaksanakan Evaluasi Kembali terhadap Target Kinerja Perangkat Daerah	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	14 Unit	8	57,14	ada perubahan target kinerja	Melaksanakan Evaluasi Kembali terhadap Target Kinerja Perangkat Daerah	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	%	80.02%	80,02	100			
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	3 Unit	3	100			
				Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	8 Unit	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	10 Unit	10	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8 Ruang	8	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	5 Unit	5	100			
				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	245 Paket	245	100			
				Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1000	100			
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1000	100			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	500 Peserta Didik	500	100			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	450 Peserta Didik	450	100			
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	100 Orang	100	100			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	49	100			
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	133 Satuan Pendidikan	133	100			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	3 Ruang	3	100			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	49 Dokumen	49	100			
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	98 Satuan Pendidikan	98	100	-	-	
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	10 Ruang	10	100			
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1000	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8 Ruang	8	100			
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	4 Paket	4	100			
				Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	2 Ruang	2	100			
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	.%	80.02%	80,02	100			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	500 Peserta Didik	570	114			
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	100 Orang	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	30 Orang	30	100			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	200	100			
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	453 Satuan Pendidikan	453	100			
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	15 Orang	15	100			
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	3 Unit	3	100			
				Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	10 Unit	10	100			
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Orang	100 Orang	100	100			
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	4 Komunitas	4	100			
				Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket	4 Paket	4	100			
				Penataan Ruang/Sudut Baca	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang	10 Ruang	10	100			
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik	200 Peserta didik	200	100			
				Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	2500 Buku	2500	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	2 Kegiatan	2	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100 Orang	100	100			
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1000	100			
				Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	2 Unit	1	50	Rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah	Unit	2 Unit	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Direhabilitasi Sedang/Berat							
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	3 Paket	3	100			
				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	839 Satuan Pendidikan	839	100			
				Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	2 Ruang	2	100			
				Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	500 Paket	247	49,04	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	1000 Paket	1000	100			
				Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	1000 Paket	18	1,08	Tenggat Waktu Pelaksanaan Yang terlampau dekat	Melakukan Perencanaan ulang di tahun berikutnya	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	%	80.02%	80.02	100			
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	400 Peserta Didik	400	100			
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	50 Orang	50	100			
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	24	100			
				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	21	87,05	Target yang terlampau tinggi	melakukan perencanaan ulang di tahun berikutnya	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	15 Orang	5	33,33	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan hasil koordinasi hasil efesiensi anggaran untuk perajadin	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	10 Unit	10	100			
				Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Orang	100 Orang	40	40	Rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	100 Orang	100	100			
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	1 Konten Digital	1	100			
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100 Orang	60	60	Rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	24 Dokumen	24	100			
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang	Komunitas	1 Komunitas	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					terfasilitasi							
				Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	4 Kegiatan	4	100			
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	1 Ruang	1	100			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1 Unit	1	100			
				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	100 Orang	40	40	Keterbatasan Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2 Ruang	2	100			
				Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	1513 Peserta Didik	1263	83,48	Penetana Target Peserta didik yang Terlalu Besar	Melakukan penyesuaian Target kembali	
				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	2 Paket	2	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	.%	66,49%	66,49	100			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	.%	66,82%	66,82	100			
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku	20000 Buku	20000	100			
				Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen	15 Dokumen	15	100			
				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	.%	66,82%	66,82	100			
				Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
					0							
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase PTK Bersertifikat Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan	%	35,50%	35,5	100			
					Persentase Guru Jenjang SD, SMP, PAUD dan Kesetaraan yang berkualifikasi SI/D-IV	%	90,94%	91	100			
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	.%	63,62%	64	100,1			
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan	5 Laporan	5	100			
2	KESEHATAN	DINAS	PERATURAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	Nilai	77,00 Nilai	76,25	99,03			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
		KESEHATAN	DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah							
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88,00 Indeks	87,05	99,43			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	1200 Orang /bulan	1200	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	76.5%	76.5	100			
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	100 Paket	100	100			
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50 Orang	50	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	95%	95	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20 Paket	20	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	2	2	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	4	4			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			



LKPJ Kota Samarinda Tahun 2025



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan							
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1 Unit Kerja	1	100			
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka kematian Ibu	per . KH	122,51 per 100.000 KH	85,98	85,98			
					Persentase pemenuhan Sumber Daya Kesehatan (Alkes, Obat, BMHP dan SDM)	%	81,00%	81	100			
					Persentase layanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	%	80,00%	80	100			
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemkot Samarinda yang bermutu	0	100,00%	100	100			
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perbekalan kesehatan (Obat, Alkes, BMHP) di UPTD Dinas Kesehatan	%	85%	85	100			
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	3 Unit	3	100			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	77 Unit	110	142,86			
				Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	5 Unit	5	100			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit	77 unit	110	142,9			
				Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit							
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	28 Paket	28	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	10000 Keluarga	10000	100			
				Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket	26 Paket	26	100			
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit	0 Unit	1	100			
				Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit	1 Unit	1	100			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit	1 Unit	1	100			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit	10 Unit	10	100			
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan siklus hidup yang dilakukan sesuai standar	%	100%	99.97	99.97			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13066 Orang	10784	82.53	capaian Berdasarkan Cakupan Pelayanan	Melakukan Evaluasi Kembali Terkaiat Pentuan Target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	1101 Orang	1095	99.46			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	19506 Orang	18132	92.96			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	25123 Orang	25070	99.79			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Lingkungan	Pelayanan Kesehatan Lingkungan							
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	13066 Orang	11558	88,46	capaian Berdasarkan Cakupan Pelayanan	Melakukan Evaluasi Kembali Terkaiat Pentuan Target	
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1101 Orang	1095	99,46			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	1101 Orang	1095	99,46			
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang	200 Orang	200	100			
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	48 Paket	42	87,05			
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	12447 Orang	11142	89,52	capaian Berdasarkan Cakupan Pelayanan	Melakukan Evaluasi Kembali Terkaiat Pentuan Target	
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Instalasi Farmasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Labkesda	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit	28 Unit	28	100			
				Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	43048 Orang	32132	74.64	capaian Berdasarkan Cakupan Pelayanan	Melakukan Evaluasi Kembali Terkait Puntuan Target	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3707 Orang	3707	100			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	3087 Orang	3087	100			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah orang yang mendapatkan	Orang	2000 Orang	2000	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Malaria	pelayanan kesehatan malaria							
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	131065 Orang	107936	82,35			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	543210 Orang	422551	77,79	capaian Berdasarkan Cakupan Pelayanan	Melakukan Evaluasi Kembali Terkaiat Pentuan Target	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	46359 Orang	41947	90,48			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	217576 Orang	215506	99,05			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24757 Orang	24259	97,99			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan terintegrasi dengan Satu Sehat	%	100%	100	100			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase RS kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diawasi dan dikendalikan perizinannya	%	100%	100	100			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit	15 Unit	15	100			
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	16 Unit	14	87,5			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit	28 Unit	28	100			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	2,55%	2,55	100			
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah tenaga kesehatan yang telah terbit SIP (sumber data MPP Digital)		60%	60	100			
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pemenuhan pengusulan tenaga kesehatan di UPT Dinkes	%	100%	100	100			
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	10 Orang	10	100			
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Manusia Kesehatan							
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM yang telah mengikuti pelatihan/workshop/bimtek/kursus/seminar sesuai kompetensinya	%	2,55%	2,55	100			
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang	10 Orang	10	100			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Makanan dan minuman yang diperiksa dan memenuhi standar	%	81,00%	81	100			
					Persentase cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	%	85,00%	85	100			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase pemberian rekomendasi izin Apotek dan Toko Obat	%	85%	85	100			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen	4 Dokumen	1	25	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, Depot Air Minum dan TPP tertentu	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan Post Market pada Produksi dan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga							
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	30 Unit	30	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	25%	25	100			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif preventif	%	100%	100	100			
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	8591 Keluarga	8591	100			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan (bimtek) kader kesehatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan promotif preventif	%	100%	100	100			
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	8591 Keluarga	8591	100			
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan (bimtek) kader kesehatan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
3	PUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	75 Nilai	75	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,23 Indeks	90,23	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan	%	100%	101	101			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					dilaporkan secara tepat waktu							
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	137 Orang/ bulan	137	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah	%	100%	100	100			
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	145 Unit	145	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24 Unit	24	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4 Unit	4	100			
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan yang dibangun dan direhabilitasi	KM	26 KM	26	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	18 Dokumen	18	100			
				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM	15 KM	15	100			
				Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM	2 KM	2	100			
				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan	1 Jembatan	1	100			
				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembatan	10 Jembatan	10	100			
				Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jembatan	16 Jembatan	16	100			
				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM	20 KM	20	100			
				Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM	10 KM	10	100			
				Pembangunan Terowongan/Tunnel	Jumlah Terowongan/Tunnel yang Dibangun	Terowongan/Tunnel	1 Terowongan/Tunnel	1	100			
				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM	3 KM	3	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga operator dan teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	8.51%	8.51	100			
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	Orang	450 Orang	450	100			
				Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	230 Orang	230	100			
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penunjang sistem informasi jasa konstruksi Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung	2 Perangkat Pendukung	2	100			
				Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	3 Orang	3	100			
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	15	100			
				Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	15 Paket Pekerjaan	15	100			
				Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	3 Lembaga	3	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	45.44%	45.44	100			
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
				Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penetapan Kebijakan dalam rangka	Jumlah Dokumen Kebijakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pelaksanaan Penataan Ruang	Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota							
				Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	1 Layanan	1	100			
				Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara	1 Berita Acara	1	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus	1 Kasus	1	100			
				Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	1 Laporan	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Luasan kawasan permukiman rawan banjir yang dilindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota	%	33,09%	33.09	100			
					Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	83,64%	83.64	100			
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	. Ha	134,85 Ha	136.14	100.96			
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	. KM	0.1 KM	0.1	100			
				Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	. KM	0.3 KM	0.3	100			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit	2 Unit	3	150	yang direhab folder air hitam, pampang, sempaja lestari	melakukan Penyesuaian target seusia anggaran yang tersedia	
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	5 Unit	5	100			
				Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit	1 Unit	1	100			
				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung	Jumlah Pintu Air/Bendung	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengendali Banjir	Pengendali Banjir yang Direhabilitasi							
				Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	100			
				Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	. KM	2.5 KM	2,5	100			
				Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	. KM	0.5 KM	0.5	100			
				Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	.%	83.64%	83.64	100			
				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	. KM	0.95 KM	0,9	90%	dicek ulang		
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	1 KM	1	100			
				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	. KM	0.5 KM	0.5	100			
				Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	2500 DI	2500	100			
				Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	1 KM	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	85%	85	100			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kota	SR	300 SR	300	100			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	8 Liter/Detik	8	100			
				Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	100 Liter/Detik	100	100			
				Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	2 Unit	2	100			
				Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	300 SR	300	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase infrastruktur persampahan yang dibangun	.	65%	65	100			
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Unit	7 Unit	7	100			
				Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Ton/hari	16 Ton/hari	16	100			
				Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang	300 Orang	300	100			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	300 Orang	300	100			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen	16 Dokumen	16	100			
				Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit	65 Unit	65	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	80%	80	100			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	708 Rumah Tangga	708	100			
				Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	M ³ /Hari	20 M ³ /Hari	20	100			
				Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	M ³ /Hari	1 M ³ /Hari	1	100			
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	M ³ /Hari	35 M ³ /Hari	35	100			
				Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	M ³ /Hari	35 M ³ /Hari	35	100			
				Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	M ³ /Hari	5 M ³ /Hari	5	100			
				Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	50 Rumah Tangga	76	152	Kegiatan Sudah Sesuai dengan layanan updt	menyesuaikan target kembali	
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya	Penyelenggara	1 Penyelenggara	1	100			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	708 Rumah Tangga	708	100			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	5 Dokumen	3	60	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik / Pembuangan Air tidak Tersumbat	%	65%	65	100			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang drainase yang dibangun/ditingkatkan	M	809093 M	809093	100			
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M	400 M	400	100			
				Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan	1 Sistem Drainase Lingkungan	1.02	120			
				Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	2	100			
				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	1	100			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	3	100			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	82,35%	82.4	100,1			
					Rasio Kepatuhan PBG Kabupaten/Kota	%	93,10%	93.10	100			
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah advice PBG/SLF/TABGJ	Jumlah	325 Jumlah	325	100			
				Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung	1 Bangunan Gedung	1	100			
				Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung	8 Bangunan Gedung	8	100			
				Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50 Dokumen	40	80	anggaran yang tersedia hanya bisa mencetak 40 dokumen	Melakukan Evaluasi Terkait Kegiatan Tersebut	
				Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	39%	39	100			
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan	3 Kawasan	3	100			
				Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kabupaten/Kota							
				Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	1 Kawasan	1	100			
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	60%	60	100			
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Termediasinya Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	5 Berita Acara	5	100			
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	40%	40	100			
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Tanah Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Ha	20 Ha	9,0259	0,451			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya Data Inventarisasi	Kelurahan	3 Kelurahan	3	100			
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Laporan Inventarisasi Tanah Kosong	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	%	20.68%	21,76	108			
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Penguasaan Tanah	Ha	100 Ha	100	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	56 Dokumen	56	100			
4	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	90,78 Indeks	90.63	99.83			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	78,50 Nilai	89.05	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1 Berita Acara	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14 Laporan	14	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	72 Orang/bulan	72	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	62 Dokumen	62	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	Laporan	2 Laporan	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	100	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	10	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	85.71	85.71	Capaian dipengaruhi realisasi capaian sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	pada saat perencanaan memperhitungkan kebutuhan	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	6 Laporan	0	0	Kegiatan tidak terealisasi karena pagu anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan riil, sehingga kunjungan tamu tidak dilaksanakan karena anggaran tidak mencukupi	pada saat perencanaan memperhitungkan kebutuhan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15 Laporan	15	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4 Unit	4	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	23 Unit	23	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	37 Laporan	37	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	42 Unit	42	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	158 Unit	158	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase perumahan dan permukiman tertata	.%	27.53%	27,67	100,5			
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	Dokumen	11 Dokumen	11	100			
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan	Kali	4 Kali	4	100			
				Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	40	100			
				Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang	40 Orang	40	100			
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan / Rehabilitasi Rumah	Unit	34 Unit	34	100			
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah	13 Unit Rumah	13	100			
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah	21 Unit Rumah	15	71,43	penambahan fasilitas (instalasi listrik, jaringan air, biofil) pada rumah yang dibangun sehingga awalnya 21 unit menjadi 15 unit	pada saat perencanaan diperhitungkan fasilitas yang dibutuhkan	
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Rekomendasi Teknis	Dokumen	6 Dokumen	6	100			
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku	Dokumen	2 Dokumen	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Facilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	.%	7.64%	0	0	Perencanaan dan konsep penanganan bersifat parsial dan tidak memperhatikan 7 (tujuh) indikator kumuh yang seharusnya terintegrasi dengan baik	Perencanaan dan penanganan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan 7 (tujuh) indikator kumuh	
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan Kawasan Kumuh Di Bawah 10 Ha Yang Ditangani	, Ha	1,346 Ha	0	100	Perencanaan dan konsep penanganan bersifat parsial dan tidak memperhatikan 7 (tujuh) indikator kumuh yang seharusnya terintegrasi dengan baik	Perencanaan dan penanganan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan 7 (tujuh) indikator kumuh	
				Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembentukan/Pembiinan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat	10 Kelompok Masyarakat	10	100			
				Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga	120 Rumah Tangga	120	100			
				Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	%	20%	20	100			
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit	23 Unit	23	100			
				Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	, Ha	2,7 Ha	2,7	100			
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	153 Unit Rumah	153	100			
				Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	, Ha	0,8 Ha	0.8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	.%	9.52%	9.5	100			
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang ditangani	Unit Rumah	201 Unit Rumah	201	100			
				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	173 Unit Rumah	173	100			
				Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit	28 Unit	28	100			
				Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	.%	16.67%	16,67	100			
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan Yang Sudah Di Lengkapi PSU	Perumahan	6 Perumahan	6	100			
				Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen	9 Dokumen	9	100			
				Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	100 Lokasi	100	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi	97 Lokasi	97	100			
				Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi	100 Lokasi	100	100			
5	TARANTIBUM LIMMAS	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	. Indeks	76.10 Indeks	91.63	120,4	capaian melebihi target karena adanya peningkatan aduan	menyesuaikan target di renja selanjutnya	
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	. Nilai	68.50 Nilai	68	99,27			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6 Dokumen	6	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	180 Orang/ bulan	181	100,6			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	18 Dokumen	18	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat	Persentase Pegawai Perangkat	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Daerah	Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian							
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1 Paket	1	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8 Laporan	8	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10 Unit	10	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20 Unit	20	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20 Unit	20	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20 Unit	20	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	66,00%	66	100			
					Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	66%	100	100			
					Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	55,00%	55	100			
					Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	50,00%	50	200			
				Penanganan Gangguan Ketenteraman	Jumlah SOP dalam Penegakan	Orang	5668 Orang	295	5,02	anggaran untuk	melakukan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	PERDA serta Penanganan Gangguan Trantibum					kegiatan pengamarna posko pemilu di alihkan ke dinas kesbang pol Pada Tahun 2025	Penyesuaian Target Kembali di tahun 2026 Terkiat Kegiatan Tersebut	
					Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikuuhkan	Kasus	46 Kasus	46	100			
					Jumlah sarana dan Prasarana Minimal yang Dipenuhi	Jenis	3 Jenis	3	100			
					Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kota yang ditangani	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	laporan	90 laporan	90	100			
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	50 Laporan	50	100			
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniLaporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	2 Unit	2	100			
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	170 Orang	170	100			
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah PERDA yang ditegakkan	Perda	13 Perda	13	100			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	6 Laporan	6	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi Pamong Praja Yang memiliki Kualitas Sebagai PPNS	Orang	8 Orang	8	100			
				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan	4 Laporan	4	100			
	TARANTIBUM LIMMAS	BPBD	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	65 Nilai	77,05	119,2			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	80 Indeks	91,98	114,98			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	0	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	36 Orang/bulan	36	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26 Dokumen	12	46,15	Kesalahan dalam Menetapkan Target	penyesuaian target di tahun berikutnya	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	0	100%	100	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	85 Paket	85	100			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13 Orang	4	30,77	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	0	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	27 Paket	27	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	0	100%	100	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	0	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	51 Unit	29	56.86			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	26 Unit	26	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	51 Unit	18	35,29			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Pasca Bencana	, Indeks	0,090 Indeks	0,09	100			
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jenis	4 Jenis	4	100			
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang	310 Orang	310	100			
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jenis	9 Jenis	5	55,56			
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan	12 Kegiatan	9	75			
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit	10 Unit	9	90			
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang	550 Orang	550	100			
				Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	59 Keluarga	59	100			
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan	3 Kawasan	2	66.67			
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)	Orang	20 Orang	0	0	pada Tahun 2025 tidak ada pelatihan	Menyesuaian Pelaksanaan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana					dari BNPB Pusat Sementara Kegiatan ini berkaitan dengan Kegiatan Yang di laksanakan Oleh BNPB Pusat	Kegiatan BNPB Pusat	
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan	1 laporan	1	100			
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan	5 Kawasan	5	100			
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jenis	5 Jenis	5	100			
				Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang	3000 Orang	3000	100			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang	1500 Orang	1500	100			
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jenis	5 Jenis	5	100			
				Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen	2 Dokumen	1	50			
				Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan	10 Kegiatan	10	100			
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen	3 Dokumen	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	4 Laporan	4	100			
	TARANTIBUM LIMMAS	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	88,00 Nilai	87	98.86			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Nilai	89,00 Nilai	89,43	100,5			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	Persen	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12 Laporan	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	0	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	158 Orang/ bulan	155	98,01			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	0	100%	100	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	230 Paket	223	96.96			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8 Paket	8	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7 Laporan	7	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	0	100%	100%	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	13 Unit	13	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14 Unit	14	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	0	100%	52	52			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	0	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	33 Unit	33	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	44 Unit	44	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 Unit	40	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12 Unit	12	100			
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persentase	80	80	100			
					Persentase kelaikan sarana dan prasarana Pemadaman dan penyelamatan	Persentase	60,00%	60	100			
					Cakupan penyebaran informasi dan edukasi daerah rawan kebakaran	Persentase	17,14%	17,14	100			
					Penurunan luas area yang terbakar	M2	23654,00 M2	23654,00	100			
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pencegahan Kebakaran dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6 Dokumen	6	100			
					Jumlah Dokumen dan Laporan layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen / Laporan	12 Dokumen / Laporan	12	100			
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
						0						
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	16 Unit	16	100			
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah dan Legal	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	3 Orang	3	100			
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen pendataan dan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	8 Dokumen	8	100			
				Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen Investigasi	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	kali	11 kali	11	100			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	500 Orang	500	100			
				Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelu- rahan	2 Desa/Kelu- rahan	2	100			
				Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah laporan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit	34 Unit	34	100			
6	SOSIAL	DINAS SOSIAL	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	. %	99.75 %	99.75	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	.	75,00%	75	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas tata kelola dan kinerja perangkat daerah	Angka	80 Angka	80	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1 Berita Acara	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			2025									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	14 Laporan	14	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	0	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	44 Orang/b ulan	44	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	34 Dokumen	34	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	0	100%	100	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	7	70	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	0	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	10	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25 Laporan	25	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kosong	0	0	0	0			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10 Unit	10	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	0	100%	77	77			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	Laporan	5 Laporan	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	0	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14 Unit	14	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	5	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85 Unit	85	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase SDM kesejahteraan sosial dan lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	,	80%	80	100			
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dibina dan aktif	,	75%	75	100			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200 Orang	200	100			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	10	100			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	100 Lembaga	1	1	keliru menentukan target seharusnya target 1 lembaga sehingga persentase capaian 100%	penyesuaian target pada tahun berikutnya	
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	10 Sertifikat	10	100			
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	0	100%	100	100			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Orang	230 Orang	229	99,57			
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	207 Orang	207	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	8 Orang	8	100			
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	300 Orang	180	60	menurunnya jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50 Orang	50	100			
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	94 Orang	94	100			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	20	100			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 Orang	30	100			
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150 Orang	150	100			
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah PPKS yang Mendapat Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bukan Korban HIV di Luar Panti	Orang	87 Orang	87	100			
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 Orang	30	100			
				Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15 Orang	15	100			
				Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	10	100			
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	3	15	pada tahun 2025 3 orang meninggal dunia, sebagian anggaran dialihkan ke belanja modal dan untuk orang yang meninggal dunia tidak bisa kita prediksi per tahunnya berapa orang		
				Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	10	100			
				Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	40	100			
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	40	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	40	100			
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25 Orang	27	100			
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30 Orang	30	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	,	2%	2	100			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang dikelola	0	100%	100	100			
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Keluarga	6000 Keluarga	6000	100			
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	844 Keluarga	1688	200	penambahan jumlah KPM dengan mengurangi jumlah bulan bansos yang diterima	Melakukan Penyesuaian Target Serta Serta Melakukan Validasi Terhadap Penerima KPM	
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20 Orang	20	100			
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	0	100%	100	100			
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban yang mendapat perlindungan sosial korban bencana	Orang	1200 Orang	1200	100			
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1600 Orang	1600	51,94	Jumlah korban bencana sebenarnya yang dibantu untuk permakanan adalah 27.179 Orang dikarenakan adanya bencana banjir di samarinda sehingga Dinas Sosial membantu pembukaan Dapur Umum untuk Korban Banjir	Melakukan Penyesuaian target di tahun berikutnya	
				Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakailan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	210 Orang	46	21,43	Tidak mencapai target dikarenakan bantuan paket sandang diberikan untuk 1 Kepala Keluarga (KK) dan yang mendapatkan hanya korban bencana Kebakaran	Melakukan Penyesuaian target di tahun berikutnya	
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25 Orang	128	460	Melebihi target dikarenakan banyak terdapat korban bencana kelompok rentan (Balita, Ibu Hamil, dan Lansia) yang ada di lokasi bencana	Melakukan Penyesuaian target di tahun berikutnya	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80 Orang	5	5	tidak mencapai target, di tahun 2025 hanya 5 orang yang mendapatkan layanan dukungan psikososial dikarenakan sebagian korban bencana mengungsi tmt keluarga	Melakukan Penyesuaian target di tahun berikutnya	
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100			
				Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	75 Orang	55	73,33	Target peserta kegiatan koordinasi sebanyak 75 orang anggota TAGANA, namun yang dapat hadir sebanyak 55 orang. Sebagian anggota berhalangan hadir karena adanya agenda/kegiatan lain yang telah terjadwal pada waktu yang bersamaan. Meskipun demikian, kegiatan tetap berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	Melakukan Penyesuaian target di tahun berikutnya	
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		0						
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan BERKEMBANG		20%	20	100			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan	0	100%	100	100			
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	59 Dokumen	59	100			
				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	59 Dokumen	59	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	0	100%	100	100			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	Lembaga	59 Lembaga	59	100			
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	10 Unit	10	100			
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	10 Laporan	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



2.2. Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi penyelenggaraan berbagai bidang, antara lain ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi serta usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Samarinda pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah memberikan hasil yang positif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup



6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Uraian mengenai capaian pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:



Tabel 3. 5 Capaian Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
1	BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	64.29%	64,29	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTK yang disusun dan di fasilitasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	%	4%	3,68	92			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah pelatihan / Unit Kompetensi yang dilaksanakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	25 Lembaga	25	100			
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	9 Unit	9	100			
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang	80 Orang	80	100			
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah kegiatan pembinaan kepada LPK Swasta yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	10 Lembaga	10	100			
				Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang memiliki perizinan lengkap	LPK	10 LPK	10	100			
				Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	13 Perizinan	13	100			
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Pengukuran Kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	5 Dokumen	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah							
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang di Tempatkan	%	16.17%	16,17	100			
				Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang menerima layanan informasi pasar kerja	Orang	2000 Orang	2000	100			
				Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	30 Orang	30	100			
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	700 Orang	700	100			
				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	18 Orang	18	100			
				Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	45 Orang	45	100			
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah data pasar kerja yang dihimpun	Dokumen	450 Dokumen	450	100			
				Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	2000 Orang	2000	100			
				Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	150 Orang	150	100			
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	90%	90%	100			
					Persentase Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	90,00%	78	86.67	Rasionalisasi Anggaran	Kegiatan Menyesuaikan Pagu Anggaran Yang Tersedia	
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	Perusahaan	50 Perusahaan	50	100			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan	Perusahaan	35 Perusahaan	35	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Perusahaan	Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online							
				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja yang berhasil dikelola / ditangani	Perkara	100 Perkara	100	100			
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	80 Perkara	80	100			
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	100 Perkara	100	100			
				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	10	100			
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	19000 Orang	14743	77,59	Rasionalisasi	Kegiatan Menyesuaikan Pagu Anggaran yang tersedia	
2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	,	10,50%	10,5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
	ANAK	ANAK	TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN								
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	,	49,71%	54,19	109,01	nilai capaian berdasarkan perhitungan data BPS tahun 2024	Melakukan Peryesuaian target di tahun berikutnya	
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelebagaan PUG	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	150 Orang	150	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	Orang	150 Orang	150	100			
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja	orang	50 orang	50	100			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Organisasi	2 Organisasi	2	100			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Perempuan	Layanan	2 Layanan	2	100			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	150 Orang	150	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	.%	84.21%	51.96	61,07	semakin kecil capaian, semakin baik hasil edukasi ke masyarakat		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus	80 Kasus	223	278,75	adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan	Malakukan Sosialisasi dan Edukasi Terhadap masyarakat Guna Menurunkan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	2	100			
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus perempuan yang dirujuk dan menerima rujukan	orang	70	30	42,85	semakin kecil capaian, semakin baik hasil edukasi ke masyarakat	Malakukan Sosialisasi dan Edukasi Terhadap masyarakat Guna Menurunkan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang	200 Orang	119	59,05	semakin kecil capaian, semakin baik hasil edukasi ke masyarakat	Malakukan Sosialisasi dan Edukasi Terhadap masyarakat Guna Menurunkan Kasus kekerasan Terhadap Perempuan	
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan terhadap Perempuan	Lembaga	2 Lembaga	2	100			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Orang	90 Orang	90	100			
				Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan	Orang	31 Orang	31	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik							
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Layanan	5,00 Layanan	5	100			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Lembaga	2 Lembaga	2	100			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5 Orang	5	100			
				Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	Layanan	5 Layanan	5	100			
				Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Layanan	5 Layanan	5	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan		42%	42	100			
				Pengumpulan, Pengolahan	Jumlah dokumen data	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia							
				Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	, Indeks	63,00 Indeks	68,27	108,37	nilai capaian berdasarkan perhitungan data BPS		
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Organisasi	40 Organisasi	40	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Lembaga	20 Lembaga	20	100			
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150 Orang	150	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1	100			
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Dokumen	1 Dokumen Dokumen	1	100			
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	, Indeks	81,16 Indeks	90.91	1121,01			
					Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	,	88,24%	98.64	111.79	adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak	melakukan KIE	
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	Kasus	120 Kasus	180	150	adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak	melakukan KIE	
				Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	Kegiatan	4 Kegiatan	4	100			
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan	orang	150 Anak	219	146	jumlah aduan yang masuk lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 219	menyesuaikan target di tahun berikutnya	
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	85 Orang	219	257.65	jumlah aduan yang masuk lebih besar dari target yang telah ditetapkan yaitu 219	menyesuaikan target di tahun berikutnya	
				Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Layanan	7 Layanan	7	100			
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	Lembaga	2 Lembaga	2	100			
				Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Orang	80 Orang	80	100			
3	BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan	Cadangan Pangan Masyarakat	, Ton	24,37 Ton	18	73.86	Adanya Pennurun Produksi Padi	Melakukan Sosialisai Serta Monitoring Guna Menaikan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	KEMANDIRIAN PANGAN							Produksi Padi	
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan yang tersedia	%	100%	100	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	28 Unit	28	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan	4 Laporan	4	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit	3 unit	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PPH Ketersediaan	. Skor	95.00 Skor	99.03	104.24			
					PPH Konsumsi	. Skor	85.60 Skor	88.01	102.82			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Angka Kecukupan Energi Ketersediaan	Kkal/ kapita/hari	3100 Kkal/ kapita/hari	3499	112.87			
				Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	Unit	2 Unit	2	100			
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan	Keluarga	240 Keluarga	240	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Keluarga							
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah yang tersedia	, ton	97,03 ton	97.03	100			
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	, Ton	52,35 Ton	52,35	100			
				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton	10 Ton	10	100			
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi Konsumsi	Kkal/k apita/hari	1937 Kkal/k apita/hari	1891	97.63			
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	4 Laporan	4	100			
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Wilayah Rentan Pangan	.%	84.75%	77.97	92	penambahan indikator dalam penyusunan FSVA	penyesuaian dengan indikator yang baru	
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah rentan pangan yang ditangani	Wilayah	3 Wilayah	5	166.67	penambahan anggaran untuk 2 wilayah rentan pangan	Kegiatan Menyesuaikan Pagu Anggaran yang Tersedia	
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	1 Laporan	1	100			
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi	%	97%	106%	109%			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	0	100%	100	100			
				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokuman	1 Dokuman	1	100			
4	PUPR	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	60%	60	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Termediasinya Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	5 Berita Acara	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	40%	40	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Tanah Penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan	Ha	20 Ha	9,0259	0,451295			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya Data Inventarisasi	Kelurahan	3 Kelurahan	3	100			
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Laporan Inventarisasi Tanah Kosong	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemanfaatan Tanah	Jumlah Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kosong	Pemanfaatan Tanah Kosong							
				PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas penguasaan tanah yang dimiliki masyarakat	.%	20.68%	21,76	108			
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Penguasaan Tanah	Ha	100 Ha	100	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen	56 Dokumen	56	100			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	80,75 Nilai	100	123.84			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	13 Dokumen	13	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	100 Orang/ bulan	98	98	2 orang pegawai meninggal dunia		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Laju peningkatan pendapatan perangkat daerah	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	100	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	10	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	27 Unit	19	70,37			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	136 Unit	136	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	289 Unit	80	27.68			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100%	100	100			
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	%	100%	100%	100			
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	24 Pengaduan	24	100			
				Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	24 Perkara	24	100			
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	10 Perkara	10	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Sampah terkelola	%	100	84,87	84,7	15,13 % adalah sampah yang tidak dikelola (membakar sampah, buang sampah ke badan air)	Melakukan Komunikasi, Informasi dan edukasi seperti, sedekah sampah dan susur sungai serta yustisi sampah	
					Persentase Pengurangan sampah	%	30	0,52	1,73	1. Target adalah sesuai Perwali No 13 Th 2019 ttg	1. Membuat draft surat edaran walikota ttg pengelolaan sampah di	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengelolaan Sampah						JAKSTRADA . Terjadi kesalahan input dikarenakan jaringan; 2. Ada perubahan penghitungan di kegiatan pengurangan sampah; a. Item pengurangan dari pembatasan sampah, ditahun 2025 sdh tidak termasuk jumlah pengurangan sampah; b. Ada perubahan jenis sampah yang dikategorikan penggunaan kembali dalam kegiatan pengurangan sampah. Dalam Hal ini adalah ban dari kendaraan R2 dan R4 serta potongan logam dari konstruksi; c. Sampah nonorganik yang dikelola di bank sampah semula masuk kategori pengurangan sampah, di tahun 2025 masuk dikategori penanganan sampah; Perhitungan Pengelolaan sampah sesuai dengan PermenLHK no. 6 tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Keterangan untuk Penanganan Sampah : Capaian yang melebihi target bukan menunjukkan hal yang positif. Ini memberikan informasi bahwa	sumber sampah; 2. Memberikan penyuluhan ttg pengelolaan sampah di sumber	
					Persentase Penanganan sampah	%	70	84,36	100		1. Membuat draft surat edaran walikota ttg pengelolaan sampah di sumber sampah; 2. Memberikan penyuluhan ttg pengelolaan sampah di sumber	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
										Pemerintah bekerja dominan sedangkan masyarakat kurang peran sertanya dalam Pengurangan Sampah seperti yang diamankan Perwali no. 13 tahun 20219. (perbaiki isian dalam bentuk persentase dan berikan keterangan keliru dalam menentukan target, berikan keterangan terkait kategori penanganan)		
				Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit	187 Unit	187	100			
				Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	, Ton	75.137,88 Ton	1.236,10	1,65	1. Perhitungan berdasarkan SIPSN; 2. Pelaku pendaur ulang sampah hanya ditahap pengumpulan, jenis sampah yang dapat didaur ulang terbatas dan di samarinda belum ada offtaker	1. Membuat draft SE Walikota ttg Pilah sampah disumber; 2. Edukasi dan kampanye berkelanjutan; 3 optimalisasi Bank Sampah Unit; 4. Pemberdayaan dan Insentif Ekonomi (Panganugerahan Bank Sampah Unit, kolaborasi CSR Perusahaan); 5. Membangun kesadaran masyarakat; 6. Berkoordinasi dengan bagian kerjasama untuk pelaksanaan Penerapan EPR (Extended Producer Responsibility/tanggung jawab produsen).	
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	10 Kelompok	10	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada							
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	100%	100%	100			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan RPPLH	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokuman	1 Dokuman	1	100			
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan KLHS	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tutupan Lahan	≥ . Koefisien	≥ 0.20 Koefisien	≥ 0.20 Koefisien	100			
					Indeks Kualitas Air Titik Pantau	≤ x < Indeks	50 ≤ x < 90 Indeks	50 ≤ x < 90 Indeks	100			
					Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	≤ Indeks	≤ 50 Indeks	≤ 50 Indeks	100			
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian	Paket	1 Paket	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				kualitas lingkungan	parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan							
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi	1 Lokasi	1	100			
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Pelaksanaan remediasi	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan	Ha	1 Ha	6,3798611	91.87			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					kabupaten/kota							
				Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1 Ha	6,9291667	99.78			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	.%	5.3%	5,3	100			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	, Ha	47,96 Ha	47.96	100			
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	, Ha	47,96 Ha	47.96	100			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang	10 Orang	10	100			
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	99%	99	100			
				Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase jumlah kegiatan usaha yang di verifikasi terkait pemenuhan standar atau rincian teknis penyimpanan limbah B3	%	50%	50	100			
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang melaporkan neraca pengumpulan limbah B3	%	25%	25	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya							
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	%	25%	24,39	97,56			
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pengawasan	.%	10.25%	10,25	100			
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	20 Dokumen	20	100			
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	10 Orang	10	100			
				Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	41 Badan Usaha	41	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100%	100	100			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat	Terselenggaranya Pendidikan, Latihan, dan penyuluhan Lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Tingkat	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Daerah Kabupaten/Kota	Daerah							
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang	100 Orang	100	100			
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	100%	100	100			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Entitas	5 Entitas	5	100			
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	5 Entitas	5	100			
6	BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	65 Nilai	62,05	96,15			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82 Nilai	80.78	98,51			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Angka	94 Angka	92	98			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan	Laporan	2 Laporan	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Perangkat Daerah								
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	90 Orang/bulan	90	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	58 Dokumen	58	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15 Unit	15	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan	Unit	110 Unit	110	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dan Mesin Lainnya	Mesin Lainnya yang Dipelihara							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PERSENTASE KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK	%	75,00%	98.96	131.95	terdapat Kenaikan Pengeurusan KIA	Melakukan Penyesuaian Target Terhadap Kepemilikan KIA	
					PRESENTASE KEPEMILIKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	%	7,00%	6,22	88.86			
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	80 Dokumen	80	100			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1 Laporan	1	100			
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PERSENTASE AKTA KELAHIRAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	%	96,00%	96	100			
					PERSENTASE AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN BAGI YANG MELAPORKAN	%	33,30%	33,03	100			
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	28000 Dokumen	28000	100			
				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket	1 Paket	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PERSENTASE INFORMASI KEPENDUDUKAN YANG DIMANFAATKAN	%	58%	585	100			
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data	Dokumen	8 Dokumen	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kependudukan							
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	CAKUPAN PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan BERKEMBANG	,	20%	20	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan	0	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen	59 Dokumen	59	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	59 Dokumen	59	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang aktif	0	100%	100	100			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Aktif	Lembaga	59 Lembaga	59	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								
				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit	10 Unit	10	100			
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
8	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	88,00 Indeks	89.95	102,22			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	84,50 Nilai	90.75	107,04			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Statistik Sektoral Daerah	Pendukung Statistik Sektoral Daerah							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	40	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	104	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	10	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	8 Paket	8	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	7 Paket	7	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0 Dokumen	0	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemerintah Daerah								
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	71 Unit	71	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	4	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	11 Unit	11	100			
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	, Rata anak perWanita	1,95 Rata2 anak perWanita	2,02		penurunan, semakin turun semakin bagus		
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	, Indeks	79,4 Indeks	79,4	100			
				Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai	Organisasi	10 Organisasi	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan							
				Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	10 Organisasi	10	100			
				Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Kegiatan	2 Kegiatan	2	100			
				Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan	Kegiatan	0 Kegiatan	0	0	Terjadi kesalahan saat perubahan renja dari bidang menyatakan kegiatan tersebut di recofusing 100% ternyata ada sisa anggaran 1,790,000		
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan	14 Kegiatan	14	100			
				Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota							
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang aktif di Kampung Keluarga Berkualitas	%	20%	20	100			
				Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit	16 Unit	16	100			
				Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	7,10%	3,99	143,08	penurunan, semakin turun semakin bagus		
					Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptiv Prevalance Rate/mCPR)	%	70,65%	66,43	94,03			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rate Angka Kelahiran Remaja Usia 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran	11 Kelahiran	10,2	92,73			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	10 Laporan	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi	10 Organisasi	10	100			
				Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan	0 Laporan	0	100			
				Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	59 Unit	59	100			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	%	14.7%	22,01	150,34			
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	7 Unit	7	100			
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	180 Orang	180	100			
				Pembinaan IMP dan Program Bangga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP	Organisasi	1 Organisasi	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB							
				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (Demand Satisfied)	.%	72.1%	63,02	87.66			
				Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	75 Orang	15	20	Terbatasnya alokasi anggaran membatasi jumlah peserta untuk mengikuti pelatihan CTU sehingga hanya mencakupi 20 Orang tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan CTU	Melakukan Kegiatan Sesuai pagu Anggaran Yang Tersedia serta Melakukan penyesuaian Target Sesuai pagu Anggaran	
				Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang	9 Orang	9	100			
				Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	70 Orang	70	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang	16486 Orang	11575	70,21			
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	16486 Orang	13553	82,21			
				Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	24 Dokumen	24	100			
				Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	4 Unit	4	100			
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB Berkelanjutan	%	50%	54	100			
				Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi	4 Organisasi	4	100			
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit	20 Unit	20	100			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program	Kampung	59 Kampung	59	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Berkualitas	Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)							
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	%	60%	60,37	100,62			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Indeks Pengasuhan Remaja	%	90,90%	86,5	95,16			
					Indeks Lansia Berdaya	, Indeks	57,1 Indeks	72	126,09			
				Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga	50 Keluarga	50	100			
				Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan	1 Kegiatan	1	100			
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen	2 Laporan / Dokumen	2	100			
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	8 Unit	8	100			
				Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor	Orang	850 Orang	850	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					(UPPKA)							
				Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	70 Orang	70	100			
				Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang	120 Orang	120	100			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang	850 Orang	850	100			
				Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok	10 Kelompok	10	100			
				Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL),	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit	Kelompok	10 Kelompok	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk							
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi Masyarakat yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Organisasi	4 Organisasi	4	100			
				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Organisasi	2 Organisasi	2	100			
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran,	laporan	1 laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Baduta/Balita)	Baduta/Balita)							
				Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan	1 laporan	1	100			
9	PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	80,00 Nilai	80	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	87,48 Indeks	87,48	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	111 Orang/ bulan	111	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Pendapatan	Laju peningkatan	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	pendapatan perangkat daerah							
				Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan barang milik daerah penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5 Unit	5	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30 Unit	30	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan layak uji	%	53%	53	100			
					Terhadap Kondisi Ideal Konektivitas Darat	, Rasio	0,58 Rasio	0,58	100			
					Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang	%	40%	40	100			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Tersedia	Unit	7 Unit	7	100			
				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	7 Unit	7	100			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	7 Unit	7	100			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah laporan Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan bermotor yang diuji dan laik jalan	. Unit	32.428 Unit	32.428	100			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	151 Unit	151	100			
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	8 Orang	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit	2000 Unit	2000	100			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	20000 Dokumen	20000	100			
				Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	85 Unit	85	100			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan persetujuan hasil Andalalin	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah laporan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Peningkatan Kapasitas	Jumlah Auditor dan	Orang	8 Orang	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya							
				Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan angkutan barang yang tersedia	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit	4 Unit	4	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Konektivitas Sungai	, Rasio	0,57 Rasio	0.57	100			
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang	Jumlah laporan Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	sungai dan danau yang melayani trayek dalam 1 daerah kabupaten/kota							
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penetapan lintas penyeberangan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan penetapan rencana induk DLKR/DLKP pelabuhan sungai	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah laporan pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit	5 Unit	5	100			
				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan Dermaga	Jumlah Dermaga Sungai	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Sungai dan Danau	dan Danau yang di Pembangunan							
				Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit	4 Unit	4	100			
10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	67	67	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88	88	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	53	53	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	5	5	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100	100	100			
				Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai	Orang	5	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	5	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	3	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	13	13	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16	16	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	%	75,00	75,00	100			
					Persentase media (cetak, online sama elektronik) yang bekerjasama dengan pemerintah daerah	%	80	80	100			
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	85	85	100			
					Persentase Badan Publik di Lingkup Pemerintah Kota Samarinda yang sudah melaksanakan urusan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) dengan kategori informatif	%	7,69	7,69	100			
				Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	5	5	100			
				Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	10	10	100			
				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	250	250	100			
				Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	, Persentase	1,80	1,80	100			
				Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	48	48	100			
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	Media	80	80	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					kriteria/juknis							
				Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	1	1	100			
				Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1700	1700	100			
				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	3	3	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Arsitektur SPBE	%	93,90	93,90	100			
					Jumlah titik layanan (endpoint)	Node	235	235	100			
				Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	95,74	95,74	100			
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100			
				Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Server Aplikasi	16	16	100			
				Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	1	100			
				Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	Laporan Dokumen	4	4	100			
				Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	9	13	144	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan arsitektur dan peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 13 aplikasi, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 9 aplikasi. Peningkatan jumlah aplikasi ini seiring dengan percepatan transformasi digital di Kota Samarinda, yang mendorong meningkatnya		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
										kebutuhan perangkat daerah terhadap aplikasi pendukung layanan pemerintahan dan pelayanan publik. Seluruh pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kota Samarinda, serta melalui tahapan User Requirement Specification (URS) dan User Acceptance Test (UAT) guna memastikan kesesuaian fungsi, integrasi sistem, dan kebutuhan pengguna. Adapun aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan meliputi E-Monev, PPID, Siti Korban Perasaan, Simuara, SIPerkasa, SIPKK, aplikasi DLH, Website Korpri, Website Dinas Perikanan, aplikasi berbasis AI, Dashboard Eksekutif, Sisdiklat, serta SI Pasar Pagi. Capaian ini menunjukkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam mendukung transformasi pemerintahan digital yang terintegrasi, adaptif, dan selaras dengan kebijakan SPBE pemerintah daerah.		
				Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan	Aplikasi	9	13	144	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Pemerintah Daerah					Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 9 aplikasi, dengan realisasi mencapai 13 aplikasi, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Seluruh aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan melalui subkegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang telah disesuaikan dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Kota Samarinda. Keterhubungan aplikasi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penggunaan domain resmi samarindakota.go.id, sehingga menjamin integrasi, interoperabilitas, serta kemudahan akses layanan secara terpusat. Capaian ini menunjukkan konsistensi penerapan arsitektur SPBE dan penguatan integrasi layanan digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Kota Samarinda.		
				Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	unit	20	20	100			
				Penyelenggaraan	Jumlah perangkat daerah di	Perangkat	40	40	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Daerah						
				Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	2	2	100			
11	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85,25 Indeks	83,85	98,36			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	66,00 Nilai	66	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1 Berita Acara	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	45	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40 Dokumen	40	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	%	100	100	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	4	40	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Ketersediaan Pagu Anggaran	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Laporan	13 Laporan	13	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30 Laporan	30	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan rencana kebutuhan barang	%	13 Laporan	13	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	82 Laporan	82	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	100			
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	2.12%	2,12	100			
				Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diterbitkan Izin Usaha simpan pinjam	Koperasi	8 Koperasi	8	100			
				Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha	8 Unit Usaha	8	100			
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	.%	19.91%	7,77	39,02	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Ketersedian Pagu Anggaran	tercapainya target kinerja
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perkoperasian	Koperasi	129 Koperasi	100	77,52	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Ketersedian Pagu Anggaran	
				Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha	129 Unit Usaha	100	77,52	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Ketersedian Pagu Anggaran	
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi aktif	%	8.47%	8,47	100			
				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatan dan telah diberikan penghargaan	Koperasi	36 Koperasi	35	97,22			
				Pelaksanaan Penilaian	Jumlah Unit Usaha	Unit Usaha	18 Unit	18	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan		Usaha					
				Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	18 Unit Usaha	17	94,44			
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	19.84%	14,66	73,89	capaian kinerja 190 dan jumlah seluruh koperasi 1296	Malakukan Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perkoprasian	
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Orang	75 Orang	75	100			
				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	75 Orang	75	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	19.98%	12,73	63,71	kinerja 165 dan jumlah seluruh koperasi 1296	Malakukan Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perkoprasian	tercapainya target kinerja
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang sadar berkoperasi	Orang	100 Orang	100	100			
				Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha	100 Unit Usaha	100	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pertumbuhan wirausaha	%	20.45%	3,98	19,46			
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Usaha Mikro yang sudah dibina	Unit Usaha	2200 Unit Usaha	2000	90,91			
				Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha	1000 Unit Usaha	1000	100			
				Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha	300 Unit Usaha	300	100			
				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	300 Unit Usaha	119	39,66	Jumlah izin usaha mikro yang di keluarkan Ber jumlah 119 unit	Melakukan Penyesuaian Serta Sosiasi Kepada Para Pemilik Usaha	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
										Usaha		
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha	300 Unit Usaha	200	66.67	Jumlah izin usaha mikro yang di keluarkan Ber jumlah 200 unit Usaha	Melakukan Penyesuaian Serta Sosiasi Kepada Para Pemilik Usaha	
				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	300 Orang	300	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor	%	0.6%	0,6	100			
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang telah difasilitasi	Unit Usaha	300 Unit Usaha	148	49,33	Jumlah usaha mikro yang di fasilitasi untuk menjadi usaha kecil Ber jumlah 148 unit Usaha	Melakukan Penyesuaian Target Serta Melakukan Sosiasi dan edukasi Kepada Para Pemilik Usaha Mikor	
				Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	360 Unit Usaha	127	35,28	Jumlah izin usaha mikro yang di keluarkan Ber jumlah 127unit Usaha	Melakukan Penyesuaian Serta Sosiasi Kepada Para Pemilik Usaha	
				Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha	40 Unit Usaha	21	52,5	Jumlah izin usaha mikro yang di keluarkan Ber jumlah 21unit Usaha	melakukan Penyesuaian Target serta melakukan Edukasi Kepada Pelaku UMKM	
12	PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	88,00 Nilai	91,05	103.98			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92,50 Indeks	94.93	102.63			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1 Berita Acara	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	4 Laporan	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	74 Orang/b ulan	74	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	8 Laporan	8	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	60%	60	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Disediakan							
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5 Unit	5	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	4	100			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3 Unit	3	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	%	100%	100	100			
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Menerima Fasilitas/Insentif Kemudahan Penanaman Modal	Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20	100			
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Berusaha Berbasis Resiko	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko							
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek Investasi Yang Siap Ditawarkan	Proyek	1 Proyek	1	100			
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah	1 Daerah	1	100			
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100%	100%	100			
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi yang diselenggarakan	Event	2 Event	2	100			
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	70.00 %	70	100			
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang patuh terhadap kewajiban Perizinan Berusaha	Pelaku Usaha	2700 Pelaku Usaha	2700	100			
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	5400 Pelaku Usaha	5400	100			
				Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	40	100			
				Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas	Kegiatan Usaha	260 Kegiatan Usaha	246	2.122			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha							
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Membuka Usaha	. %	100.00 %	100	100			
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan LKPM	Pelaku Usaha	400 Pelaku Usaha	400	100			
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	50 Kegiatan Usaha.	50	100			
				Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	70	100			
				Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	200 Kegiatan Usaha	200	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	60%	60	100			
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Sistem Informasi Penanaman Modal	%	50%	50	100			
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	5000 Dokumen	5000	100			
13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85 Indeks	83,43	98,15			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	70 Nilai	70	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Daerah								
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65 Orang/bulan	65	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14 Dokumen	14	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14 Paket	14	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20 Paket	20	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	4 Unit	0	0	rasionalisasi anggaran		
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	95	95			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	25 Unit	25	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	4	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING	Rasio Wirausaha Pemuda	.%	0.31%	0.31	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				KEPEMUDAAN								
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah yang mendapat pelatihan kepemudaan	Orang	225 Orang	225	100			
				Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1 Dokumen	0	0	tidak dianggarkan	Hapus Tabel	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	150 Orang	150	100			
				Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	31 Orang	31	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	10 Kegiatan	12	120			
				Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemuahan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	100 Orang	100	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	15 Orang	15	100			
				Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Orang	50 Orang	50	100			
				Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	10 Organisasi	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				tingkat kabupaten/kota								
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis penguatan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang	50 Orang	50	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda	%	50%	50	100			
					Persentase Cabor Binaan (PPLPD)	%	58,82%	58.82	100			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatih Olahraga yang memiliki Kompetensi di satuan-satuan pendidikan	Orang	20 Orang	20	100			
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	4 Unit	4	100			
				Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	12 Unit	12	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen	10 Dokumen	10	100			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event Olahraga	Event	12 Event	12	100			
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan	7 Kegiatan	7	100			
				Keikutsertaan anggota	Jumlah Peserta pada	Orang	400 Orang	400	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota							
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang dibina	Orang	800 Orang	800	100			
				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang	100 Orang	100	100			
				Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	475 Orang	475	100			
				Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda	1 Pelatda	0	0	rasionalisasi anggaran	Hapus tabel	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang	151 Orang	151	100			
				Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen	3 Dokumen	2	66.67	Target kinerja sub kegiatan terealisasi melalui kolaborasi dalam rangkaian kegiatan Sportaculinaire di tw.2 dan kolaborasi dalam rangka HUT RI di bulan Agustus	melakukan evaluasi dan koordinasi untuk pelaksanaan efent selanjutnya	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	.%	5.92%	5.92	100			
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Pendidikan Kepramukaan	Orang	250 Orang	250	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Organisasi	10 Organisasi	10	100			
				Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	100 Orang	100	100			
				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit	1 Unit	1	100			
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi	10 Organisasi	10	100			
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase kegiatan statistik mendapat rekomendasi dari Pembina Daerah	%	100	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	3	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Indonesia								
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	1	1	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	40	40	100			
				Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persentase	100	100	100			
				Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis	Persentase	100	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tepat waktu Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	.%	10,29	10,29	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	.%	53,33	53,33	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	2	2	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	100			
			PERATURAN	Pelaksanaan Keamanan	Jumlah Laporan	Laporan	1	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik							
				Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	6	6	100			
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang di tetapkan	%	36	36	100			
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	36	36	100			
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan Daerah Kota Samarinda yang di Lestarikan	,	70%	64.75	87,05			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebudayaan Daerah yang Terkelola	Objek	8 Objek	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek	5 Objek	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang	25 Orang	25	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesenian Daerah yang di lestarikan	Objek	7 Objek	7	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			2025									
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	8 Objek	8	100			
				Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Adat yang di bina	Objek	4 Objek	4	100			
					0							
				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	4 Objek	4	100			
					Tingkat Partisipasi Masyarakat (TPM) terhadap tinjauan sejarah lokal	.%	17.05%	67,05	100			
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sejarah Lokal	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang	52 Orang	52	100			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit	1 Unit	1	100			
				Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	.%	34.56%	73.62	100			
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang telah ditetapkan	Objek	16 Objek	32	100			
				Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek	41 Objek	41	100			
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek	2 Objek	2	100			
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	Objek	10 Objek	16	100			
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	11 Objek	11	100			
				Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek	3 Objek	3	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Wisatawan/Pengunjung Museum Usia 10 tahun ke	,	73%	132.82	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					atas							
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Museum yang di kelola	Unit	293 Unit	635	100			
				Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	4 Unit	4	100			
				Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	11 Unit	11	100			
				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit	1 Unit	1	100			
17	BIDANG PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	71,00 Nilai	142	200			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,00 Indeks	175,18	208,55			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	76%	71	93,42			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	51 Orang/bulan	51	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	10	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	50%	50	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3 Paket	3	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	50%	50	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	58 Unit	58	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24 Laporan	24	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	50%	50	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	15 Unit	15	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15 Unit	15	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	5	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	85,00 Nilai	85	100			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang ditingkatkan kualitasnya	Perpustakaan	31 Perpustakaan	31	100			
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	5 Perpustakaan	5	100			
				Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan	4 Layanan	4	100			
				Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	8 Perpustakaan	8	100			
				Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar	7000 Eksemplar	7000	100			
				Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen	10 Dokumen	10	100			
				Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang	25 Orang	25	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	4000 Eksemplar	4000	100			
				Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	10 Eksemplar	10	100			
				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan	1 Perpustakaan	1	100			
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan	13 Perpustakaan	13	100			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi dan pembudayaan gemar membaca di tingkat Kabupaten/Kota	%	9%	9	100			
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	4 Lokus	4	100			
				Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang	0 Orang	0	100			
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	1 Perpustakaan	1	100			
				Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	5 Orang	5	100			
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	25%	25	100			
				Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar di wilayahnya (item)	Eksemplar	50 Eksemplar	50	100			
				Seleksi dan Pengadaan	Jumlah Koleksi Budaya	Eksemplar	156	156	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota		Eksemplar					
				Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar	170 Eksemplar	170	100			
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	32.50 %	32,5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan arsip secara baku	Opd	33 Opd	33	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas	35 Berkas	35	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	19 Berkas	19	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	9 Laporan	9	100			
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit	5 Unit	5	100			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip	50 Arsip	50	100			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	850 Arsip	850	100			
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna	25 Pengguna	25	100			
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas	Laporan	3 Laporan	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota							
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	100%	100	100			
				Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah arsip	Arsip	360 Arsip	360	100			
				Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas	180 Berkas	180	100			
				Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	180 Arsip	180	100			
				Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip	Arsip	650 Arsip	650	100			
				Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip	650 Arsip	650	100			
				Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip	Arsip	2 Arsip	2	100			
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar	180 Daftar	180	100			
				Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip	180 Arsip	180	100			
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah arsip	Arsip	6 Arsip	6	100			
				Penilaian dan Penetapan	Jumlah Daftar Autentisitas	Arsip	4 Arsip	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan							
				Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip	2 Arsip	4	200	jumlah yang dialih mediakan sebanyak 4	melakukan penyesuaian target di tahun berikutnya	
				PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	100%	10%	100			
				Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip	250 Arsip	250	100			



2.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan urusan pemerintahan pilihan yang mencakup bidang Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian. Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun anggaran 2025 tersebut secara riil disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 6 Capaian Pelaksanaan Urusan Pilihan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	91.50 Nilai	91,5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86.50 Indeks	237,15	274,16			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	0	0			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	34 Orang/bulan	34	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					ASN							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	10	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	4 Unit	4	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15475.52 Ton	15565.8	100,58			
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Sarana dan prasarana perikanan tangkap yang tersedia	Unit	257 Unit	257	100			
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Yang terfasilitasi	Kelompok	6 Kelompok	6	100			
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	25 Orang	25	100			
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	6 Kelompok	6	100			
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan,	Unit Usaha	1 Unit Usaha	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kemitraan Usaha							
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelaku Usaha di TPI Yang Terlayani	Orang	300 Orang	300	100			
				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	4 Layanan	4	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	873.40 Ton	873.93	100,06			
				Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembudidaya Yang Memiliki Legalitas Usaha	Rekomendasi	80 Rekomendasi	80	100			
				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi	80 Rekomendasi	80	100			
				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Yang Terfasilitasi	Kelompok	12 Kelompok	12	100			
				Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	4 Kelompok	4	100			
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	3 Kelompok	3	100			
				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	Kelompok	5 Kelompok	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Pendidikan dan Pelatihan							
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Benih Ikan	Ekor	34.124.453,89 Ekor	34.299.000	100,01			
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	2 Unit	2	100			
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4 Unit	4	100			
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Pengawasan Diperairan Darat	Kali	4 kali	4	100			
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha yang diawasi	Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	40	100			
				Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang	10 Orang	10	100			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	74.06 Ton	82.002	110.72			
				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Terbinanya Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Pelaku Usaha	35 Pelaku Usaha	35	100			
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko							
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	5%	-0.48	9,06	Adanya instruksi efisiensi perjalanan dinas dan pengurangan penggunaan hotel untuk acara pemerintah sebagai venue kegiatan sehingga menyebabkan capaian menurun untuk tahun 2025		
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikelola	Lokasi	4 Lokasi	4	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi	3 Lokasi	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	153 Unit	153	100			
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Jasa Pariwisata yang Terbina	%	8.11%	8.11	100			
				Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Usaha	57 Usaha	57	100			
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	20%	20	100			
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Jasa Pariwisata yang Terpromosikan	Destinasi	3 Destinasi	3	100			
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Lokasi	3 Lokasi	3	100			
				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Unit	2 Unit	2	100			
				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi	Promosi	35 Promosi	35	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri							
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	18.89%	18.89	100			
				Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Prasarana yang Tersedia	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terlibat dalam Program Pengembangan	Orang	50 Orang	50	100			
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	produk	100 Produk	76	76	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	laporan	5 Laporan	5	100			
				Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0,17 %	0,17	100			
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah Pelaku Pariwisata dan	orang	225 Orang	225	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Ekonomi Kreatif yang Tersektifikasi							
				Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	laporan	6 Laporan	6	100			
				Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	orang	120 Orang	120	100			
				Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	orang	90 Orang	90	100			
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	orang	75 Orang	75	100			
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	88,50 Indeks	89.01	100.68			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	81,50 Nilai	80.75	99,08			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	1 Berita Acara	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	139 Orang/ bulan	133	95.68	pengurangan 6 orang pegawai (pensiun dan meninggal dunia)		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	110	110			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20 Orang	22	110			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	,	86%	86	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Paket	1 Paket	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Disediakan							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	162 Unit	125	77,16			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	8 Unit	8	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	133 Unit	113	84.96	20 kendaraan operasional rusak berat sehingga tidak dapat dilakukan pemeliharaan	Melakukan Pendataan Ulang serta Melakukan Pengecekan Kendaraan Secara Berkala	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4 Unit	4	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan pengawasan	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					penggunaan sarana pertanian							
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/ tanaman	%	100%	100	100			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	2	66.67	realisasi hanya 1 karena dari 3 usulan hanya 1 yang disetujui oleh kementerian	Mengajukan Pengusulan kembali Ke Kementrian	
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	laporan	2 laporan	2	100			
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan	%	100%	100	100			
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	%	100%	100	100			
				Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang	Ton	76 Ton	76	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Beredar							
				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	100	100			
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	76 Ton	76	100			
				Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	23 Ekor	23	100			
				Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	1034 Dosis	1034	100			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana pertanian yang berfungsi baik	.%	1.93%	2,06	106.74			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Dokumen Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	Dokumen	2 Dokumen	1	50	rasionalisasi anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dibangun / direhabilitasi	Unit	9 Unit	9	100			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Embung	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemeliharaan Embung Pertanian	Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara							
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4 Unit	4	100			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular	%	100%	100	100			
				Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	2 Wilayah	6	300	ada perubahan statuta penanganan zoonosis	Kegiatan Menyesuaikan Satatus Penanganann Zoonosis	
				Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	%	100%	100	100			
				Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan	4 laporan	4	100			
				Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik	Persentase Pelaksanaan	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner							
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	%	100%	100	100			
				Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha	5 Unit Usaha	4	80			
				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	75%	75	100			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	55 Ha	55	100			
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	20 Ha	20	100			
				Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	laporan	2 laporan	3	150	ada perubahanan statuta penanganan zoonosis	Melakukan Koordinasi Dan Evaluasi	
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pelaku usaha pertanian yang memperoleh Rekomendasi	%	100%	91,03	91,03			
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi penerbitan izin usaha pertanian	Rekomendasi	25 Rekomendasi	8	32	pengajuan surat rekomendasi hanya 8	Malkukan Pendataan Serta Melakukan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
											Sosialisasi Terkait Rekomendasi Yang di keluarkan	
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan	Rekomendasi	5 Rekomendasi	5	100			
				Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Unit Usaha Pengecer Obat Hewan yang memiliki Izin yang diawasi	Unit Usaha	20 Unit Usaha	10	50	pembatasan penjualan obat hewan bagi klinik umum/pet shop	mengusulkan bankeu untuk pembangunan apotek veteriner	
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	4 Laporan	4	100			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	76,92%	88.46	115			
					Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	%	47,81%	51.93	108.62			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian	%	80%	80%	100			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	4 Unit	4	100			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan	Unit	170 Unit	121	71	jumlah Kelembagaan Petani yang di tingkatn	Malakukan sosialisasin dan Evaluasi	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kapasitasnya					kapasitasnya berjumlah 121 unit		
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	4 Unit	4	100			
4	BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	86 Nilai	86	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88 Indeks	87,02	99,09			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bulan	1512 Orang /bulan	1512	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Dokumen	12 Dokumen	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Pelaksanaan Tugas ASN							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pendapatan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu	%	100%	100	100			
				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	10	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6 Laporan	6	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	4 Laporan	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kantor yang Disediakan							
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11 Unit	11	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50 Unit	50	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45 Unit	45	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase izin usaha perdagangan yang di fasilitasi	.%	70.13%	70,13	100			
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	.%	65.85%	65.85	100			
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	243 Dokumen	243	100			
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase TDG	%	100%	100,01	100,01			
				Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen	57 Dokumen	57	100			
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Penerbitan Rekomendasi Perizinan usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Di Kota Samarinda	%	100%	100	100			
				Fasilitasi Penerbitan Surat Izin	Jumlah Surat Izin	Dokumen	24 Dokumen	24	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	26.67%	35.71	133,09	terdapat 5 pasar yang fasilitasnya sudah ditingkatkan	Melakukan Evaluasi Peningkatan Sarana Perdagangan	
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	%	100%	93,33	93,33			
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	14 Unit	14	100			
				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	7 Unit	7	100			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Presentase Retribusi Pengelolaan pasar rakyat	%	100%	115,27	115,27			
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Realisasi Retribusi Pengelolaan Pasar Pada Unit Organisasi	Rp.	Rp. 4255444173	4,708E+09	110.63			
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Realisasi Retribusi Pengelolaan Pasar pada unit organisasi	Rp.	Rp. 1657831027	2,106E+09	127,06			
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	.%	88.24%	88,24	100			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	%	10%	9,24	107,06			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	13 Laporan	13	100			
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kinerja realisasi pupuk	%	75%	42,41	56,55	aturan kewenangan dan intervensi penyaluran pupuk bukan di dinas perdagangan	Melakukan Evaluasi dan Koordinasi kepada beberapa Stekholder	
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	4 Laporan	4	100			
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang	, US\$	110694000,00 US\$	100645418.01	90.92	capaian bersumber dari BPS per november 2025		
				Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Kode HS 2 Digit Ekspor	Kode	9 Kode	16	177.78			
				Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2	100			
				Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	1 Pelaku Usaha	1	100			
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat - alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	.%	87.95%	85,15	96.82			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Permendag No. 26/MDAG/PER/5/2017)	%	75%	87.71	116.95			
				Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	1500 Orang	1621	108,07			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	-	%	0	0	97,03			
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang,	Unit	4616 Unit	4479	97,03			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang							
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Presentase Promosi Produk Lokal yang Di Fasilitas / Dilaksanakan	%	25%	25	100			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang bermitra dengan Pelaku Usaha	Produk	25 Produk	25	100			
				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM	50 UMKM	50	100			
				Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM	50 UMKM	50	100			
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%	4.41%	4,41	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	6 Dokumen	2	33,33			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Industri	Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri							
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Masyarakat							
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	8.05%	85	82,11			
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaku usaha Industri yang diawasi	Pelaku Industri	250 Pelaku Industri	250	100			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	2.64%	1,64	62,12			
				Penyediaan Informasi Industri	Jumlah Informasi	Dokumen	110 Dokumen	87	79,1			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN KINERJA	(%)	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Industri							
				Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



2.4. Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Fungsi lainnya, Unsur Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Selain menjalankan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, berikut juga kami laporkan pencapaian pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum. Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya, unsur kewilayahan dan urusan pemerintahan umum Tahun anggaran 2025 akan disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Unsur Penunjang Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
1	URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	87 Indeks	87.85	100.98			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	73 Nilai	71.75	98,29			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sudah disusun sesuai SOP	%	90%	90	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	74	98.67			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	40 Orang	40	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4 Laporan	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1500 Dokumen	1500	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15 Paket	15	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	44 Unit	44	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	42 Unit	45	107,14			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7 Unit	7	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	204 Unit	204	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase capaian program pembangunan daerah	%	90%	90	100			
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	7 Berita Acara	7	100			
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	2000 Usulan	2000	100			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					(RPJPD/RPJMD/RKPD)							
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	80 Orang	80	100			
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	6 Dokumen	6	100			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	14 Kerja Sama	14	100			
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Perekonomian dan SDA	%	90%	90	100			
					Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	%	90,00%	90	100			
					Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	. %	90.00 %	90	100			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	8 Dokumen	8	100			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					RPJMD dan RKPD)							
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	8 Dokumen	8	100			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Asistensi Penyusunan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	3 Laporan	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur							
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1 Laporan	1	100			
				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0								
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	%	79%	79	100			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	5 Dokumen	7	100			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	6 Dokumen	6	100			
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	8 Dokumen	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbangan Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	4 Dokumen	6	150			
				Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2 Laporan	2	100			
2	URUSAN PENUNJANG KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	75,00 Nilai	71	94.67			
			PERATURAN		Indeks Kepuasan	, Indeks	92,00	94,4	102.61			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Masyarakat (IKM)		Indeks					
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7 Dokumen	7	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	84 Orang/b ulan	84	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	52 Dokumen	52	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100%	100	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	44 Orang	7	15,91			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10 Unit	0	0			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	75 Unit	75	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	72 Unit	72	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72 Unit	72	100			
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	45 Unit	45	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,10%	96,10%	100			
					Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	60,50%	60,50%	100			
					Persentase Penurunan SILPA	%	50,56%	50,56%	100			
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	20,14%	13,81	68,57			
					Persentase Laporan Keuangan tepat waktu	%	100,00%	100	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	40	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang	Dokumen	2 Dokumen	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				PPAS	Disusun							
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Buku Juknis dan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Jenis Buku	5 Jenis Buku	5	100			
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	40 Orang	40	100			
				Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Koordinasi, Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank							
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Buku Laporan Keuangan Pemerintah serta Laporan Pertanggungjawaban dan Penjabaran APBD	Jenis buku Lap.K euangan	3 Jenis buku Lap.K euangan	3	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	200 Orang	200	100			
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	21 Lembaga	21	100			
				Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Beban							
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan	40 Laporan	40	100			
				Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Penyaluran Belanja Transfer Belanja Daerah	%	100%	100	100			
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Kegiatan	2 Kegiatan	2	100			
				Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	200 Orang	200	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	.%	14.15%	14.15%	100			
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pencatatan Aset Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Optimalisasi Penggunaan,	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah							
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	1 Orang	1	100			
				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
3	URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	71,50 Nilai	71,5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	95,00 Indeks	97,6	102,17			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	14 Laporan	14	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	78	104	Penambahan pegawai (CPNS 3 Orang)	Melakukan evaluasi dan penyesuaian target	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	26 Dokumen	24	92,3			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	10 Paket	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Disediakan							
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15 Laporan	15	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5 Unit	5	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	27 Laporan	24	88.89	Realisasi Capaian Berdasarkan Kondisi Real dalam pelaksanaan kegiatan	Melakukan evaluasi dan penyesuaian target	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28 Unit	28	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100%	100	100			
					Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100%	100	100			
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100%	96	96			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	1 Lembaga	1	100			
				Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	100%	97,6	97,6			
				Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	700 Dokumen	700	100			
				Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengembangan Kompetensi ASN	Presentasi ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	100%	100	100			
				Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	20 Orang	20	100			
				Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Center							
				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	5 Orang	3	60	ASN yang mendapat beasiswa untuk kuliah spesialis yang belum selesai tersisa untuk tahun 2025 3 orang	Melakukan evaluasi dan penyesuaian target	
				Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang	100 Orang	100	100			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	95%	97	102,1			
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	9 Orang	9	100			
				Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	150 Orang	150	100			
				Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	30 Orang	21	70	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan disiplin dan di proses berjumlah 21 orang	Melakukan evaluasi dan penyesuaian target	
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	15 Dokumen	15	100			
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		%						
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	100%	100	100			
					Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	100%	0	0			
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	%	100%	100	100			
				Penyusunan Kebijakan	Jumlah Kebijakan Teknis	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun							
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	200 Orang	200	100			
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Presentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar , manajerial dan fungsional	%	100%	71,32	71,32	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang	10 Orang	10	100			
				Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan	Laporan	5 Laporan	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan							
				Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
4	URUSAN PENUNJANG PENDAPATAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85 Indeks	164,09	194			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	65 Nilai	65	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		disusun sesuai SOP							
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	5	125	perbaikan inputan capaian	Telah dilakukan perbaikan E-Dalev, dengan realisasi 0, karena tidak dianggarkan lagi pada anggaran perubahan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	150 Orang/ bulan	145	96.67			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14 Dokumen	14	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	%	100%	100	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	60 Orang	60	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	140 Paket	140	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	3	50	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	14 Paket	14	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	24 Paket	13	54,17	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	70 Laporan	70	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	2 Unit	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Lainnya	Lainnya yang Disediakan							
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100 Unit	48	48	target awal sebanyak 100, tetapi yang terlaksana hanya untuk 48	Karena hanya 2 UPT yang terpenuhi penyediaan mebelnya karena keterbatasan waktu penyelesaian	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	72 Laporan	72	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	20 Laporan	20	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7 Unit	2	28,57	hanya 2 gedung yang dipelihara	melakukan Perencanaan ulang di tahun berikutnya	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	100 Unit	100	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	350 Unit	232	66,29	hanya 232 unit mesin atau peralatan yang dilakukan pemeliharaan sesuai kebutuhan	malakukan evaluasi ulang terhadap penentuan target	
				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	2 Unit	1	50	Pada TA 2025, pemeliharaan aset	melakukan evaluasi ulang	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
										tak berwujud hanya dilaksanakan pada 1 aplikasi karena aplikasi lainnya dikelola secara mandiri oleh Staf IT Bapenda tanpa menggunakan anggaran. Adapun aplikasi yang menggunakan anggaran disebabkan adanya kebutuhan pembelian peta khusus titik reklame (Map Box), sedangkan aplikasi lainnya masih memanfaatkan sisa kuota Map Box TA 2024.	terhadap target dan capaian di tahun depan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7 Unit	7	100			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	49,23%	52,39	106,42	Dikarenakan ada peningkatan pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, baik dari sisi Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah serta penerimaan lainnya yang telah menggunakan transaksi secara nontunai	Malakukan Evaluasi secara berkala	
					Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	%	80,05%	77.62	96.96			
					Persentase Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	30,61%	24.46	79.91	Capaian Sesuai dengan pendapatan yang ada	melakukan evaluasi kembali dalam penetapan target	
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Kenaikan jumlah realisasi pajak daerah	%	32.84%	25.96	78.99	Capaian Sesuai dengan pendapatan yang ada	melakukan evaluasi kembali dalam penetapan target	
				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan	Dokumen	50 Dokumen	50	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Verifikasi							
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	10 Dokumen	0	0	belum selesainya mou dengan kejaksanaan	masih perlu pendalaman bentuk kerjasama dengan kejaksanaan dan bagian kerjasama setda kota samarinda	
				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	24 Dokumen	12	50	masih tedapat beberapa dokument yang belum selesai sampai dengan berakhirnya tahun anggaran	melakukan evaluasi kembali dalam penetapan target	
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan	25 Laporan	25	100			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan	Laporan	10 Laporan	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Daerah	Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah							
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak	2400 Obyek Pajak	1900	79,17	Ada beberapa wilayah yang daerahnya msh hutan seperti Pada Wilayah kel. Bukit Pinang kebanyakan masih hutan sehingga untuk akses dan ketersediaan informasi mengenai jual beli masih minim	melakukan evaluasi kembali dalam penetapan target	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24 Kegiatan	24	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	171 Keluarga	171	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30 Keluarga	30	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	29 Keluarga	29	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	43 Keluarga	43	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29 Keluarga	29	100			
5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi	, NILAI	73,25 NILAI	73,25	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, INDEKS	88,29 INDEKS	88,29	100			
			PERATURAN DAERAH		Indeks Kematangan Organisasi	, INDEKS	42,58 INDEKS	42,58	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Kinerja Program Sekretariat Daerah yang sesuai target	%	80%	80	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu	Berita Acara	2 Berita Acara	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	2 Data	2	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	196 Orang/ bulan	196	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	, NILAI	67,38 NILAI	67,38	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	, NILAI	67,38 NILAI	67,38	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	25 Orang	1	4	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5 Paket	5	100			
				Administrasi Umum	Persentase Pemenuhan	%	51,50%	51,05	100	Realisasi kinerja		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Perangkat Daerah	Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah					yang benar adalah 51,50%		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	45 Paket	44	97,78			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	65 Paket	60	92,31	Sesuai dengan realisasi kinerja. Persentase yang benar adalah 92,31		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	70 Paket	65	92,86			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	30000 Paket	25000	83,33	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50 Paket	48	96			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	500 Laporan	450	90			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	%	51,50%	51,50	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	24 Unit	22	91,67			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4 Unit	4	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	62 Unit	50	80,65	Rasionalisasi Anggaran	Melaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Anggaran yang tersedia	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	3	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Pelayanan Bagian Umum	, NILAI	67,38 NILAI	89,18	132			
				Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	62 Laporan	62	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	65 Laporan	60	92,31			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	40 Laporan	40	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	%	51,50%	51,05	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	85 Unit	70	82			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	3	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	16 Unit	10	62,05	Jumlah Kendaraan yang di Pelihara Pada Tahun 2025 sebanyak 10 Unit	Melakukan Penyesuaian Target Kembali di tahun selanjutnya	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10 Unit	9	90			
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3 Unit	2	66.67	Sesuai dengan realisasi kinerja		
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2	100			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2	100			
				Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah	%	51,50%	51,05	100			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12 Paket	11	91.67			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	12 Paket	11	91.67			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	12 Paket	11	91.67			
				Penataan Organisasi	Nilai Evaluasi Kelembagaan	, NILAI	79,28 NILAI	79,28	100			
					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Indeks Kepuasan Masyarakat >= 88.31 (Sangat Baik)	%	97,50%	97,05	100			
					Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi AKIP >= 70 (BB)	%	87,50%	87,05	100			
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	, NILAI	50,5 NILAI	50,05	100			
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi	Laporan	12 Laporan	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Pimpinan							
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	, NILAI	3,5 NILAI	3,05	100			
					Persentase Perjanjian Kerja Sama yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	76,92%	76,92	100			
					Persentase Tindak Lanjut Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat Hasil Fasilitasi	--	--	80	100			
					Indeks Reformasi Hukum	, INDEKS	80,3 INDEKS	80,03	100			
				Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	0,57%	0,57	100			
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi	%	--	11	100			
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	8 Dokumen	8	100			
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pelaksanaan Kebijakan,	Jumlah Dokumen Hasil	Dokumen	3 Dokumen	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	50 Keluarga	50	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga	50 Keluarga	50	100			
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi	%	98%	98	100			
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	500 Dokumen	651	130,02			
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	24 Kasus	24	100			
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	500 Dokumen	641	128,02			
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kerjasama Daerah	%	74,42%	74,42	100			
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	24 Dokumen	24	100			
				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	4 Laporan	4	100			
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Tata Kelola Pengadaan	INDEKS	70 INDEKS	70	100			
					Persentase Capaian Target Program Prioritas Pembangunan Daerah	%	95%	95	100			
					Tingkat Inflasi	< %	< 3 %	3	100			
					Persentase tindaklanjut	%	80%	80	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA) Hasil Fasilitas Tingkat Inflasi							
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kegiatan Fasilitas Kebijakan Urusan Perekonomian yang ditindaklanjuti	%	93%	93	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Fisik Yang Berkualitas	%	95%	95	100			
				Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	%	91%	91	100			
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	10 Orang	10	100			
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Urusan Sumber Daya Alam (SDA)	%	80%	80	100			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pertambangan dan Lingkungan Hidup	dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian							
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
6	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DPRD	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	90,50 Indeks	91,02	100.77			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	90,00 Nilai	90	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	63	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12 Dokumen	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0 Orang	0	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	100%	92.81	92.81			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3 Paket	3	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	9 Paket	9	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	99.91	99.91			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7 Unit	7	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	5 Unit	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	135 Unit	135	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Paket	3 Paket	3	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	98,5	98,5			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	99.70	99,07			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	35 Unit	35	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	8 Unit	8	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	163 Unit	163	100			
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	10 Unit	10	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	2 Unit	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Dipelihara/Direhabilitasi							
				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat pelayanan keuangan dan kesejahteraan sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	45	100			
				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	45 Orang	33	73,33	tidak semua anggota dewan menggunakan fasilitas mcu	dilakukan sosialisasi pelaksanaan medical checkup agar bisa dimanfaatkan	
				Layanan Administrasi DPRD	Persentase kegiatan DPRD yang difasilitasi sesuai SOP	%	100%	94,06	94,06			
				Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100,00%	100	100			
					Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100%	100	100			
					Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	75,00%	50	66.67	Efisiensi Anggaran	Mekaksanakan Kegiatan Sesuai dengan Pagu Yang tersedia	
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penyelenggaraan Kajian	Jumlah Dokumen Kajian	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Perundang-Undangan	Perundang-Undangan							
				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh	Dokumen	1 Dokumen	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan							
				Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	27 Orang	23	85,19	mengikuti kebutuhan tenaga pakar/ahli untuk setiap AKD	telah disosialisasikan sesuai dengan pp 18 tahun 2017 tentang hak hak keuangan anggota dprd	
				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	8 Orang	8	100			
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat sebagai Bahan Masukan bagi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3 Dokumen	3	100			
				Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang	15750 Orang	33552	213,03	diberikan keterangan terkait capaian melebihi target		
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					DPRD							
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
7	FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAH	INSPEKTORAT DAERAH	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	83,25 Nilai	83,25	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	88,00 Indeks	88	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	%	100%	100	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	17 Dokumen	17	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun dan Dilaporkan Secara Tepat Waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan	Jumlah Orang yang	Orang/b ulan	69 Orang/b	69	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		ulan					
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14 Dokumen	14	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah Yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	%	100%	91.78	91.78			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	6 Orang	0	0	Tidak ada list bimtek pada tahun 2025 terkait bimtek pengawasan dari Pusat	Melakukan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Bimtek di Tahun 2026 Terkuat Pengawasan	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2 Paket	2	100			
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	63 Orang	63	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	%	100%	100	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	Dokumen	4 Dokumen	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30 Laporan	30	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	16 Unit	16	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	2	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9 Unit	9	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Dinas Jabatan								
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7 Unit	7	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20 Unit	20	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10	10	100			
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penyelesaian Kegiatan Assurance Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) Persentase Penyelesaian Pemantauan dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal (APIP)	%	100%	100	100			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	175 Laporan	175	100			
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	54 Laporan	54	100			
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	3 Laporan	3	100			
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	%	40	40	100			
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pemeriksaan Khusus Yang Selesai	%	100%	100	100			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Manajemen Risiko	%	75%	75	100			
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase Penyelesaian Kegiatan Consulting Sesuai Dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	%	100%	100	100			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah	40 perangkat daerah	40	100			
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	40 perangkat daerah	40	100			
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4 Kegiatan	4	100			
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	9 perangkat daerah	9	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	51 Unit	51	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	20 Unit	20	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	83 Unit	83	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Kegiatan	307 Kegiatan	307	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	161 Keluarga	161	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	42 Keluarga	42	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	38 Keluarga	38	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	38 Keluarga	38	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	35 Keluarga	35	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	51 Keluarga	51	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	83 Keluarga	83	100			



Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Unsur Kewilayahan Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
1	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN PALARAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	88,50 Indeks	97,13	109.75			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	81,25 Nilai	80,25	98.77			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	.%	83.4%	83,04	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11 Dokumen	11	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	.%	95.75%	95.75	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78 Orang/bulan	78	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan	.%	95.75%	95	99,22			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kepegawaian							
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	10	100			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang	10	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	.%	95.75%	95.75	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6 Paket	6	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	1	8,33	Jumlah laporan sesuai dengan kondisi di tahun 2025 yaitu 1 laporan	Melakukan evaluasi dan perbaikan di target sesuai dengan kondisi pelaksanaan Kegiatan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7 Laporan	7	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	.%	95.75%	95.75	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	9 Unit	9	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	6 Unit	6	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	.%	95.75%	95.75	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	.%	95.75%	95.75	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	28 Unit	28	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5 Unit	5	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	115 Unit	115	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor	Unit	6 Unit	6	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	.%	90.25%	90,05	99.78			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	85%	85	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	340 Kegiatan	340	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13	100			
				Pembangunan Sarana	Jumlah Sarana dan	Unit	32 Unit	32	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dan Prasarana Kelurahan	Prasarana Kelurahan yang Terbangun							
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	47 Unit	47	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	25 Unit	25	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	52 Unit	52	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	32 Unit	32	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	14 Unit	14	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24 Kegiatan	24	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	170 Keluarga	170	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	14 Keluarga	14	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	47 Keluarga	47	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	25 Keluarga	25	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	52 Keluarga	52	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	32 Keluarga	32	100			
2	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	94,47 Indeks	94,45	99.98			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	, Nilai	77,30 Nilai	77,25	99.94			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		(AKIP) Perangkat Daerah							
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	.%	96.5%	96,05	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	.%	96.5%	96,05	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	78 Orang/bulan	78	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	.%	96.5%	96,05	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	5 Orang	5	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	.%	96.5%	96,05	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	0	0			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Paket	1 Paket	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	72 Dokumen	72	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	.%	96.5%	96,05	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	10 Unit	8	80			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10 Unit	10	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	.%	96.5%	96,05	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0 Laporan	0	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	.%	96.5%	96,05	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Unit	14 Unit	14	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya							
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6 Unit	6	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	150 Unit	150	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	.%	92.75%	92.75	100			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana,	%	85%	85	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				KELURAHAN	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui							
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	249 Kegiatan	249	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	10	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	50 Unit	50	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	37 Unit	37	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	32 Unit	32	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	46 Unit	46	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	33 Unit	33	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4 Laporan	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24 Kegiatan	24	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	125 Keluarga	125	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	41 Keluarga	41	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	37 Keluarga	37	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	32 Keluarga	32	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	46 Keluarga	46	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	33 Keluarga	33	100			
3	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	72,75 Nilai	90,23	124,03			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025										
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	86,30 Indeks	90,08	105,21			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun sesuai SOP	.%	95.5%	95,5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11 Dokumen	11	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	95.5%	95.5%	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	91 Orang/bulan	91	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	14 Dokumen	14	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	%	95.5%	95.5%	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	Dokumen	84 Dokumen	84	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	.%	97.25%	97.25%	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	.%	98.15%	98.15%	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	.%	97.5%	97.5%	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27 Unit	27	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7 Unit	7	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Lapangan								
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	91 Unit	91	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9 Unit	9	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	.%	91.05%	90	98.85			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	14 Dokumen	14	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	95%	95%	105,26			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	141 Kegiatan	141	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga K emasyarak atan	13 Lembaga K emasyarak atan	13	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	22 Unit	22	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	21 Unit	21	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	36 Unit	36	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	19 Unit	19	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	13 Unit	13	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	8 Unit	8	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5 Laporan	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24 Kegiatan	24	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	171 Keluarga	171	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30 Keluarga	30	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29 Keluarga	29	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	43 Keluarga	43	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29 Keluarga	29	100			
4	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	PERATURAN DAERAH KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	84	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	%	78.94%	78.94	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	.%	83.5%	83,05	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	131 Orang/ bulan	98	74.81			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	78 Dokumen	78	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	0	0	terjadi keterlambatan dalam proses administrasi dan verifikasi dokumen pendukung kegiatan	- penyusunan timeline dan SOP yang lebih ketat - peningkatan koordinasi internal	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	.%	83.5%	80,08	96.77			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12 Orang	4	33,33	jumlah Orang Yang Mengikut bimtek Per undang-undangan berjumlah 4 orang	Melakukan Penataan Terhadap Kegiatan bimtek yang akan di ikuti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	.%	83.5%	83.05	100			
				Penyediaan Komponen	Jumlah Paket Komponen	Paket	4 Paket	4	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9 Paket	9	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	11 Laporan	11	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	.%	83.5%	83,05	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	50 Unit	50	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36	100			
				Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	83.5%	83,05	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	6 Unit	6	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9 Unit	9	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	104 Unit	104	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	,	86%	86	100			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	18 Dokumen	18	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Tingkat Kecamatan							
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	.%	94.35%	94,35	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	249 Kegiatan	249	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	31 Unit	31	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	33 Unit	33	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	53 Unit	53	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	13 Unit	13	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	43 Unit	43	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	12 Unit	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					yang Terbangun							
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	54 Unit	54	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	6 Unit	6	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	24 Kegiatan	24	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	245 Keluarga	245	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	31 Keluarga	30	96.77			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	33 Keluarga	33	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	53 Keluarga	53	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	13 Keluarga	13	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	43 Keluarga	43	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	12 Keluarga	12	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	54 Keluarga	54	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	6 Keluarga	6	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				dan Kelompok Masyarakat	Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
5	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SAMARINDA ULU	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	89,00 Indeks	91.63	102.96			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	76,00 Nilai	79	103.95			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	92%	92	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	92%	92	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	141 Orang/bulan	141	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	92%	74	80,43			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	Orang	10 Orang	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Peraturan Perundang-Undangan							
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang	0	0	Tidak adanya informasi/ pemanggilan ASN untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dari BKPSDM	Melakukan Penataan Terhadap Kegiatan bimtek yang akan di ikuti	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	92%	92	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	92%	92	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8 Unit	8	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4 Unit	4	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	92%	92	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	92%	92	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	41 Unit	41	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10 Unit	10	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 Unit	40	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	9 Unit	9	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	Persentase Layanan Masyarakat Yang	%	92%	92	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselesaikan							
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	18 Dokumen	18	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana , Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	100%	100	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan , Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	869 kegiatan	869	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang	Lembaga Kemasyarakatan	18 Lembaga Kemasyarakatan	18	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	80 Unit	80	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	423 Unit	423	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	40 Unit	40	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	152 Unit	152	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	395 Unit	395	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	326 Unit	326	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	59 Unit	59	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	210 Unit	210	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	339 Unit	339	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	6	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	5	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	8 Laporan	8	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	9 kegiatan	9	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	321 Keluarga	321	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	30 Keluarga	30	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	61 Keluarga	61	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	40 Keluarga	40	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan	Keluarga	56 Keluarga	56	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	34 Keluarga	34	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	38 Keluarga	38	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	40 Keluarga	40	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	21 Keluarga	21	100			
6	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	90,00 Indeks	86,7	96,3			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	80,00 Nilai	79,5	99,8			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	90%	90%	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	90%	88%	97,4			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	90 Orang/bulan	83	92,22	1. terdapat PNS yang pensiun. 2. Target dilebihkan untuk antisipasi perpindahan PNS dari luar yang sudah mengajukan permohonan ke kecamatan		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7 Laporan	7	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	90%	90	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12 Orang	12	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	90%	90%	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	Paket	1 Paket	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan							
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	90%	82%	91,66			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7 Unit	7	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	3 Unit	3	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	1	50	Barang yang direncanakan tidak dibeli karena barang yang tersedia tidak sesuai spek	Melakukan Perecaan dan Koordinasi ,Komunikasi Terhadap Spesifikasi Barang yang di rencanakan di tahun berikutnya	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP	%	90%	90%	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	90%	90%	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14 Unit	14	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	8	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10 Unit	10	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	286 Unit	286	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	8 Unit	8	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang terselesaikan	.%	92.75%	92.75	100			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti	Dokumen	16 Dokumen	16	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	90%	90	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana, kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Kegiatan	335 Kegiatan	335	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	42 Unit	42	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	38 Unit	38	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	38 Unit	38	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	35 Unit	35	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	51 Unit	51	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	20 Unit	20	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	83 Unit	83	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	8	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Kegiatan	307 Kegiatan	307	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	161 Keluarga	161	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	42 Keluarga	42	100			
				Peningkatan Kesadaran	Jumlah Keluarga yang	Keluarga	38 Keluarga	38	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	38 Keluarga	38	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	35 Keluarga	35	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	51 Keluarga	51	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	83 Keluarga	83	100			
7	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SUNGAI PINANG	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	, Nilai	76,00 Nilai	271,15	356.78			
			PERATURAN		Indeks Kepuasan	, Indeks	81,55 Indeks	97,15	119,13			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Masyarakat (IKM)							
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	%	85%	101	118.82			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	%	90%	90%	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70 Orang/bulan	70	100			
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	70 Orang/bulan	70	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	11 Laporan	11	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang Mendapat Pelayanan Kepegawaian	%	90%	90	100			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	3 Orang	3	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	90%	90	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	90%	100	111,11			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7 Unit	7	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	90%	90	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					yang Disediakan							
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	%	90%	90%	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	14 Unit	14	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14 Unit	14	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6 Unit	6	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	%	91%	915	100			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	3	150			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	90%	90%	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	248 kegiatan	247	99,06			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	39 Unit	43	110,26			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	114 Unit	113	99,12			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	29 Unit	29	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	23 Unit	23	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	43 Unit	43	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	10	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	6 kegiatan	6	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	248 Keluarga	248	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	39 Keluarga	39	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	114 Keluarga	114	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29 Keluarga	29	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	23 Keluarga	23	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	43 Keluarga	43	100			
8	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SAMBUTAN	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai Indeks	62,00 Nilai Indeks	81.75	131.85			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	88,00 Indeks	97,33	110,06			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	62%	81.75	131.85			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9 Dokumen	9	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/b ulan	84 Orang/b ulan	84	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	30 Dokumen	30	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan	%	90%	90	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Kepegawaian							
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12 Orang	12	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	80%	80	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	50 Paket	50	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	72 Dokumen	0	0	Kegiatan tidak terlaksana karena adanya sisa anggaran pergeseran pada pagu perubahan	Target disesuaikan pada tahun berikutnya dengan memperhitungkan kebutuhan dokumen (bahan bacaan) di Kecamatan Sambutan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8 Laporan	8	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	90%	90	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	7 Unit	7	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan							
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	6 Unit	6	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	3	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36 Laporan	36	100			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19 Unit	19	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1 Unit	1	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	31 Unit	31	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	12 Unit	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Dipelihara/Direhabilitasi							
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat Yang Terselesaikan	.%	84.5%	80	94.67			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	72%	72	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	111 Kegiatan	111	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Masyarakat	13 Lembaga Masyarakat	13	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	25 Unit	25	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	40 Unit	40	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	27 Unit	27	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	10 Unit	10	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	9 Unit	9	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan	111 kegiatan	111	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	111 Keluarga	111	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	25 Keluarga	25	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	40 Keluarga	40	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	27 Keluarga	27	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	10 Keluarga	10	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	9 Keluarga	9	100			
9	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	90,00 Indeks	91.68	101.87			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN		Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	68,15 Nilai	68,15 Nilai	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN 2025									
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai SOP	%	91%	91	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11 Dokumen	11	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun dan Dilaporkan secara Tepat Waktu	%	91%	91	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	86 Orang/bulan	86	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terpenuhi	%	91%	91	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	100			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	91%	92	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	7 Unit	7	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi sesuai SOP	%	91%	96	105,49			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	%	91%	91	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18 Unit	18	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7 Unit	7	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 Unit	38	95			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terealisasi	.%	92.5%	91.73	99,17			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	Dokumen	12 Dokumen	12	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas	Dokumen	2 Dokumen	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	.%	75.75%	97.68	128.95			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	230 Kegiatan	227	98,07			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	14 Lembaga Kemasyarakatan	14	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	29 Unit	29	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	25 Unit	25	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	14 Unit	14	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	19 Unit	19	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	37 Unit	35	94,59			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan	Jumlah Pokmas dan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas /	2	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Masyarakat di Kelurahan	Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Ormas					
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	1	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kegiatan	42 Kegiatan	41	97.62			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	125 Keluarga	118	94,04			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29 Keluarga	29	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	25 Keluarga	25	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	14 Keluarga	14	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga	Keluarga	19 Keluarga	19	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	25 Keluarga	25	100			
10	URUSAN KEWILAYAHAN	KECAMATAN LOAJANAN ILIR	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Perangkat Daerah	, Nilai	72,75 Nilai	72,5	99.66			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	, Indeks	90,00 Indeks	88.72	98,58			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	90%	89	98.89			
			PERATURAN	Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen	Dokumen	8 Dokumen	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah							
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	90%	90	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65 Orang/bulan	65	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1 Dokumen	1	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Laporan	7 Laporan	7	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
					Tahun SKPD							
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	90%	84	93,33			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	8 Orang	7	87,05	anggaran tidak mencukupi untuk 8 orang	Kegiatan menyesuaikan Pagu Yang tersedia	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	90%	87,04	97,11			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3 Paket	3	100			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4 Paket	4	100			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	8 Dokumen	0	0	Kegiatan tersebut tidak di laksanakan	Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan pada tahun Selanjutnya	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1 Laporan	0	0	Kegiatan tersebut tidak di laksanakan	Melakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan Kegiatan pada tahun Selanjutnya	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	90%	90	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	5 Unit	5	100			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1 Unit	1	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4 Unit	4	100			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Terpenuhi Sesuai SOP	%	90%	87	96.67			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	90%	90	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	20 Unit	20	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 Unit	2	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40 Unit	40	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	6 Unit	6	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Masyarakat yang Terselesaikan	,	92%	88,01	95.76			
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	Dokumen	12 Dokumen	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindak Lanjuti							
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2 Dokumen	2	100			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Disetujui	%	85%	85	108,24			
					Persentase Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%	100%	100	100			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	142 Kegiatan	142	100			
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan	13 Lembaga Kemasyarakatan	13	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	30 Unit	30	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	20 Unit	20	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	20 Unit	20	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	43 Unit	43	100			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	29 Unit	29	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	2	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	4	100			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3	100			
				Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Kegiatan	142 Kegiatan	142	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	142 Keluarga	142	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga,	Keluarga	30 Keluarga	30	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Masyarakat	Warga, dan Kelompok Masyarakat							
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	20 Keluarga	20	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	43 Keluarga	43	100			
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	29 Keluarga	29	100			



Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Program Dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
1	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN UMUM	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	80 Nilai	88	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76.8 Nilai	76.08	100			
			PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP	%	100%	100	100			
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5 Dokumen	5	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
			ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025									
			PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 81 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1	100			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu	%	100,00%	100	100			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	65 Orang/bulan	65	100			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	40 Dokumen	40	100			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	5	100			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian	%	100%	100	100			
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	Paket	100 Paket	60	60	Jumlah Kebutuhan pakaian Dinas di	Melakukan Penetapan Target	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Kelengkapannya	Kelengkapan					seuaikan dengan Jumlah Kebutuhan yang ada di satuan Perangkat kerja	Sesuai dengan jumlah Kebutuhan	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20 Orang	20	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	%	6	6	100			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12 Paket	12	100			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5 Paket	2	40	Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga di seuaikan dengan Jumlah Kebutuhan yang ada di satuan Perangkat kerja	Melakukan Penetapan Target Sesuai dengan jumlah Kebutuhan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5 Paket	5	100			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12 Paket	7	59	Jumlah Kebutuhan Paket Barang cetakan di seuaikan dengan Jumlah Kebutuhan yang ada di satuan Perangkat kerja	Melakukan Penetapan Target Sesuai dengan jumlah Kebutuhan	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4 Laporan	4	100			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30 Laporan	26	90			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100%	100	100			
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	2 Unit	2	100			
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	12 Unit	12	100			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP	%	100%	100	100			
				Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan	Laporan	36 Laporan	36	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan							
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	100			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	10 Laporan	10	100			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100%	90%	90%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18 Unit	18	100			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12 Unit	12	100			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1 Unit	1	100			
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100%	100	100			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Orang	1200 Orang	1200	100			
				Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang	40 Orang	40	100			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	800 Orang	800	100			
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Laporan	8 Laporan	8	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Sejarah Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							
				Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen	4 Dokumen	4	100			
				Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Orang	300 Orang	300	100			
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100%	100	100			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Orang	1200 Orang	1200	100			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen	10 Dokumen	10	100			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2500 Orang	2500	100			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika	Laporan	12 Laporan	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah							
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100%	100	100			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang dibina	Ormas	45 Ormas	45	100			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	600 Orang	600	100			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	50 Laporan	50	100			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	100%	100	100			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	45 Laporan	45	100			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya	Orang	600 Orang	600	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah							
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	30 Laporan	30	100			
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100%	100	100			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani	Kasus	24 Kasus	24	100			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1500 Orang	1500	100			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	14 Laporan	14	100			
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum	Dokumen	12 Dokumen	12	100			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	NAMA PROGRAM /KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJAUAN REKOMENDASI
				Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota							



3. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Secara umum Pemerintah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang terdiri dari 4 Tujuan, 12 Sasaran dan 23 Indikator Kinerja yang capaian kinerjanya dapat dilihat sebagaimana tabel 3.3. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui kegiatan Perangkat Daerah diatas.



	Tujuan 1
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	82,32	82,81	75,90

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
83,25	83,53	100,34	84,50

❖ Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas pembangunan manusia dari dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pada Tahun 2025, realisasi IPM Kota Samarinda tercatat sebesar 83,53, melampaui target yang ditetapkan sebesar 83,25, sehingga capaian kinerja mencapai 100,34%. Dengan demikian, indikator kinerja ini dinyatakan tercapai dan melampaui target.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 82,32, terjadi peningkatan sebesar 1,21 poin, yang menunjukkan adanya tren perbaikan kualitas pembangunan manusia secara konsisten. Selain itu, capaian IPM Kota Samarinda berada di atas capaian nasional Tahun 2025 sebesar 75,90, yang mencerminkan daya saing daerah yang relatif baik dalam konteks pembangunan manusia pada tingkat nasional.

KALIMANTAN TIMUR	78,83
Paser	74,70
Kutai Barat	74,50
Kutai Kartanegara	75,91
Kutai Timur	75,53
Berau	76,66
Penajam Paser Utara	73,90
Mahakam Ulu	70,35
Kota Balikpapan	82,24
Kota Samarinda	82,81
Kota Bontang	82,42

Gambar 3. 1 IPM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Kota Samarinda juga memiliki IPM tertinggi diantara Kab/Kota bahkan Provinsi Kalimantan Timur, jika dibandingkan dengan Kota lainnya seperti Kota Balikpapan dengan nilai IPM 82,24 dan Kota Bontang dengan nilai IPM 82,42.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan yang berdampak pada perbaikan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; membaiknya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup; serta stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Di samping itu, sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan manusia serta penguatan intervensi penanggulangan kemiskinan berbasis data turut mendukung capaian tersebut.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IPM pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kota Samarinda akan terus memperkuat kebijakan dan program yang berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, pengurangan angka putus sekolah, serta pengembangan ekonomi masyarakat yang inklusif. Pendekatan intervensi berbasis wilayah dan kelompok rentan juga akan dioptimalkan guna memastikan pemerataan hasil pembangunan manusia secara berkelanjutan.



Secara keseluruhan, capaian indikator Indeks Pembangunan Manusia pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia telah berada pada jalur yang tepat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Samarinda.



Tujuan 2

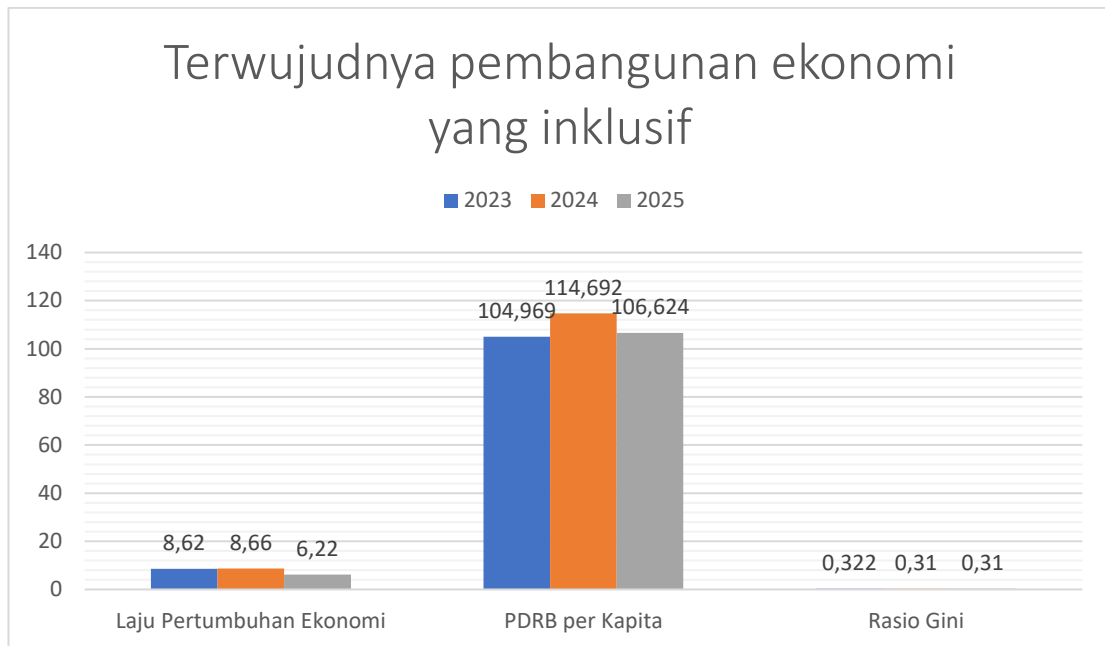
Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	8,62	8,66	5,11
PDRB per kapita	Juta Rupiah	104,969	114,692	83,747
Rasio Gini	Indeks	0,322	0,310	0,363

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
6,25 – 8,00	6,22	99,52	8,00 – 9,00 %
118,41	123,222	104,06	190,70
0,325 – 0,330	0,310	105,45	0,276 – 0,285

Pencapaian Tujuan 2 diukur melalui tiga indikator utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per Kapita, dan Rasio Gini. Ketiga indikator tersebut merepresentasikan aspek pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan, serta pemerataan hasil pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian Tujuan 2 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan satu indikator (Rasio Gini) telah melampaui target, sementara dua indikator (Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita) masih perlu penguatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah telah berjalan dengan baik dan relatif inklusif, namun peningkatan nilai tambah ekonomi dan produktivitas masyarakat masih perlu terus dioptimalkan.



Gambar 3. 2 Pembangunan Ekonomi Inklusif

❖ Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mencapai **6,22%**, sedikit di bawah target minimal **6,25%**. Selisihnya sangat kecil (0,03%), sehingga secara umum kinerja ini dapat dikatakan **hampir memenuhi target**.

Dibandingkan tahun 2023 (8,62%) dan 2024 (8,66%), memang terjadi perlambatan. Namun capaian 6,22% masih **lebih tinggi dari pertumbuhan nasional tahun 2025 sebesar 5,11%**, yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Samarinda masih relatif baik dan lebih kuat dibanding rata-rata nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang positif ini didorong oleh meningkatnya aktivitas sektor perdagangan, jasa, dan konstruksi sebagai sektor dominan dalam struktur ekonomi daerah. Selain itu, terjaganya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, serta dukungan kebijakan daerah dalam mendorong pertumbuhan UMKM turut memberikan kontribusi terhadap penguatan ekonomi lokal.

Selama periode 2020-2025, laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda cenderung meningkat. Pada tahun 2020 kondisi perekonomian memburuk akibat wabah Covid-19 hingga berkontraksi sebesar 0,99 persen. Namun, sejak tahun 2021 perekonomian berangsur membaik hingga pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda mencapai 8,66 persen, atau mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan pada tahun tahun sebelumnya.

Lapangan Usaha/Industry		2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,74	1,55	1,52	1,46	1,44
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	12,51	15,66	10,66	8,40	7,29
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	7,47	6,92	6,84	6,88	7,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,16	0,14	0,16	0,17	0,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,17	0,15	0,15	0,16	0,16
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	20,75	20,53	23,10	23,96	22,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	16,62	16,07	16,85	17,07	18,51
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,40	7,54	8,22	8,72	8,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	3,92	3,79	3,99	4,16	4,57
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,78	3,52	3,53	3,47	3,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	7,32	7,54	8,20	8,13	7,36
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	2,27	2,03	2,01	1,94	1,99

Gambar 3. 3 Pertumbuhan Ekonomi



Lapangan Usaha/Industry	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,76	0,69	0,70	0,71	0,75
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	6,08	5,66	5,70	6,28	6,57
P Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,34	3,79	3,74	3,73	3,86
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,87	1,71	1,74	1,72	1,90
R,S,T,U Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	2,84	2,71	2,89	3,04	3,35
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Pengeluaran <i>Expenditure</i>	2021	2022	2023	2024*	2025**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga <i>Household Consumption Expenditure</i>	32.216,17	36.529,54	40.319,16	43.356,63	46.357,71
Pengeluaran Konsumsi LNPR <i>NPISH Consumption Expenditure</i>	737,59	809,67	895,41	1.034,99	1.056,04
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah <i>Government Consumption Expenditure</i>	10.093,03	10.945,12	15.867,39	17.578,09	16.772,21
Pembentukan Modal Tetap Bruto <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	29.452,61	35.336,39	41.887,29	47.101,04	51.643,45
Perubahan Inventori <i>Changes in Inventories</i>	156,13	181,97	150,03	154,80	83,47
Net Ekspor Barang dan Jasa <i>Net Exports of Goods and Services</i>	-1.484,98	-449,00	-9.829,83	-10.810,68	-9.288,07
Produk Domestik Regional Bruto <i>Gross Regional Domestic Product</i>	71.170,55	83.353,69	89.289,45	98.414,87	106.624,81

Gambar 3. 4 Pertumbuhan Ekonomi



Di tahun 2025, perekonomian di Kota Samarinda didominasi oleh lapangan usaha konstruksi. Nilai PDRB menurut harga berlaku yang dihasilkan oleh lapangan usaha tersebut sebesar 23,95 triliun rupiah dan berkontribusi terhadap total PDRB sebesar 22,46 persen. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Kota Samarinda tercatat sebesar 6,22 persen, menurun 2,44 poin dibandingkan tahun 2024. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya.

Jika dilihat berdasarkan komponen pengeluaran, pada tahun 2025, produk yang dihasilkan di Kota Samarinda Sebagian besar digunakan untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yakni sebesar 48,43 persen dan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga yakni sebesar 43,47 persen.

Ke depan, Pemerintah Kota Samarinda akan terus mendorong diversifikasi struktur ekonomi, meningkatkan kemudahan investasi, serta memperkuat daya saing sektor riil agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga secara berkelanjutan dan inklusif.

Faktor Pendukung

1. **Aktivitas ekonomi daerah tetap berjalan stabil**, terutama dari sektor perdagangan dan jasa.
2. **Belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat** masih menjadi penggerak utama ekonomi.
3. **Posisi Samarinda sebagai kota penyangga IKN** ikut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi.

Faktor Penghambat

1. **Perlambatan ekonomi nasional** yang berdampak pada menurunnya daya beli dan investasi.
2. **Penurunan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya (base effect)** karena tahun 2023–2024 tumbuh sangat tinggi.



3. **Ketergantungan pada sektor tertentu**, sehingga ketika sektor tersebut melambat, pertumbuhan ikut terdampak.

Pemerintah Kota Samarinda akan melaksanakan beberapa strategi dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. **Mendorong diversifikasi ekonomi**, agar tidak terlalu bergantung pada satu atau dua sektor utama.
2. **Memperkuat UMKM dan ekonomi kreatif** untuk meningkatkan daya tahan ekonomi lokal.
3. **Meningkatkan iklim investasi**, terutama sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan.
4. **Mengoptimalkan peluang dari pembangunan IKN**, agar dampaknya lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik. Ke depan, diperlukan penguatan strategi agar pertumbuhan dapat kembali berada dalam kisaran target dan lebih berkelanjutan.

❖ PDRB per Kapita

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Ribu Rp)
Paser	196.723**
Kutai Barat	229.647**
Kutai Kartanegara	249.111**
Kutai Timur	325.075**
Berau	193.391**
Penajam Paser Utara	63.809**
Mahakam Ulu	118.650**
Kota Balikpapan	233.398**
Kota Samarinda	123.222**
Kota Bontang	371.195**

Gambar 3. 5 PDRB per Kapita Tahun 2025

Sumber data : Rilis Web BPS 06 Maret 2026

Pada tahun 2025, PDRB per kapita Kota Samarinda terealisasi sebesar **Rp123,222 juta**, dari target sebesar **Rp118,41 juta**. Dengan capaian kinerja **104,06%**, indikator ini **telah memenuhi target** yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, PDRB per kapita tahun 2023 sebesar Rp104,969 juta dan tahun 2024 sebesar Rp114,692 juta. Artinya, secara tren jangka menengah terjadi peningkatan dari 2023 ke 2024, namun pada 2025 mengalami penurunan. Meski demikian, nilai PDRB per kapita Samarinda masih **lebih tinggi dibandingkan capaian nasional tahun 2025 sebesar Rp83,747 juta**, sehingga posisi ekonomi masyarakat Samarinda relatif masih lebih baik dibanding rata-rata nasional.

Adapun beberapa poin faktor pendukung dan penghambat PDRB Kota Samarinda yaitu:

Faktor Pendukung

1. **Struktur ekonomi daerah yang cukup kuat**, terutama sektor perdagangan dan jasa.
2. **Aktivitas investasi dan pembangunan yang tetap berjalan.**
3. **Posisi strategis Samarinda sebagai pusat kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur.**

Faktor Penghambat

1. **Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2025**, yang berdampak langsung pada pendapatan per kapita.
2. **Pertumbuhan jumlah penduduk**, yang dapat menekan nilai PDRB per kapita meskipun ekonomi tetap tumbuh.
3. **Belum optimalnya sektor bernilai tambah tinggi**, sehingga peningkatan pendapatan belum maksimal.

Strategi Ke Depan

1. **Mendorong sektor industri pengolahan dan jasa bernilai tambah tinggi** agar pendapatan masyarakat meningkat.
2. **Memperkuat UMKM dan kewirausahaan**, sehingga distribusi pendapatan lebih merata.
3. **Meningkatkan kualitas SDM**, melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
4. **Mendorong investasi produktif**, khususnya yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

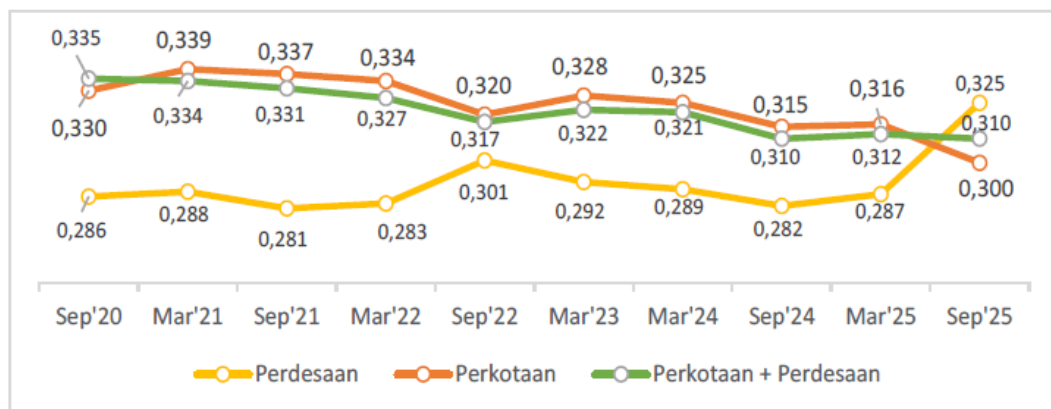
Secara umum, meskipun belum mencapai target, PDRB per kapita Kota Samarinda masih berada di atas rata-rata nasional. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah ekonomi agar pendapatan masyarakat dapat tumbuh lebih optimal.

❖ Rasio Gini

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan

agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Realisasi Rasio Gini Tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencakup Kota Samarinda tercatat sebesar 0,310, lebih baik dari target yang ditetapkan pada kisaran 0,325–0,330, dengan capaian kinerja sebesar 104,62%. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 0,363, yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Samarinda relatif lebih rendah dan mencerminkan arah pembangunan yang semakin inklusif.



Gambar 3. 6 Rasio Gini Kota Samarinda Tahun 2025

Sumber data: Publikasi BPS 06 Februari 2026

Keberhasilan dalam menjaga tingkat ketimpangan dipengaruhi oleh efektivitas program penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan intervensi perlindungan sosial berbasis data turut mendukung distribusi pendapatan yang lebih merata.

Ke depan, strategi yang akan ditempuh antara lain memperluas akses ekonomi bagi kelompok rentan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan antar wilayah guna menjaga tren penurunan ketimpangan secara berkelanjutan.



	Tujuan 3
	Terwujudnya Kota Layak Huni yang Aman, Bersih dengan Infrastruktur yang Berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)	Indeks	71,8	N/A	N/A

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
73,69	73,64	99,93	85,00

❖ Indeks Kota Layak Huni (Liveable City Index)

Perkembangan kota di Indonesia dalam dua dekade terakhir berjalan sangat cepat dan membawa konsekuensi kompleks terhadap kualitas hidup penduduk. Kota tidak lagi hanya dipahami sebagai ruang ekonomi, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menuntut kenyamanan, keamanan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, infrastruktur menjadi tulang punggung utama yang menentukan sejauh mana sebuah kota mampu menyediakan layanan dasar yang memadai, merata, dan berkualitas bagi warganya.

Pemerintah pusat dan daerah mulai mendorong pengukuran kualitas infrastruktur secara lebih sistematis melalui pengembangan berbagai indeks, salah satunya Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur atau Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Indeks ini dipakai sebagai instrumen evaluasi untuk menilai sejauh mana pembangunan infrastruktur benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. IKLI tidak hanya melihat ketersediaan fisik sarana dan prasarana, tetapi juga menilai kualitas, kemudahan akses, kesesuaian dengan

kebutuhan, serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Pada saat yang sama, wacana tentang kota layak huni semakin menguat. Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia memperkenalkan Indeks Kota Layak Huni (IKLH) dan Most Liveable City Index (MLCI) sebagai alat untuk membaca persepsi warga atas kelayakhunian kota tempat tinggal mereka. Kota layak huni tidak hanya dilihat dari aspek fisik seperti jaringan jalan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, keamanan, kebersihan, interaksi sosial, serta peluang pengembangan diri. Konsep ini mendorong pemerintah kota agar tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, tetapi juga memperhatikan pengalaman hidup sehari-hari warga kota.

Kota Samarinda memegang posisi strategis karena menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur sekaligus salah satu kota penyangga bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Posisi ini menghadirkan peluang sekaligus tekanan besar terhadap kapasitas infrastruktur dan kualitas layanan kota. Berbagai dokumen perencanaan daerah dan studi kebijakan menunjukkan bahwa Samarinda menghadapi kombinasi persoalan klasik dan baru, mulai dari banjir, kemacetan, keterbatasan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah, hingga kerentanan terhadap perubahan iklim. Pemerintah Kota Samarinda merespons melalui integrasi isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan, termasuk dalam penyusunan rencana aksi kota berketahanan iklim dan peta jalan riset dan inovasi daerah.

Dari sisi kualitas hidup, indikator makro menunjukkan bahwa Samarinda termasuk kota dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Kalimantan Timur, dengan nilai sekitar 80 dan berada dalam kategori “sangat tinggi”.



Berdasarkan hasil survei Indeks Kota Layak Huni (IKLH) di Kota Samarinda tahun ini, diperoleh skor rata-rata sebesar 73,69, yang masuk dalam kategori "layak huni" sesuai klasifikasi dari Kementerian PUPR. Secara umum, hasil ini mencerminkan bahwa masyarakat menilai Samarinda telah menyediakan infrastruktur dasar, layanan publik, dan kondisi lingkungan yang cukup memadai untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai indeks tertinggi tercatat pada aspek layanan darurat, keamanan lingkungan, dan keterjangkauan air bersih dan listrik, yang masing-masing menunjukkan skor di atas 75. Namun, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan performa di bawah rata-rata, seperti kemudahan akses dan kualitas transportasi umum (nilai berkisar 62–66) serta sistem drainase dan pengendalian banjir (nilai terendah 61,90). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Samarinda tergolong layak huni, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam aspek konektivitas, pengelolaan air hujan, dan infrastruktur penunjang transportasi massal. Secara ekonomi, kondisi ini mencerminkan bahwa pembangunan fisik dan layanan sosial di Samarinda telah memberikan manfaat langsung terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, tetapi optimalisasi pada sektor transportasi dan pengelolaan lingkungan akan semakin mendorong efisiensi ekonomi kota di masa depan.

Selain itu, data indeks menunjukkan bahwa aspek akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan memperoleh skor relatif tinggi, umumnya berada di atas angka 75. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi Pemerintah Kota Samarinda dalam sektor sosial telah cukup berhasil menjangkau kebutuhan masyarakat secara merata. Keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses serta memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas jangka panjang. Selain itu, persepsi positif masyarakat terhadap layanan kebersihan, penataan ruang, dan keterlibatan dalam proses pembangunan turut memperkuat posisi Samarinda sebagai kota yang

responsif terhadap kebutuhan warganya. Namun demikian, masih diperlukan inovasi kebijakan yang lebih inklusif agar pelayanan publik dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan demografis kota.

Dari perspektif ekonomi regional, capaian IKLH ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur dan layanan publik memiliki keterkaitan yang erat dengan daya saing kota serta efisiensi aktivitas ekonomi. Pembangunan jalan, penyediaan air bersih, dan jaringan listrik yang mendapat skor tinggi berkontribusi signifikan terhadap penurunan biaya logistik dan peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Namun, skor rendah pada aspek transportasi umum dan drainase menjadi hambatan potensial terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun hasil analisis indeks kota layak huni di Kota Samarinda sebagai berikut:

Indeks Kota Layak Huni di Kota Samarinda dapat dianalisis melalui berbagai indikator persepsi masyarakat terhadap aspek lingkungan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Berdasarkan hasil evaluasi menurut persepsi masyarakat Kota Samarinda yang terbesar di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa, indikator kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal, menunjukkan skor hasil rekapitulasi dengan rata-rata sebesar 3,88. Skor hasil rekapitulasi ini mengindikasikan bahwa mayoritas warga merasa lingkungan tempat tinggal mereka cukup sehat dan layak huni. Dalam perspektif lingkungan, hal ini mencerminkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan kualitas udara yang cukup baik di sebagian besar wilayah kota, meskipun terdapat ketimpangan pada kawasan-kawasan tertentu yang mencatat skor di bawah rata-rata.

Sementara itu, untuk indikator kebersihan udara, skor rata-rata sebesar 3,58 menunjukkan bahwa kualitas udara di Kota Samarinda masih menjadi tantangan, terutama di kawasan-kawasan padat aktivitas seperti Simpang Pasir dan Loa Bakung. Dalam konteks ekonomi perkotaan, hal ini menunjukkan adanya eksternalitas negatif

dari aktivitas transportasi, industri, atau pertambangan yang belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah daerah perlu melakukan investasi pada ruang terbuka hijau dan pengawasan emisi sebagai bentuk intervensi yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, indikator kebersihan sungai mendapatkan skor rata-rata 3,42, yang tergolong rendah. Ini menandakan bahwa masyarakat masih belum puas terhadap kondisi sungai sebagai bagian dari ekosistem kota. Dalam kerangka ekonomi sumber daya, sungai yang tercemar dapat menimbulkan kerugian ekonomi akibat menurunnya kualitas air baku, meningkatnya risiko banjir, dan hilangnya fungsi sosial serta estetika kota. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sungai secara terintegrasi - meliputi pengendalian limbah domestik dan industri serta edukasi masyarakat - menjadi krusial untuk ditingkatkan.

Pada indikator kebersihan jalan, skor 3,57 merepresentasikan kondisi jalan yang secara umum cukup bersih, namun masih menyisakan disparitas antarwilayah. Kualitas kebersihan jalan berkontribusi langsung terhadap kenyamanan dan kelancaran aktivitas masyarakat serta mencerminkan efektivitas sistem pengelolaan kebersihan perkotaan. Dari sisi ekonomi, hal ini juga berhubungan erat dengan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi logistik kota. Maka, kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada peningkatan anggaran kebersihan dan penguatan kerja sama dengan masyarakat melalui program padat karya lingkungan.

Terakhir, pada indikator kemudahan mendapatkan pekerjaan, skor rata-rata 3,21 mencerminkan tantangan struktural dalam pasar kerja lokal. Skor ini mengindikasikan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja produktif. Dalam perspektif ekonomi tenaga kerja, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dan permintaan dari sektor-sektor unggulan kota. Oleh karena itu, strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasional dan

pengembangan kewirausahaan menjadi langkah penting dalam mendorong inklusivitas pasar kerja di Samarinda.

Lebih lanjut, persepsi masyarakat mengenai kemudahan dalam mengembangkan usaha di Kota Samarinda tercermin dari skor rata-rata sebesar 3,47. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden menganggap kota ini relatif kondusif untuk berwirausaha, masih terdapat kendala struktural dan regulatif yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Selanjutnya, dari aspek keterjangkauan biaya hidup, skor indeks mencapai 3,67, yang dapat dikatakan relatif tinggi dibandingkan indikator lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, warga Kota Samarinda masih merasa biaya kebutuhan dasar seperti pangan, transportasi, perumahan, dan utilitas masih dalam batas wajar. Dalam perspektif ekonomi makro daerah, keterjangkauan biaya hidup menjadi faktor penting dalam menarik migrasi tenaga kerja, menurunkan tekanan inflasi rumah tangga, serta menjaga stabilitas sosial.

No	Pertanyaan	Indeks Kota Layak Huni		
		score	Indeks	Keterangan
59	Saya merasa kesehatan lingkungan disekitar tempat tinggal saya baik	3.87	77.38	
60	Saya puas dengan kebersihan udara di Kota Samarinda (bebas dari polusi)	3.57	71.43	
61	Saya puas dengan kebersihan sungai di Kota Samarinda	3.42	68.46	
62	Saya puas dengan kebersihan jalan di Kota Samarinda	3.57	71.34	
63	Saya merasa mudah mendapatkan pekerjaan di Kota Samarinda	3.24	64.71	
64	Saya merasa mudah mengembangkan usaha di Kota Samarinda	3.47	69.45	
65	Saya merasa biaya hidup di Kota Samarinda terjangkau	3.62	72.45	
66	Saya merasa kebutuhan pokok (sembako) di Kota Samarinda mudah didapat	3.79	75.73	
67	Saya merasa makanan bergizi di Kota Samarinda mudah didapat dan cukup	3.78	75.60	
68	Pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Samarinda membantu saya produktif	3.79	75.75	
69	Pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Samarinda mempermudah aktivitas saya	3.85	76.92	
70	Pembangunan dan perbaikan jalan di Kota Samarinda membuat wilayah saya menjadi ramai	3.80	75.99	
71	Saya merasa aman berjalan kaki di Kota Samarinda pada siang dan malam hari	3.83	76.66	
72	Saya merasa mudah mendapatkan bantuan atau pelayanan keamanan dari polisi saat membutuhkan	3.69	73.72	
73	Saya puas dengan kualitas pelayanan keamanan dari Kepolisian	3.62	72.49	
74	Saya puas dengan layanan ketertiban dari Satpol PP (Polisi Pamong Praja)	3.63	72.64	
75	Saya merasa aman dari gangguan atau tindak kejahatan saat bekerja atau beraktivitas	3.78	75.58	
76	Saya merasa situasi di Kota Samarinda tetap aman dan terkendali saat ada demo atau unjuk rasa	3.81	76.27	
77	Saya merasa bebas menyampaikan pendapat atau hak politik di Kota Samarinda	3.71	74.21	
78	Saya puas dengan kesiapan Pemerintah Kota Samarinda saat terjadi bencana atau wabah	3.43	68.64	

No	Pertanyaan	Indeks Kota Layak Huni		
		score	Indeks	Keterangan
79	Saya puas dengan pelayanan dan bantuan dari Pemerintah Kota Samarinda setelah terjadi bencana	3.35	67.05	
80	Saya merasa aman dari resiko kecelakaan lalu lintas di Kota Samarinda	3.58	71.61	
81	Saya merasa aman dari resiko kejahatan di tempat saya tinggal	3.81	76.12	
82	Saya merasa lingkungan tempat tinggal saya aman dari perkelahian atau konflik	3.87	77.50	
83	Saya merasa Pemkot Samarinda melibatkan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan	3.90	77.90	
84	Saya merasa aman menggunakan internet atau media sosial di Kota Samarinda	3.91	78.25	
85	Saya merasa layanan darurat (seperti ambulans atau pemadam kebakaran) mudah diakses saat diperlukan	3.90	78.02	
86	Saya merasa mudah mendapatkan pelayanan kesehatan di Kota Samarinda	3.85	76.93	
87	Saya merasa puas dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan di Kota Samarinda	3.77	75.47	
88	Saya puas dengan layanan pengelolaan sampah, seperti tempat pembangunan semenatara (TPS) dan pengambilan sampah	3.65	72.95	
89	Saya puas dengan kondisi pasar tradisional di Kota Samarinda	3.80	76.02	
90	Saya puas dengan kondisi pasar modern di Kota Samarinda	3.81	76.28	
91	Saya puas dengan peraturan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Samarinda	3.71	74.24	
92	Saya merasa mudah mendapatkan pelayanan pendidikan di Kota Samarinda	3.77	75.48	
93	Saya puas dengan layanan pendidikan di Kota Samarinda	3.86	77.19	
94	Saya puas dengan layanan kegiatan keagamaan di Kota Samarinda	3.96	79.21	
95	Taman-taman di Kota Samarinda mudah digunakan untuk semua orang, termasuk anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas	3.95	79.06	
96	Saya merasa mudah mendapatkan dan menggunakan fasilitas olahraga di Kota Samarinda	3.51	70.29	
97	Saya puas mendapatkan dan menggunakan fasilitas olahraga di Kota Samarinda	3.51	70.23	
98	Saya puas dengan fasilitas seni dan budaya di Kota Samarinda, seperti gedung kesenian	3.54	70.73	
99	Saya menikmati acara seni dan budaya yang diselenggarakan di Kota Samarinda	3.65	73.05	

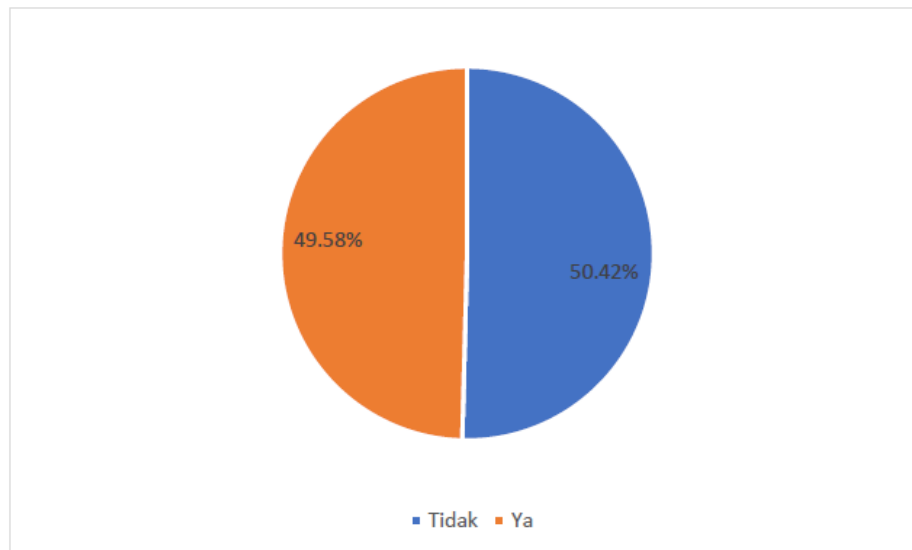
No	Pertanyaan	Indeks Kota Layak Huni		
		score	Indeks	Keterangan
162	Saya merasa prosedur dan administrasi memiliki rumah di Kota Samarinda itu mudah	3.51	70.11	
163	Saya puas dengan kualitas pelayanan administrasi pemerintah (khusus kota samarinda)	3.61	72.14	
164	Saya merasa mudah untuk proses perizinan pengelolaan dan pemanfaatan tanah di Kota Samarinda (BPN/ATR)	3.49	69.79	
165	Saya merasa proses perizinan pemanfaatan ruang di Kota Samarinda itu mudah	3.56	71.17	
166	Saya puas dengan kepastian hukum kepemilikan tanah di Kota Samarinda	3.56	71.20	
167	Saya puas dengan kesesuaian guna lahan dengan aturan tata ruang di Kota Samarinda	3.56	71.11	
168	Pemkot Samarinda membuka ruang bagi saya untuk terlibat dalam pembangunan (memberi saran dan keluhan)	3.59	71.78	
169	Layanan listrik sudah tersedia dengan baik di Kota Samarinda	3.88	77.57	
170	Penyediaan listrik di Kota Samarinda sudah sesuai kebutuhan masyarakat	3.89	77.88	
Indeks Kota Layak Huni		3.68	73.64	Layak Huni

Gambar 3. 7 Laporan Expose IKLI dan IKLH Kota Samarinda

Sumber Data: Laporan Expose IKLI dan IKLH oleh BRIDA Provinsi Kalimantan Timur dan Bapperida Kota Samarinda – Juni 2025

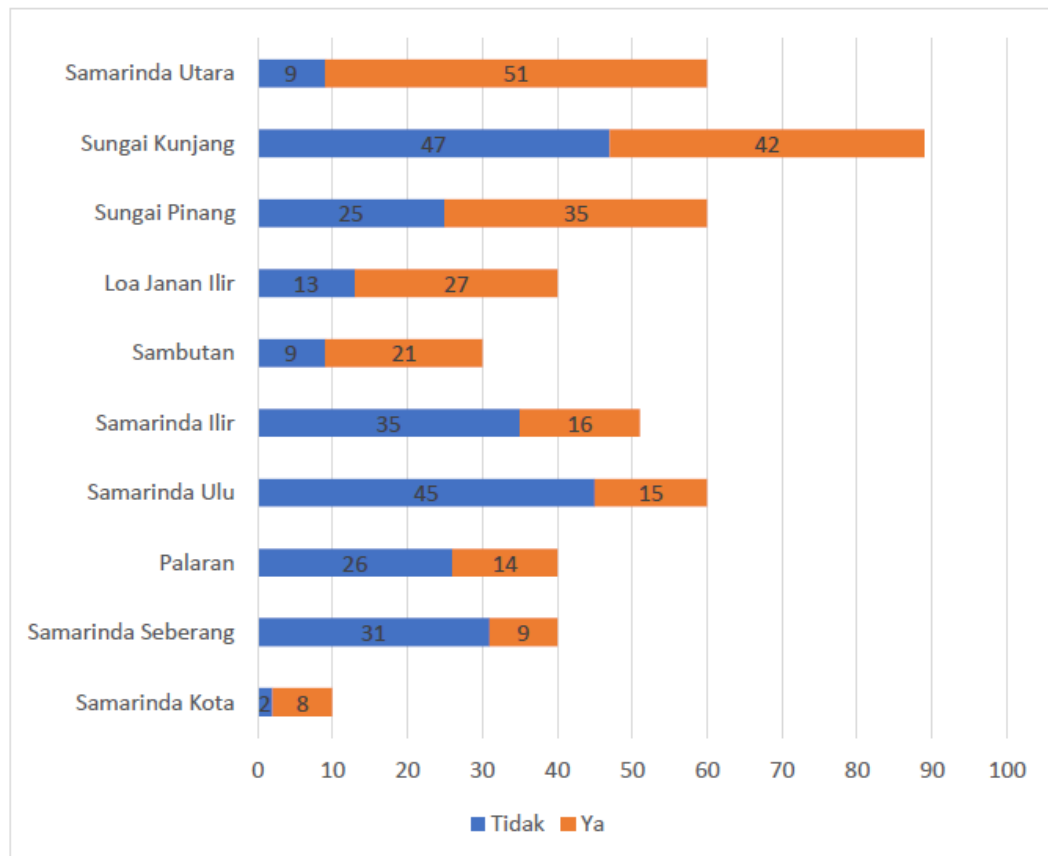
Beberapa catatan terkait IKLH ini yaitu salah satu aspek penting dalam penilaian Indeks Kota Layak Huni (IKLH) adalah ketahanan terhadap bencana, khususnya bencana banjir yang kerap terjadi di kawasan perkotaan. Berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat, diperoleh data bahwa sebesar 50.48% responden menyatakan tidak pernah mengalami banjir, sementara 49.58% lainnya mengaku pernah terdampak banjir di lingkungan tempat tinggalnya di Kota Samarinda. Temuan ini menunjukkan bahwa separuh masyarakat masih menghadapi risiko banjir, yang mencerminkan tantangan dalam aspek tata kelola drainase, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengelolaan ruang terbuka hijau. Dari perspektif kelayakan huni, kondisi ini menempatkan

Samarinda dalam posisi yang masih perlu perbaikan khususnya dalam mewujudkan kota yang aman dan nyaman dari bencana.



Gambar 3. 8 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH)

Namun demikian, tingkat persepsi “tidak pernah banjir” yang mencapai 50.42% juga dapat diartikan sebagai indikasi positif bahwa sejumlah wilayah telah mengalami peningkatan dalam infrastruktur pengendalian banjir. Keberhasilan ini mencerminkan adanya upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas kota dalam menghadapi risiko bencana, sejalan dengan prinsip pembangunan kota berketahanan dan berkelanjutan. Dengan demikian, data ini menjadi masukan penting dalam evaluasi kebijakan tata ruang dan pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda sebagai bagian dari peningkatan skor IKLH, khususnya dalam indikator keamanan dan kenyamanan lingkungan.



Gambar 3. 9 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH)

Berdasarkan data persepsi masyarakat mengenai pengalaman banjir di Kota Samarinda berdasarkan tingkat kecamatan, terlihat bahwa beberapa wilayah memiliki tingkat kejadian banjir yang cukup tinggi. Kecamatan Sungai Kunjang mencatat angka tertinggi dengan 42 responden menyatakan pernah mengalami banjir, disusul oleh Samarinda Utara dengan 41 responden, serta Sungai Pinang dengan 35 responden. Sementara itu, kecamatan seperti Samarinda Kota, Samarinda Seberang, dan Palaran relatif memiliki angka yang lebih rendah, dengan masing-masing hanya 9, 14, dan 14 responden yang pernah mengalami banjir. Melihat jumlah responden yang pernah mengalami banjir, kecamatan yang paling berpotensi banjir adalah Sungai Kunjang, Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Loa Janan Ilir (27 responden). Semakin banyak warga yang melaporkan pernah banjir, semakin tinggi indikasi kerentanan historis wilayah tersebut terhadap banjir, yang biasanya berkorelasi

dengan kombinasi faktor seperti kepadatan permukiman di dataran rendah, kapasitas dan pemeliharaan drainase, kedekatan dengan badan air utama, serta perubahan tataguna lahan yang menurunkan kapasitas resapan. Dari sudut pandang ekonomi publik, empat kecamatan teratas seperti Sungai Kunjang, Samarinda Utara, Sungai Pinang, dan Loa Janan Ilir sebaiknya diprioritaskan dalam pengembangan dan peningkatan infrastruktur pengendali banjir seperti normalisasi sungai, kolam retensi, sumur resapan massal, dan rehabilitasi drainase mikro.

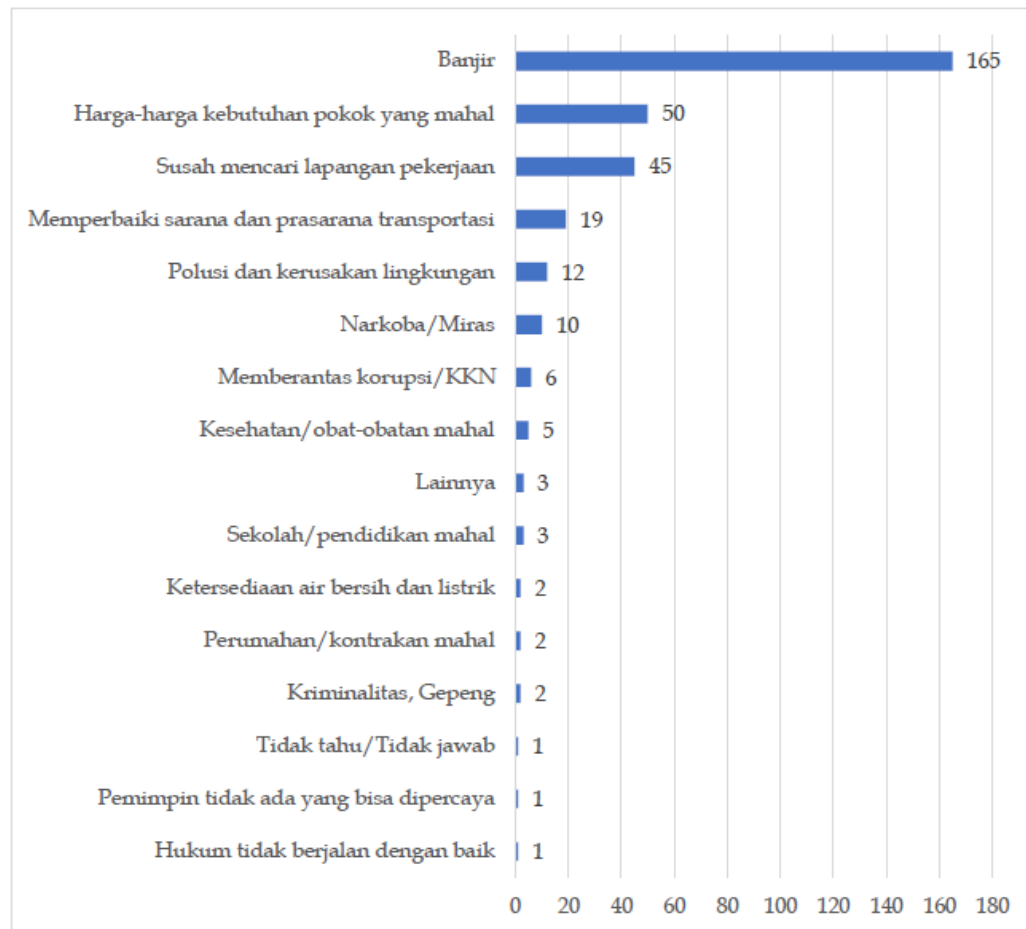
Beberapa rekomendasi terkait capaian hasil IKLH adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survei persepsi masyarakat, banjir merupakan masalah utama dengan 165 responden (47,83%) yang menilai isu ini sebagai prioritas mendesak bagi Pemerintah Kota Samarinda. Permasalahan banjir tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi, menurunkan produktivitas, serta menimbulkan kerugian sosial-ekonomi. Oleh karena itu, strategi penanganan banjir perlu difokuskan pada perbaikan dan peningkatan sistem drainase kota, termasuk normalisasi saluran air, pembangunan kolam retensi, pembersihan saluran secara rutin, serta pengawasan terhadap tata guna lahan agar tidak terjadi penyumbatan aliran air akibat pembangunan yang tidak terkendali.
2. Masalah kedua yang paling menonjol adalah harga kebutuhan pokok yang mahal (50 responden atau 14,49%), yang di antaranya disebabkan oleh keterbatasan pasokan LPG yang sulit didapatkan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya persoalan pada rantai distribusi dan stabilitas pasokan energi rumah tangga. Pemerintah Kota Samarinda dapat mengambil langkah strategis dengan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan ketersediaan pasokan yang merata di



seluruh wilayah, serta mengawasi praktik penimbunan atau spekulasi harga. Di sisi lain, program pengendalian harga bahan pangan pokok melalui penyediaan pasar induk, operasi pasar murah, dan dukungan logistik dari daerah produsen juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

3. Selain itu, sulitnya mencari lapangan pekerjaan (13,04%) dan masalah transportasi (5,51%) turut mempengaruhi kondisi ekonomi lokal. Kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, pelatihan keterampilan, serta pengembangan UMKM perlu diperkuat. Dengan prioritas utama pada peningkatan drainase untuk mengurangi banjir dan stabilisasi distribusi LPG serta harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Samarinda dapat mengambil langkah yang lebih terarah dan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.



Gambar 3. 10 Diagram Indeks Kota Layak Huni (IKLH)

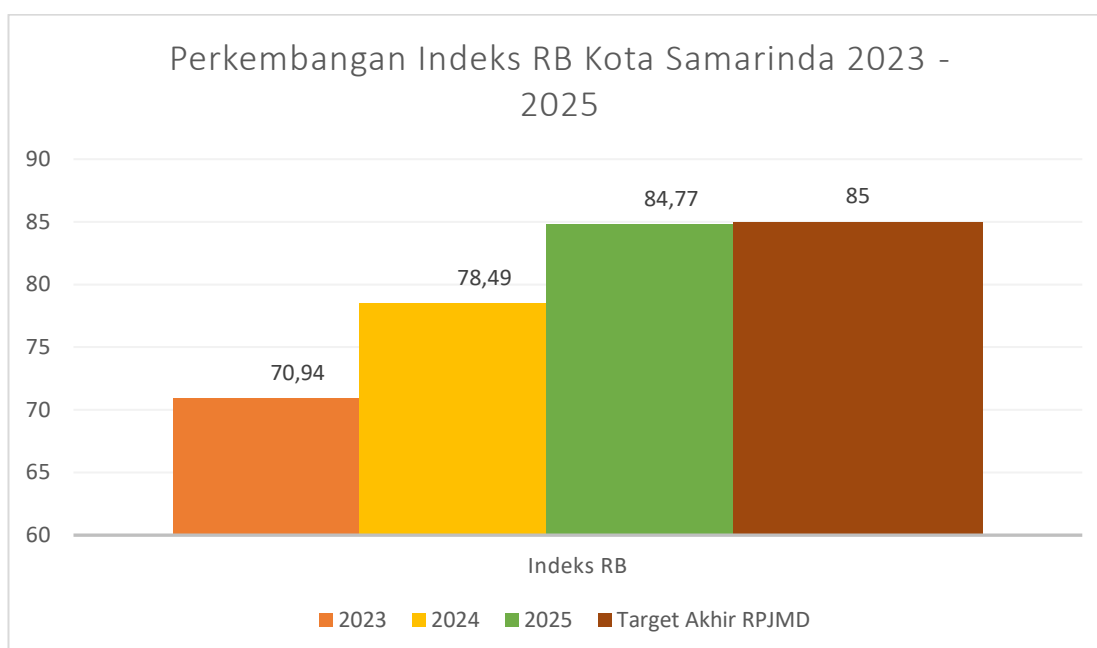


	Tujuan 4
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Provinsi Tahun 2025
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,94	78,49	88,07

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
80	84,77	105,96	85,00

❖ Indeks Reformasi Birokrasi



Gambar 3. 11 Diagram Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator yang mengukur tingkat kematangan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan melayani. Sejalan dengan kebijakan nasional, pengukuran Reformasi Birokrasi saat ini menggunakan pendekatan RB General dan RB Tematik,

yang menekankan tidak hanya pada tata kelola internal organisasi, tetapi juga pada dampak reformasi terhadap penyelesaian isu-isu strategis pembangunan.

Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Samarinda (data sementara) mencapai 84,77, melampaui target yang ditetapkan sebesar 80, dengan capaian kinerja sebesar 105,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar 70,94 dan Tahun 2024 sebesar 78,49, capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dan konsisten. Nilai ini juga telah mendekati target akhir RPJMD sebesar 85,00.

Peningkatan capaian tersebut mencerminkan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi baik pada aspek RB General, yang meliputi perbaikan tata kelola internal, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun pada aspek RB Tematik, yang berfokus pada kontribusi reformasi birokrasi terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, pengendalian inflasi, dan digitalisasi pemerintahan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh meningkatnya konsistensi integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja; penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); serta komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi secara sistematis.

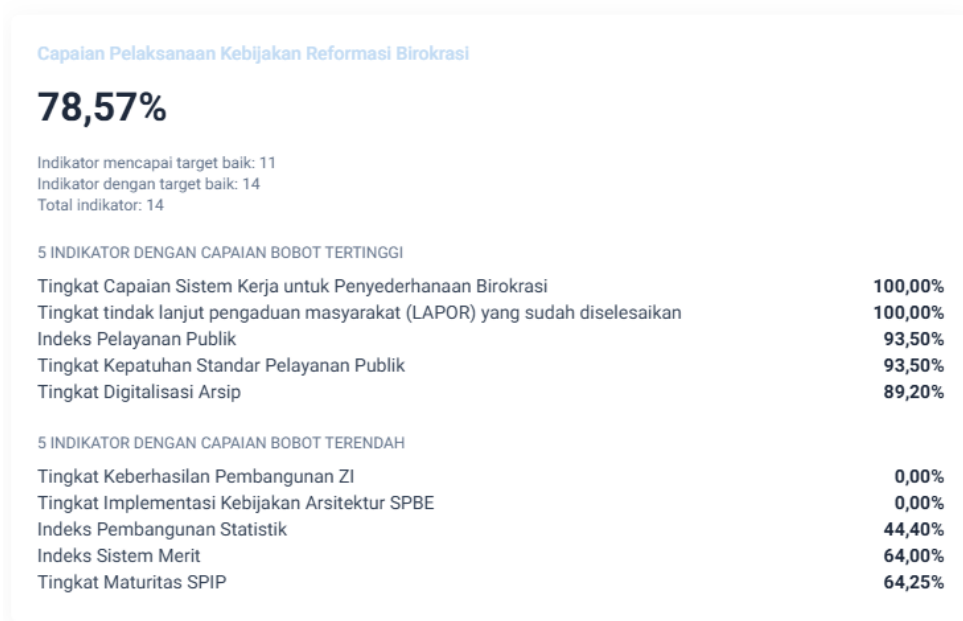
Meskipun capaian telah melampaui target tahunan, tantangan ke depan adalah memastikan keberlanjutan Reformasi Birokrasi agar tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator evaluasi, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda akan terus memperkuat

implementasi Reformasi Birokrasi Berdampak, meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur, memperkuat manajemen risiko dan pengawasan internal, serta mengintegrasikan agenda digitalisasi pemerintahan secara lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Samarinda semakin baik dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir RPJMD serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan utama pada RB General yang terdapat catatan dengan capaian bobot 0 seperti Pembangunan Zona Integritas dan Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE.

Persentase Indikator Mencapai Target Baik



Gambar 3. 12 Persentase Capaian Pelaksanaan Kebijakan Reformasi Birokrasi

Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi**57,14%**

Indikator mencapai target baik: 4
Indikator dengan target baik: 7
Total indikator: 8

3 INDIKATOR DENGAN CAPAIAN BOBOT TERTINGGI

Opini BPK	100,00%
Capaian IKU Makro	96,50%
Survei Kepuasan Masyarakat	90,38%

3 INDIKATOR DENGAN CAPAIAN BOBOT TERENDAH

Capaian IKU Non Makro	53,33%
Indeks BerAkhlaq	74,75%
Survei Penilaian Integritas	75,90%

Gambar 3. 13 Persentase Capaian Sasaran Strategis Reformasi Birokrasi

Untuk pelaksanaan Zona Integritas, tahun ini Inspektorat akan mengadakan bimbingan dan pendampingan langsung kepada perangkat daerah/unit kerja yang berpotensi untuk diusulkan mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) seperti RSUD I.A Moeis. Sedangkan untuk Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Kota Samarinda akan berfokus pada penyelesaian dan penyempurnaan arsitektur SPBE mengikuti periode RPJMD 2025-2029.

RB Tematik**Capaian Indikator Dampak**

Total Score Index **7,70**
Total Bobot **15,00**
Persentase **51,33%**
Rata-rata Nasional **42,12%**

Strategi Pembangunan

Total Score Index **2,21**
Total Bobot **5,00**
Persentase **44,20%**
Rata-rata Nasional **47,14%**

Gambar 3. 14 Persentase Capaian Indikator Dampak dan Strategi Pembangunan

Sedangkan untuk RB Tematik, Kota Samarinda masih diatas rata-rata nasional. Beberapa catatan pada tema-tema yang tertuang pada peta jalan Reformasi Birokrasi Nasional telah ditindaklanjuti seperti:



1. Membuat crosscutting/pemetaan stakeholder/pentahelix yang terlibat;
2. Melaksanakan koordinasi secara berkala dan pemantauan bersama APIP untuk menjaga capaian rencana aksi dan output RB Tematik; dan
3. Melakukan expose berkala kepada PD/Stakeholder dalam rangka penyampaian progress rencana aksi reformasi birokrasi yang telah dan akan dilaksanakan pada setiap triwulan.

Tabel 3. 10 Data Indeks RB Provinsi dan Kab/Kota Se-Kalimantan Timur Tahun 2025

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Kalimantan Timur	88,07	A
2	Bontang	85,37	A
3	Kutai Kartanegara	79,83	BB
4	Berau	76,45	BB
5	Kutai Timur	74,38	BB
6	Penajam Paser Utara	70,36	BB
7	Paser	80,91	A
8	Balikpapan	83,08	A
9	Samarinda	83,27	A
10	Mahakam Ulu	58,18	CC
11	Kutai Barat	65,26	B



	Sasaran 1
	Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun	Tahun	10,93	10,95	9,07

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
11,4	11,04	96,84	12,05

❖ **Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun**

Capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 tahun Kota Samarinda pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,04 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2024 (10,95 tahun) dan 2023 (10,93 tahun). Capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam peningkatan akses dan partisipasi pendidikan masyarakat. Namun demikian, realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 11,40 tahun, dengan selisih 0,36 tahun. Hal ini mengindikasikan masih adanya penduduk usia di atas 15 tahun yang belum menuntaskan pendidikan pada jenjang menengah atau sederajat.

CAPAIAN KINERJA			
Instansi	Kota	Provinsi	Nasional
Balikpapan	11,04	10,10	9,07
Penajam Paser Utara	8,72		

Secara komparatif, capaian Rata-Rata Lama Sekolah Kota Samarinda masih sedikit lebih rendah dibandingkan Kota Balikpapan, namun lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara yang mencapai 8,72 tahun, serta berada di atas rata-

rata Provinsi dan Nasional. Kondisi tersebut menempatkan Kota Samarinda pada kategori capaian kinerja yang cukup baik di tingkat regional, namun masih memerlukan penguatan pelaksanaan program, khususnya pendidikan kesetaraan dan upaya penurunan angka putus sekolah.

a. Indikator Kinerja Tersebut Tercapai karena Faktor

1. **Meningkatnya akses layanan pendidikan**, didukung oleh pembangunan ruang kelas baru serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
2. **Ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang cukup dan merata**, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan optimal di seluruh satuan pendidikan.
3. **Dukungan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik**, melalui penyediaan biaya personil dan pengadaan perlengkapan peserta didik, yang berkontribusi pada penurunan risiko putus sekolah.
4. **Pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan yang konsisten dan berkelanjutan**, sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
5. **Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan**, yang mendorong keberlanjutan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.

b. Solusi/Strategi untuk Meningkatkan/Mempertahankan Pencapaian Kinerja

1. Penguatan akses pendidikan bagi penduduk usia di atas 15 tahun, khususnya melalui perluasan layanan pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal.
2. Pencegahan angka putus sekolah dengan memperkuat program bantuan pendidikan, pendampingan peserta didik berisiko putus



sekolah, serta kerja sama dengan sekolah dan pemangku kepentingan terkait.

3. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan manajemen satuan pendidikan.
4. Sinergi lintas sektor dan pemangku kepentingan, termasuk dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan masyarakat, dalam mendukung keberlanjutan pendidikan bagi kelompok usia produktif.
5. Optimalisasi pemanfaatan data pendidikan, untuk mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat dengan rata-rata lama sekolah rendah sebagai dasar penetapan kebijakan dan program intervensi yang lebih tepat sasaran.
6. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, mengenai pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

c. Program/Kegiatan yang Mendukung Tercapainya Kinerja

1. **Pembangunan Ruang Kelas Baru**, guna meningkatkan daya tampung satuan pendidikan serta mendukung pemerataan akses layanan pendidikan.
2. **Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah**, untuk menunjang proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan sesuai standar pelayanan pendidikan.
3. **Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar**, sebagai bentuk dukungan pembiayaan pendidikan guna mencegah terjadinya putus sekolah.
4. **Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik**, untuk memastikan seluruh peserta didik memiliki sarana belajar yang memadai dan mendukung keberlanjutan pendidikan.



Upaya/Strategi Perbaikan

Strategi yang dilakukan antara lain penguatan pendidikan kesetaraan, pencegahan putus sekolah, peningkatan kualitas layanan pendidikan, penguatan sinergi lintas sektor, dan optimalisasi pemanfaatan data pendidikan.

REALISASI ANGGARAN		
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR		
Pembangunan Ruang Kelas Baru	40.517.877.000,00	27.433.215.164,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.110.986.700,00	724.477.500,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	774.938.750,00	721.500.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	449.950.000,00	448.332.000,00
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA		
Pembangunan Ruang Kelas Baru	50.997.400.000,00	50.063.426.418,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.492.607.400,00	6.243.487.383,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	544.917.500,00	544.892.500,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.676.458.950,00	1.194.791.789,00
PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)		
Pembangunan Ruang Kelas Baru	257.500.000,00	3.739.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.689.684.500,00	969.881.454,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	200.000.000,00	200.000.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000,00	197.710.073,00
PENGELOLAAN PENDIDIKAN NON-FORMAL/ KESETARAAN		
Pembangunan Ruang Guru/ Kepala Sekolah/ TU	300.000.000,00	276.599.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.792.067.800,00	361.713.112,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	448.637.500,00	448.637.500,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	401.010.000,00	327.531.367,00



	Sasaran 2
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,27	75,51	74,47
Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	24,4	20,3	N/A

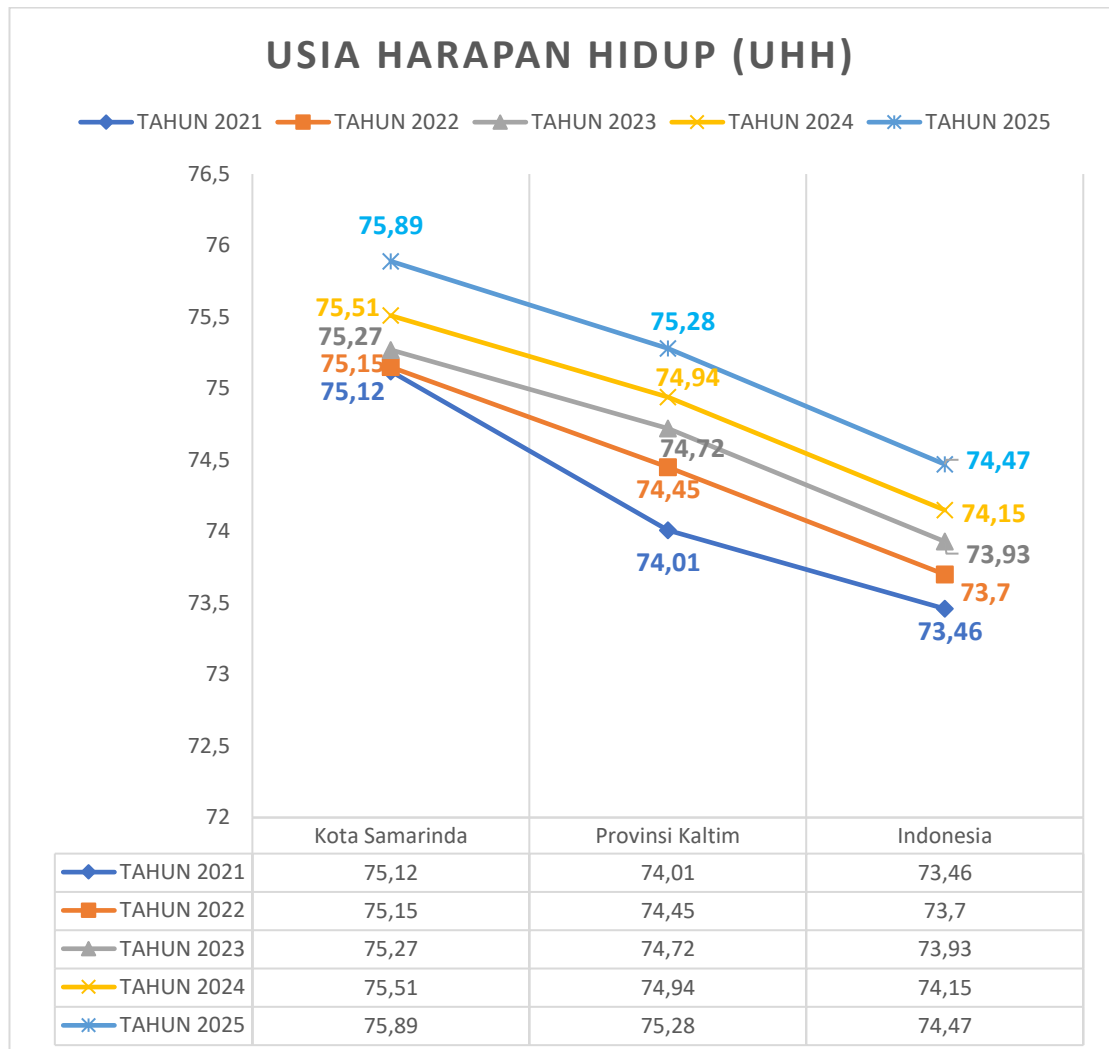
Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
75.63	75.89	100.34%	76,73
20.3	17.13	115.62%	18,20

❖ **Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran statistik untuk menggambarkan rata-rata jumlah tahun hidup yang diharapkan akan dijalani oleh seseorang sejak lahir, berdasarkan tingkat kematian pada saat tertentu. Usia Harapan Hidup digunakan sebagai indikator kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Semakin besar UHH dari suatu wilayah, maka semakin baik tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Usia Harapan Hidup (UHH) mencerminkan akses terhadap pelayanan kesehatan, status gizi dan lingkungan hidup.

Usia Harapan Hidup (UHH) di Kota Samarinda tahun 2025 adalah 75,89 (tahun), target yang ditetapkan sebesar 75,63 (tahun), sehingga persentase capaian kinerja yang diperoleh tahun 2025 yakni sebesar 100,34 %.

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir, dibandingkan dengan UHH provinsi Kaltim dan Nasional adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 15 Tren UHH Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa UHH Kota Samarinda dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 berada di atas rata-rata UHH Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia. Pencapaian UHH Kota Samarinda yang berada di atas rata-rata UHH Provinsi Kaltim dan Indonesia ini didorong beberapa faktor pendukung yang saling terkait, baik dari bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kondisi ekonomi dan



lainnya. Dari faktor kesehatan tingginya UHH didukung oleh beberapa aspek, antara lain :

1. Baiknya akses ke layanan kesehatan, tersedianya fasilitas kesehatan dari tingkat primer hingga tingkat lanjut yang tersebar di 10 Kecamatan dan 59 Kelurahan. Tercatat tahun 2025 kota Samarinda memiliki 26 Puskesmas, 148 Klinik, dan 16 Rumah Sakit (terdiri dari 10 Rumah Sakit Umum dan 6 Rumah Sakit Khusus).
2. Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) kota Samarinda mencapai 100%, memastikan seluruh masyarakat kota Samarinda mendapat jaminan pelayanan kesehatan.
3. Meningkatnya mutu fasilitas kesehatan yang ada. Proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan.
4. Meningkatnya upaya preventif. Upaya preventif menitikberatkan pencegahan terhadap penyakit. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan di Kota Samarinda sebagai upaya preventif yakni, meningkatkan angka skrining terhadap penyakit menular maupun tidak menular, pemberian vitamin serta penyuluhan/edukasi mengenai pencegahan penyakit.
5. Adanya komitmen pemerintah terhadap pembangunan kesehatan dan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Samarinda tahun 2025 meskipun melebihi target yang sudah ditetapkan, namun mengalami beberapa kendala dalam beberapa pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan. Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemeriksaan kesehatan (skrining kesehatan);
2. Gaya hidup tidak sehat pada masyarakat, seperti merokok, kurang aktifitas fisik, konsumsi alkohol dan juga pola makan tinggi gula dan lemak;

Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Samarinda yang terus meningkat setiap tahunnya tentu saja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan memastikan bahwa angka tersebut berkelanjutan. Tantangan kedepan yang akan dihadapi merupakan tugas bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi serta peneliti. Dengan adanya kolaborasi dengan semua pihak, diharapkan UHH kota Samarinda dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

❖ **Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita**

Prevalensi stunting merupakan persentase balita yang mengalami gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan menurut umur berada di bawah standar. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kondisi status gizi masyarakat, kualitas kesehatan ibu dan anak, pola asuh, serta akses terhadap pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan. Semakin rendah angka prevalensi stunting, maka semakin baik derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Prevalensi stunting di Kota Samarinda tahun 2025 sebesar 17,13%, lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 20,3%, sehingga menunjukkan bahwa kinerja penurunan stunting telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 20,3% dan tahun 2023 sebesar 24,4%, yang menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Prevalensi stunting tahun 2025 diperoleh dari data rerata tahunan bersumber aplikasi sigizikesga, capaian ini merupakan capaian sementara dikarenakan belum dilaksanakan finalisasi data antara kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Faktor Pendukung Capaian Prevalensi Stunting:



1. Penguatan intervensi gizi spesifik melalui pemberian makanan tambahan (PMT). Pelaksanaan PMT bagi balita dan ibu hamil membantu meningkatkan asupan gizi kelompok sasaran, memperbaiki status gizi, serta mencegah terjadinya stunting sejak periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK);
2. Adanya pemberian makanan tambahan inovatif (protein kapsul, dan Pangan Kebutuhan Gizi Khusus/PKGK);
3. Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan dan pendampingan meningkatkan kemampuan dalam deteksi dini risiko stunting, pemantauan tumbuh kembang balita, serta edukasi gizi kepada keluarga;
4. Peningkatan peran serta masyarakat dan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan RT, Kelurahan, PKK, Kader, serta dukungan sektor swasta memperkuat pelaksanaan intervensi stunting secara terpadu di tingkat masyarakat;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program secara berkala. Pengawasan terhadap pelaksanaan intervensi membantu memastikan ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta efektivitas program percepatan penurunan stunting.
6. Dukungan kebijakan, anggaran program, dan inovasi intervensi gizi. Ketersediaan pembiayaan program, inovasi makanan tambahan, serta kebijakan percepatan penurunan stunting memperkuat keberlanjutan pelaksanaan program.
7. Pengawasan keamanan pangan dan kualitas intervensi. Pengendalian mutu makanan tambahan dan layanan kesehatan meningkatkan keamanan serta kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Prevalensi Stunting Kota Samarinda tahun 2025 meskipun melebihi target yang sudah ditetapkan, namun capaiannya masih lebih rendah dari rata-rata prevalensi stunting tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pelaksanaan penurunan prevalensi stunting di kota Samarinda mengalami



beberapa kendala. Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perilaku masyarakat dan pola asuh yang belum optimal. Pemahaman keluarga tentang gizi seimbang, pemberian makan anak, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan ibu dan balita masih perlu ditingkatkan.
2. Dukungan keluarga dan partisipasi sasaran yang belum merata. Kepatuhan dalam memanfaatkan layanan kesehatan dan mengikuti intervensi gizi masih bervariasi di masyarakat.
3. Kapasitas kader dan tenaga pelaksana yang belum merata. Belum seluruh kader memiliki kompetensi yang sama dalam pendampingan keluarga dan pelaksanaan intervensi gizi.
4. Keterbatasan anggaran operasional program di lapangan. Dukungan operasional seperti distribusi intervensi dan kegiatan pendampingan masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program secara optimal.
5. Pencatatan, pelaporan, dan pemantauan wilayah setempat yang belum optimal. Integrasi data antar fasilitas kesehatan dan pemantauan sasaran masih perlu diperkuat untuk meningkatkan akurasi intervensi.
6. Koordinasi lintas sektor yang perlu terus ditingkatkan. Sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan masih memerlukan penguatan agar intervensi stunting berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Penurunan prevalensi stunting di Kota Samarinda yang menunjukkan tren membaik setiap tahunnya perlu terus dijaga melalui upaya yang berkelanjutan dan terintegrasi lintas sektor. Tantangan besar karena prevalensi stunting kota Samarinda termasuk tiga terbawah diantara 10 Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur, masih adanya risiko kekurangan gizi pada kelompok rentan, perbedaan akses layanan kesehatan dan sanitasi antar wilayah, pola asuh dan pemenuhan gizi keluarga, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan intervensi spesifik dan sensitif secara konsisten, mulai dari masa remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga balita.

Keberhasilan penurunan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta lintas perangkat daerah terkait seperti pendidikan, sosial, dan pekerjaan umum. Melalui sinergi yang berkelanjutan, peningkatan edukasi gizi, perbaikan sanitasi dan lingkungan, serta penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, diharapkan prevalensi stunting di Kota Samarinda dapat terus menurun secara signifikan sehingga mampu mewujudkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif di masa mendatang.

Capaian kinerja dari kedua indikator sasaran ini dilaksanakan melalui dukungan Program – Program yang ada di Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan serapan anggaran tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3. 11 Serapan Anggaran per Program Dinas Kesehatan Kota Samarinda Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp200,038,082,696.00	Rp167,983,563,333.00	83.98%
Program Peningkatan Kapasitas	Rp279,721,000.00	Rp278,330,415.00	99.50%



PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	REALISASI (%)
Sumber Daya Manusia Kesehatan			
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp666,909,000.00	Rp327,806,331.00	49.15%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp2,578,935,000.00	Rp1,641,382,865.00	63.65%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp312,565,603,665.00	Rp291,102,372,735.00	93.13%

Sumber : aplikasi e-Tepian



	Sasaran 3
	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,197	0,237	0,421

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
0,237	0,243	97,47	0,231

❖ Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

BPS menggunakan proporsi wanita pernah kawin usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi wanita pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama kali di usia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Pada dimensi pemberdayaan, indikator persentase penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan ijazah terakhir yang dimiliki, BPS menggunakan batasan minimal SMA ke atas dan sederajat. Untuk indikator lainnya proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF).

INDIKATOR IKG	2022	2023	2024	2025	
KESEHATAN REPRODUKSI					
MTF (melahirkan tidak di fasilitas kesehatan)	0,001	0	0,01	0,005	
MHPK20 (Melahirkan Hidup Pertama Kali sebelum usia 20 tahun)	0.149	0.161	0.224	0,177	
PEMBERDAYAAN	2022	2023	2024	2025	
Keterwakilan Legislatif (%)	15.56	15.56	15.56	8,89	
Pendidikan SMA ke Atas (%)	61,02	67,33	69,5	72,43	L
	53,07	64,02	65,98	65,31	P



INDIKATOR IKG	2022	2023	2024	2025	
PASAR TENAGA KERJA	2022	2023	2024	2025	
TPAK (%)	78,53	78,54	80,09	80,87	L
	49,12	46,79	50,42	49,70	P

Capaian Kinerja			
Daerah Lain	Kab/Kota se Kaltim		Provinsi/Nasional
IKG Terendah Nasional (positif)	Samarinda	: 0.243	Kalimantan Utara : 0.418
DKI Jakarta : 0.147	Balikpapan	: 0.313	Kalimantan Timur : 0.441
DI Yogyakarta : 0.163	Bontang	: 0.313	Kalimantan Tengah : 0.461
Bali : 0.183	Mahakam Ulu	: 0.339	Kalimantan Selatan : 0.486
	Berau	: 0.421	Kalimantan Barat : 0.493
	Kutai Kartanegara	: 0.439	
IKG Tertinggi Nasional (negatif)	Penajam Paser Utara	: 0.474	INDONESIA : 0.421
- Papua : 0.579	Kutai Barat	: 0.477	
- Papua Pegunungan			
- Papua Barat : 0.558	Kutai Timur	: 0.517	
- Maluku : 0.538	Paser	: 0.527	

Realisasi Anggaran		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		
<i>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)</i>		
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 64.466.833	Rp. 57.024.360 (88.46%)
- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Rp. 37.922.000	Rp. 35.927.500 (94.74%)
- Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Rp. 28.670.000	Rp. 28.591.160 (99.73%)
<i>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.</i>		
Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp. 36.857.000	Rp. 34.087.000 (92.48%)
<i>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>		
- Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 37.775.000	Rp. 36.768.500 (97.34%)



Realisasi Anggaran		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 185.607.000	Rp. 178.937.500 (96.41%)

Kota Samarinda mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,243 pada tahun 2025, terendah di antara 10 kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan berperspektif gender. Capaian ini didukung oleh kondisi kesehatan reproduksi yang baik dan peningkatan pendidikan perempuan, meskipun masih terdapat tantangan pada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan partisipasi perempuan di pasar kerja. Ke depan, diperlukan penguatan intervensi pada dimensi pemberdayaan dan ekonomi perempuan untuk menjaga tren penurunan ketimpangan gender.

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Samarinda tahun 2025 sebesar 0,243 menunjukkan kondisi ketimpangan gender yang relatif terkendali, meskipun mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023 (0,237). Meskipun masih lebih tinggi dibandingkan capaian terbaik nasional seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Posisi Samarinda berada pada kategori cukup baik di tingkat nasional, namun masih memerlukan penguatan pada dimensi tertentu.

Pada dimensi kesehatan reproduksi, indikator persalinan tidak di fasilitas kesehatan (MTF) tergolong sangat rendah, yang mencerminkan akses layanan kesehatan yang baik. Namun demikian, indikator melahirkan pertama kali di usia <20 tahun (MHPK20) masih fluktuatif dan relatif tinggi dibanding tahun sebelumnya, sehingga menjadi perhatian utama dalam upaya penurunan ketimpangan gender.

Pada dimensi pemberdayaan, capaian pendidikan perempuan (SMA ke atas) terus meningkat dan menunjukkan tren positif. Sebaliknya, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami penurunan signifikan, khususnya pasca pemilu dimana partisipasi perempuan di



DPRD, baik Pemerintah Kota ataupun Pemerintah Provinsi menurun sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan gender dalam pengambilan keputusan publik.

Pada dimensi pasar tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih tertinggal jauh dibanding laki-laki dan cenderung stagnan, menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan sosial dalam akses kerja perempuan.

Dari sisi dukungan anggaran, realisasi Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan tergolong sangat baik (rata-rata di atas 90%), menandakan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Namun, dampaknya terhadap indikator strategis IKG—khususnya pemberdayaan politik dan ekonomi perempuan—perlu terus ditingkatkan agar capaian output berbanding lurus dengan outcome pembangunan gender.

Di antara 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, Kota Samarinda menempati posisi terbaik dengan IKG sebesar 0,243, yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender paling rendah di provinsi ini. Posisi berikutnya ditempati oleh Kota Balikpapan dan Kota Bontang dengan nilai IKG masing-masing 0,313, disusul Kabupaten Mahakam Ulu (0,339). Kelompok ini mencerminkan daerah dengan kinerja relatif baik dalam pembangunan berperspektif gender.

Sementara itu, Kabupaten Berau (0,421) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (0,439) berada pada kategori menengah, mendekati rata-rata nasional. Adapun daerah dengan IKG tertinggi (ketimpangan terbesar) di Kalimantan Timur adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (0,474), Kutai Barat (0,477), Kutai Timur (0,517), dan Paser (0,527), yang menunjukkan masih kuatnya tantangan pada dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja perempuan.

Secara keseluruhan, posisi Samarinda sebagai peringkat pertama di Kalimantan Timur menegaskan peran strategis kota ini sebagai



benchmark pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, sekaligus menjadi rujukan praktik baik bagi kabupaten/kota lain dalam upaya penurunan ketimpangan gender di tingkat provinsi.

	Sasaran 4
	Meningkatnya peran sektor unggulan daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB	%	57,57	58,97	N/A

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
51,74	61.41	118,69	56,08

❖ **Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB**

Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda memiliki struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor tersier (jasa), khususnya perdagangan besar dan eceran, serta berbagai subsektor jasa seperti jasa keuangan, transportasi, akomodasi, dan jasa lainnya. Transformasi ekonomi kota yang semakin urban dan berbasis konsumsi memperkuat dominasi sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pada tahun 2025, sektor perdagangan dan jasa tetap menjadi leading sector dalam menopang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan capaian kinerja ekonomi tahun 2025, sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi sekitar 17–19% (menunggu nilai pasti dirilis BPS) terhadap total PDRB Kota Samarinda, menjadikannya salah satu penyumbang terbesar dalam struktur ekonomi daerah. Sementara itu, secara agregat, kelompok sektor jasa (termasuk transportasi, akomodasi dan makan minum, jasa keuangan, serta jasa lainnya) memberikan kontribusi lebih dari 45% terhadap total PDRB, yang menunjukkan kuatnya karakter ekonomi perkotaan berbasis jasa.



Dari sisi pertumbuhan, laju pertumbuhan sektor perdagangan pada tahun 2025 tercatat berada pada kisaran 5–6% (year on year), relatif stabil dan konsisten di atas rata-rata beberapa sektor primer. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi kota mencapai sekitar 1 persen poin dari total pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini didukung oleh meningkatnya aktivitas perdagangan ritel, pertumbuhan UMKM, serta membaiknya daya beli masyarakat pasca pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, dengan proporsi lebih dari 40% total tenaga kerja Kota Samarinda bekerja pada sektor ini, baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah, maupun usaha jasa modern. Stabilitas inflasi daerah yang terjaga pada kisaran 2–3% sepanjang tahun 2025 turut memperkuat kinerja sektor ini melalui terjaganya daya beli Masyarakat.

Dengan capaian tersebut, sektor perdagangan dan jasa tidak hanya berperan sebagai kontributor utama PDRB, tetapi juga sebagai penopang stabilitas sosial-ekonomi Kota Samarinda di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dampak pengembangan kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara. Capaian kinerja tersebut diatas juga melalui dukungan program kegiatan Dinas Perdagangan pada Tahun 2025 yaitu:



No	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Keuangan		Capaian Kinerja	Predikat	Catatan
			Realisasi (Rp)	Serapan (%)			
30.03	URUSAN PERDAGANGAN	49.380.501.757	45.821.148.904	92,79	100,5	ST	Serapan Keuangan Cukup Tinggi dan Capaian Kinerja Melampaui Target
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.683.251.586	28.473.457.110	89,87	100,95	ST	AKIP tercapai (86), tapi IKM hanya 87,20 dari target 88 (99,09%) → layanan publik belum nyampe target walau akuntabilitas aman serta serapan keuangan rendah juga dikarenakan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025 (Terhutang)
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	255.312.350	219.891.919	86,13	100	ST	Kinerja tercapai tapi serapan keuangan rendah program ini juga berdampak kemampuan keuangan daerah (Terhutang)
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	14.763.499.916	14.702.552.443	99,59	100	ST	Target Tercapai dan serapan nyaris habis, program ini paling rapi kendati masih terdapat bangunan pasar yang belum dapat dimanfaatkan (Pasar Buah) dampak efisiensi anggaran
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	743.335.000	642.668.681	86,46	100	ST	Target Kinerja Tercapai tapi serapan masih rendah, Program ini juga berdampak kemampuan keuangan daerah (Terhutang) namun masih terdapat capaian realisasi kinerja dibawah target yaitu Persentase Pupuk (55,65%) dampak kewenangan
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	213.836.250	209.317.032	97,89	100	ST	Capaian Kinerja sesuai Target dan Serapan juga tinggi, kendati data yang didapat masih bersifat sementara (BPS-Ekspor- Nov25)
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.475.501.655	1.348.385.934	91,38	102,55	ST	Capaian kinerja diatas target dan realisasi sudah baik meski terdapat beberapa belanja yang berdampak kemampuan keuangan daerah (Terhutang) namun dari capaian Indikator UTTP Masih kurang dampak lemahnya pemetaan potensi UTTP
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	245.765.000	224.875.785	91,5	100	ST	Serapan dan Kinerja Stabil, paling tidak bermasalah secara capaian dan realisasi

Ditinjau per program, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan menunjukkan performa paling kuat baik dari sisi keuangan maupun kinerja, dengan realisasi anggaran 99,59% serta indikator persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya mencapai 35,71% dari target 26,67%. Program Pengembangan Ekspor juga memperlihatkan serapan tinggi (97,89%) disertai capaian positif pada diversifikasi komoditas ekspor, yang tercermin dari jumlah jenis kode HS 2 digit ekspor mencapai 16 dari target 9. Namun demikian, indikator nilai ekspor barang belum sepenuhnya mencapai target tahunan karena realisasi sebesar 100.645.418,01 US\$ (Data BPS S.d Nopember 2025) atau 90,92% dari target 110.694.000,00 US\$.

Pada Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, realisasi anggaran mencapai 91,38% dengan capaian kinerja agregat 102,55%. Kinerja pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) tercatat melampaui target, yaitu 87,71% dibanding target 75%. Meskipun demikian, indikator persentase alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku belum memenuhi target, dengan capaian 85,15% dari target 87,95%. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya penguatan Potensi Alat UTTP, pelaksanaan tera/tera ulang dan peningkatan kepatuhan metrologi untuk memastikan perlindungan konsumen berjalan lebih konsisten.

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan serta Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mencatat realisasi anggaran relatif lebih rendah dibanding program lain, masing-masing sebesar 86,13% dan 86,46%, meskipun indikator kinerja program pada umumnya tercatat tercapai. Pada program stabilisasi, indikator persentase stabilisasi harga tercapai sebesar 88,24%, namun indikator persentase kinerja realisasi pupuk hanya mencapai 42,41 dari target 75, yang menunjukkan adanya gap kinerja pada aspek pengawasan pupuk bersubsidi. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menegaskan bahwa kinerja dan serapan anggaran Dinas Perdagangan pada tahun 2025 berada pada

kategori sangat tinggi, namun tetap diperlukan tindak lanjut perbaikan terarah pada indikator yang belum mencapai target, khususnya peningkatan kepuasan layanan, penguatan metrologi, pencapaian nilai ekspor, dan optimalisasi pengawasan pupuk bersubsidi.

Kesimpulan dari evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Samarinda Tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Kota Samarinda secara umum telah mencapai kinerja yang sangat baik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp49.380.501.757 dan realisasi hingga Triwulan IV sebesar Rp45.821.148.904 (92,79%), capaian kinerja agregat mencapai 100,5% dengan predikat sangat tinggi. Artinya, sebagian besar target program berhasil dicapai, bahkan beberapa indikator melampaui target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, hasil evaluasi juga memperlihatkan adanya beberapa indikator strategis yang masih memerlukan penguatan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum mencapai target, indikator nilai ekspor masih berada di bawah target tahunan, persentase alat UTTP bertanda tera sah belum sepenuhnya memenuhi target, serta kinerja realisasi pupuk bersubsidi masih jauh dari target. Dengan demikian, tindak lanjut yang diperlukan tidak lagi berfokus pada peningkatan capaian agregat, melainkan pada perbaikan kualitas dan konsistensi pelaksanaan kegiatan pada aspek-aspek tersebut agar pencapaian kinerja tidak hanya tinggi secara rata-rata, tetapi juga merata dan berdampak langsung pada peningkatan layanan publik, perlindungan konsumen, stabilitas perdagangan, serta daya saing ekspor daerah.

Dalam melaksanakan program diatas telah diidentifikasi Faktor – Faktor yang mempengaruhi capaian kinerja Program pada Tahun 2025 Diantara Lain:

Tabel Hasil Analisis Capaian Program Dinas Perdagangan Tahun 2025



NO	PROGRAM / KEGIATAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Dukungan Anggaran - Terealisasinya Kegiatan rutin seperti pembayaran gaji, Belanja Cetak & ATK serta Pemeliharaan Barang milik daerah - Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan	- Kurangnya Responden Survey IKM - Kurangnya Kualitas SDM Teknis Kesekretariatan seperti Agendaris, Perencana dan Fungsional lainnya - Pencatatan setiap data, informasi yang dilaksanakan	- Peningkatan responden disetiap layanan melalui sistem - Pengusulan Tenaga Teknis - Memaksimalkan SDM yang ada dengan mengikuti berbagai BIMTEK - Sentralisasi data dan informasi melalui sistem sidangang
2.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	- Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi (seperti OSS - Online Single Submission) mempermudah pengusaha dalam mengurus perizinan dan pendaftaran secara lebih efisien. - insentif atau kemudahan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan perizinan - Dukungan ketersediaan anggaran dalam hal fasilitasi pemenuhan komitmen	- Keterbatasan jumlah petugas yang berkompeten dalam mengelola perizinan sehingga menyebabkan proses menjadi lebih lambat. - Banyak pengusaha, terutama UMKM, yang kurang memahami prosedur hukum terkait perizinan. - Adanya regulasi yang tumpang tindih atau tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah - Validitas data pedagang yang masih manual berdampak terhadap relokasi	- Secara rutin memonitor dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi program perizinan dan pendaftaran perusahaan dan Pedagang pasar. - Melakukan sosialisasi terus-menerus mengenai peraturan terbaru, cara pendaftaran, dan persyaratan kepada pengusaha. - Meningkatkan kerja sama antara lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan regulasi tidak saling bertentangan dan pelaksanaan program berjalan lancar.



NO	PROGRAM / KEGIATAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN
				- Menerapkan sistem pemberian sanksi bagi pelanggar dan penghargaan bagi pengusaha yang mematuhi ketentuan perizinan
3.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	- Adanya komitmen pimpinan dalam pengembangan sarana distribusi khususnya pasar rakyat - Letak kota samarinda yang menjadi pusat distribusi bukan hanya untuk kota samarinda melainkan kabupaten / kota sekitar juga	- Efisiensi anggaran berdampak pada penyelesaian pasar buah - Rendahnya tingkat Ketelusuran data pengelolaan retribusi pasar rakyat - Kurangnya tenaga teknis khususnya sipil dan bangunan	- Pembangunan pasar buah jl. merdeka akan diusulkan kembali - Review SOP dan Pengelolaan Retribusi yang tepat sasaran
4.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	- Adanya Komitmen Pimpinan melalui tim TPID dalam penanganan inflasi Kota Samarinda - Peran serta aktif perumda, bulog, distributor dan agen dalam penanganan gejala harga Bapokting	- Pasokan barang kebutuhan pokok dan penting kota samarinda masih dipasok dari luar - Letak kota samarinda menjadikan stok bapokting bukan hanya digunakan untuk pemenuhan kota samarinda juga untuk kabupaten / kota sekitar	- Terus melakukan pengawasan terhadap gejala harga komoditi bapokting - Segera melakukan operasi pasar pada komoditi yang mengalami gejala harga dengan melibatkan seluruh stakeholder
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	- Kota samarinda memiliki Pelabuhan sebagai titik tolak informasi barang ekspor	- Terbatasnya Pembinaan, Data dan Informasi mengenai pelaku usaha ekspor Kota	- Koordinasi dengan instansi / lembaga terkait data dan informasi Ekspor Kota Samarinda



NO	PROGRAM / KEGIATAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN
			Samarinda karena kewenangan SKA - Efisiensi Anggaran berdampak pada Pameran dagang	- Mencarai alternatif promosi tanpa menggunakan anggaran APBD
6.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	- Pelimpahan kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 - Kota Samarinda sebagai Ibukota provinsi kaltim yang mendapatkan pelimpahan sarana dan SDM dari provinsi kaltim khususnya Metrologi Legal	- Gedung layanan yang sudah akan diambil alih oleh pemerintah provinsi belum ada kepastian pembangunan - Kurangnya tenaga teknis kemetrolagian dari segi kualitas dan kuantitas - Efisiensi anggaran dan keberpihakan porsi anggaran dalam pemenuhan alat standar - Masih minimnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat terkait metrologi legal dan validitas data potensi UTP	- Memaksimalkan anggaran yang tersedia dalam pemenuhan alat standar untuk layanan metrologi yang memiliki potensi tinggi di kota samarinda - Selalu melakukan koordinasi terkait peningkatan kualitas Aparatur Teknis Kemetrolagian - Meningkatkan kegiatan penyuluhan kemetrolagian - Meningkatkan kemudahan layanan
7.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	- Partisipasi aktif pusat perbelanjaan dan toko swalayan di kota samarinda - Anggaran yang tersedia	- Kewenangan dalam interfensi peningkatan kurasi produk UMKM - Lemahnya Koordinasi lintas sektor / perangkat daerah - Pilihan jenis produk UMKM belum	- Meningkatkan pelaksanaan promosi dan bisnis matching dalam rangka mendorong kemitraan dengan retail dan pusat perbelanjaan - Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam peningkatan



NO	PROGRAM / KEGIATAN	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT PERBAIKAN
			berorientasi pada produk kebutuhan sehari – hari dalam rangka penguasaan pasar dalam negeri / kota samarinda	kurasi / daya saing produk

- **Analisis Kinerja**

Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat dominasi sektor unggulan dalam struktur perekonomian daerah. Indikator ini mencerminkan kapasitas sektor perdagangan dan jasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat.

Realisasi kontribusi sektor perdagangan dan jasa pada Tahun 2023 tercatat sebesar 57,57%, dan meningkat menjadi 58,97% pada Tahun 2024 (data pembaruan per 23 Februari 2026). Pada Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 51,74%, dengan realisasi sebesar 61,41%, sehingga capaian kinerja mencapai 113,97%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan dan jasa berada di atas target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tren tahun sebelumnya, terjadi peningkatan kontribusi sebesar 1,40 poin persentase dari Tahun 2023 ke Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas perdagangan barang dan jasa, distribusi logistik, serta subsektor jasa lainnya mengalami pertumbuhan yang stabil. Kondisi tersebut



mempertegas posisi Kota Samarinda sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Kalimantan Timur.

Meskipun capaian melampaui target, perlu dilakukan evaluasi terhadap struktur ekonomi daerah agar tidak terjadi ketergantungan yang berlebihan pada sektor tersier. Penguatan sektor produktif lainnya tetap diperlukan guna menciptakan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. **Meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat**, yang ditandai dengan pertumbuhan usaha perdagangan skala kecil, menengah, dan besar.
2. **Stabilitas daya beli masyarakat**, yang turut mendorong perputaran transaksi barang dan jasa.
3. **Penguatan infrastruktur penunjang perdagangan dan jasa**, termasuk aksesibilitas distribusi dan fasilitas pelayanan publik.
4. **Iklim usaha yang relatif kondusif**, didukung oleh kemudahan perizinan dan pelayanan berbasis digital.
5. **Posisi strategis Kota Samarinda sebagai pusat distribusi regional**, sehingga menjadi simpul aktivitas ekonomi di Kalimantan Timur.

Faktor Penghambat dan Tantangan

1. **Ketergantungan struktur ekonomi pada sektor tersier**, sehingga rentan terhadap fluktuasi daya beli dan dinamika konsumsi masyarakat.
2. **Belum optimalnya diversifikasi sektor ekonomi produktif**, khususnya sektor industri pengolahan dan sektor berbasis nilai tambah.



3. **Persaingan usaha yang semakin kompetitif**, termasuk dengan pelaku usaha berbasis digital dan pasar daring skala nasional.
4. **Potensi perlambatan ekonomi makro**, baik di tingkat regional maupun nasional, yang dapat memengaruhi stabilitas perdagangan.

Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perbaikan

Dalam rangka menjaga keberlanjutan kinerja sektor unggulan daerah, Pemerintah Kota Samarinda akan:

- Mendorong penguatan UMKM berbasis inovasi dan digitalisasi;
- Mengembangkan diversifikasi sektor ekonomi melalui penguatan industri kreatif dan hilirisasi produk lokal;
- Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung distribusi dan konektivitas;
- Memperkuat promosi investasi di sektor perdagangan dan jasa bernilai tambah;
- Mengintegrasikan pengembangan sektor unggulan dengan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB ADHB Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Namun demikian, penguatan strategi pembangunan ekonomi yang lebih terdiversifikasi tetap diperlukan guna memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.



Sasaran 5

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Indeks Kemandirian Fiskal	%	21,16	18,79	N/A

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
21,19	22,68	107,03	23,56

❖ **Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah**

Indeks Kemandirian Fiskal pada Tahun 2025 tercapai sebesar 22,68% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,63% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat, serta ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat secara bertahap dapat ditekan.

Keberhasilan pencapaian Indeks Kemandirian Fiskal didukung oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

- **Penguatan regulasi daerah**, melalui penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota beserta perubahannya terkait pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga memberikan kepastian hukum dalam optimalisasi PAD.
- **Peningkatan kemudahan layanan perpajakan**, khususnya melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai dan digitalisasi transaksi pajak daerah.
- **Pembentukan dan optimalisasi UPT Pendapatan Daerah di setiap kecamatan**, yang memperluas jangkauan pelayanan serta mendekatkan layanan kepada masyarakat.
- **Koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah**, sehingga proses pemungutan dan pengawasan pajak berjalan lebih efektif.



- **Inovasi sistem pemungutan pajak daerah**, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan pengendalian penerimaan.
- **Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pajak secara intensif**, khususnya terhadap wajib pajak self assessment.
- **Sinergisitas kerja sama dengan instansi vertikal dan horizontal**, baik di tingkat daerah maupun pusat, dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah.

Dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan capaian Indeks Kemandirian Fiskal, Pemerintah Kota Samarinda melalui Bapenda melaksanakan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pada berbagai jenis pajak daerah, sebagai berikut:

- **Optimalisasi PBB-P2**, melalui pemutakhiran data NJOP dan subjek pajak, penagihan aktif piutang, validasi luas tanah dan bangunan, penertiban SPPT ganda, serta konfirmasi status wajib pajak. Ekstensifikasi dilakukan melalui pendataan objek pajak baru, integrasi data PBG, BPN, dan OSS, serta pemetaan berbasis GIS melalui Sensus Pajak dan aplikasi Samarinda Smart Tax.
- **Optimalisasi BPHTB**, melalui validasi nilai transaksi, pengawasan akta PPAT, audit transaksi berisiko tinggi, serta pendataan peralihan hak non-jual beli (hibah, waris, tukar-menukar) dan integrasi data lintas instansi.
- **Optimalisasi Pajak Reklame**, melalui penertiban reklame tanpa izin, penagihan piutang, pengawasan masa tayang, serta pendataan titik reklame baru termasuk reklame digital dan mobile.
- **Optimalisasi Pajak Air Tanah**, melalui validasi debit dan meter air, audit pengguna skala besar, penagihan pajak terutang, serta integrasi data dengan ESDM dan OSS.
- **Optimalisasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB**, melalui sinkronisasi data Samsat, pengawasan mutasi kendaraan, penagihan tunggakan, razia gabungan, serta pendataan kendaraan luar daerah dan kendaraan operasional perusahaan.
- **Penguatan elektronifikasi pajak daerah**, bekerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara melalui pembayaran PBB-P2 via GenTax Bankaltimtara,



pemanfaatan QRIS dan Virtual Account, serta pemasangan TMD dan MPOS sebagai alat monitoring transaksi.

- **Optimalisasi penagihan piutang pajak**, termasuk kewajiban pelunasan piutang sebelum mutasi wajib pajak, penerbitan SKPKDB, dan konseling perpajakan.
- **Penguatan basis data perpajakan**, melalui penggalan potensi pajak baru, pendaftaran wajib pajak baru, peremajaan data wajib pajak, serta tindak lanjut hasil Sensus Pajak Daerah.
- **Sosialisasi dan edukasi perpajakan secara masif**, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.
- **Pengembangan sistem informasi pelayanan perpajakan**, untuk meningkatkan kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas.
- **Penguatan kerja sama lintas instansi**, antara lain dengan:
 - Disdukcapil (pemanfaatan NIK dan data kependudukan),
 - Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
 - Kantor Pertanahan Kota Samarinda,
 - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (opsen pajak kendaraan),
 - Kejaksaan Negeri (penagihan pajak daerah),
 - serta instansi terkait dalam penerbitan regulasi pendukung, termasuk pengaturan transaksi Sarang Burung Walet keluar Kalimantan Timur.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Kemandirian Fiskal menunjukkan tren positif dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, keberlanjutan peningkatan kemandirian fiskal memerlukan konsistensi penguatan regulasi, digitalisasi layanan, pengawasan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis pajak secara berkelanjutan guna mendukung stabilitas keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan yang lebih mandiri.



Realisasi Anggaran		
Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
7		
Program Pengelolaan Pendapatan	20.699.137.175	13.244.919.248
Kegiatan Pengelolaan kegiatan	20.699.137.175	13.244.919.248
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	383.207,000	75.162.996
Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	721.450,000	379.247.335
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	15.874.125,000	10.744.947.853
Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB)	356.457,000	258.503.500
Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	240.243,000	172.479.305
Penagihan Pajak Daerah	100.000,000	600.000
Pengendalian, Pemeriksaan, Dan Pengawasan Pajak Daerah	295.000,000	22.270.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	296.447,500	193.090.583
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	260.246,500	156.441.036
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I	322.977,225	170.043.800
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II	486.225,000	192.718.725
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III	466.139,725	369.629.858
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV	481.647,225	273.759.892
Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V	414.972,000	236.024.365



PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KONSOLIDASI)
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.516.189.127.897,00	5.020.691.231.038,55	91,01	5.177.088.647.963,90
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.203.243.610.997,00	1.138.616.036.776,55	94,62	973.231.612.768,21
4.1.01	Pajak Daerah	954.826.760.000,00	860.353.699.448,57	90,10	683.041.335.375,94
4.1.02	Retribusi Daerah	174.299.045.332,00	192.808.911.677,54	110,61	52.892.908.387,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.226.906.597,00	20.750.386.559,04	97,75	22.082.018.474,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	52.890.899.068,00	64.703.039.091,40	122,33	215.215.350.531,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.203.243.610.997,00	1.138.616.036.776,55	94,62	973.231.612.768,21
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.298.710.946.900,00	3.867.840.624.011,00	89,97	4.138.073.600.326,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.607.010.020.900,00	1.404.540.213.999,00	87,40	1.844.217.172.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	922.775.704.000,00	912.758.219.492,00	98,91	841.775.200.055,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	327.930.769.000,00	300.625.935.219,00	91,67	285.855.918.710,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	2.857.716.493.900,00	2.617.924.368.710,00	91,60	2.971.848.290.765,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.488.933.000,00	7.488.933.000,00	100,00	20.758.998.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.488.933.000,00	7.488.933.000,00	100,00	20.758.998.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	1.433.505.520.000,00	1.242.427.322.301,00	86,67	1.145.466.311.561,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	708.387.870.000,00	517.309.672.301,00	73,02	557.097.679.235,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	725.117.650.000,00	725.117.650.000,00	100,00	588.368.632.326,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	1.433.505.520.000,00	1.242.427.322.301,00	86,67	1.145.466.311.561,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	4.298.710.946.900,00	3.867.840.624.011,00	89,97	4.138.073.600.326,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.234.570.000,00	14.234.570.251,00	100,00	65.783.434.869,69
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	14.234.570.000,00	14.234.570.251,00	100,00	65.783.434.869,69
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.234.570.000,00	14.234.570.251,00	100,00	65.783.434.869,69
	JUMLAH PENDAPATAN	5.516.189.127.897,00	5.020.691.231.038,55	91,01	5.177.088.647.963,90

Gambar 3. 16 Data Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Sumber : SIPD RI



	Sasaran 6
	Meningkatnya kemandirian pangan

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	88,97*	89,68* 73,00**	73,00

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
89,68 - 90,68	77,63**	86,56	92,19-93,19

*menggunakan metode perhitungan lama

**menggunakan metode perhitungan baru

❖ Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberi gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. Selain itu, dihasilkan pula IKP Nasional yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan nasional.



Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam SDGs, yang di antaranya adalah tanpa kemiskinan (target nomor 1) dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki



nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan (target nomor 2). Dalam pencapaian target tersebut, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas dan peran untuk melakukan koordinasi, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan.

Pengembangan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi mutlak diperlukan untuk mendukung tugas dan peran tersebut. Badan Pangan Nasional terus berupaya melakukan inovasi dan transformasi dalam penyediaan data dan informasi yang dituangkan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (Global Food Security Index - GFSI) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional.

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.



Skor IKP Kota Samarinda selama 6 tahun berturut-turut berdasarkan tabel dibawah

Indeks	Indeks Ketahanan Pangan						
	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025
Ketersediaan	66,12					49,80	61,66
Keterjangkauan	88,62	89,13	92,11	93,82	93,90	86,83	86,01
Pemanfaatan	74,31	79,29	78,56	85,00	86,22	82,78	85,36
Komposit	80,75	83,72	84,66	88,97	89,68	73,06	77,63

Pada Tahun 2025, realisasi Indikator Kinerja mencapai **77,63**, belum memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar **89,68**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar **86,56%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja masih berada di bawah target yang direncanakan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penurunan nilai indikator.

Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Program : PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Dana Tahun 2025: Rp. 472.736.790

Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 472.529.180 (99,96%)

2. Program : PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan



Sub Kegiatan :

Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Pagu Dana Tahun 2025 : Rp. 49.070.790

Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 45.395.490 (92,51%)

Tidak tercapainya target Indikator Kinerja pada tahun pelaporan terutama disebabkan oleh **pemutakhiran metode dan mekanisme penghitungan indikator pada Tahun 2025**, yang berdampak pada penyesuaian komponen penilaian dan bobot variabel. Perubahan metodologi tersebut menyebabkan skor IKP Kota Samarinda mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan metode penghitungan sebelumnya. Dengan demikian, penurunan capaian tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja substantif di lapangan, melainkan juga dipengaruhi oleh penyesuaian sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan ketat.

Selain faktor metodologis, tantangan struktural seperti ketahanan pangan, kemiskinan, akses infrastruktur dasar, serta pemerataan distribusi sumber daya turut memengaruhi capaian indikator. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan berkelanjutan guna meningkatkan capaian pada tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan capaian Indikator Kinerja, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

1. **Peningkatan penyediaan pangan di daerah non-sentra produksi**, melalui optimalisasi sumber daya pangan lokal dan pemanfaatan pekarangan masyarakat sebagai sumber ketahanan pangan keluarga.



2. **Pemanfaatan lahan tidur di wilayah padat penduduk**, guna mendukung ketersediaan pangan dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat.
3. **Optimalisasi lahan pertanian yang telah ada**, melalui diversifikasi dan intensifikasi sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
4. **Penanganan kemiskinan secara terintegrasi**, melalui penciptaan lapangan kerja produktif berbasis UMKM dan program padat karya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan irigasi, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat rentan.
5. **Pelaksanaan pasar murah secara rutin di wilayah prioritas**, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
6. **Pemberian bantuan pengelolaan usaha bagi UMKM**, khususnya bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), guna memperkuat kemandirian ekonomi keluarga.
7. **Peningkatan akses air bersih**, melalui penyediaan fasilitas dan perluasan layanan air bersih sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun target Indikator Kinerja Tahun 2025 belum tercapai, Pemerintah Kota Samarinda tetap berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan capaian indikator pada tahun berikutnya sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih merata dan inklusif.



NO.	PROVINSI/ KOTA	2021			2022		
		KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT	KETER- JANGKAUAN	PEMAN- FAATAN	KOMPOSIT
KALIMANTAN TIMUR							
78	Kota Balikpapan	98,01	81,06	88,68	97,13	83,20	89,47
79	Kota Samarinda	89,13	79,29	83,72	92,11	78,56	84,66
80	Kota Bontang	93,41	82,18	87,24	91,19	78,49	84,21
KALIMANTAN UTARA							
81	Kota Tarakan	88,91	76,37	82,02	85,43	71,73	77,90
SULAWESI UTARA							
82	Kota Manado	86,08	82,53	84,13	80,17	75,41	77,55
83	Kota Bitung	78,66	68,32	72,97	66,77	66,18	66,44
84	Kota Tomohon	85,08	76,43	80,32	78,20	68,53	72,89
85	Kota Kotamobago	88,64	71,35	79,13	83,40	64,22	72,85
SULAWESI TENGAH							
86	Kota Palu	87,17	75,81	80,92	86,90	74,25	79,94
SULAWESI SELATAN							
87	Kota Makassar	85,87	82,12	83,81	88,51	80,05	83,86
88	Kota Pare-Pare	87,43	73,55	79,80	88,54	71,38	79,10
89	Kota Palopo	79,28	72,37	75,48	77,54	70,02	73,41
SULAWESI TENGGARA							
90	Kota Kendari	87,99	81,24	84,28	88,71	78,35	83,01
91	Kota Bau-Bau	81,20	65,74	72,70	79,46	71,93	75,32

56

Indeks Ketahanan Pangan
Tahun 2022

NO.	PROVINSI/ KOTA	2023			2024		
		KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT	KETERJANGKAUAN	PEMANFAATAN	KOMPOSIT
67	Kota Serang	91,65	54,88	71,42	91,13	56,25	71,95
68	Kota Tangerang Selatan	98,52	78,35	87,43	98,38	80,72	88,67
BALI							
69	Kota Denpasar	97,58	94,35	95,80	98,16	94,91	96,37
NUSA TENGGARA BARAT							
70	Kota Mataram	86,27	70,85	77,79	86,29	75,13	80,15
71	Kota Bima	85,93	64,80	74,31	86,19	66,81	75,53
NUSA TENGGARA TIMUR							
72	Kota Kupang	86,24	67,35	75,85	86,17	67,57	75,94
KALIMANTAN BARAT							
73	Kota Pontianak	94,60	51,95	71,15	94,62	54,50	72,55
74	Kota Singkawang	93,85	47,07	68,12	93,78	47,40	68,27
KALIMANTAN TENGAH							
75	Kota Palangka Raya	96,16	66,06	79,61	96,64	67,63	80,69
KALIMANTAN SELATAN							
76	Kota Banjarmasin	94,04	78,73	85,62	94,26	78,55	85,62
77	Kota Banjar Baru	95,18	71,85	82,35	95,68	78,69	86,34
KALIMANTAN TIMUR							
78	Kota Balikpapan	98,62	85,49	91,40	98,90	84,95	91,23
79	Kota Samarinda	93,82	85,00	88,97	93,90	86,22	89,68
80	Kota Bontang	92,12	86,02	88,76	94,16	84,58	88,89

246

FSVA Nasional Tahun 2024



NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
350	Hulu Sungai Utara	64,03	79,48	64,71	69,36	285	4
351	Tabalong	89,16	82,95	73,76	81,95	14	6
352	Tanah Bumbu	70,87	89,25	74,93	78,30	44	6
353	Balangan	70,65	86,87	68,67	75,34	97	5
354	Kota Banjarmasin	63,89	89,64	80,44	77,93	48	6
355	Kota Banjarbaru	64,89	81,63	83,40	76,62	71	5
KALIMANTAN TIMUR							
356	Paser	84,54	78,55	79,69	80,94	21	6
357	Kutai Kartanegara	77,98	81,35	83,12	80,81	22	6
358	Berau	85,65	77,86	81,16	81,57	17	6
359	Kutai Barat	55,92	79,39	72,21	69,12	291	4
360	Kutai Timur	85,57	79,51	76,05	80,38	25	6
361	Penajam Paser Utara	68,53	79,45	78,29	75,40	96	5
362	Mahakam Ulu	40,45	75,86	65,71	60,60	427	3
363	Kota Balikpapan	63,02	88,06	84,27	78,40	39	6
364	Kota Samarinda	49,80	86,83	82,78	73,06	168	5
365	Kota Bontang	60,09	87,51	85,55	77,66	52	6
KALIMANTAN UTARA							
366	Bulungan	60,92	82,85	77,36	73,67	151	5
367	Malinau	52,91	83,33	62,61	66,20	356	4
368	Nunukan	61,12	82,52	64,36	69,27	288	4
369	Tana Tidung	35,14	84,81	77,58	65,75	364	4
370	Kota Tarakan	56,56	84,61	82,84	74,62	115	5

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	INDEKS KETERSEDIAAN	INDEKS KETERJANGKAUAN	INDEKS PEMANFAATAN	INDEKS KOMPOSIT	PERINGKAT	PRIORITAS KOMPOSIT
350	Hulu Sungai Utara	82,13	83,35	73,79	79,74	54	6
351	Tabalong	91,33	84,83	79,51	85,23	8	6
352	Tanah Bumbu	89,59	90,41	69,65	83,18	23	6
353	Balangan	93,48	86,02	79,76	86,42	4	6
354	Kota Banjarmasin	64,44	83,74	82,28	76,78	124	5
355	Kota Banjarbaru	63,26	84,47	83,37	77,00	115	5
KALIMANTAN TIMUR							
356	Paser	84,88	85,98	79,54	83,46	20	6
357	Kutai Kartanegara	87,33	84,87	87,27	86,50	3	6
358	Berau	78,58	85,34	82,13	82,00	35	6
359	Kutai Barat	75,34	85,05	73,71	78,00	95	6
360	Kutai Timur	77,68	85,25	77,66	80,17	49	6
361	Penajam Paser Utara	80,68	86,84	79,24	82,23	29	6
362	Mahakam Ulu	58,74	76,24	64,08	66,31	384	4
363	Kota Balikpapan	64,23	89,23	83,48	78,93	71	6
364	Kota Samarinda	61,66	86,01	85,36	77,63	102	6
365	Kota Bontang	59,79	87,26	86,90	77,94	97	6
KALIMANTAN UTARA							
366	Bulungan	59,86	76,36	76,31	70,82	290	5
367	Malinau	57,54	84,42	64,78	68,84	339	4
368	Nunukan	69,99	82,61	75,58	76,03	150	5
369	Tana Tidung	38,18	85,16	71,46	64,83	398	4
370	Kota Tarakan	51,75	84,55	82,57	72,90	234	5



	Sasaran 7
	Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan	%	4,81	4,30	8,25
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,92	5,75	4,85

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
4,25	3,45	118,82	3,38
5,6 – 5,63	5,31	105,18	4,93-5,12

❖ Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan indikator strategis yang menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Berikut tren Tingkat Kemiskinan Kota Samarinda selama 10 tahun terakhir.

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2016	4,72
2017	4,77
2018	4,59
2019	4,59
2020	4,76
2021	4,99
2022	4,85
2023	4,81
2024	4,3
2025	3,45

Sumber: Katadata.co.id dan BPS



Berdasarkan data per 30 November 2025, persentase penduduk miskin di Kota Samarinda tercatat sebesar **3,45%**, melampaui target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar **4,25%**, dengan tingkat capaian kinerja mencapai **118,82%**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanggulangan kemiskinan berjalan sangat baik dan melebihi target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 4,30%, terjadi penurunan sebesar **0,85 poin persentase**. Bahkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, tren kemiskinan di Kota Samarinda menunjukkan kecenderungan menurun secara konsisten, dari **4,72% menjadi 3,45%**, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Samarinda pada Tahun 2024 tercatat sebesar **868,5 ribu jiwa**. Dengan persentase kemiskinan sebesar 3,45%, hal ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk miskin relatif terkendali dibandingkan dengan total populasi yang cukup besar.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, persentase penduduk miskin Kota Samarinda berada pada **peringkat ketiga dari sepuluh kabupaten/kota**, dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan sebagian besar daerah lain. Persentase kemiskinan tertinggi terdapat di Kabupaten Mahakam Hulu (10%) dan Kabupaten Kutai Barat (8%), disusul beberapa kabupaten lainnya pada kisaran 6–8%. Sementara itu, Kota Samarinda berada pada kelompok daerah dengan tingkat kemiskinan rendah, sejajar dengan Kota Bontang (3%) dan berada di atas Kota Balikpapan (1%). Posisi ini menunjukkan daya saing dan ketahanan sosial ekonomi Kota Samarinda yang cukup baik di tingkat provinsi.



Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pelaksanaan program penanganan kemiskinan secara terpadu dan berbasis data;
2. Penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM dan program padat karya;
3. Peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, irigasi, dan air bersih;
4. Penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran;
5. Stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah yang menjaga daya beli masyarakat, salah satunya dengan gerakan pangan murah.

Meskipun capaian telah melampaui target tahunan dan mendekati Target Akhir RPJMD sebesar 3,38%, tantangan ke depan tetap perlu diantisipasi, terutama potensi kerentanan kelompok miskin terhadap guncangan ekonomi, fluktuasi harga kebutuhan pokok, serta dinamika ketenagakerjaan.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Pemerintah Kota Samarinda akan terus memperkuat pendekatan Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan, meningkatkan kualitas intervensi pemberdayaan ekonomi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta memastikan program bantuan sosial dan perlindungan masyarakat bersifat adaptif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian indikator Tingkat Kemiskinan Tahun 2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan mempertegas komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



❖ Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang menunjukkan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

TPT dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{TPT} = (\text{Jumlah Pengangguran} / \text{Jumlah Angkatan Kerja}) \times 100\%$$

TPT mencerminkan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah dan digunakan untuk mengukur seberapa besar peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Semakin tinggi TPT, semakin sulit masyarakat mendapatkan pekerjaan. Sebaliknya, jika TPT menurun, berarti kesempatan kerja semakin membaik.

TABEL CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran/Tujuan	Indikator	Target	Capaian Kinerja		
				2025	2024	2023
1	2	3	4	5		
1.	Berkurangnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,60%-5,63%	5,31%	5,75%	5,92%

Pertumbuhan TPT Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Indonesia

Tahun 2021 – 2025

WILAYAH	CAPAIAN KINERJA				
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
6					
Kota Samarinda	8,16%	6,78%	5,92%	5,75%	5,31%
Provinsi Kaltim	6,83%	5,71%	5,31%	5,14%	5,18%



WILAYAH	CAPAIAN KINERJA				
	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
6					
Nasional	6,49%	5,86%	5,32%	4,91%	4,85%

Sumber: website BPS

Serapan Anggaran per Program Dinas Tenaga Kerja

Kota Samarinda Tahun 2025

REALISASI ANGGARAN		
PROGRAM / KEGIATAN / SUB-KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
7	8	9
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 944.109.875	Rp. 916.454.621
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 600.806.875	Rp. 576.168.779
Program Hubungan Industrial	Rp. 3.390.037.875	Rp. 3.348.006.863

Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Samarinda tercapai dengan capaian kinerja 105,18%

Indikator Kinerja tersebut tercapai karena faktor:

- Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
Pelaksanaan layanan penempatan tenaga kerja dan penyediaan informasi pasar kerja berjalan lebih optimal, sehingga mampu mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja secara lebih tepat. Hal ini sejalan dengan sasaran Renstra Disnaker dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan penempatan tenaga kerja, yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk bekerja.



- b. Pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
Upaya peningkatan kompetensi pencari kerja melalui fasilitasi pelatihan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja telah mendorong kesiapan tenaga kerja memasuki pasar kerja. Program ini mendukung sasaran Renstra Disnaker dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, sehingga memperkecil kesenjangan antara kebutuhan dunia usaha dan kompetensi pencari kerja.
- c. Penguatan Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Kondusif
Pembinaan hubungan industrial dan pemenuhan syarat kerja yang kondusif turut mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas tenaga kerja. Kondisi hubungan industrial yang harmonis berkontribusi pada menurunnya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menjaga tingkat penyerapan tenaga kerja.
- d. Sinergi Program Ketenagakerjaan dengan Perangkat Daerah dan Dunia Usaha
Capaian indikator TPT juga dipengaruhi oleh sinergi antara Dinas Tenaga Kerja dengan perangkat daerah terkait, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung penciptaan kesempatan kerja. Sinergi ini selaras dengan arah kebijakan Renstra yang menekankan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan ketenagakerjaan.
- e. Kondisi Perekonomian Daerah yang Mendukung
Pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah mendorong terciptanya lapangan kerja baru, khususnya pada sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Kondisi ini memperkuat efektivitas program Disnaker dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka.

Capaian kinerja Indikator TPT yang melampaui target Renstra menunjukkan bahwa **program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda telah berjalan efektif dan tepat sasaran**. Ke depan, upaya penurunan TPT akan terus diarahkan pada peningkatan kualitas tenaga kerja,



perluasan kesempatan kerja, serta penguatan sinergi dengan dunia usaha guna menjaga keberlanjutan penyerapan tenaga kerja di Kota Samarinda.

Solusi/Strategi untuk meningkatkan/mempertahankan pencapaian kinerja yaitu:

- a. Penguatan Layanan Penempatan Tenaga Kerja
Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan penempatan tenaga kerja melalui optimalisasi layanan informasi pasar kerja, job matching, dan fasilitasi rekrutmen tenaga kerja agar pencari kerja dapat terserap secara lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
- b. Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja
Mendorong peningkatan kompetensi pencari kerja melalui fasilitasi pelatihan kerja dan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan menurunkan angka pengangguran terbuka
- c. Penguatan Hubungan Industrial dan Pencegahan PHK
Memperkuat pembinaan hubungan industrial yang harmonis serta peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan guna menciptakan iklim kerja yang kondusif dan meminimalkan terjadinya pemutusan hubungan kerja.
- d. Penguatan Sinergi dengan Dunia Usaha dan Pemangku Kepentingan
Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan perangkat daerah terkait dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan penyelarasan kebijakan ketenagakerjaan daerah.
- e. Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Ketenagakerjaan
Mengoptimalkan pengelolaan data ketenagakerjaan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil (outcome).



f. Mendorong Kewirausahaan dan Pekerjaan Mandiri

Mendukung pengembangan kewirausahaan dan pekerjaan mandiri melalui fasilitasi pembinaan tenaga kerja mandiri dan usaha produktif, sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja di luar sektor formal.

- g. Memperkuat program ketenagakerjaan yang terintegrasi, antara lain melalui pelaksanaan Program BUMRT (Badan Usaha Milik RT) yang mulai diperkuat pada akhir tahun 2025 dan dilanjutkan pada tahun 2026 sebagai basis pengembangan ketenagakerjaan di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT. Program ini diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja berbasis potensi lokal melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, pendampingan usaha produktif masyarakat, serta sinergi dengan layanan penempatan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industrial, sehingga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara berkelanjutan di Kota Samarinda.

Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga keberlanjutan capaian kinerja TPT yang telah melampaui target serta memperkuat peran Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

a. Program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja yaitu:

1. Program Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

b. Kegiatan

1. - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja



- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 2. - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- 3. -Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

c. Sub Kegiatan

1. - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari kerja berdasarkan Unit Kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
2. - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/Bursa Kerja
3. - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan



- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non-Afiliasi
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja



	Sasaran 8
	Mewujudkan kota yang aman dan tangguh

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	98,29	85,20	117,73
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	N/A	N/A	N/A

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
84,05	71,48	114,96%	79,05
65	77,33	118,97%	67,50

❖ Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko bencana di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Indeks ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko bencana alam atau risiko terkait bencana manusia, serta untuk membantu pemangku kebijakan dan peneliti dalam perencanaan mitigasi bencana dan manajemen risiko.

Dalam menghitung sebuah Indeks Risiko Bencana, diperlukan adanya formulasi yaitu:

$$R = H \times V / C$$

Ket :

R : Risk / Risiko

H : Hazard / Bahaya

V : Vulnerability / Kerentanan

C : Capacity / Kapasitas



Indikator Kinerja Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Samarinda pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 84,05. Berdasarkan hasil pengukuran yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), realisasi IRB Kota Samarinda Tahun 2025 tercatat sebesar 71,48, sehingga capaian kinerja mencapai 117% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian, indikator ini dinyatakan **TERCAPAI** dan melampaui target kinerja yang telah ditentukan.

Semakin rendah nilai IRB menunjukkan semakin menurunnya tingkat risiko bencana suatu daerah. Penurunan nilai IRB Kota Samarinda dari 85,20 pada Tahun 2024 menjadi 71,48 pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengurangan risiko bencana. Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya pengurangan risiko melalui penguatan kapasitas (*capacity*) dan penurunan tingkat kerentanan (*vulnerability*) berjalan lebih efektif dibandingkan dengan peningkatan potensi ancaman (*hazard*) yang ada.

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Timur, posisi Kota Samarinda pada Tahun 2025 menunjukkan tren yang kompetitif dalam pengendalian risiko bencana. Hal ini mencerminkan bahwa intervensi kebijakan dan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketangguhan daerah.

- **Faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja antara lain:**
 1. Penguatan Basis Data Risiko Bencana

Ketersediaan data spasial dan sektoral yang semakin akurat menjadi fondasi dalam perhitungan IRB. Integrasi data ancaman, kerentanan, dan kapasitas memungkinkan perencanaan mitigasi yang lebih tepat sasaran.
 2. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Koordinasi dengan perangkat daerah teknis seperti PUPR, Perkim, DLH, Dinas Kesehatan serta instansi vertikal dan

komunitas memperkuat dimensi kapasitas daerah dalam formula risiko ($R = H \times V / C$).

3. Optimalisasi Anggaran Program Penanggulangan Bencana

Dari pagu anggaran sebesar Rp6.529.565.472,00 terealisasi Rp5.993.997.552,00 atau sekitar 91,8%. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan efektivitas pelaksanaan program pencegahan, kesiapsiagaan, respon darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Peningkatan Kapasitas SDM Kebencanaan

Pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi serta penguatan Tim Reaksi Cepat (TRC) meningkatkan responsivitas dan profesionalisme dalam penanganan bencana.

Meskipun capaian telah melampaui target, tantangan tetap berada pada karakteristik geografis Kota Samarinda yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Urbanisasi, perubahan tata guna lahan, serta peningkatan kepadatan penduduk berpotensi meningkatkan dimensi kerentanan apabila tidak diimbangi dengan mitigasi struktural dan non-struktural.

Strategi keberlanjutan yang perlu dilakukan meliputi penguatan sistem informasi kebencanaan berbasis digital, integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, peningkatan investasi pada mitigasi struktural dan non-struktural, serta penguatan monitoring dan evaluasi berbasis indikator risiko secara periodik.

Secara keseluruhan, capaian Indeks Risiko Bencana Kota Samarinda Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Penurunan nilai IRB secara signifikan menandakan bahwa upaya pengurangan risiko bencana telah berjalan efektif melalui pendekatan sistemik yang mencakup pencegahan, kesiapsiagaan, respon, serta penguatan kapasitas kelembagaan.



Capaian Kinerja			
Kab/Kota	2023	2024	2025
Balikpapan	118,21	101,43	89,43
Bontang	127,85	116,57	85,25
Berau	173,74	148,64	155,27
Kutai Barat	149,15	151,32	140,51
Kutai Kertanegara	114,30	118,80	106,40
Kutai Timur	185,17	173,36	200,10
Mahakam Ulu	156,40	146,03	103,74
Paser	191,78	187,98	136,60
Penajam Paser Utara	129,44	131,81	88,54

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Realisasi Anggaran		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Penanggulangan Bencana	6.529.565.472,00	5.993.997.552,00

❖ Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) secara terintegrasi.

Indeks ini mencerminkan kualitas tata kelola, efektivitas pelaksanaan tugas, kapasitas kelembagaan, serta sinergi antar perangkat daerah dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan lingkungan, dan perlindungan masyarakat dari berbagai potensi gangguan.

Indeks Trantibumlinmas disusun dari beberapa sub-urusan utama yaitu:

- Sub Urusan Bencana – Mengukur kesiapsiagaan, pencegahan, dan respons terhadap bencana.
- Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) – Mengukur efektivitas penegakan peraturan daerah, pengawasan ketertiban umum, dan stabilitas sosial.



- Indeks Penyelenggaraan Manajemen (IPM) Satlinmas – Mengukur kualitas tata kelola, pembinaan, dan penguatan kapasitas Perlindungan Masyarakat.
- Sub Urusan Kebakaran – Mengukur kinerja pencegahan, pengendalian, dan penyelamatan kebakaran serta non-kebakaran.

Secara prinsip, semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah tersebut. Indeks ini menjadi alat ukur strategis dalam menilai efektivitas program lintas perangkat daerah seperti BPBD, Satpol PP, dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan keamanan dan ketertiban daerah.

IPPKU = 50,66

IPN Linmas = 75

Bencana = 93,66

Damkar = 90

Kab/Kota	Bobot IPPKU	Indek IPPKU	Indeks Satlinmas	Bobot Satlinmas	Indeks Kebakaran	Bobot Kebakaran	Indeks Bencana	Bobot Bencana
Samarinda	50,66	0,25	75	0,25	90	0,25	93,66	0,25

IPT= (W IPPKU X I IPPKU) + (W Satlinmas X I Satlinmas) + (W Kebakaran X I Kebakaran) + (W Bencana x I Bencana)

IPT Kota Samarinda = 77,33 (Baik)

Indikator Kinerja Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 65. Berdasarkan hasil perhitungan komponen Sub Urusan Bencana (93,66), Sub Urusan Trantibum (50,66), Indeks Penyelenggaraan Manajemen (IPM) Satlinmas (75), dan Sub Urusan Kebakaran (90), diperoleh nilai rata-rata sebesar 77,33. Dengan demikian persentase capaian kinerja adalah sebesar 119% dari target yang ditetapkan, sehingga indikator ini dinyatakan **TERCAPAI** dan melampaui target kinerja.

Secara substantif, capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat telah berjalan secara efektif melalui sinergi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Analisis Per Komponen:

- a. Sub Urusan Bencana (93,66) menunjukkan kinerja sangat baik, didukung oleh kesiapsiagaan, respon cepat, serta penguatan kapasitas kebencanaan.
- b. Sub Urusan Kebakaran (90) mencerminkan optimalnya layanan pencegahan, pengendalian, dan penyelamatan kebakaran serta partisipasi masyarakat melalui Relawan Pemadam Kebakaran.
- c. Indeks Penyelenggaraan Manajemen (75) menunjukkan tata kelola dan koordinasi kelembagaan yang cukup baik dalam mendukung operasional Linmas.
- d. Sub Urusan Trantibum (50,66) masih memerlukan penguatan, khususnya dalam penegakan perda, pengawasan ketertiban umum, dan peningkatan kehadiran petugas di lapangan.

Faktor Pendorong Keberhasilan:

- Ketersediaan dan validitas data kinerja.
- Sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah.
- Dukungan anggaran yang memadai.
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM.
- Dukungan sarana dan prasarana operasional.
- Partisipasi aktif masyarakat.

Strategi Keberlanjutan:

- Penguatan pengawasan dan patroli ketertiban umum.
- Optimalisasi sistem informasi dan pelaporan berbasis digital.
- Peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan berkelanjutan.
- Evaluasi berkala terhadap program dan kegiatan.



Secara keseluruhan, capaian Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mencerminkan komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan kota yang aman, tertib, dan tangguh.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp. 6.529.565.472	Rp. 5.993.997.552
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 4.164.962.500	Rp. 3.954.754.002
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 6.846.228.000	Rp. 6.435.689.421
TOTAL	Rp. 17.540.755.972	Rp 16.384.440.975

Capaian Kinerja		
Perangkat Daerah Lain	Kab/Kota	Provinsi/Nasional
-	Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan	-
-	73,058	-

% Kinerja Anggaran: 93,40%



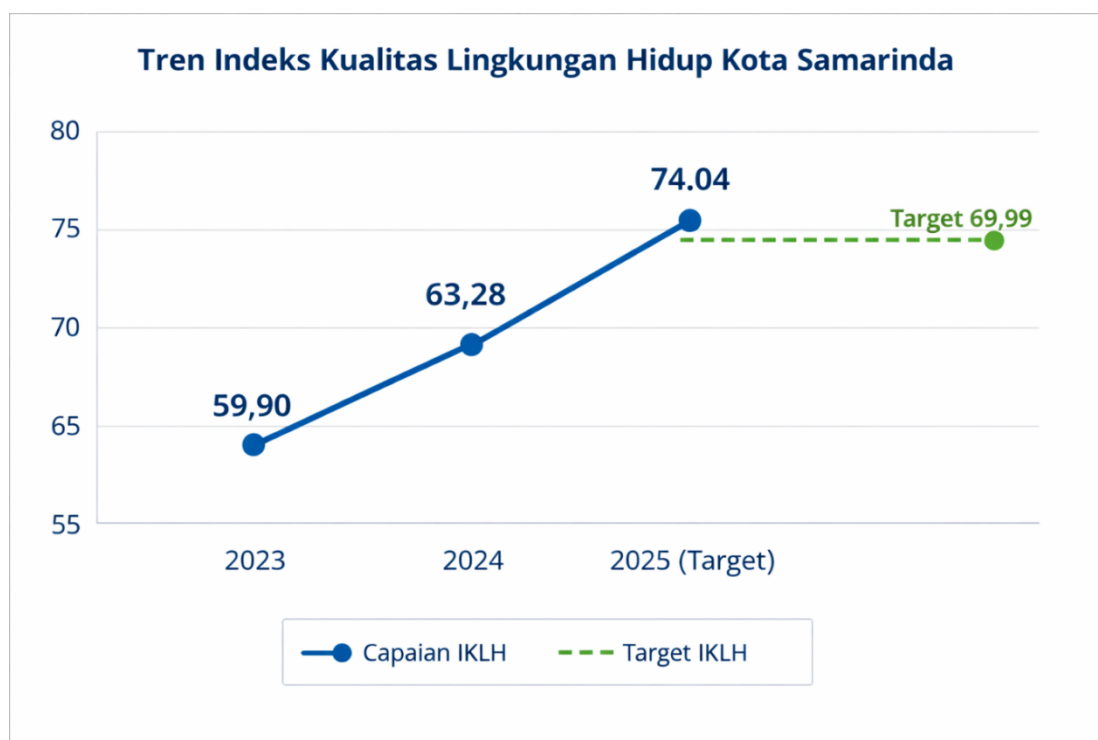
Sasaran 9

Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2025
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	59,90	63,28	78,76 / 81,88

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
69,99	74,04	105,79	71,07

❖ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) Kota Samarinda pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar **74,04**, melampaui

target yang ditetapkan sebesar **69,99**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya (63,28) dan dua tahun sebelumnya (59,90), terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Hal ini mencerminkan keberhasilan Pemerintah Kota Samarinda dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan strategis di bidang lingkungan hidup.

Faktor Pendorong Pencapaian

Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap pencapaian IKLH di atas target antara lain:

- **Perubahan metodologi perhitungan IKLH** yang kini memasukkan komponen permukiman, lahan terbuka, dan variabel lingkungan lainnya sehingga memberikan gambaran lebih komprehensif.
- **Pendetailan dan penambahan data tutupan vegetasi** dengan skala yang lebih kecil, termasuk delineasi tutupan vegetasi seluas 30.045 Ha serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) seluas 10,7 Ha.
- **Penataan Sungai Karang Mumus** dan kegiatan pembersihan sungai secara berkala yang berdampak pada kualitas air.
- **Sosialisasi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir** serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- **Pembinaan terhadap kegiatan usaha** melalui kewajiban pengelolaan limbah cair dan emisi, serta pelaksanaan uji kualitas udara kendaraan bermotor.
- **Operasi yustisi** terhadap masyarakat dan usaha yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan.

➤ **Perbandingan dengan Provinsi dan Nasional**

Capaian IKLH Kota Samarinda (74,04) masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur (81,88) dan Nasional (78,76). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan, masih



terdapat ruang perbaikan agar kualitas lingkungan hidup di Samarinda dapat sejajar dengan standar provinsi maupun nasional.

➤ **Strategi Ke Depan**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian IKLH, strategi yang dirumuskan meliputi:

- **Penguatan pengelolaan limbah cair domestik dan industri** melalui pembangunan IPAL skala perkotaan serta kewajiban sertifikasi kelayakan operasi.
- **Normalisasi sungai secara rutin** dan perlindungan daerah sempadan sungai dari pemukiman yang berpotensi mencemari.
- **Pengendalian emisi** baik dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, dengan penegakan sanksi bagi pelanggar.
- **Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)** baik publik maupun privat, termasuk inventarisasi RTH eksisting dan rencana RTH dalam RTRW.
- **Rehabilitasi lahan kritis** seperti bekas tambang, semak belukar, dan sempadan sungai untuk meningkatkan tutupan vegetasi.
- **Peningkatan kesadaran masyarakat** melalui kampanye, penyuluhan, dan kegiatan car free day, serta penegakan larangan pembakaran sampah.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, pencapaian IKLH Kota Samarinda tahun 2025 dapat dikategorikan **sangat baik** dengan capaian 105% dari target. Peningkatan ini merupakan hasil sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kegiatan usaha. Namun, tantangan masih ada untuk mengejar capaian provinsi dan nasional. Dengan strategi yang terarah, diharapkan IKLH Kota Samarinda dapat terus meningkat dan mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.



Tabel 3. 12 Realisasi Anggaran

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	63.724.695.158	60.574.672.232
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.053.206.000	1.024.706.502
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	5.673.479.100	4.548.829.723
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	228.848.000	228.288.000
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	188.264.500	183.488.707
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	299.797.000	299.786.134
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	466.309.500	465.834.716
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	339.690.500	339.689.940
Program Pengelolaan Persampahan	21.649.774.459	21.039.687.108
Jumlah	117.440.945.537	107.494.981.417

% Kinerja Anggaran : 91,53%



	Sasaran 10
	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2025
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	N/A	N/A	N/A

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
76,24	76,24	100	85

❖ Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Infrastruktur dalam konteks perkotaan merujuk pada sistem fisik dan nonfisik yang menopang aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan, seperti jaringan jalan, transportasi, air bersih, sanitasi, listrik, telekomunikasi, persampahan, dan drainase. Infrastruktur bukan sekadar aset fisik, tetapi bagian dari sistem pelayanan publik yang menentukan sejauh mana negara dan pemerintah daerah memenuhi hak dasar warga atas mobilitas, air bersih, lingkungan sehat, dan ruang hidup yang aman.

Literatur kebijakan publik menempatkan pelayanan infrastruktur sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang paling nyata karena dampaknya langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Kualitas pelayanan publik secara umum dapat dilihat dari aspek keandalan, daya tanggap, kepastian, empati, dan bukti fisik, yang dalam konteks infrastruktur diterjemahkan menjadi ketersediaan, kualitas fisik, ketepatan fungsi, kemudahan akses, serta kejelasan pengelolaan.

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia menempatkan infrastruktur sebagai prioritas strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Di



tingkat provinsi, dokumen perencanaan di Kalimantan Timur menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur memegang peran penting untuk meningkatkan daya saing wilayah dan mendukung fungsi kota-kota utama sebagai simpul pelayanan dan logistik.

Kualitas layanan infrastruktur berkaitan dengan sejauh mana infrastruktur yang tersedia mampu memberikan layanan yang memuaskan, handal, dan sesuai kebutuhan bagi masyarakat. Konsep ini menggabungkan pendekatan kualitas layanan (*service quality*) dengan karakteristik infrastruktur sebagai layanan publik. Kualitas layanan infrastruktur tidak hanya berbicara tentang keberadaan jalan atau jaringan air bersih, melainkan juga mengenai kondisi fisik, frekuensi gangguan, keamanan, kenyamanan, kemudahan akses bagi kelompok rentan, serta dampaknya terhadap biaya dan waktu yang dikeluarkan masyarakat.

Pada level operasional, Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur atau Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) dikembangkan sebagai alat ukur untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur. Dokumen panduan dan praktik di berbagai daerah menunjukkan bahwa pengukuran IKLI umumnya memanfaatkan survei persepsi masyarakat terhadap beberapa dimensi, seperti ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian dengan kebutuhan, efektivitas pemanfaatan, kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian lokal.

Metode pengolahan data pada pekerjaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kota Samarinda didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik. Nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI), masing-masing jenis infrastruktur memiliki jumlah unsur pelayanan yang berbeda



disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Namun demikian setiap unsur pelayanan mempunyai penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata - Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}}$$

Perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) untuk tiap unit pelayanan dilakukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Berdasarkan uraian di atas, adapun persamaan matematis dalam perhitungan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur uraian sebagaimana berikut ini:

$$\text{IKLI} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi} \times \text{Nilai Penimbang}}$$

Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan penguatan daya saing daerah. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran strategis dalam sistem konektivitas regional dan nasional, sehingga kualitas layanan infrastrukturnya menjadi faktor krusial dalam mendorong transformasi wilayah yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pengukuran dan analisis terhadap Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur menjadi penting sebagai instrumen evaluatif untuk menilai sejauh mana kinerja infrastruktur publik telah memenuhi harapan masyarakat. Analisis ini dilakukan berdasarkan sejumlah objek infrastruktur utama seperti jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pelabuhan, dengan pendekatan indikator yang mencakup ketersediaan fisik, kualitas, kesesuaian, pemanfaatan, kontribusi ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kota Samarinda, dapat disimpulkan bahwa seluruh jenis infrastruktur utama baik berupa jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pelabuhan menunjukkan kinerja yang optimis yang didukung dengan posisi kinerja

berada dalam kategori baik dengan nilai rata-rata 76,24. Nilai indeks kinerja tertinggi dicapai oleh infrastruktur jembatan (77,62), diikuti oleh fasilitas kesehatan (75,88), jalan raya (75,88), dan pelabuhan (75,57). Hal ini mencerminkan adanya upaya pemerintah kota dalam menjaga kualitas infrastruktur yang menopang aktivitas masyarakat dan ekonomi lokal.

Infrastruktur	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur							
	Indeks Kinerja				Indeks Kategori/Harapan Layanan			
	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Nilai Indeks	Kategori	Nilai Rata-rata	Kinerja Unsur Kepuasan	Nilai Rata-rata Tertimbang	Kategori
Jalan Raya	3.035	0.17	75.88	baik	3.42	0.17	85.479	Sangat Penting
Jembatan	3.105	0.17	77.62	baik	3.42	0.17	85.449	Sangat Penting
Fasilitas Kesehatan	3.035	0.17	75.88	baik	3.42	0.17	85.386	Sangat Penting
Pelabuhan	3.023	0.17	75.57	baik	3.38	0.17	84.489	Sangat Penting

Gambar 3. 17 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kota Samarinda berdasarkan variabel indikator masing-masing objek infrastruktur yang dievaluasi, diperoleh temuan bahwa seluruh infrastruktur strategis meliputi jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pelabuhan menunjukkan kinerja layanan yang konsisten dalam kategori “baik” dengan indeks rata-rata di atas 74. Selain itu, tingkat harapan masyarakat terhadap layanan tersebut juga sangat tinggi, sebagaimana tercermin dari nilai rata-rata tertimbang yang mencapai lebih dari 83, yang seluruhnya masuk dalam kategori “sangat penting”.

Pada aspek jalan raya, indikator kontribusi terhadap perekonomian mencatatkan nilai indeks kinerja tertinggi sebesar 76,89, menunjukkan

bahwa masyarakat menilai jalan raya memiliki peran vital dalam mendorong aktivitas ekonomi. Sementara itu, indikator penyerapan tenaga kerja memperoleh nilai kinerja terendah (75,57), namun tetap dalam kategori baik. Harapan layanan tertinggi juga ditemukan pada indikator kontribusi ekonomi (86,44), mencerminkan tingginya ekspektasi publik terhadap fungsi jalan raya sebagai tulang punggung mobilitas dan produktivitas daerah.

Infrastruktur jembatan menampilkan performa yang sangat baik, dengan nilai indeks tertinggi pada indikator kontribusi terhadap perekonomian (77,81) dan pemanfaatan (77,50). Nilai ini mencerminkan bahwa jembatan di Kota Samarinda tidak hanya fungsional secara teknis, tetapi juga memiliki dampak signifikan dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Tingginya nilai harapan layanan (86,67 pada kontribusi ekonomi dan 86,35 pada pemanfaatan) mengindikasikan bahwa masyarakat memandang jembatan sebagai infrastruktur yang sangat strategis dalam sistem logistik dan konektivitas wilayah.

Sementara itu, fasilitas kesehatan menunjukkan kinerja yang konsisten baik di seluruh indikator, dengan nilai tertinggi pada indikator kesesuaian (77,80) dan kontribusi terhadap perekonomian (76,43). Nilai harapan layanan juga relatif tinggi, terutama pada indikator kontribusi terhadap perekonomian (87,67), yang merupakan salah satu skor tertinggi dalam seluruh kategori. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat fasilitas kesehatan sebagai layanan dasar, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas masyarakat yang sehat. Pada infrastruktur pelabuhan, meskipun nilai indeks kinerjanya sedikit lebih rendah dibandingkan infrastruktur lainnya (kisaran 74,71–76,10), seluruh indikator tetap masuk dalam kategori baik. Indikator kontribusi terhadap perekonomian mencatatkan skor tertinggi (76,10), menegaskan peran penting pelabuhan dalam mendukung aktivitas perdagangan dan ekspor-impor. Harapan masyarakat juga cukup tinggi, khususnya pada penyerapan tenaga kerja

(85,53) dan kontribusi ekonomi (85,39), yang mencerminkan kesadaran publik akan pentingnya pelabuhan sebagai motor penggerak ekonomi kawasan pesisir.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa kualitas layanan infrastruktur di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Tingginya nilai harapan layanan pada semua indikator juga menjadi sinyal positif bagi pemerintah dimana masyarakat percaya dan berharap besar terhadap peran strategis infrastruktur dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Temuan ini juga tentunya dapat menjadi dasar empiris yang kuat bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan peningkatan infrastruktur yang lebih terukur, responsif, dan berbasis bukti, guna memperkuat daya saing daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara detail, hasil analisis indeks kualitas infrastruktur di Kota Samarinda sebagai berikut.

Infrastruktur	Variabel Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur							
		Indeks Kesesuaian				Indeks Kesiadaan			
		Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Nilai Indeks	Kategori*	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Nilai Indeks	Kategori
Jalan Raya	Ketersediaan fisik	2.99	0.17	74.86	sesuai	3.18	0.17	79.56	Terpenuhi
	Kualitas fisik	3.03	0.17	75.66	sesuai	3.10	0.17	77.49	Terpenuhi
	Kesesuaian	3.07	0.17	76.84	sesuai	3.14	0.17	78.62	Terpenuhi
	Pemanfaatan	3.12	0.17	78.05	sesuai	3.21	0.17	80.36	Sangat Terpenuhi
	Kontribusi terhadap perekonomian	3.09	0.17	77.24	sesuai	3.20	0.17	79.95	Terpenuhi
	Penyerapan tenaga kerja	3.01	0.17	75.19	sesuai	3.22	0.17	80.58	Sangat Terpenuhi
Jembatan	Ketersediaan fisik	2.99	0.17	74.66	sesuai	3.12	0.17	78.03	Terpenuhi
	Kualitas fisik	3.03	0.17	75.71	sesuai	3.19	0.17	79.63	Terpenuhi
	Kesesuaian	3.08	0.17	77.03	sesuai	3.27	0.17	81.79	Sangat Terpenuhi
	Pemanfaatan	3.07	0.17	76.85	sesuai	3.23	0.17	80.85	Sangat Terpenuhi
	Kontribusi terhadap perekonomian	3.03	0.17	75.74	sesuai	3.25	0.17	81.13	Sangat Terpenuhi

Gambar 3. 18 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Infrastruktur	Variabel Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur							
		Indeks Kesesuaian				Indeks Kesiadaan			
		Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Nilai Indeks	Kategori*	Nilai Rata-rata	Nilai Rata-rata Tertimbang	Nilai Indeks	Kategori
	Penyerapan tenaga kerja	2.94	0.17	73.54	sesuai	3.19	0.17	79.86	Terpenuhi
Fasilitas Kesehatan	Ketersediaan fisik	3.00	0.17	75.11	sesuai	3.07	0.17	76.86	Terpenuhi
	Kualitas fisik	3.04	0.17	76.05	sesuai	3.14	0.17	78.44	Terpenuhi
	Kesesuaian	3.08	0.17	76.97	sesuai	3.20	0.17	80.00	Sangat Terpenuhi
	Pemanfaatan	3.10	0.17	77.61	sesuai	3.18	0.17	79.51	Terpenuhi
	Kontribusi terhadap perekonomian	3.01	0.17	75.34	sesuai	3.19	0.17	79.82	Terpenuhi
	Penyerapan tenaga kerja	2.96	0.17	73.99	sesuai	3.18	0.17	79.43	Terpenuhi
Pelabuhan	Ketersediaan fisik	2.95	0.17	73.70	sesuai	3.12	0.17	77.95	Terpenuhi
	Kualitas fisik	3.02	0.17	75.42	sesuai	3.12	0.17	77.88	Terpenuhi
	Kesesuaian	3.02	0.17	75.43	sesuai	3.15	0.17	78.72	Terpenuhi
	Pemanfaatan	2.92	0.17	73.01	sesuai	3.08	0.17	77.09	Terpenuhi
	Kontribusi terhadap perekonomian	2.95	0.17	73.77	sesuai	3.11	0.17	77.67	Terpenuhi
	Penyerapan tenaga kerja	2.99	0.17	74.74	sesuai	3.14	0.17	78.45	Terpenuhi

Secara makro, hasil ini menunjukkan bahwa Kota Samarinda telah menempuh langkah positif dalam penyediaan infrastruktur publik, namun tantangan utamanya adalah ketimpangan spasial dan ketidakseimbangan antara pembangunan fisik dan dampak ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang berbasis spasial dan kebutuhan sektoral yang lebih terarah. Langkah strategis seperti revitalisasi infrastruktur di pusat kota, pengembangan infrastruktur terintegrasi di kawasan pinggiran, dan peningkatan konektivitas antarwilayah akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan jangka menengah dan panjang. Selain itu, penerapan mekanisme public-private partnership (PPP) untuk percepatan investasi infrastruktur, penguatan sistem perencanaan berbasis data, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam evaluasi layanan publik dapat menjadi katalis dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di Kota Samarinda.

➤ Analisis Capaian Kinerja

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) ditetapkan dengan target kinerja Tahun 2025 sebesar **76,24**, dan realisasi yang dicapai juga sebesar **76,24**, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai **100 persen**.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan infrastruktur telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan **target akhir RPJMD sebesar 85**, maka capaian kinerja pada tahun berjalan masih memerlukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan guna mencapai target pembangunan jangka menengah daerah.

➤ Analisis Tren Kinerja

Berdasarkan data yang tersedia, realisasi indikator kinerja **Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)** pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 belum tersedia, sehingga analisis tren kinerja secara komprehensif belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, capaian pada Tahun 2025 yang berhasil memenuhi target menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis.

Ke depan, ketersediaan data capaian kinerja secara berkelanjutan setiap tahun menjadi penting untuk mengukur perkembangan kinerja, mengevaluasi efektivitas kebijakan, serta menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

➤ **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dari sisi efisiensi, pencapaian target indikator kinerja yang mencapai **100 persen** menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur.

Efisiensi ini tercermin dari kemampuan perangkat daerah dalam merealisasikan target yang telah ditetapkan tanpa adanya deviasi capaian kinerja. Selain itu, optimalisasi pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang baik antar unit kerja turut mendukung tercapainya hasil kinerja yang sesuai dengan target yang direncanakan.

Meskipun demikian, upaya peningkatan efisiensi tetap perlu dilakukan melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan layanan infrastruktur.

➤ **Faktor Pendorong dan Penghambat**

Dalam pencapaian indikator kinerja tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat.

Faktor pendorong antara lain:

- Pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang berjalan sesuai dengan rencana kerja.
- Dukungan anggaran yang mendukung pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur.
- Koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- Peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat.



Sementara itu, faktor penghambat yang perlu menjadi perhatian meliputi:

- Belum tersedianya data capaian pada tahun sebelumnya yang dapat digunakan untuk analisis tren kinerja secara menyeluruh.
- Kebutuhan pemeliharaan infrastruktur yang terus meningkat seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk.
- Keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam pengelolaan infrastruktur.
- Faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan kondisi geografis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan.

➤ **Rekomendasi Perbaikan Kinerja**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada tahun-tahun mendatang serta mendukung pencapaian target akhir RPJMD, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengoptimalkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan data kinerja sehingga analisis tren kinerja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.
4. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui prioritas program yang berdampak langsung terhadap kepuasan masyarakat.
6. Mengembangkan inovasi pelayanan publik di bidang infrastruktur guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat.



Sasaran 11

Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2025
Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	64,11	65,33	77,82
Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3,14*	3,85*	3,12*
Indeks Integritas Pemerintah	Indeks	70,97	71,55	72,32

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
67,50	64,57	95,66	85
1,9	3,85*	202,63	2,30
74,5	75,90	101,88	79,60

*Menggunakan nilai indeks SPBE tahun 2024

❖ **Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**



Tabel 3. 13 Data Nilai Evaluasi AKIP se Kalimantan Timur

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Kalimantan Timur	77,82	BB
2	Bontang	71,42	BB
3	Kutai Kartanegara	66,71	B
4	Berau	63,58	B
5	Kutai Timur	60,45	B
6	Penajam Paser Utara	61,14	B
7	Paser	61,96	B
8	Balikpapan	70,63	BB
9	Samarinda	64,57	B
10	Mahakam Ulu	54,00	CC
11	Kutai Barat	63,50	B

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Wali Kota Samarinda yang mencerminkan kualitas penerapan manajemen kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda memperoleh nilai **64,57 dengan predikat B (Baik)**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda telah berjalan cukup efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan akuntabel.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, nilai AKIP mengalami sedikit penurunan dari **65,33 menjadi 64,57**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem manajemen kinerja telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar implementasi SAKIP dapat

memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan kinerja pembangunan daerah.

Secara substantif, capaian nilai AKIP ini mencerminkan bahwa:

1. Kerangka manajemen kinerja daerah telah terbentuk dengan baik melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal.
2. Implementasi SAKIP telah berjalan di sebagian besar perangkat daerah, namun kualitas penerapan belum sepenuhnya merata.
3. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam pengambilan keputusan strategis masih perlu ditingkatkan agar lebih berdampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
4. Integrasi antara perencanaan, pelaksanaan program, hingga evaluasi kinerja masih memerlukan penguatan agar lebih fokus pada pencapaian outcome pembangunan.

Tabel evaluasi AKIP per Komponen Kota Samarinda Tahun 2025

No	Komponen	Tahun	
		2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	21,33	21,24
2	Pengukuran Kinerja	17,23	16,95
3	Pelaporan Kinerja	11,16	11,08
4	Evaluasi Internal	15,61	15,30

Dengan demikian, capaian nilai AKIP tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda telah berada pada jalur yang tepat dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja, namun masih memerlukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong Capaian Kinerja

Capaian nilai AKIP Pemerintah Kota Samarinda didukung oleh beberapa faktor strategis, antara lain:

1. **Komitmen pimpinan daerah dalam reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja**



Dukungan pimpinan daerah menjadi faktor utama dalam mendorong implementasi SAKIP di seluruh perangkat daerah.

2. Implementasi sistem perencanaan dan pelaporan kinerja yang telah terbangun

Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki sistem perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang berjalan secara terstruktur dan tepat waktu.

3. Pelaksanaan evaluasi AKIP internal secara menyeluruh pada perangkat daerah

Evaluasi internal yang dilakukan oleh APIP menjadi instrumen penting dalam menjaga kualitas implementasi manajemen kinerja.

4. Mulai diterapkannya pendekatan manajemen kinerja berbasis hasil (result oriented government)

Perangkat daerah mulai diarahkan untuk fokus pada pencapaian sasaran strategis dan dampak pembangunan.

5. Koordinasi antar perangkat daerah dalam implementasi SAKIP

Kolaborasi lintas perangkat daerah mendukung proses perencanaan hingga evaluasi kinerja.

Faktor Penghambat Capaian Kinerja

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang masih menjadi kendala dalam peningkatan nilai AKIP, yaitu:

1. Kualitas perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya berbasis kinerja dan data

Masih terdapat penetapan target kinerja yang belum mempertimbangkan capaian baseline secara optimal.

2. Pemanfaatan pengukuran kinerja yang belum maksimal sebagai dasar pengambilan kebijakan

Pengukuran kinerja masih berfokus pada capaian program/kegiatan dan belum sepenuhnya digunakan sebagai instrumen pengendalian kinerja.

3. Kualitas analisis dalam laporan kinerja yang belum merata di seluruh perangkat daerah



Beberapa laporan kinerja belum memuat analisis yang komprehensif terkait keberhasilan maupun kendala pencapaian kinerja.

4. Evaluasi internal yang belum sepenuhnya memberikan rekomendasi strategis

Hasil evaluasi internal masih perlu diperkuat agar mampu memberikan arah perbaikan yang lebih konkret.

5. Implementasi cascading kinerja yang belum optimal
Keterkaitan antara sasaran strategis kepala daerah dengan indikator kinerja perangkat daerah belum sepenuhnya selaras.

Untuk meningkatkan nilai AKIP sebagai indikator kinerja strategis kepala daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan beberapa strategi utama sebagai berikut:

1. Penguatan Kepemimpinan Kinerja (Performance Leadership)

- Meningkatkan peran pimpinan perangkat daerah dalam pengendalian dan evaluasi kinerja.
- Memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berbasis pada pencapaian kinerja.

2. Penyempurnaan Perencanaan Kinerja yang Berkualitas

- Menyelaraskan dokumen RPJMD, Renstra, dan Perjanjian Kinerja secara lebih kuat.
- Menetapkan indikator kinerja yang terukur, relevan, dan berbasis outcome pembangunan.

3. Optimalisasi Sistem Pengukuran dan Monitoring Kinerja

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang.
- Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis.

4. Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

- Memastikan laporan kinerja memuat analisis yang komprehensif dan berbasis data.



- Menjadikan laporan kinerja sebagai instrumen perbaikan kebijakan pembangunan.

5. Penguatan Evaluasi Internal dan Pengawasan Kinerja

- Meningkatkan kualitas evaluasi internal SAKIP oleh APIP.
- Memastikan tindak lanjut rekomendasi evaluasi dilakukan secara sistematis dan terukur.

6. Transformasi Budaya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah

- Mendorong budaya kerja berbasis kinerja dan hasil.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam implementasi SAKIP.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan agar mampu mencapai tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih tinggi, yaitu predikat **BB (Sangat Baik)**.

Target peningkatan nilai AKIP menuju predikat BB menjadi langkah strategis dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil pembangunan daerah. Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan kualitas reformasi birokrasi serta penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa area utama yang menjadi fokus perbaikan untuk mencapai predikat BB, yaitu kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja yang lebih berbasis outcome, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta penguatan evaluasi internal secara komprehensif.

Secara strategis, peningkatan nilai AKIP menuju predikat BB diarahkan pada transformasi manajemen kinerja pemerintah daerah yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi, tetapi juga pada pencapaian dampak pembangunan yang nyata bagi masyarakat.

Arah Strategi Peningkatan Nilai AKIP Menuju BB

1. Penguatan Perencanaan Kinerja Berbasis Outcome

Pemerintah Kota Samarinda akan memastikan bahwa seluruh dokumen perencanaan kinerja telah selaras dan terintegrasi mulai dari

RPJMD, Renstra perangkat daerah, hingga Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja akan difokuskan pada indikator yang mencerminkan hasil pembangunan (outcome) serta memiliki keterkaitan langsung dengan sasaran strategis daerah.

Selain itu, penetapan target kinerja akan disusun secara lebih realistis dan progresif dengan mempertimbangkan capaian baseline sebelumnya, sehingga mendorong peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

2. Optimalisasi Cascading dan Alignment Kinerja

Untuk mencapai predikat BB, diperlukan penguatan keterkaitan antara kinerja kepala daerah dengan kinerja perangkat daerah hingga unit kerja terkecil. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda akan memperkuat implementasi cascading kinerja sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Langkah ini juga akan memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki peran yang jelas dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah.

3. Penguatan Pengukuran dan Pemanfaatan Kinerja

Salah satu faktor penting dalam peningkatan nilai AKIP adalah pemanfaatan hasil pengukuran kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Samarinda akan:

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala dan berjenjang.
- Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian kebijakan dan program pembangunan.
- Meningkatkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam proses pengendalian kinerja.

Dengan demikian, sistem pengukuran kinerja tidak hanya berfungsi sebagai pelaporan, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja yang efektif.



4. Peningkatan Kualitas Analisis Kinerja dalam Laporan Kinerja

Untuk mencapai predikat BB, laporan kinerja tidak hanya menyajikan capaian indikator, tetapi juga harus memuat analisis yang komprehensif terkait:

- Faktor keberhasilan pencapaian kinerja,
- Kendala yang dihadapi,
- Efektivitas program dan kegiatan,
- Strategi perbaikan ke depan.

Dengan peningkatan kualitas analisis tersebut, laporan kinerja dapat menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kualitas kebijakan dan program pembangunan daerah.

5. Penguatan Evaluasi Internal dan Peran APIP

Evaluasi internal akan ditingkatkan agar lebih komprehensif dan memberikan rekomendasi yang strategis serta implementatif. Selain itu, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) akan diarahkan pada:

- Pengawasan implementasi SAKIP secara berkelanjutan,
- Pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi,
- Pendampingan perangkat daerah dalam peningkatan kualitas manajemen kinerja.

6. Transformasi Budaya Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan nilai AKIP menuju BB juga memerlukan perubahan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda menuju budaya kerja yang berorientasi pada hasil (performance driven government). Hal ini dilakukan melalui:

- Penguatan komitmen pimpinan perangkat daerah,
- Peningkatan kapasitas SDM dalam implementasi SAKIP,
- Integrasi sistem kinerja dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.



Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Perbaikan AKIP Pemerintah Kota Samarinda

No	Rekomendasi sesuai LHE AKIP 2024	Unit/Satuan Kerja Penanggung Jawab
1	Agar seluruh perangkat daerah mempertimbangkan penetapan target kinerja disesuaikan dengan kondisi baseline capaian kinerja sebelumnya sehingga dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik.	Bapperida / Perangkat Daerah
2	Agar seluruh perangkat daerah memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja dalam penetapan Perjanjian Kinerja.	Bapperida / Perangkat Daerah
3	Agar seluruh perangkat daerah menetapkan rencana aksi sesuai dengan langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mewujudkan capaian kinerja akhir tahun yang termuat di PK.	Bapperida / Perangkat Daerah
4	Agar seluruh perangkat daerah memastikan pengukuran kinerja dilakukan secara triwulan, dan melakukan identifikasi masalah/kendala serta menetapkan solusi terhadap hasil pengukuran kinerja tersebut.	Bapperida / Perangkat Daerah
5	Agar setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.	Bapperida
6	Agar Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan(Decision Maker) dalam pemanfaatan hasil pengukuran kinerja.	Bapperida
7	Agar Informasi dalam laporan kinerja menjadi acuan dalam penyesuaian strategi untuk mencapai kinerja.	Bag. Organisasi / Perangkat Daerah
8	Agar setiap perangkat daerah menyusun Laporan Kinerja dengan memuat analisa capaian kinerja yang disertai faktor penghambat dan pendukung, serta memuat penjelasan atas keberhasilan dari suatu program/kegiatan yang dipilih oleh unit terkait.	Bag. Organisasi / Perangkat Daerah
9	Agar pimpinan unit kerja menindaklanjuti secara konkret seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan tindak lanjutnya dipantau oleh APIP/evaluator internal.	Inspektorat / Perangkat Daerah
10	Agar menyempurnakan pelaksanaan evaluasi AKIP internal sehingga lebih konkret dan komprehensif sesuai dengan standar evaluasi yang telah ditetapkan.	Inspektorat

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran pada Program Pendukung

No.	Nama Program /Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Kinerja Anggaran %
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 10.142.513.743	Rp 9.519.829.317	93,86
2	Kegiatan Penataan Organisasi	Rp 835.567.762	Rp 828.415.334	99,14
3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 4.236.650.250,00	Rp 3.229.187.767,00	76,22%
4	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 3.198.335.965,00	Rp 1.925.519.100,00	60,20%

❖ Indeks Pemerintahan Digital

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, indikator Indeks Pemerintahan Digital ditargetkan sebesar 1,90, sedangkan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 3,85, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 202,63 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda telah melampaui target yang direncanakan.

Pelaksanaan indikator ini pada Tahun 2023 hingga Tahun 2025 masih menggunakan pengukuran Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil evaluasi SPBE Tahun 2024, Pemerintah Kota Samarinda memperoleh nilai indeks sebesar 3,85 dengan predikat Sangat Baik. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda tidak termasuk dalam daftar pemerintah daerah yang dilakukan pemantauan evaluasi SPBE, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 masih mengacu pada hasil penilaian Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kota Samarinda telah berjalan dengan baik melalui penguatan tata kelola

pemerintahan digital, peningkatan integrasi layanan, serta pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik.

Berdasarkan data capaian kinerja dalam tiga tahun terakhir, perkembangan nilai indeks menunjukkan tren peningkatan kinerja, yaitu:

- Tahun 2023 sebesar 3,14
- Tahun 2024 sebesar 3,85
- Tahun 2025 sebesar 3,85 (mengacu pada hasil evaluasi Tahun 2024)

Peningkatan nilai indeks dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi SPBE, khususnya pada aspek tata kelola, layanan digital, serta integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Secara umum, tren kinerja menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan digital di Kota Samarinda mengalami perkembangan yang positif dan berada pada kategori sangat baik.

Dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Indeks Pemerintahan Digital, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan program pengelolaan aplikasi informatika dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

- Tahun Anggaran 2024
Pagu anggaran sebesar Rp2.875.000.000 dengan realisasi sebesar Rp2.847.529.055 atau sekitar 99,04 persen dari pagu anggaran.
- Tahun Anggaran 2025
Pagu anggaran sebesar Rp3.134.860.000 dengan realisasi sebesar Rp1.282.680.600 atau sekitar 40,92 persen dari pagu anggaran.

Meskipun realisasi anggaran Tahun 2025 belum optimal, capaian kinerja indikator tetap dapat dipertahankan pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, serta didukung oleh kebijakan dan tata kelola SPBE yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik dalam pemanfaatan sumber daya, khususnya dalam pengelolaan aplikasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

➤ **Faktor Pendorong Pencapaian Kinerja**

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Indeks Pemerintahan Digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Tersusunnya dokumen kebijakan dan pedoman SPBE sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
2. Dukungan anggaran dalam program dan kegiatan pengelolaan aplikasi informatika.
3. Terjalannya koordinasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah dalam implementasi SPBE.
4. Tersusunnya pemetaan aplikasi SPBE Kota Samarinda dalam arsitektur SPBE daerah.
5. Dukungan sumber daya manusia melalui tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis di bidang teknologi informasi.

➤ **Faktor Penghambat**

Secara umum, pencapaian indikator kinerja pada tahun berjalan tidak mengalami hambatan yang signifikan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

1. Tidak dilaksanakannya evaluasi SPBE pada Tahun 2025 sehingga capaian kinerja masih mengacu pada hasil penilaian tahun sebelumnya.
2. Perubahan kebijakan nasional terkait transformasi pengukuran dari Indeks SPBE menuju Indeks Pemerintahan Digital yang memerlukan penyesuaian dalam tata kelola dan indikator kinerja.
3. Kebutuhan peningkatan integrasi sistem dan aplikasi antar perangkat daerah untuk mendukung layanan pemerintahan digital yang lebih optimal.



➤ **Rekomendasi Perbaikan dan Peningkatan Kinerja**

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun mendatang, beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Memperkuat tata kelola SPBE melalui penyempurnaan kebijakan, standar, dan pedoman pendukung.
2. Mengembangkan dan memutakhirkan arsitektur SPBE sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.
3. Menyusun proses bisnis layanan pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi.
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan SPBE di seluruh perangkat daerah.
5. Mendorong peningkatan integrasi sistem dan aplikasi antar perangkat daerah guna mendukung interoperabilitas layanan.
6. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan SPBE.
7. Melakukan persiapan penyesuaian tata kelola dan indikator kinerja dalam rangka transisi pengukuran menuju Indeks Pemerintahan Digital.



Realisasi Anggaran		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Tahun Anggaran 2024		
Program: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 2.875.000.000,-	Rp. 2.847.529.055,-
Kegiatan: Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan: Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik		
Tahun Anggaran 2025		
Program: Program Aplikasi Informatika	Rp. 3.134.860.000,-	Rp. 1.282.680.600,-
Kegiatan: Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan: Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur		

❖ Indeks Integritas Pemerintah



Capaian Indeks Integritas Pemerintah

Indikator Kinerja Indeks Integritas Pemerintah **tercapai** dengan capaian kinerja **101,87%** disebabkan beberapa faktor antara lain:



- a. dilaksanakannya Sosialisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, pemaparan hasil SPI 2024 kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Samarinda, pembuatan barcode SPI 2025;
- b. meningkatnya penilaian komponen internal (Pegawai Pemerintah Kota Samarinda) pada SPI 2025 dari sebelumnya 73,18 menjadi 75,24;
- c. meningkatnya penilaian komponen eksternal (masyarakat penerima layanan) pada SPI 2025 dari sebelumnya 85 menjadi 86,91;
- d. dilaksanakannya kampanye integritas dan membangun budaya antikorupsi yang tidak hanya ditujukan kepada pegawai, melainkan kepada masyarakat, siswa dan mahasiswa secara aktif.
- e. dilaksanakannya sosialisasi anti korupsi (terkait penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, gratifikasi, suap dan pemerasan);
- f. dilakukannya strategi pemberantasan anti korupsi melalui partisipasi pegawai Pemerintah Kota Samarinda dan masyarakat dalam rangka Pariwara Anti Korupsi.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan predikat "Waspada" dengan skor indeks sebesar 75,90. Capaian ini merupakan bentuk konsistensi kebijakan *zero tolerance* terhadap korupsi yang dicanangkan pimpinan daerah. Jika dibandingkan dengan rata-rata regional Kalimantan Timur, Samarinda tetap berada di jajaran Top 3 (Tiga Besar), menunjukkan resiliensi sistem birokrasi di tengah dinamika pelayanan publik yang tinggi.

Kota Samarinda menjadi satu-satunya wakil Kalimantan yang masuk 10 Besar Nasional dalam ajang Pariwara Antikorupsi 2025 kategori Media Konvensional. Ini membuktikan efektivitas kampanye edukasi publik.

Beberapa variabel kunci yang berkontribusi positif terhadap pencapaian skor SPI 2025 adalah:

a. Optimalisasi Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa (Skor 83,66):

Penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang terintegrasi penuh telah berhasil memangkas interaksi tatap muka antara penyedia dan pejabat pengadaan. Hal ini secara signifikan menutup celah negosiasi tidak sah dan gratifikasi. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): Pengelolaan PBJ mencatatkan skor tinggi (83,66), menandakan digitalisasi pengadaan telah berhasil meminimalisir interaksi tatap muka yang berisiko. Pada Tahun 2025 pemerintah kota Samarinda aktif melaksanakan sosialisasi PBJ berintegritas untuk meningkatkan tata Kelola pengadaan barang jasa.

b. Transparansi Informasi Publik (Skor 84,12):

Keberhasilan ini didorong oleh keterbukaan akses terhadap dokumen perencanaan dan anggaran (APBD) yang dapat dipantau oleh masyarakat luas, yang juga diperkuat dengan prestasi 10 Besar Nasional Pariwisata Antikorupsi.

c. Pengelolaan Anggaran (Skor 81,19)

Risiko korupsi terkait pengelolaan anggaran relatif lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata risiko level nasional, risiko korupsi tersebut relatif lebih rendah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda berhasil mempertahankan predikat "Waspada" dengan skor indeks sebesar 75,90. Capaian ini merupakan bentuk konsistensi kebijakan *zero tolerance* terhadap korupsi yang dicanangkan pimpinan daerah. Jika dibandingkan dengan rata-rata regional Kalimantan Timur, Samarinda tetap berada di jajaran Top 3 (Tiga Besar), menunjukkan resiliensi sistem birokrasi di tengah dinamika pelayanan publik yang tinggi.

Kota Samarinda menjadi satu-satunya wakil Kalimantan yang masuk 10 Besar Nasional dalam ajang Pariwisata Antikorupsi 2025 kategori Media Konvensional. Ini membuktikan efektivitas kampanye edukasi publik.

Tingginya persepsi integritas di komponen internal pegawai menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai BerAKHLAK telah terlembagakan dengan baik di lingkungan OPD se-Kota Samarinda dan secara aktif dilaksanakan kampanye integritas untuk membangun budaya antikorupsi

- **Solusi/Strategi untuk meningkatkan/mempertahankan pencapaian kinerja yaitu:**

Meskipun mencapai tren positif, terdapat beberapa catatan kritis yang perlu mendapat perhatian khusus:

- a. Rendahnya Skor Sosialisasi Antikorupsi (63,64): Hal ini mengindikasikan bahwa kanal pengaduan masyarakat (*Whistleblowing System*) belum terutilisasi secara maksimal oleh warga sebagai instrumen kontrol sosial sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada seluas-luasnya pegawai dan masyarakat untuk menggunakan *Whistleblowing system*.
- b. Resiko Intervensi (*Trading in Influence*): Masih adanya persepsi mengenai pengaruh pihak eksekutif/legislatif tertentu dalam pengambilan keputusan strategis yang tercermin pada skor 74,29. Oleh karena itu masih diperlukan sosialisasi terkait *trading in influence*.
- c. Masih rendahnya komponen integritas dalam pelaksanaan tugas (69,5). Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa penyalahgunaan fasilitas kendaraan maupun pengelolaan pertanggung jawaban belanja. Oleh karena itu masih diperlukan intensitas kampanye untuk meningkatkan kesadaran pegawai dan integritas melaksanakan tugas.



- d. Pemerintah Kota akan melanjutkan program unggulan dalam upaya pencegahan korupsi terdiri atas:
 - 1. *Inspektorat goes to school/ kampus*;
 - 2. *Car free day*;
 - 3. Pelita Aksi;
 - 4. Kampanye antikorupsi ke media sosial;
 - 5. Sosialisasi ke Pegawai baik terkait integritas, manajemen risiko dan tata kelola;
- e. Untuk meningkatkan skor SPI ke kategori "Terjaga" di tahun mendatang, Pemerintah Kota Samarinda akan melakukan langkah-langkah strategis:
 - 1) *Strengthening Whistleblowing System*: Melakukan *re-branding* dan sosialisasi masif kanal pengaduan korupsi di tingkat akar rumput kecamatan/kelurahan.
 - 2) Meningkatkan pendidikan antikorupsi sejak dini ke siswa/mahasiswa.
 - 3) Meningkatkan budaya antikorupsi ke internal pegawai Kota Samarinda dan masyarakat.
 - 4) Mewajibkan seluruh OPD untuk menyusun dan melaporkan peta risiko korupsi pada setiap unit layanan publik.
 - 5) Melakukan sosialisasi konflik kepentingan dan mendorong perangkat daerah untuk melakukan identifikasi konflik kepentingan.
 - 6) Mendorong perangkat daerah untuk Menyusun unit pengendalian gratifikasi dan melaksanakan implementasi pengendalian gratifikasi.
 - 7) Meninjau kembali instrumen mutasi dan promosi jabatan untuk memastikan transparansi dan keadilan untuk menekan skor kerawanan SDM.
 - 8) Sosialisasi PBJ terutama terkait swakelola untuk meningkatkan kompetensi pengelola pengadaan barang jasa.



- **Program Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja yaitu:**
 - a. Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
 - b. Kegiatan : Pendampingan dan Asistensi
 - c. Sub Kegiatan:
 - 1. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 - 2. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Realisasi Anggaran		
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi/ Kegiatan Pendampingan dan Asistensi/ Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Rp2.221.545.965	Rp1.239.242.200
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi/ Kegiatan Pendampingan dan Asistensi/ Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Rp175.060.000	Rp36.135.000



	Sasaran 12
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Nasional/Provinsi Tahun 2025
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,02	4,26	N/A

Tahun 2025		Capaian Kinerja (%)	Target Akhir RPJMD
Target	Realisasi		
4,30	4,67	108,60	4,75

❖ Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kinerja pelayanan publik di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah didasari 6 aspek penilaian yaitu:

1. **Kebijakan Pelayanan** (meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat)
2. **Profesionalisme SDM**
3. **Sarana dan Prasarana** (meliputi ketersediaan sarpras, kelayakan sarpras serta sarpras berkebutuhan khusus)
4. **Sistem Informasi Pelayanan Publik** (meliputi ketersediaan SIPP elektronik dan non elektronik, kepemilikan situs dan pemutakhiran data)
5. **Konsultasi dan Pengaduan** (meliputi media dan dokumentasi konsultasi serta pengaduan)
6. **Inovasi Pelayanan** termasuk didalamnya pelaksanaan inovasi.

Untuk data evaluasi penilaian kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh KemenpanRB terhadap Kota Samarinda adalah sebagai berikut:



Indeks Pelayanan Publik Kota Samarinda

Indikator Kinerja *Indeks Pelayanan Publik* pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar **4,30**, realisasi mencapai **4,67**, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar **108,60%**. Dengan demikian, terdapat **surplus kinerja (positive gap) sebesar 0,37 poin** terhadap target tahunan.

➤ Analisis Gap Kinerja

Secara kuantitatif, gap antara target dan realisasi menunjukkan bahwa proyeksi perencanaan kinerja telah terlampaui secara signifikan. Surplus 0,37 poin atau 8,60% di atas target mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan dan program peningkatan kualitas pelayanan berjalan lebih efektif dari asumsi awal perencanaan.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar:

- 0,24 poin (2023 ke 2024)
- 0,41 poin (2024 ke 2025)

Kenaikan yang lebih tinggi pada periode 2024–2025 menunjukkan adanya akselerasi perbaikan kualitas pelayanan. Hal ini menandakan bahwa strategi penguatan pelayanan tidak hanya bersifat incremental, tetapi telah mencapai tahap konsolidasi dan pematangan sistem.

Sementara itu, terhadap **Target Akhir RPJMD sebesar 4,75**, capaian tahun 2025 telah mencapai **98,32%**, dengan gap tersisa sebesar **0,08 poin**. Gap yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa target akhir periode berada dalam kondisi sangat realistis untuk dicapai, bahkan berpotensi terlampaui sebelum periode RPJMD berakhir.

➤ **Analisis Efektivitas Program Pendukung**

Capaian Indeks Pelayanan Publik tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pendukung, antara lain:

1. Penguatan Standar Pelayanan dan Kepatuhan Regulatif

Pemenuhan komponen standar pelayanan (maklumat pelayanan, SOP, sistem pengelolaan pengaduan, survei kepuasan masyarakat) telah berjalan lebih sistematis dan terdokumentasi. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan nilai evaluasi pelayanan publik.

2. Digitalisasi dan Simplifikasi Proses Layanan

Optimalisasi layanan berbasis elektronik mengurangi waktu tunggu, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi maladministrasi. Digitalisasi ini berkontribusi signifikan terhadap persepsi kualitas layanan.

3. Peningkatan Kompetensi SDM Pelayanan

Pelatihan teknis dan penguatan budaya pelayanan prima mendorong perubahan perilaku aparatur menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Penguatan Sistem Pengelolaan Pengaduan

Responsivitas terhadap pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang terukur meningkatkan kepercayaan publik serta memperbaiki aspek akuntabilitas pelayanan.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pengawasan internal yang konsisten mencegah penurunan standar dan memastikan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Secara evaluatif, efektivitas program dapat dinilai tinggi karena terjadi korelasi positif antara intervensi kebijakan dengan peningkatan indeks secara konsisten selama tiga tahun berturut-turut. Tidak terdapat stagnasi atau penurunan nilai, yang menunjukkan bahwa program tidak bersifat administratif semata, tetapi memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan.

Meskipun capaian telah melampaui target tahunan, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian strategis, yaitu menjaga konsistensi kualitas antar perangkat daerah, mengurangi potensi disparitas layanan, serta mengantisipasi meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kecepatan dan kemudahan layanan.

Dengan mempertimbangkan tren peningkatan yang signifikan, kecilnya gap terhadap target akhir RPJMD, serta efektivitas program pendukung yang terbukti, maka Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dapat dinyatakan **tercapai secara sangat memuaskan dan berada pada jalur percepatan menuju target akhir RPJMD**.

Tabel 3. 16 Serapan Anggaran pada Kegiatan yang mendukung IPP Kota Samarinda

Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi
Penataan Organisasi	Rp 835.567.762	Rp 828.415.334

% Kinerja Anggaran : 99,14%



Berbagai upaya telah dilakukan dengan mengintensifkan monev di perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik langsung kepada masyarakat. Selain itu pendampingan penyelenggaraan yanlik juga terus dilakukan oleh tim monev pelayanan publik kota samarinda melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan Meningkatkan Sistem Pelayanan Publik melalui:

- Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
- Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan
- Meningkatkan layanan penanganan masalah pertanahan melalui identifikasi tanah negara, dan pelayanan pengadaan tanah untuk kepentingan publik, dan penanganan sengketa pertanahan
- Peningkatan kualitas pengelolaan arsip daerah
- Peningkatan standar pelayanan dan kepatuhan terhadap regulasi pelayanan publik.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan (digitalisasi layanan).
- Peningkatan kompetensi SDM penyelenggara layanan
- Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya.
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap unit-unit pelayanan.



3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Kebijakan yang ditetapkan meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, maupun tindakan strategis kepala daerah dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat yang bersifat prioritas selama satu tahun anggaran. Adapun kebijakan yang diambil oleh Wali Kota Samarinda pada Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Kebijakan Strategis Tahun 2025

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2025 tentang PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA	Pengadaan barang / jasa merupakan aspek penting untuk kelangsungan berjalannya penyelenggaraan layanan kesehatan di RSUD I.A. Moeis
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2025 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDOEL MOEIS SAMARINDA	Sehubungan dengan perubahan Visi dan Misi pada Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 35 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Inche Abdoel Moeis Samarinda
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2025 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 25 Tahun 2025 tentang PENGENDALIAN KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH INCHE ABDUL MOEIS SAMARINDA	Agar pelaksanaan program jaminan kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dilakukan upaya untuk mencegah kerugian dana jaminan sosial nasional akibat kecurangan
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 36 Tahun 2025 tentang PEDOMAN SISTEM	Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERPADU KOTA SAMARINDA	pendidikan bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya tersebut dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 49 Tahun 2025 tentang KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KOTA SAMARINDA	anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 73 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 65 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SAMARINDA	dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Terpadu Kota Samarinda, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2022 tentang Pemberian Honorarium bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah Negeri dan Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2025 tentang RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025-2026	Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
2	PEMBANGUNAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN MILIK PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DI JAKARTA	Sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf J Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf l dan Pasal 111 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diatur Pengelolaan Tempat Penginapan/Mess



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Perwakilan milik Pemerintah Kota Samarinda yang berada di Jakarta
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA	Dalam rangka memudahkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Reklame dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, perlu dipasang QR Code pada Objek Reklame
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota yang mengatur besarnya nilai perolehan Air Tanah
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2025 tentang PEMBEBASAN POKOK DAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2025	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2025 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PEMAKAIAN BANGUNAN DAN/ATAU GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI DAN FASILITAS DAN/ATAU PERLENGKAPAN STADION SEGIRI	Dengan selesainya revitalisasi Komplek Gedung Olahraga Segiri beserta fasilitas penunjangnya, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Pemakaian Bangunan dan/atau Gedung Olahraga Segiri, dan Fasilitas dan/atau Perlengkapan Stadion Segiri, untuk membiayai operasional layanan yang meningkat
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2025 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA PADA LAPANGAN BASKET DAN KOLAM RENANG GEDUNG OLAHRAGA SEGIRI	Dengan selesainya revitalisasi Komplek Gedung Olahraga Segiri beserta fasilitas penunjangnya, perlu melakukan penyesuaian tarif layanan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga pada Lapangan Basket dan Kolam Renang untuk membiayai operasional layanan yang meningkat
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN, PERIZINAN, DAN PENATAAN REKLAME	Dalam rangka penataan reklame di Kota Samarinda agar tidak mengganggu estetika kota, lebih memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, efisiensi proses perizinan, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan serta



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			adaptasi terhadap teknologi baru di bidang reklame, perlu diatur tata kelola penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 43 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	dalam rangka Hari Ulang Tahun Kota Samarinda sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak masyarakat, perlu adanya pemberian insentif berupa pengurangan dan pembebasan sanksi administratif;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 50 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR SEHAT	sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat berupa Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik yang dilakukan dengan berpedoman pada standar nasional Indonesia pasar rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 54 Tahun 2025 tentang PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN	sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 84 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH	dalam rangka memberikan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk keringanan beban pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
3	PENURUNAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Dalam rangka menumbuhkembangkan, menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat, perlu dilakukan perbaikan rumah tidak layak huni
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 33 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 57 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	agar pelaksanaan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah dapat tepat sasaran, perlu diatur lebih terperinci persyaratannya;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 35 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH	koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 88 Tahun 2025 tentang FASILITASI PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN SUMBANGAN DANA GOTONG ROYONG UNTUK PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	pengumpulan dan pengelolaan sumbangan untuk pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu unsur penunjang usaha kesejahteraan sosial yang dilandasi oleh jiwa kegotongroyongan;
4	PENGUATAN KETAHANAN PANGAN	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 23 Tahun 2025 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK	Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
5	IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 24 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif maupun teknis agar menjamin keamanan,



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		SEDERHANA	keselamatan dan kenyamanan bagi penghuni dan lingkungannya
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2025 tentang PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG KHUSUS HARGA SATUAN GEDUNG NEGARA/STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI	Sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (8) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Tabel Harga Satuan Gedung Negara/Standar Harga Satuan Tertinggi
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK	Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan MPP
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
6	LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana belum mengakomodir presentasi besaran jumlah kontribusi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah sehingga perlu diubah
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda	Dalam rangka peningkatan pelayanan dan pengembangan kegiatan usaha penyediaan air bersih serta sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Samarinda
7	KOTA TANGGUH PERUBAHAN IKLIM	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Pelindungan Masyarakat, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 78 Tahun 2025 tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029	rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan kompleksitas dan potensi bencana yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lainnya secara nyata mengisyaratkan bahwa masing-masing daerah memerlukan suatu rencana yang bersifat terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah
8	KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS ANTAR DAN INTER WILAYAH	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 39 Tahun 2025 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SAMARINDA UTARA	ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 52 Tahun 2025 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2026, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 53 Tahun 2025 tentang RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN LOA JANAN ILIR	ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan Upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 57 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIDOMULYO KECAMATAN SAMARINDA ILIR	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Samarinda Ilir;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 58 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SELILI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 59 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI DAMA KECAMATAN SAMARINDA ILIR	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 60 Tahun 2025 tentang	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR	untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 62 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN MAKROMAN KECAMATAN SAMBUTAN	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan batas Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 63 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan batas kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 64 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SINDANG SARI KECAMATAN SAMBUTAN	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Desa perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sindangsari Kecamatan Sambutan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 65 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SUNGAI KAPIH KECAMATAN SAMBUTAN	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 66 Tahun 2025 tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN SIDODAMAI KECAMATAN SAMARINDA ILIR	untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 86 Tahun 2025 tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN CITRA NIAGA	penataan bangunan dan lingkungan yang terencana merupakan kebijakan yang sangat penting bagi pembangunan di daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
9	PENCEGAHAN KAWASAN KUMUH	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	Dalam rangka mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat, perlu dilakukan perbaikan rumah tidak layak huni
10	PENINGKATAN REFORMASI BIROKRASI SECARA MENYELURUH	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2025 tentang PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2025 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Dalam rangka mengatur terkait ketentuan pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA	Untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Penilaian kinerja organisasi sejalan dengan upaya mewujudkan kinerja yang prima dan perbaikan berkelanjutan bagi setiap instansi pemerintah
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2025 tentang TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 22 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM KEARSIPAN DAERAH	Dalam rangka menyediakan informasi secara transparan yang merupakan salah satu bagian dari perwujudan sistem pemerintahan yang baik
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 27 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 63 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu melaksanakan penyesuaian terhadap isi Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai diperlukan penambahan ketentuan terkait kriteria budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2025 tentang	Salah satu agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		PENGLOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2025 tentang TIM WALI KOTA UNTUK AKSELERASI PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029	untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 42 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	untuk mengakomodir usulan tambahan komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 46 Tahun 2025 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI	dalam rangka mengatur ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, agar



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA	dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, selektif, dan transparan serta bertanggungjawab, diperlukan suatu peraturan yang memuat tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan dinas
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025	untuk mengakomodir usulan tambahan komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 51 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2025;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2025 tentang PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2026	dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025	dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 tentang PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 68 Tahun 2025 tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SAMARINDA DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029	untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 71 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	pengelolaan Jadwal Retensi Arsip rekam medis adalah upaya untuk menata dan mengelola arsip rekam medis secara sistematis dari penyimpanan arsip dari aktif hingga arsip akhir yang melewati masa simpannya dan arsip tersebut dapat dimusnah jika arsipnya tidak memiliki nilai guna lagi dan arsip yang masih memiliki nilai guna, dapat dilakukan penilaian kembali sehingga arsip tersebut dapat dipermanenkan
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 72 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Tranformasi Digital Nasional yang merupakan kebijakan nasional yang mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan layanan digital, maka pemerintah daerah perlu menyelaraskan program digitalisasi dengan kebijakan nasional untuk percepatan SPBE yang sebelumnya aplikasi bernama SANTER berubah menjadi SAMAGOV
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 74 Tahun 2025 tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 75 Tahun 2025 tentang ANALISA STANDAR BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2026;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 76 Tahun 2025 tentang STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2026;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 79 Tahun 2025 tentang PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP DARI BENCANA	arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2025 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN ARSIP TERTUTUP	dalam rangka menjamin kelancaran layanan penggunaan arsip tertutup untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan peminjaman arsip keluarga/masyarakat serta penyelidikan dan penyidikan, maka perlu menetapkan pedoman perijinan penggunaan arsip tertutup
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 81 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 74 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025	beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 74 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah serta Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor:



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			900.1.3.2/507/SJ tanggal 3 Februari 2025 Perihal: Hasil Verifikasi atas Distribusi Tambahan Penghasilan Pegawai (TTP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 82 Tahun 2025 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 di nilai masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya serta perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan arahan dan pertimbangan Wali Kota yang terbaaru, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 87 Tahun 2025 tentang TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH	beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2025 di nilai masih memiliki kelemahan dalam pelaksanaannya serta perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan arahan dan pertimbangan Wali Kota yang terbaaru, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk penyempurnaan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 89 Tahun 2025 tentang PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	dalam rangka memberikan kemudahan dan keadilan bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan investasi di daerah, diperlukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai bentuk keringanan beban pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029	Untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah, perlu disusun Rencana Jangka Menengah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dengan berpedoman pada Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama
		Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Wali Kota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama
11	PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN INOVASI	Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 44 Tahun 2025 tentang DAFTAR INOVASI DAERAH DAN MEKANISME PELAPORAN SERTA EVALUASI INOVASI DAERAH DI KOTA SAMARINDA	untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berdaya saing, diperlukan pelaksanaan inovasi daerah secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan;
		Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 70 Tahun 2025 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM SOCIAL SECURITY NUMBER	Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Social Security Number sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;



3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel 3. 18 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Kota Samarinda Tahun 2024

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
1.	Perbaikan Sarpras Sekolah. Dinas Pendidikan harus memperhatikan serta mengevaluasi sarana dan prasarana Sekolah yang ada di pinggiran kota Samarinda, dan jangan terjadi perhatian sepenuhnya Pembangunan sekolah di tengah kota saja, harus ada pemerataan pembangunan SD dan SMP di seluruh Kota Samarinda.	Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Layak Telah Dilaksanakan Langkah : pendanaan APBD dan Bantuan Keuangan, serta dukungan program pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program revitalisasi sarana prasarana. Pemerintah Kota Samarinda telah mengakomodir rencana pembangunan SMP di wilayah Balik Buaya pada tahun Anggaran 2024. Penambahan Ruang Kelas Baru Dan Fasilitas Pendukung Lainnya Terus Dilakukan Langkah : usulan APBD, Bantuan Keuangan, dan DAK. Pengadaan mebel sekolah serta TIK sekolah dilaksanakan secara bertahap.	Tujuan : Terwujudnya Pemerataan Pembangunan dan pemenuhan sarana dan Prasarana Pendidikan diseluruh Wilayah Kota Samarinda, termasuk Wilayah Pinggiran Kota, serta terlaksananya Pembangunan SMP di wilayah Balik Buaya pada tahun Anggaran 2024 (SMP 46 dan SMP 47)
	Mandatory Spending Belum Maksimal. Sesuai dengan Anggaran Dinas Pendidikan termasuk mandatory spending 20 % dari APBD, Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2024 belum menyentuh 20 % dari APBD Tahun 2024, hal diharapkan tidak terjadi lagi di tahun 2025.	Langkah : Melakukan Sinkronisasi dan Penajaman perencanaan serta penganggaran urusan pendidikan pada tahun anggaran berikutnya agar seluruh belanja pendidikan terklasifikasi sebagai Mandatory spending 20% APBD melalui koordinasi dengan Bappeda dan BPKAD.	Tujuan : Terpenuhinya ketentuan Mandatory Spending 20% APBD serta terjaminnya pendanaan program prioritas pendidikan.
	Sekolah Model. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran sesuai kebutuhan sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kota Samarinda, dan untuk pengadaan sekolah SMA Model harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi kaltim sehingga tidak terjadi miskomunikasi terkait pengelolaannya.	Penggunaan anggaran Pendidikan diarahkan agar tepat sasaran sesuai kewenangan Pemerintah Kota Samarinda. Langkah : Untuk pengadaan dan pengelolaan Sekolah Model dilakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai dengan kapasitas dan pengembangan kompetensi Pegawai Langkah : kegiatan Webinar maupun Pelatihan Luring serta koordinasi antar perangkat daerah. Pemetaan Program Kerja dan Usulan Peningkatan SDM	Tujuan : Terjaminnya ketepatan sasaran penggunaan Anggaran Pendidikan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Samarinda, Kejelasan pengelolaan Sekolah Model, meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pendidikan, serta terhindarnya miskomunikasi antar tingkat Pemerintah.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		serta Sarana Prasarana terus dilakukan Langkah : peran aktif Operator Dapodik Sekolah sebagai dasar Perencanaan Pembiayaan yang Berkelanjutan.	
	Kekurangan Tenaga Guru. Masih banyak permasalahan yang harus diatasi seperti kekurangan tenaga Guru karena guru banyak memasuki pensiun dan tidak boleh lagi mengangkat Guru Honorer, serta sarana prasarana sekolah yang harus dipenuhi. Diharapkan dinas pendidikan kota Samarinda terkait kekurangan guru ini dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian kota Samarinda terkait pemenuhan jumlah guru yang bisa diterima dari jalur penerimaan tenaga guru CPNS ataupun jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).	Pemetaan dan Analisis Kebutuhan Guru (Retensi & Proyeksi) Langkah : pendataan akurat terhadap jumlah Guru yang memasuki masa pensiun dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan serta menghitung rasio kebutuhan Guru per-mata pelajaran/kelas. Koordinasi Lintas Sektor Langkah : Mengadakan Rapat Koordinasi intensif dengan BKPSDM Kota Samarinda untuk menyusun usulan formasi CPNS dan PPPK berdasarkan data Dapodik terbaru. Optimalisasi Usulan Formasi Langkah : Mengajukan kuota penerimaan guru melalui jalur PPPK secara maksimal kepada Pemerintah Pusat, merujuk pada PP No.49 Tahun 2018, guna mengakomodasi kebutuhan mendesak akibat larangan pengangkatan honorer baru. Audit dan Perencanaan Sarana Prasarana (Sapras) Langkah : Melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi gedung, ruang kelas, dan fasilitas pendukung lainnya untuk disusun ke dalam skala prioritas anggaran pada APBD murni maupun perubahan. Digitalisasi Data Guru Langkah : Memperkuat sistem informasi kepegawaian guru agar distribusi tenaga pendidik lebih merata diseluruh wilayah Kota Samarinda (pemerataan guru)	Masalah yang diselesaikan: 1. Kesenjangan Jumlah Guru: Mengatasi kekosongan posisi pendidik yang ditinggalkan oleh guru purna tugas (Pensiun). 2. Ketidakpastian Status Tenaga Honorer: Menjawab kendala aturan pelanggaran pengangkatan guru honorer dengan memberikan solusi jalur resmi (PPPK/CPNS). 3. Ketimpangan Kualitas Pendidikan: Memperbaiki kondisi sarana prasarana yang rusak atau tidak memadai yang selama ini menghambat proses belajar mengajar. 4. Beban Kerja Berlebih: Mengurangi beban kerja guru yang ada (akibat kekurangan personil) agar kualitas pengajaran tetap terjaga. Tujuan: 1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM): Memastikan setiap memiliki jumlah Guru yang ideal sesuai dengan jumlah rombongan belajar. 2. Kepastian Regulasi: Terciptanya tata kelola tenaga pendidik yang patuh terhadap PP No.49 Tahun 2018. 3. Peningkatan Mutu Lulusan: Dengan sarana yang lengkap dan Guru yang cukup, diharapkan prestasi Akademik dan Non Akademik siswa di Samarinda meningkat. 4. Pemerataan Akses Pendidikan: Menjamin seluruh anak di Samarinda mendapatkan fasilitas sekolah yang layak dan tenaga pendidik yang kompeten.
2.	Peningkatan Klasifikasi Rsud. Mendorong pemerintah kota Samarinda melalui Dinas kesehatan menjadikan Rumah	Langkah : 1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Profesional 2. Peningkatan sarana	Masalah yang diselesaikan: 1. Sebanyak 10 dokter umum sedang melaksanakan program pendidikan dokter



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang D diselesaikan
	sakit IA Moeis untuk ditingkatkan menjadi Rumah sakit Type B.	pendukung 3. Peningkatan jumlah tempat tidur	spesialis yang tersebar di beberapa universitas di Indonesia. 2. Satu Dokter spesialis neurologi sedang melaksanakan program fellowship neurologi di Universitas di Cina 3. Beberapa tenaga kesehatan juga sedang diikuti sertakan pendidikan peningkatan kapasitas seperti perawat, bidan, penata anastesi dan radiographer. 4. Penamahan sebanyak 12 ruangan poliklinik yang baru 5. Penambahan mobil ambulance unit transfuse darah 6. Telah dioprasikannya bangunan rawat inap Kris pada 1 Januari 2026 sebanyak 24 tempat tidur 7. Telah diselesaikannya pembangunan gedung kesehatan ibu dan anak dengan penambahan tempat tidur sebanyak 40 TT sehingga jika dibandingkan dengan eksisting jumlah tempat tidur saat ini dan penambahan tempat tidur maka: 167 ditambah 64 sama dengan 231 tempat tidur yang telah dimiliki di RSUD IA Moeis saat ini.
	Penurunan Angka Stunting. Data prevalensi stunting di Kota Samarinda menunjukkan angka yang signifikan dan menjadi perhatian serius. Pada tahun 2023, prevalensi stunting di Samarinda tercatat sebesar 24,4%, dan data Dinas Kesehatan Kota Samarinda mencatat 4.177 anak mengalami stunting per Juni 2024. Pemerintah Kota Samarinda menargetkan penurunan angka stunting hingga 18% di akhir tahun 2024. untuk mendukung target nasional dalam menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024. sementara di tahun 2024 sendiri tercatat angka stunting di Samarinda sendiri masih berada di 21 % dan masih jauh dari target Pengurangan stunting pemerintah kota Samarinda sehingga perlu kerja keras bagi semua pihak agar target itu dapat tercapai. Terkait hal tersebut meminta Dinas	Adanya perubahan target dari Pemerintah Pusat yang menunjukkan bahwa penurunan stunting memerlukan Kerjasama yang sinergi antar OPD terkait dan komitmen Pemerintah Daerah baik dari segi Kebijakan (Peraturan Daerah) dan Anggaran belum maksimal penurunan stunting karena masalahnya bersifat multidimensi—melibatkan gizi, kesehatan ibu, sanitasi, pendidikan, dan kemiskinan Langkah : Membutuhkan sinergi lintas sektor (Kecamatan, Kelurahan, OPD terkait). Implementasi di lapangan sering kali belum konsisten sehingga perlu dibuatkan strategi aksi daerah yang bisa langsung di terapkan di tingkat kota untuk mendukung target nasional. Peran TIM TPPS	Tujuan: 1. Terlaksananya optimalisasi Tim Intervensi Spesifik TPPS melalui Program Akselerasi Gotong Royong Untuk Stunting (AGUS). 2. Berdasarkan data tahun 2023 hingga pertengahan 2024, prevalensi stunting di Kota Samarinda berhasil ditekan dari 24,4% menjadi 20,3%, mencerminkan penurunan sebesar 4.1% dalam kurun waktu satu tahun. Capaian ini menempatkan Samarinda sebagai salah satu kota dengan penurunan stunting tercepat di Kalimantan Timur. 3. Berdasarkan data tahun 2023 hingga pertengahan 2024, prevalensi stunting di Kota Samarinda berhasil ditekan dari 24,4% menjadi 20,3%, mencerminkan penurunan sebesar 4.1% dalam kurun waktu satu tahun. Capaian ini



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Kesehatan untuk lebih fokus pada strategi peningkatan pencegahan stunting dalam mengatasi stunting di tahun 2025.	Langkah : disinergikan dan perlu konsistensi dalam melakukan evaluasi hasil kerja masing masing penanggung jawab baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Perlunya perubahan strategi di daerah terkait intervensi sensitive sebanyak 70%, sedangkan intervensi spesifik hanya 30%. Semua hal di atas tidak bisa hanya di lakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda, tetapi perlu dilakukan oleh semua pihak dalam konsep pentahelix sebagai bagian dari TPPS Kota Samarinda. Langkah : 1. Pemeriksaan HB pada Remaja Putri untuk menentukan apakah Remaja Putri mengalami Anemia. 2. Peningkatan Asupan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil dengan Pemberian Makanan Tambahan dan Suplementasi bagi Balita dengan gangguan Pertumbuhan dan Gizi dan Ibu Hamil yang bermasalah Gizi (PMT Penyuluhan) serta kegiatan Aksi Gotong Royong (AGUS) Untuk stunting adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT Lokal, PKMK, Suplementasi Gizi/Vipalbumin, taburia). 3. Peningkatan Asupan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil dengan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri dan Ibu Hamil. 4. Memastikan pencatatan pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil dan balita serta edukasi melalui buku KIA dengan kegiatan Pendistribusian Buku KIA bagi Ibu Hamil dan Balita. 5. Pelaksanaan Optimalisasi Intervensi PMT dengan Pendekatan Gotong Royong dengan Pendampingan oleh kader dalam rangka pemberian makanan tambahan berbahan lokal dan tablet tambah darah.	menempatkan Samarinda sebagai salah satu kota dengan penurunan stunting tercepat di Kalimantan Timur. 4. Meningkatkan cakupan Pemeriksaan Hb pada Remaja Putri sehingga bisa dilakukan penanganan secara efektif dan efisien. 5. Meningkatnya Asupan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil yang bisa dilihat dari meningkatnya cakupan Pemberian Makanan Tambahan dan Suplementasi bagi Balita dengan gangguan Pertumbuhan dan Gizi dan ibu hamil yang bermasalah Gizi (PMT Penyuluhan) serta terlaksananya kolaborasi pentahelix melalui kegiatan Aksi Gotong Royong (AGUS) Untuk Stunting dalam Pemberian Makanan Tambahan (PMT Lokal, PKMK, Suplementasi Gizi/Vipalbumin, taburia). 6. Meningkatnya Asupan Gizi untuk Balita dan Ibu Hamil yang bisa kita lihat dari meningkatnya cakupan Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri dan Ibu hamil. 7. Meningkatnya kepatuhan pencatatan pelayanan kesehatan yang diterima oleh ibu hamil dan balita serta edukasi melalui buku KIA dengan kegiatan Pendistribusian Buku KIA bagi Ibu Hamil dan Balita. 8. Meningkatnya cakupan Intervensi PMT dengan Pendekatan Gotong Royong dengan Pendampingan oleh kader dalam rangka pemberian makanan tambahan berbahan lokal dan tablet tambah darah.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Kualitas Pelayanan Puskesmas. Di kota Samarinda terdapat 26 puskesmas yang melayani masyarakat di sekitarnya, terkait hal mendorong Dinas kesehatan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan kualitas sarana dan prasarana puskesmas termasuk peningkatan keahlian tenaga medis dan tenaga administrasi puskesmas untuk lebih baik lagi kedepannya.	Langkah : Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan Rehab-Rehab gedung puskesmas, pemenuhan alat-alat medis dan non medis, pelaksanaan pemeliharaan alat dengan kalibrasi, Monitoring dan Evaluasi berkala, Penanganan keluhan dan pengaduan masyarakat, Pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi tenaga medis dan non medis, Peningkatan kualitas pelayanan melalui pembiayaan BLUD.	Tujuan : Seluruh Masyarakat di Kota Samarinda yang berada di wilayah kerja puskesmas mendapatkan jaminan mutu pelayanan kesehatan secara optimal.
	Pelayanan BPJS Kesehatan. Dinas kesehatan melakukan evaluasi bersama terhadap kebijakan BPJS kesehatan di RSUD milik pemerintah kota samarinda dan Puskesmas telah terlayani dan sesuai dengan harapan jasa pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama Layanan kesehatan dasar, seperti pemeriksaan umum, konsultasi, dan pengobatan penyakit ringan, menjadi prioritas utama.	Langkah : Melaksanakan Monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap kegiatan pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit serta meminta umpan balik dari masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan yang dilakukan 2x setahun untuk Puskesmas dan setahun 4x untuk RS Moeis, demi menjaga dan meningkatkan mutu layanan di Puskesmas yang berada di wilayah kerja Kota Samarinda.	Tujuan : Seluruh Masyarakat di Kota Samarinda yang berada di wilayah kerja puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan jaminan mutu pelayanan kesehatan secara optimal.
	Penyelesaian Tunggakan BPJS Kesehatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tercatat memiliki tunggakan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar Rp28 miliar yang terakumulasi sejak 2020 hingga 2024. Hal ini terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang mengubah iuran Jaminan Kesehatan bagi berbagai kelompok peserta. Dalam Perpres tersebut, iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan, berlaku sejak 1 Agustus 2019. terkait hal tersebut agar Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan OPD teknis lainnya untuk menyelesaikan tunggakan pembayaran BPJS kesehatan ini dan duduk bersama pihak BPJS kesehatan membicarakan strategi dan skema pembayaran secara bertahap atau dibayar keseluruhan dengan melihat kesanggupan dana APBD milik kota Samarinda tahun berjalan.	Langkah : 1. Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Inspektorat dan diarahkan untuk membuat Surat Pernyataan tunggakan iuran Tahun 2025. 2. Pendaftaran untuk masyarakat miskin dan tidak mampu Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial. 3. Tunggakan Iuran Pembayaran PBI tahun 2025 sebesar Rp. 7.436.670.200	Tujuan : 1. Telah mengirimkan Surat Pernyataan Tunggakan Iuran ke Inspektorat dan BPKAD berdasarkan permintaan BPJS Kesehatan dan kesepakatan dengan Kepala daerah setempat, agar membantu likuiditas BPJS Kesehatan dan memastikan peserta PBI mendapatkan layanan kesehatan. 2. Tunggakan Iuran Tahun 2025 sudah diusulkan ke BPKAD dan akan dibayarkan di Tahun 2026.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Kampanye Kesehatan Secara Luas. Meningkatkan kampanye terkait menjaga kesehatan kepada Masyarakat secara masif dan terstruktur terutama pada musim-musim yang rawan dengan naiknya potensi adanya penyakit-penyakit menular.	Langkah : 1. Kampanye Kesehatan yang dilaksanakan pada Kegiatan Pameran Kesehatan tahun 2024, 2025 dengan memanfaatkan penyampaian informasi-informasi pencegahan masalah Kesehatan yang rawan Penyakit menular sering muncul pada musim musim tertentu. 2. Peningkatan Prekwensi Komunikasi dan Edukasi, Melalui Poster, Spaduk, Lieflet dengan memanfaatkan Media Sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi Kunci secara berulang dan Konsisten. 3. Penyuluhan langsung di Komunitas, Sekolah, Tempat kerja, di Posyandu dengan penekanan pada tindakan pencegahan spesifik musim misal Demam berdarah pada musim hujan. 4. Menerapkan skrining kesehatan di Posyandu secara rutin untuk mengidentifikasi kasus secara dini dan mencegah penyebaran lebih lanjut. 5. Memberdayakan Kader dalam bentuk Pelatihan kompetensi dasar Kader Posyandu untuk menjadi agen perubahan dan penyampaian informasi terpercaya di Tingkat RT diwilayah Samarinda	Tujuan : 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat, pemberian edukasi, dan mendorong perubahan perilaku Positif masyarakat pengunjung pameran, dan memperkenalkan produk kesehatan mempromosikan gaya hidup sehat (Olahraga, Gizi, pencegahan penyakit menular). 2. Meningkatnya pengetahuan pada sasaran agar terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dilaksanakan secara berulang-ulang. 3. Terjadinya perubahan perilaku, meningkatnya pengetahuan serta meningkatnya kesadaran masyarakat agar mampu menerapkan perilaku hidup sehat, bersih, atau mandiri dalam kehidupan sehari-hari. 4. Meningkatnya Deteksi dini masalah Kesehatan yang dilaksanakan seperti: Stunting, Hipertensi, Diabetes, Gangguan gizi, Gangguan mental, dari hasil penjangkaran ini agar segera mendapat penanganan tepat sasaran sehingga kualitas kesehatan masyarakat kota samarinda meningkat. 5. Meningkatnya Kapasitas, Pengetahuan, dan Keterampilan Kader sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan dasar yang lebih berkualitas, mengelola Posyandu dengan baik, dan memberikan informasi kesehatan terpercaya kepada masyarakat.
3.	Berdasarkan hasil RDP dan Sidak yang dilakukan Anggota Pansus berkaitan dengan kegiatan pembangunan Terowongan (Tunnel), ada beberapa rekomendasi yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dinas PUPR sebagai penanggung jawab kegiatan, meliputi : a. Proyek Pembangunan terowongan ini menghadapi beberapa kendala seperti faktor geologi dan cuaca yang tidak dapat diprediksi dan kendala ini berpotensi	Proyek pembangunan terowongan. Langkah : dilakukan upaya monitoring cuaca setiap harinya agar dapat dilakukan tindakan mitigasi ataupun alternatif action plan di lapangan.	Tujuan : Meminimalisir potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Saat ini Proyek sedang Finishing 98% selanjutnya dilakukan tahap pengujian.		
	b. Pembangunan Infrastruktur Terowongan tahun 2023 sesuai dengan program APBD mencapai target di akhir tahun 2024, Pembangunan selama 18 bulan dan Perpanjangan hingga tahun 2025 Diantaranya pekerjaan : Pekerjaan terowongan, Jalan Dan Drainase Menggunakan APBD tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar Rp. 395.972.799.000	Pembangunan infrastruktur terowongan. Langkah : menggunakan APBD tahun 2023 dan 2024 dengan Nilai + PPN adalah sebesar Rp 395.972.999.000 serta penambahan ruang lingkup pekerjaan untuk penanganan lereng fase 1 dengan DIPA tahun 2025 dengan Nilai + PPN sebesar Rp 36.331.194.000	Tujuan : Terbangunnya Terowongan Jalan Sultan Alimuddin-Kakap Kota Samarinda yang aman, nyaman dan efisien
	c. Pembangunan Terowongan untuk memecah kemacetan lalu lintas kendaraan yang mengarah sambutan dan jembatan mahkota II	Langkah : pembangunan terowongan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kemacetan di ruas jalan ke arah Sambutan dan Jembatan Mahkota	Tujuan : Mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan di ruas jalan Sambutan dan Mahkota II
	d. Selesai pembangunan Perlu adanya koordinasi terkait rekayasa lalu lintas oleh Dinas perhubungan dan Polresta samarinda	Langkah : koordinasi dengan instansi terkait seperti dishub dan kepolisian berhubungan dengan rekayasa lalu lintas atas pembangunan terowongan Samarinda	Tujuan : Rekayasa lalu lintas terowongan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar
	e. Pekerjaan fisik dimulai awal maret 2023 dimulai dengan design dan persiapan Fisibility Study dengan Pengecekan data bencana, pengecekan tanah dan pengecekan longsor.	Langkah : Pekerjaan phisik awal dilakukan pada awal bulan Maret 2023 dengan pekerjaan pembersihan lahan dan pekerjaan galian open cut di sisi inlet	Tujuan : Terbangunnya Terowongan Jalan Sultan Alimuddin-Kakap Kota Samarinda yang aman, nyaman dan efisien
	f. Kegiatan multiyears yang progress saat ini adalah pembangunan terowongan tembus Jl. Sultan Alimudin ke Jl. Kakap dan diadakan peletakan batu pertama ada bulan januari tahun 2023 yang berjangka waktu 18 bulan. Rencana Terowongan panjang 400 meter dan ada 2 Blower untuk ventilasi udara, sebaiknya ditambahkan 6 blower. Pembuangan aliran air jangan menyebabkan genangan air dan banjir serta perlu adanya Rekayasa lalu lintas sekitar terowongan Dari sisi Jalan tembus sultan Alimudin perlu pelebaran jalan karena lebar jalan 5 meter saja, dan Pengaman Bukit dan lereng hasil investigasi di lapangan Mulai	Pembangunan terowongan dilakukan dengan kontrak multiyears dari 26 Desember 2023 s.d. 31 Desember 2025. Langkah : Pembangunan terowongan dengan rencana awal 400 meter dan bertambah menjadi 552 meter sebagai salah satu perkuatan struktur dan pengamanan atas potensi terjadinya longsor. Blower dalam terowongan telah dipasang sebanyak 6 unit sesuai dengan perhitungan teknis yang direncanakan. Sistem drainase dari pembangunan terowongan sudah direncanakan sedemikian mungkin dengan mempertimbangkan kaidah teknis yang memperhitungkan catchment area, arah aliran air, debit air, kecepatan air, dan	Tujuan : Terbangunnya Terowongan Jalan Sultan Alimuddin-Kakap Kota Samarinda yang aman, nyaman dan efisien



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	start pembangunan dari sisi jalan kakap.	integrasi dengan saluran eksisting.	
	Pembangunan Teras Samarinda. Berkaitan dengan masalah penyediaan kios UKM di lokasi Teras Samarinda, pansus mengharapkan agar untuk di tahap selanjutnya untuk penyediaan kios UKM ini bisa diakomodir, sesuai dengan wacana yang disampaikan dari Pemerintah kota samarinda, yang ingin memberdayakan UKM dan UMKM yang ada di Kota Samarinda.	Langkah : Sesuai dengan masterplan Teras Samarinda secara keseluruhan, bahwa Teras Samarinda ini akan terbagi beberapa segmen, yang mana peletakan UMKM akan tersebar, sehingga tidak mengganggu konsep kawasan	Tujuan : Tidak ada
	Sidak pada kegiatan Renovasi Pasar Pagi. Dijelaskan oleh OPD Tehnis PUPR dan kontraktor pelaksana bahwa untuk pekerjaan Fisik Proyek Tahap I telah selesai 100 % Pembiayaan tahun 2024 sekitar 290 milyar dengan addendum sebanyak 3 kali. Selanjutnya Proyek tahap kedua Tahun 2025 baru progres 10 % dengan dana 150 milyar, Proyek Tahap II ini merupakan pekerjaan Penyekatan Kios, sistem mekanikal, elektrik, dan plumbing, pemasangan keramik, plafond Lift dan eskalator. Bangunan Pasar pagi ini memiliki 7 lantai dan di lantai 1 area parkir roda dua bisa menampung sekitar 704 motor dan Roda empat sebanyak 104 mobil dan lantai 2 sampai lantai 7 area pedagang, lantai 2 pedagang basah seperti pedagang ikan dan sayur Ukuran kios pedagang basah 1.2 x 2 meter dan kios besar 4 x 8 meter. Terkait kegiatan ini termasuk anggaran tahun tunggal di tahun 2024 sebaiknya PUPR selalu berkoordinasi dengan kontraktor agar tepat waktu penyelesaiannya.	Langkah : Akan menjadi perhatian dan evaluasi kedepannya	Tujuan : Tidak ada
	Penanggulangan banjir secara terpadu. Melakukan pembangunan kolam retensi, dengan tujuan mengurangi volume air di beberapa ruas jalan, meliputi Jl. Padat karya, Bengkuring, Jl. Wahid Hasyim dan menuju simpang empat Sempaja. Berdasarkan sidak lapangan masih terkendala masalah dampak sosial dengan masyarakat, dengan ini diharapkan pemerintah kota	Langkah : koordinasi lintas perangkat daerah terkait, sosialisasi kepada masyarakat terdampak, serta penyelesaian hak dan kewajiban para pihak agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar, efektif, dan memberikan manfaat optimal dalam pengendalian banjir	Tujuan : 1. Menyelesaikan dampak sosial terhadap masyarakat terdampak agar pelaksanaan pembangunan kolam retensi dapat berjalan lancar. 2. Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai regulasi yang berlaku melalui penyelesaian permasalahan sosial secara tertib dan berkeadilan.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Samarinda segera menyelesaikan dampak sosial dengan masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku.		
4.	Mengaudit ulang Nilai NJOP yang berlaku	Sesuai Tupoksi Dinas mengenai Audit Nilai NJOP akan disampaikan ke pihak yang berwenang Langkah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berkoordinasi dengan OPD terkait yaitu Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) melalui POKJA PKP.	Tujuan : Nilai NJOP yang berlaku adalah kewenangan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda.
	Sisa Penataan Kawasan kumuh sekitar 37 Hektar dan Perlu perencanaan yang matang.	Tahun 2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akan berbenah dengan konsep baru Langkah : penataan Kawasan kumuh yang terintegrasi dengan baik dan mengacu pada 7 indikator Kementerian PKP, sehingga dalam penataan Kawasan kumuh menghasilkan output yang selaras.	Tujuan : Sisa Kawasan Kumuh Tahun 2024 sebesar 26,16 Ha yang telah di tuangkan dalam BA Pengurangan Kumuh Tahun 2024. Memang kita akui di tahun 2024 dan tahun 2025 perencanaan penataan Kawasan kumuh tidak terintegrasi dengan baik sehingga dapat menghitung perencanaan integrase dengan 7 indikator yang ditetapkan oleh kementerian PKP.
	Penanganan Dampak sosial dimana untuk pelaksanaan ganti rugi lahan melalui Apraisal, seperti Relokasi penataan Sungai Karang Mumus.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menangani pelaksanaan ganti rugi lahan seperti relokasi penataan sungai karang mumus Langkah : melaksanakan pola Apraisal sehingga menciptakan ganti rugi yang transparan dan akuntabel	Tujuan : Pengurangan kawasan kumuh di Kawasan sungai karang mumus.
	Penanganan lampu penerangan jalan umum (LPJU) khususnya pada kawasan lingkungan Pemukiman, sedangkan untuk jalan utama di perkotaan penanganannya ada pada OPD Dinas Perhubungan, berkaitan dengan kegiatan tersebut, ada beberapa rekomendasi yang diberikan, meliputi : a. Untuk penataan kawasan kumuh dan penanganan Dampak Sosial khususnya pada kawasan Tepian Karang mumus diharapkan Pemerintah Kota Samarinda agar lebih cermat didalam melakukan pendataan yang berkaitan dengan status kepemilikan berupa atas Hak maupun Sertifikat yang dimiliki oleh warga, agar tidak menimbulkan permasalahan pada saat pelaksanaan program atau	Pada tahun 2026, Kepala Bidang Kawasan Permukiman memiliki konsep baru pendataan yang lebih cermat lagi dengan data dari aplikasi. Langkah : Verifikasi dilakukan cek langsung melalui turun kelapangan dengan mengambil situasi Kawasan kumuh dan datang langsung ke pemilik rumah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada program Samarinda Terang telah mengelola aspirasi/usulan Masyarakat yang berkaitan tentang LPJU perumahan dan kawasan permukiman Langkah : aplikasi SILAJU PERKIM sejak tahun 2019 telah diimplementasikan berupa penganggaran baik yang berupa pemeliharaan	Tujuan : melakukan penataan Kawasan kumuh dan penanganan dampak sosial melalui pendataan berlapis baik melalui appraisal dan verifikasi kelurahan. Tujuan : pelaksanaan Pembangunan LPJU perumahan dan Kawasan permukiman merupakan salah satu program Kota Samarinda yaitu Samarinda Terang dengan tujuan 1. Mendukung pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa. 2. Menciptakan lingkungan yang lebih terang, aman, dan kondusif bagi masyarakat. 3. Menunjang program pengembangan infrastruktur kota secara keseluruhan.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	kegiatan yang sudah dialokasikan anggarannya pada APBD, b. Pemerintah Kota Samarinda kembali bisa lebih memberikan prioritas anggaran berkaitan dengan pengadaan LPJU yang merupakan aspirasi usulan dari Masyarakat.	maupun penganggaran pembangunan baru LPJU, dengan anggaran pada 2 tahun terakhir (baik dari APBD Kota dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltim) yaitu : Tahun 2024 sebesar Rp. 11.218.326.000,00. 1.814 Titik LPJU Tahun 2025 sebesar Rp. 27.510.197.670,00. 2.898 Titik LPJU	
5.	Pendapatan Asli Daerah / PAD Kota Samarinda mampu melampaui target sebesar Rp 875 miliar, lantaran berhasil memperoleh realisasi sebesar Rp 972 miliar.	Langkah : Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi, Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Penagihan Pendapatan Daerah	Tujuan : Tercapainya target pendapatan daerah
	Perlu Sensus Pajak PBB di setiap Kecamatan	Kegiatan sensus PBB. Langkah : mulai dilaksanakan di Kota Samarinda tahun 2024	Tujuan : Update data untuk akurasi data wajib pajak
	Dari target PAD penambahan dari Sektor Pembayaran PBB dan BPHTB	Langkah : Peningkatan PBB senilai Rp. 5,7 miliar dan Peningkatan BPHTB senilai 19,6 miliar	Tujuan : Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak karena adanya program PTSL
	Pajak parkir tepi jalan target 4 miliar realisasi 2,3 miliar	Langkah : Akan dilakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan	Tujuan : Perbaikan capaian target
	BPHTB Target 135 miliar realisasi 154 miliar	Langkah : Meningkatnya jumlah masyarakat melakukan pemindahan hak atas tanah, Perbaikan NJOP dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	Tujuan : Tercapainya target BPHTB
	PBB target 99 miliar Realisasi 104 miliar	Langkah : Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), penagihan secara aktif, kegiatan Pajak Keliling (JAKLING) dan Gebyar Pajak	Tujuan : Tercapainya target PBB-P2
	Pajak Daerah 612 miliar realisasi 683 miliar	Langkah : Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi, Meningkatkan Pengawasan dan Pemeriksaan serta Penagihan Pendapatan Daerah	Tujuan : Tercapainya target PAD
	BPHTB Sampai target berdasarkan SOP selama 7 hari berkas lengkap dengan langkah sebagai berikut : a. Validasi BPHTB b. Verifikasi data dengan warga (nilai, jual) c. NJOP konfirmasi wajib pajak (harga pasar) d. Tunggakan PBB	Langkah : Proses pelayanan BPHTB akan terus ditingkatkan melalui System BPHTB yang baru	Tujuan : Update data dan memudahkan Wajib Pajak



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	diselesaikan e. Dasar NJOP dan langkah Penyesuaian Nilai NJOP di lapangan f. Penilaian Jurnal nilai tanah bekerjasama dengan BPN dalam bentuk berdasarkan ZNT (zona nilai tanah)		
	Pendataan Pajak konfirmasi pada objek pajak	Langkah : Meningkatkan peran petugas sensus pajak daerah yang sudah tersedia	Tujuan : Update data secara berkala
	Data disesuaikan dengan konfirmasi (kalau objek dijual) dan Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan catatan sipil dalam penyesuaian data NIK KTP objek Pajak	Penyesuaian data objek pajak dengan status kepemilikan dan NIK KTP. Langkah : kerja sama intensif dengan Disdukcapil dan sistem yang digunakan mulai Tahun 2024 adalah SISMIOP Back Office (BO).	Tujuan : Meningkatkan data wajib pajak yg masih terhutang
	Perlakuan Khusus pada Masyarakat tertentu terkait BPHTB.	Pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam proses BPHTB. Langkah : Semua wajib pajak diperlakukan setara sesuai regulasi.	Tujuan : Agar lebih berkeadilan dalam pelayanan pajak
	Pajak untuk Pengelolaan Parkir disesuaikan dengan Jumlah kendaraan yang ada di Kota Samarinda	Langkah : melakukan update data dan berkoordinasi dengan integrasi data Samsat, Dishub, dan Bapenda	Tujuan : Tersedianya data kendaraan yang wajib pajak
	Pajak parkir disesuaikan berapa jumlah kendaraan yang ada di samarinda	Penyesuaian tarif pajak parkir berbasis jumlah kendaraan Langkah : menyusun formula berbasis rasio kapasitas dan utilisasi lahan parkir.	Tujuan : Tersedianya data kapasitas parkir wajib pajak
	Pajak Parkir yang dikelola oleh Pusat Perbelanjaan / mall seperti Vallet Parking apa sudah sesuai laporan Pendapatannya dan harus ada koordinasi dengan tim Teknis dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda	Sudah dilaksanakan Langkah : berkoordinasi dengan pengelola parkir melalui update data	Tujuan : Tersedianya data Vallet Parking Service di Samarinda
	Lebih menggali Potensi untuk Peningkatan PAD Kota samarinda	Langkah : updating data, digitalisasi transaksi, dan penguatan regulasi	Tujuan : Peningkatan target PAD
	Perencanaan parkir dimasukan Gedung Plaza 21 disarankan untuk sarana pengelolaan Parkir.	Langkah : Akan segera dikaji dengan instansi dan OPD terkait untuk pemanfaatan Gedung Plaza 21 sebagai saran parkir	Tujuan : Tercapainya tertib parkir di Sekitar Citra Niaga dan potensi PAD dari parkir
	Khusus OPD sebagai pemungut pajak dan retribusi perlu diperhatikan penambahan potensi sumber daya manusianya terkait penggalan dan pemungutan potensi pendapatan asli daerah di wilayah kerja masing-masing dan pembenahan pengelolaan kantong parkir potensial dan kantong parkir yang belum tergarap maksimal, karena dilihat masih belum optimal	Langkah : berkoordinasi terkait Penambahan SDM pemungut pajak di OPD teknis dan pelatihan intensif. Serta pembenahan Kantong parkir potensial akan ditata ulang dalam upaya peningkatan PAD dari sektor parkir	Tujuan : Terpenuhinya SDM di OPD Pemungut Pajak



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	penerimaan PAD dari sektor tersebut masih ada.		
	Mengoptimalkan Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) potensial meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan lebih progresif melakukan intensifikasi pengumpulan pajak dan retribusi tersebut, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah melalui OPD terkait.	Langkah : maksimal dalam intensifikasi pajak dan retribusi, serta optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah melalui BUMD dan aset strategis	Tujuan : Peningkatan PAD
	Mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari potensi daerah setempat sebagai wujud kemandirian daerah dalam proses pembangunan dan pelayanan.	Optimalisasi PAD akan selalu ditingkatkan Langkah : meningkatkan Tingkat Kemandirian Pemerintah dalam proses pembangunan dan pelayanan	Tujuan : Peningkatan Tingkat Kemandirian Daerah
	Pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar tidak terjadi kebocoran serta mencermati perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) agar daerah menerima sesuai dengan porsinya. Pada Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Samarinda tahun 2024 sendiri mencakup berbagai komponen, termasuk DBH PBB, DBH CHT, DBH Pertambangan, dan DBH lain-lain.	Digitalisasi dan Elektronifikasi Transaksi Pajak dan Retribusi Daerah akan dioptimalkan dalam rangka mengurangi kebocoran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemungutan PAD. Langkah : Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perhitungan TKD	Tujuan : Pelaksanaan digitalisasi dan elektronifikasi pemungutan pajak daerah
	Pendapatan Asli Daerah (PAD) target 875,018 Miliar Rupiah, realisasi sebesar 973,187 Miliar Rupiah atau 111,22 %. DPRD kota Samarinda memberikan apresiasi dan terimakasih pada Pemerintah Kota Samarinda, Bapenda Kota Samarinda selaku koordinator pendapatan, OPD Tehnis pemungut dan pihak-pihak yang memberikan dukungan terhadap capaian ini, Tentu saja kenaikan ini membuat kita tetap menjadi perhatian kita bersama terutama terhadap penggalian sumber-sumber Retribusi Parkir yang berada ditepi jalan umum, Retribusi Perizinan tertentu Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Tempat Minuman Beralkohol dan lainnya, Maka DPRD Kota Samarinda merekomendasikan untuk lebih meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran. DPRD kota Samarinda juga menyampaikan terima kasih	Capaian PAD 111,22% menjadi motivasi untuk menetapkan target yang lebih terukur dan berbasis potensi riil. Langkah : berkoordinasi dengan DPRD dan OPD teknis dalam penetapan target tahun berikutnya.	Tujuan : Tercapainya target PAD



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	kepada Bapenda / UPTD Bapenda yang telah melakukan pendataan / pemutahiran data pajak dilapangan yang termasuk dalam wilayah kerja UPTD terutama pajak Restauran (Rumah Makan), Pajak Bumi Bangunan dalam upaya intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan pada Pajak Bumi Bangunan (PBB) tidak hanya menaikkan tarif nilai NJOP saja yang ujungnya memberatkan masyarakat. Maka dari uraian tersebut DPRD Kota Samarinda merekomendasikan agar Pendataan perlu lebih ditingkatkan lagi dan sosialisasi semakin gencar dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif membayar pajak.		
	Penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun 2024 sebesar target 875,018 Miliar Rupiah, realisasi sebesar 973,187 Miliar Rupiah atau 111,22 % maka Berdasarkan kondisi ini DPRD Kota Samarinda merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Samarinda agar kembali menghitung potensi PAD di Kota Samarinda dan penetapan target pendapatan di tahun-tahun yang akan datang sebaiknya berkoordinasi dengan baik OPD terkait, dengan harapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh Kota Samarinda sehingga lebih realistis dan terukur sehingga dapat kembali meningkat lagi dan berpengaruh positif pada pembangunan di Kota Samarinda. Terhadap Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kembali tetap mengacu pada UU No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada UU No. 1 tahun 2022 tentang HKPD mengatur antara lain pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dilakukan oleh Kabupaten dan Kota di Indonesia. Ada beberapa pungutan yang tidak dapat dipungut lagi oleh Kabupaten Kota serta ada perubahan perhitungan presentasi pengenaan pajak. maka DPRD Kota Samarinda merekomendasikan untuk dapat mencermati dan mereview	Penetapan target PAD tahun-tahun mendatang akan mengacu pada potensi aktual dan UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD serta Perda No. 1 Tahun 2024 tentang PDRD. Langkah : Pemerintah berkomitmen menjaga akurasi, transparansi, dan keberlanjutan fiskal daerah.	Tujuan : Target PAD yang lebih realistis



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	terhadap sistem yang sudah berjalan, hingga kita akan mendapatkan nilai tambah lebih baik lagi kedepannya.		
6.	Pengajuan izin reklame dan tidak bisa membayar pajak, perizinan terkait PBG, dan tata ruang.	Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) baru yang telah diterapkan di awal tahun 2026 Langkah : 1. Telah tersedia peta sebaran reklame Kota Samarinda yang dapat diakses oleh pemohon reklame saat mendaftarkan perizinan reklamennya, peta ini berisi informasi tentang penetapan titik reklame yang diperbolehkan maupun yang diperbolehkan; 2. Telah tersedia informasi interaktif tentang nilai pajak reklame bagi pemohon reklame, dengan memasukkan data jenis reklame dan luas reklame, maka data nilai pajak reklame akan muncul 3. NIK yang telah terintegrasi pada sistem Bapenda Kota terkait pajak daerah khususnya PBB, dalam upaya kepatuhan wajib pajak daerah, pembayaran pajak daerah menjadi main entry point dalam mengakses perizinan reklame; 4. Bapenda kota telah dilibatkan sebagai tim verifikator perizinan reklame, sehingga bila alur proses izin telah masuk pada akun Bapenda Kota, nilai pajak reklame akan terhitung dan informasi pajaknya akan ternotifikasi ke pemohon, sehingga memudahkan pemohon dalam pembayaran pajak reklame; 5. Menu unduh SK izin telah tersedia di akun pemohon, hal ini memudahkan pemohon dalam melakukan pengunduhan SK izin secara mandiri. Dalam verifikasi PBG, DPMPSTSP kota memiliki kewenangan pada verifikasi administrasi penerbitan Surat	Tujuan : Kemudahan bagi pemohon reklame dalam pengurusan perizinan reklame, pembayaran pajak serta PBG reklame



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), untuk verifikasi teknis PBG kewenangannya berada pada Dinas PUPR Kota. Namun demikian DPMPTSP Kota tetap melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan ke Dinas PUPR Kota terkait peningkatan pelayanan perizinan PBG. Dalam hal layanan pembayaran retribusi perizinan PBG, DPMPTSP Kota telah menyiapkan metode pembayaran secara online (VA dan QRis) di aplikasi Sistem Infomasi Perzinan Online (SIPO) Langkah: 1. Pembayaran secara online (VA dan QRis) memudahkan pemohon/ wajib retribusi dalam bertransaksi, tidak perlu datang ke Bank KaltimTara MPP Kota Samarinda untuk membayar secara offline (efisiensi biaya, waktu dan tenaga); 2. Jaminan keamanan bagi pemohon/wajib retribusi bila bertransaksi secara online terhadap tindak kejahatan dll.	
	Potensi pendapatan terkait reklame cukup besar terkait PAD	Kewenangan berada di Bapenda Kota Langkah : DPMPTSP Kota akan berkoordinasi secara berkelanjutan dalam berkolaborasi peningkatan PAD.	Tujuan : Upaya peningkatan PAD Pajak Reklame melalui kolaborasi OPD
	Permasalahan perizinan persetujuan bangunan gedung/ PBG banyak belum tuntas karena berkas tidak sesuai dengan di lapangan	Verifikasi persyaratan teknis PBG dan pengecekan lapangan berada di Dinas PUPR Kota Langkah : DPMPTSP Kota akan berkoordinasi secara berkelanjutan terkait perihal dimaksud.	Tujuan : Upaya penyelesaian kesesuaian PBG antara Permohonan dengan kondisi lapangan
	Pengurusan perpanjangan reklame terbagi dua : a. Reklame sedang adalah reklame tidak memakai tower dan prosesnya langsung bayar retribusi ke bapenda kota samarinda b. Reklame berat adalah reklame yang besar yang memakai	Langkah : 1. Istilah reklame konstruksi ringan dan reklame konstruksi berat termaktub dalam Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 34 Tahun 2023 tentang perubahan peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 12 Tahun	Tujuan : Penyelesaian perizinan reklame berdasarkan peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan dan penataan reklame



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	tower dan harus masyarakat mengurus PBG untuk towernya sehingga banyak perusahaan reklame berat kendala di perijinan PBG,	2020 tentang penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame, sebagaimana telah dicabut dan digantikan dengan peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 31 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan dan penataan reklame; 2. Dalam hal perizinan reklame yang wajib melampirkan PBG sesuai dengan peraturan Wali Kota yang terbaru termasuk dalam kategori reklame terbatas yang memerlukan PBG, Salah satu persyaratan yang wajib dilampirkan dalam kategori reklame ini, bila reklame berada menempel atau di atas bangunan, cukup melampirkan PBG bangunannya saja, namun bila reklame berdiri di atas tanah, wajib melampirkan PBG reklamenya. 3. Dalam hal pengurusan izin PBG reklame, dapat didaftarkan secara bersamaan dengan perizinan reklame, yang mana apabila pemohon mengajukan izin perpanjangan izin perpanjangan kategori reklame terbatas yang memerlukan PBG di tahun depan sudah wajib melampirkan PBG reklamenya; 4. Untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak reklame, Sistem Perizinan SIPO DPMPSTSP Kota sudah terintegrasi dengan sitem E-Reklame Bapenda Kota tujuan integrasi ini salah satunya guna memudahkan pemohon reklame dalam bertransaksi secara Online.	
	Terkait PBG perusahaan reklame banyak belum selesai terkendala mekanime	DPMPSTSP Kota telah menyediakan layanan berbantuan konsultan Langkah : 1. Online melalui website, media sosial, dan aplikasi perizinan; 2. Offline, melalui layanan tatap muka di MPP Kota	Tujuan : Penyelesaian mekanisme izin melalui layanan berbantuan konsultasi



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Samarinda pada gerai DPMPTSP Kota dan Gerai PUPR Kota. Dalam hal ini pemohon/ perusahaan reklame dapat memanfaatkan layanan tersebut dalam pengurusan perizinan reklame dan PBG.	
	Pengurusan lewat konsultan dan sedangkan konsultan di opd tekhnis jumlahnya terbatas.	Langkah : Kewenangan berada PUPR Kota, DPMPTSP Kota akan berkoordinasi secara berkelanjutan terkait perihal dimaksud.	Tujuan : Koordinasi berkelanjutan DPMPTSP Kota dengan PUPR Kota
	Terkait standar pengurusan perizinan dpmptsp menerapkan selesai dalam waktu 14 hari kerja kecuali terkendala di opd tekhnis terkait PBG.	Langkah : Acuan waktu proses masih mengacu pada Perwali Nomor 50 Tahun 2022	Tujuan : Penyelesaian mekanisme waktu proses perizinan dan non perizinan
7.	Program Penanganan Miskin ekstrim dan berharap 0 % Zero di Tahun 2024, terkait dengan ini juga Penanganan stunting, Bapperida sebagai Koordinator dan menganalisa kegiatan. Data kemiskinan Ekstrim berdasarkan dari data BPS / Badan Pusat Statistik	Penanganan kemiskinan di Kota Samarinda dilakukan secara terpadu dan komprehensif dibawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Samarinda. Langkah : melibatkan seluruh unsur yang terkait mulai dari penanganan pengangguran, jaminan sosial, serta OPD lain yang terlibat.	Tujuan : 1. Tingkat kemiskinan kota Samarinda menurun dari tahun 2023: 4,81% (41.850 jiwa), 2024: 4,30% (37.800 jiwa), 2025: 3,45% (30.450 jiwa). Pemerintah kota melalui Dinas Sosial telah melaksanakan <i>Groundcheck</i> kemiskinan (proses verifikasi lapangan untuk memvalidasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran. 2. Angka stunting di Pemerintah kota Samarinda mengalami tren penurunan 21,6 tahun 2021, 25,3 tahun 2022, 24,20 tahun 2023 dan 20,3 tahun 2024. Angka Kemiskinan ekstrem tahun 2024 sebesar 0,21%.
	Menganggarkan Program Bedah Rumah	Langkah : Penganggaran disesuaikan Renstra OPD berdasarkan Dokumen Perencanaan Kota dalam hal ini RPJMD Kota Samarinda	Tujuan : mengurangi kemiskinan ekstrim dari aspek fisik dan juga pencapaian pemenuhan target Pembangunan Nasional dalam hal pengurangan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat
	Probabaya diawali dengan Pokmas berkoordinasi dengan Para RT dan rembuk warga untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan swakelola pekerjaan Probabaya dan pengawasan Pelaksanaan Probabaya perlu difokuskan, Pelaksanaan Probabaya ada yang Tenaga Pendamping /petugas yang ditunjuk oleh Bapperida.	Perencanaan kegiatan Probabaya dilakukan secara berjenjang Langkah : 1. Pengusulan dari tingkat RT (melalui mekanisme rembuk warga). 2. Sinkronisasi usulan perencanaan tingkat RT oleh Kelurahan. 3. Perencanaan tingkat Kelurahan.	Tujuan : 1. Memperkuat Pemberdayaan Masyarakat Secara Langsung. 2. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah. 3. Menguatkan Sinergi Pemerintah dan Warga dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Daerah. 4. Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional dan SDGs di Level



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		4. Perencanaan tingkat Kecamatan. 5. Perencanaan tingkat kota Penyelenggaraan Prokebaya didukung oleh 85 (delapan puluh lima) orang tenaga Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.	Lokal.
	Tim Pendukung Program Prokebaya ada SK-nya, yang dipimpin Ketua oleh Bapak Sekretaris Daerah/ Sekda Kota Samarinda dan Bapperida sebagai Koordinator Prokebaya. Program pembangunan Prokebaya dikoordinasikan dengan Dinas PUPR dalam hal Pekerjaan Infrastruktur.	Langkah : Sesuai dengan Perwali Nomor 11 Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendali Prokebaya yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh Tim Pendukung yang terdiri dari: a. Tim verifikasi usulan dan perencanaan (ketua : Kepala Bapperida); b. Tim verifikasi keuangan (ketua : Kepala BPKAD); c. Tim verifikasi Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan gambar teknik (ketua : Kepala Dinas PUPR); d. Tim pembina teknis; e. Tim publikas (Kepala Dinas Kominfo); f. Tim monitoring (ketua : Inspektur).	Tujuan : Untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan pelaksanaan Prokebaya di Kota Samarinda.
	Inspektorat melaksanakan Pembinaan secara internal terhadap Prokebaya	Langkah : 1. Tahap Konsolidasi dan Administrasi Langkah pertama adalah memastikan seluruh rekomendasi masuk ke dalam sistem penganggaran dan memiliki dasar hukum yang kuat. • Finalisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA): Memastikan poin-poin rekomendasi pembangunan fisik (drainase, semenisasi jalan lingkungan) masuk dalam rincian anggaran OPD terkait atau dana kelurahan. • Penyelarasan dengan RPJMD: Memastikan kegiatan tetap selaras dengan visi Samarinda sebagai "Kota Pusat Peradaban". 2. Prioritas Pembangunan Fisik & Lingkungan Fokus pada mitigasi banjir dan penataan pemukiman yang menjadi isu utama di Samarinda.	Tujuan : 1. Kendala Teknis dan Geografis (Infrastruktur) Meskipun anggaran seperti PROKEBAYA (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) tersedia, eksekusinya sering terbentur kondisi lapangan: Topografi dan Drainase yang Kompleks: Karakteristik tanah Samarinda yang sebagian rawa dan perbukitan membuat pembangunan semenisasi atau drainase cepat rusak jika tidak dibarengi dengan kajian teknis yang matang. Masalah Lahan: Sering terjadi sengketa lahan skala kecil di tingkat RT atau warga yang keberatan tanahnya terkena pelebaran parit/jalan, yang akhirnya menunda realisasi fisik. Kualitas Pengerjaan Swakelola: Karena melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas), standar kualitas hasil



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		• Optimalisasi Drainase Lingkungan: Melanjutkan normalisasi parit di area rawan genangan (seperti wilayah Samarinda Utara dan Sungai Pinang). • Penguatan Sarana Posyandu & RT: Implementasi dana pembangunan berbasis RT untuk perbaikan fasilitas publik skala kecil. 3. Pemberdayaan Masyarakat & Ekonomi Kreatif Mendorong kemandirian ekonomi warga melalui pelatihan yang relevan dengan pasar kerja saat ini. • Digitalisasi UMKM Lokal: Pelatihan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro di tiap kelurahan untuk menembus pasar Regional (Wilayah Kalimantan Timurl). • Pemberdayaan Perempuan & Pemuda: Workshop keterampilan teknis (seperti tata boga, desain grafis, atau teknisi handphone) yang bersertifikasi. 4. Monitoring dan Evaluasi (Monev) Untuk menjaga transparansi dan kualitas hasil kerja: • Laporan Periodik: Setiap kelurahan wajib menyerahkan progres fisik dan keuangan setiap bulan melalui aplikasi (misal: e-Planning/e-Monev Kota Samarinda). • Forum Konsultasi Publik: Mengundang tokoh masyarakat dan warga untuk meninjau apakah pembangunan yang berjalan sudah sesuai dengan usulan awal saat Musrenbang.	bangunan terkadang tidak seragam dan kurang memenuhi spesifikasi teknis dinas terkait. 2. Masalah Administrasi dan SDM (Tata Kelola) Transisi menuju sistem digital di tahun 2025 membawa tantangan tersendiri bagi aparatur di tingkat bawah: Kapasitas Pengurus Pokmas: Tidak semua pengurus Kelompok Masyarakat di tingkat Kelurahan memiliki kemampuan administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Keterlambatan Pelaporan: Beban kerja administratif yang tinggi sering menyebabkan keterlambatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), yang berdampak pada pencairan dana tahap berikutnya. Sinkronisasi Data: Perbedaan data kemiskinan atau data UMKM antara pusat, daerah, dan kondisi riil di lapangan sering membuat penyaluran bantuan pemberdayaan menjadi tidak tepat sasaran. 3. Tantangan Pemberdayaan (Ekonomi & Sosial) Membangun fisik lebih mudah dari pada membangun kapasitas manusia. Di Samarinda, tantangan ini sangat terasa: Program "Copy-Paste": Banyak usulan pemberdayaan di tingkat Musrenbang yang hanya mengulang pelatihan tahun-tahun sebelumnya (seperti menjahit atau memasak) tanpa melihat kebutuhan pasar. Kurangnya Keberlanjutan: Setelah pelatihan selesai dan alat diberikan, masyarakat sering dilepas tanpa pendampingan pemasaran (marketing) atau akses permodalan lebih lanjut. Ketergantungan pada Bantuan: Masih adanya pola pikir "proyek" di mana



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			masyarakat berpartisipasi hanya karena ada insentif atau bantuan barang, bukan karena kesadaran untuk mandiri.
	Probebaya tetap Melaksanakan sesuai dengan Mekanisme Awal dan tetapi kebanyakan yang terjadi di lapangan barang yang di beli untuk keperluan tidak sesuai spesifikasi.	Mekanisme usulan perencanaan kegiatan Probebaya yang dilakukan secara berjenjang harus memperhatikan dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan tema pembangunan tahunan yang tertuang dalam petunjuk teknis Musrenbang. Langkah : spesifikasi disesuaikan dengan SOP teknis barang yang dibeli, hal ini bisa dikonsultasikan (dengan dibantu Tenaga Pendamping Probebaya) kepada anggota Tim Pembina Teknis sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Karena tugas Tim Pembina Teknis adalah menyelenggarakan klinik konsultasi Probebaya.	Tujuan : Dengan adanya pendampingan dan pembinaan teknis dalam penyusunan perencanaan sesuai bidang masing-masing, maka diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran kegiatan Probebaya.
	Perencanaan Pembangunan dan Rencana kerja / renja berdasarkan Kesejahteraan rakyat.	Langkah : Renja opd disusun berdasarkan prioritas pembangunan yang mengacu pada visi misi dalam RPJMD dan renstra perangkat daerah dimana urusan kesejahteraan rakyat terdapat dalam misi RPJMD beserta dengan strategi dan arah kebijakan yang disusun.	Tujuan : 1. Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang inklusif. 2. Berkurangnya kemiskinan dan pengangguran. 3. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
	Peningkatan Sumber daya manusia/ sdm eksternal dengan diadakan Bimtek dan Pelatihan Pegawai Negeri sipil.	Langkah : 1. Perencanaan pengembangan kompetensi ASN tersusun 2. Tersedianya program pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional, seperti PKP, PKA, PKN yang didukung oleh kerjasama antara BKPSDM, BPSDM dan LAN 3. Dukungan regulasi terkait manajemen talenta dan pengembangan karir ASN	Tujuan : 1. Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi 2. Meningkatnya ASN yang mengikuti pelatihan dan sertifikasi 3. Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi
	Sipd / Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan Aplikasi dimana data diinput sesuai Rencana kegiatan	Langkah : Bahwa sampai dengan saat ini sistem pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan	Tujuan : Tidak Ada



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Anggaran /RKA.	menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan / pertanggungjawaban yang keseluruhannya merupakan suatu proses yang terintegrasi, termasuk data yang diinput sesuai dengan rencana kegiatan anggaran / RKA	
	Melakukan penyelesaian dan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis pembangunan dan revitalisasi kawasan dan gedung milik Pemerintah Kota.	Langkah : 1. Pada tahun 2025 merencanakan pelaksanaan Rapat Pengendalian Pekerjaan (Radalok) OPD secara berkala 2. Pada tahun 2025 melakukan pengusulan revitalisasi Tepian Mahakam menjadi Teras Samarinda Tahap II melalui Banku Provinsi dan Penganggaran dari APBD 3. Pada tahun 2025 melakukan pengusulan revitalisasi gedung-gedung pemerintahan diantaranya adalah Kelurahan yang bertransformasi menjadi Kelurahan Digital 4. Melakukan Rapat Fasilitasi dan Koordinasi tentang permasalahan dan solusi dengan perangkat daerah yang melaksanakan proyek 5. Melakukan monitoring lapangan ke proyek-proyek strategis 6. Pemantauan realisasi fisik dan keuangan melalui dashboard 10 proyek strategis e-tepian 7. Pengumuman penayangan 10 proyek strategis melalui dashboard etepian untuk MCP KPK	Tujuan : 1. Radalok bertujuan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, permasalahan segera teratasi jika terdapat permasalahan serta memiliki kualitas hasil yang maksimal 2. Revitalisasi sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu, Samarinda Maju, Kaltim Maju. Konsep revitalisasi melambangkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Samarinda telah mengarah untuk menjadikan Kota Samarinda menjadi kota yang maju
	Melakukan evaluasi terhadap beberapa kegiatan program pemerintah ke masing-masing OPD terutama bagi OPD yang melakukan kegiatan proyek multi years untuk bisa dikerjakan tepat waktu sesuai kontrak kerja.	Langkah : 1. Pada tahun 2025 merencanakan pelaksanaan Rapat Pengendalian Pekerjaan (Radalok) OPD secara berkala 2. Melakukan monitoring lapangan ke proyek-proyek strategis	Tujuan : Radalok bertujuan agar pekerjaan dapat selesai tepat waktu, permasalahan segera teratasi jika terdapat permasalahan serta memiliki kualitas hasil yang maksimal
	Pemerintah Kota melakukan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadi lagi pekerjaan-pekerjaan yang molor dalam penyelesaian terutama pada proyek multiyears.	Langkah : Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan disesuaikan Renstra OPD dan atau permasalahan kota sebagai bagian dari prioritas masalah yang perlu segera ditangani, yang disesuaikan pula dengan	Tujuan : Meminimalisir faktor-faktor penghambat pelaksanaan pekerjaan dengan ikut mendampingi OPD terkait dalam hal pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan fisik dimulai dari perencanaan, implementasi



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		kemampuan fiskal daerah	pekerjaan sampai dengan monev pekerjaan sehingga faktor-faktor penghambat pelaksanaan pekerjaan dapat diminimalisir sesuai target pelaksanaan pekerjaan
	Mendorong Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan Belanja di APBD bisa berorientasi kepada Skema Stimulus dan pembiayaan proyek multiyears yang bersifat besar dilakukan skema kerjasama dengan Pemerintah Provinsi pada Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kota Samarinda merekomendasikan untuk memberikan pelaporan terperinci terkait capaian, indikator, maupun evaluasi yang lebih terukur berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Samarinda tahun 2025-2029 yang telah diperbaharui, serta memberikan gambaran ringkas dan detail terkait posisi kota Samarinda ditingkat nasional, daya saing antar provinsi, maupun hubungan dengan kabupaten / kota lain di tahun 2025 kedepannya.	Arah Kebijakan Belanja APBD Langkah : - Mengarahkan belanja APBD pada skema stimulus ekonomi daerah, dengan prioritas pada: - Penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif - Infrastruktur pengendalian banjir dan konektivitas - Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan - Meningkatkan proporsi belanja produktif dibandingkan belanja administratif. - Mengendalikan rasio belanja pegawai agar tidak mengurangi ruang fiskal pembangunan. Skema Pembiayaan Proyek Multiyears Mengidentifikasi dan menetapkan proyek strategis daerah yang layak dilaksanakan melalui skema multiyears. Langkah : - Melakukan analisis kapasitas fiskal secara komprehensif sebelum penetapan kontrak tahun jamak - Mengoptimalkan skema kerja sama pembiayaan (<i>cost sharing</i>) dengan Pemerintah Provinsi serta membuka peluang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan - Memastikan setiap proyek multiyears memiliki studi kelayakan (<i>feasibility study</i>) dan analisis manfaat-biaya yang jelas. Penguatan Sistem Pelaporan dan Evaluasi RPJMD 2025–2029 Langkah : - Menyampaikan laporan kinerja secara berkala berbasis outcome, bukan hanya realisasi anggaran.	Tujuan : - Mewujudkan APBD yang Berorientasi Stimulus Ekonomi - Menjamin Keberlanjutan Proyek Strategis Daerah - Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja - Memperkuat Posisi dan Daya Saing Kota



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		2. Menyusun indikator capaian yang selaras dengan target RPJMD, meliputi: • Pertumbuhan ekonomi daerah • Indeks Pembangunan Manusia • Angka kemiskinan • Tingkat pengangguran terbuka • Indeks daya saing daerah 3. Menyediakan sistem monitoring berbasis digital yang memungkinkan evaluasi triwulanan. Pemetaan Posisi dan Daya Saing Kota Samarinda Langkah : 1. Menyampaikan gambaran komparatif posisi Kota Samarinda di tingkat nasional dan provinsi pada Tahun 2025 dan proyeksi 2029. 2. Melakukan analisis perbandingan fiskal dan indikator pembangunan dengan kota-kota di Kalimantan Timur seperti: • Balikpapan • Bontang 3. Menyusun strategi penguatan peran Kota Samarinda sebagai kota penyangga dan pusat layanan dalam mendukung kawasan IKN.	
	Pemerintah Kota Samarinda lebih intensif lagi melakukan komunikasi dan pendekatan baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta dukungan politik dari Legislator Provinsi dan DPR RI dalam usaha mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan Kota Samarinda.	Penguatan komunikasi dan koordinasi antar pemerintahan Langkah : 1. Pemerintah Kota Samarinda lebih intensif melakukan komunikasi, koordinasi, dan pendekatan strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperoleh dukungan pembiayaan pembangunan, khususnya untuk proyek-proyek strategis dan prioritas daerah. 2. Melakukan sinkronisasi program dan kegiatan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat melalui kementerian/lembaga terkait, guna meningkatkan peluang memperoleh dukungan pendanaan dari APBN.	Tujuan : 1. Meningkatkan Dukungan Pembiayaan Pembangunan 2. Memperkuat Sinergi Pembangunan Antar Level Pemerintahan 3. Meningkatkan Daya Saing Daerah 4. Menjamin Keberlanjutan Proyek Strategis



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		3. Menyusun agenda advokasi pembangunan daerah secara terstruktur dan berbasis data, dengan menyiapkan dokumen perencanaan teknokratis yang komprehensif sebagai bahan pengajuan dukungan anggaran. Optimalisasi Dukungan Politik dan Legislatif Langkah : 1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota DPRD Provinsi serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Kalimantan Timur dalam rangka pengawalan program pembangunan Kota Samarinda. 2. Menyampaikan proposal prioritas pembangunan yang dilengkapi kajian teknis, proyeksi manfaat ekonomi, dan dampak sosial sebagai bahan pertimbangan dukungan anggaran melalui jalur legislasi dan aspirasi. 3. Membangun sinergi lintas pemangku kepentingan guna memperkuat posisi tawar Kota Samarinda dalam perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional. Strategi Peningkatan Dukungan Pembiayaan Langkah : 1. Mengoptimalkan potensi perolehan Dana Transfer Pusat, Dana Alokasi Khusus, serta bantuan keuangan provinsi melalui peningkatan kualitas perencanaan dan keselarasan indikator kinerja. 2. Mengembangkan skema pembiayaan alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kerja sama lintas pemerintahan dan pola pembiayaan inovatif untuk proyek strategis. 3. Melaporkan secara berkala kepada DPRD mengenai progres komunikasi, hasil koordinasi, serta realisasi dukungan pembiayaan yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.	



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Dalam rangka penyusunan program kegiatan hendaknya sudah beralih pada paradigma <i>money follow function</i> ke <i>money follow program</i> . Dengan beralih ke paradigma " <i>money follow program</i> ," pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.	Perubahan Paradigma Penganggaran Langkah : 1. Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan RKPD dan APBD secara konsisten menerapkan paradigma <i>money follow program</i>, dengan mengutamakan pengalokasian anggaran pada program prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian target pembangunan daerah. 2. Mengurangi pendekatan <i>money follow function</i> yang menitikberatkan pada pembagian anggaran berdasarkan urusan atau struktur organisasi, tanpa mempertimbangkan dampak program terhadap outcome pembangunan. Penyelarasan Program dan Indikator Kinerja Langkah : 1. Menetapkan program prioritas daerah yang terukur dan berbasis pada indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, realistis, serta selaras dengan target RPJMD 2025–2029. 2. Memastikan setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan langsung dengan indikator capaian, termasuk pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Menghapus atau merasionalisasi kegiatan yang tidak memiliki relevansi langsung terhadap sasaran strategis pembangunan. Penguatan Penganggaran Berbasis Kinerja Langkah : 1. Menerapkan secara konsisten sistem <i>performance based budgeting</i> dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran. 2. Mengaitkan evaluasi kinerja program dengan alokasi anggaran pada tahun berikutnya sebagai bentuk penguatan prinsip akuntabilitas.	Tujuan : 1. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Anggaran 2. Mempercepat Pencapaian Target RPJMD 2025–2029 3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 4. Mendorong Integrasi dan Sinergi Antar Perangkat Daerah



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		3. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program serta menyampaikan laporan capaian berbasis outcome kepada DPRD. Koordinasi dan Integrasi Lintas Perangkat Daerah Langkah : 1. Mendorong sinergi dan integrasi program lintas perangkat daerah guna menghindari duplikasi kegiatan. 2. Menetapkan program strategis daerah yang dikelola secara terkoordinasi dengan penanggung jawab yang jelas dan terukur.	
8.	Edukasi Masyarakat, Dengan telah adanya Perda sampah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2021. Perda ini mengatur tentang pengelolaan sampah, termasuk pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Selain Perda, ada juga Peraturan Walikota (PERWALI) yang mengatur pengawasan dan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah, seperti Perwali Nomor 18 Tahun 2022. diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat memaksimalkan pengelolaan Sampah dan lebih banyak lagi melakukan program edukasi ke masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sanksi administratif terkait pengelolaan sampah bagi yang melanggar.	Langkah : 1. Melakukan Sosialisasi melalui: a) Susur Sungai b) Sedekah Sampah c) Tuang Ecoenzym d) Penganugerahan Bank Sampah Unit 2. Membuat Spanduk tentang jam buang	Tujuan : 1. Susur Sungai Karang Mumus, identifikasi sumber-sumber timbulah sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran serta kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Hasil dari kegiatan susur sungai ini menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan program pengelolaan sungai yang berkelanjutan. 2. Sedekah Sampah : a. Mengurangi Volume sampah yang masuk ke TPA b. Menumbuhkan kesadaran & mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. c. Melalui pemilahan dan pemanfaatan sampah bernilai guna, sampah menjadi sumber manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. 3. Penuangan ecoenzym ke badan air yaitu mampu mengurangi tingkat pencemaran ringan karena membantu meningkatkan aktivitas mikroba pengurai yang berperan dalam proses alami pemulihan kualitas air. Ecoenzym berbahan dasar sampah



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			organic yang merupakan satu dari cara pengolahan sampah organic, sehingga menjadi sarana edukasi dan kampanye kepedulian lingkungan. 4. Penganugerahan Bank Sampah Unit Terbaik. a. Memberikan motivasi, apresiasi dan penghargaan kepada Bank Sampah unit yang berprestasi, Inovatif, atas berkontribusi nyata dalam pengelolaan sampah berbasis Masyarakat yang berkelanjutan. b. Sarana evaluasi terhadap kinerja Bank Sampah Unit dalam aspek kelembagaan, operasional, partisipasi masyarakat, dan manfaat ekonomi. 5. Pemasangan spanduk tentang pengelolaan sampah. a. Memberikan edukasi singkat yang mudah dipahami, memperkuat pesan moral dan tanggung jawab b. Menanamkan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
	Penambahan Fasilitas Sarpras TPA Sambutan. Hadirnya Tempat Pengelolaan Sampah di Sambutan yang dibangun oleh Dinas PUPR Provinsi Kaltim dan telah diserahkan pada Pemerintah kota Samarinda Tahun 2008, pada kenyataannya masih belum rampung infrastruktur jalan masuk ke TPA secara optimal, terkait hal tersebut untuk dapat diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat membantu permasalahan tersebut dan berkoordinasi dengan PUPR kota Samarinda.	Langkah : Membuat Surat Usulan ke Dinas PUPR agar dapat melakukan peningkatan jalan (semenisasi) akses jalan masuk TPA Sambutan	Tujuan : Akses jalan masuk TPA Sambutan menjadi baik
	Peningkatan Armada Sampah Dan Honorer Petugas Pengambil Sampah. Perlunya penambahan kendaraan peremajaan kendaraan angkut sampah (Truck, Motor Roda 3), kendaraan alat berat (Buldozer) sampah, Incinerator sampah standarisasi bebas polusi,	Langkah : 1. Membuat usulan anggaran terkait pengadaan alat berat baru. 2. Pengadaan armada angkutan sampah secara bertahap melalui Dinas PUPR Kota Samarinda sebanyak 5 unit Dump Truck dan 5 unit Arm	Tujuan : 1. Kelancaran Operasional TPA Sambutan 2. Sarana Prasarana Persampahan yang tidak dan tidak sebanding dengan layanan pengangkutan Sampah rumah tangga. Untuk masing-masing Armada Dump



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Kontainer Sampah (insenarator) berdasarkan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda dan peningkatan jasa honorer bagi tenaga angkut sampah yang masih jauh dari harapan.	Roll Truck (catatan mobil yang ada untuk menggantikan mobil yang rusak dan penyesuaian.	truck dan Arm Roll kelebihan daya angkut rata-rata sebanyak 2 ret/hari, sehingga untuk menutupi kekurangan tersebut 1 armada bisa digunakan oleh 2-3 Sopir dengan Shift kerja yang berbeda, ditambah Usia sebagian Mobil Angkutan Sampah sudah tidak mudah lagi, dimana kecenderungan sering mengalami kerusakan ditambah Mobil Angkutan Sampah yang relatif masih muda usia operasionalnya diOperasikan lebih dari Satu Sopir yang memungkinkan terjadinya kerusakan Mobil tersebut lebih cepat sehingga juga bisa menjadi faktor penghambat kelancaran aktivitas pelayanan pengangkutan Sampah rumah tangga di TPS menuju ke TPA. 3. Meningkatkan efektifitas, kecukupan dan ketetapan penggunaan Sarana Prasarana Persampahan.
	Perbaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai DLH. Perlunya diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai Dinas Lingkungan Hidup kota Samarinda berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan penjelasan Rincian Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut: a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya / radiasi/bahan radiokatif; c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja.	Langkah : Akan diajukan Pengusulan sesuai regulasi.	Tujuan : a. Meningkatkan Etos Kerja dan Disiplin; Memastikan pemberian TPP menjadi instrumen strategis untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai. b. Kompensasi Resiko: Memberikan Penghargaan Finalisasi tambahan sebagai kompensasi atas kemungkinan kecelakaan kerja atau gangguan kesehatan yang melekat pada jabatan tersebut.
9.	Badan pengelola keuangan dan aset Daerah dialokasikan	Mendukung fungsi pelayanan administrasi keuangan	Tujuan : 1. Sinkronisasi perencanaan



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	anggaran sebesar Rp 173,2 M, yang terdiri dari Belanja operasi sebesar Rp 94,9 M, dengan realisasi sebesar Rp 93,2 M, dan belanja modal sebesar Rp 78,3 M dengan Realisasi sebesar Rp 54,9 M,	daerah, penyusunan laporan keuangan, rekonsiliasi dan pengendalian anggaran serta pembinaan pengelolaan keuangan daerah. Langkah : 1. Melakukan evaluasi perencanaan belanja untuk meningkatkan serapan anggaran 2. Mempercepat proses pengadaan dan administrasi per triwulan 3. Melakukan monitoring triwulan terhadap progres fisik dan keuangan 4. Menyusun mitigasi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan 5. Mengoptimalkan perencanaan berbasis kebutuhan riil dan prioritas strategis.	1. anggaran dengan roadmap penguatan sistem keuangan dan aset daerah 2. Prioritaskan belanja modal dan barjas yang berdampak langsung pada akuntabilitas dan pengawasan 3. Menerapkan monitoring berbasis capaian fungsi bukan hanya serapan anggaran. 4. Penguatan monitoring triwulan berbasis progres fisik dan keuangan 5. Pemetaan risiko pengadaan sejak awal 6. Penyesuaian perencanaan agar lebih realistis dan berbasis prioritas strategis.
	Kinerja BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kota Samarinda pada tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah, terutama dalam efektivitas perencanaan anggaran dan pengelolaan aset.	Langkah : 1. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam penyusunan dan realisasi anggaran 2. Melakukan rekonsiliasi dan penertiban data aset 3. Mengoptimalkan sistem informasi keuangan daerah 4. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran 2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah 3. Memperbaiki tata kelola dan administrasi aset daerah 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah
	BPKAD Samarinda juga berperan dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.	Koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan rekomendasi dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Langkah : Pemantauan dan pengendalian atas penyelesaian ganti kerugian daerah termasuk penatausahaan, penagihan serta pelaporan progres penyelesaian sebagai bagian dari upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola yang baik dikoordinasi secara berkala oleh Inspektorat	Tujuan : 1. Meningkatkan kepatuhan terhadap rekomendasi pemeriksaan dengan memastikan rekomendasi dari BPK ditindaklanjuti tepat waktu 2. Memulihkan kerugian daerah 3. Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah
	Kesesuaian data Aset keuangan daerah dan dilapangan (sinkronkan)	Langkah : 1. Rekonsiliasi data secara berkala per triwulan dan pencocokan data antara BPKAD dengan OPD 2. Inventarisasi dan verifikasi fisik melalui sensus dan stock opname dan	Tujuan : 1. Meminimalisir perbedaan data antara laporan dan kondisi fisik aset. 2. Mengurangi jumlah aset yang belum tercatat atau pencatatan tidak lengkap 3. Mengurangi risiko



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		pemasangan label aset 3. Integrasi sistem informasi pengelolaan aset yang terintegrasi dengan keuangan 4. Penertiban aset yang bermasalah 5. Penguatan pengawasan oleh APIP dan tindak lanjut temuan BPK secara sistematis	kehilangan atau penyalahgunaan aset 4. Meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan 5. Meningkatkan pengendalian internal atas pengelolaan aset daerah
	Utang pada pihak ketiga yang belum terbayar sekitar 168 Milyar	Langkah : 1. Melakukan inventarisasi dan verifikasi utang 2. Menyusun skema pembayaran bertaha 3. Penyesuaian perencanaan anggaran untuk mengalokasikan pembayaran kewajiban dalam APBD 4. Penguatan pengendalian internal untuk memastikan komitmen belanja sesuai dengan kemampuan fiskal agar tidak menambah beban utang	Tujuan : 1. Menjaga stabilitas fiskal daerah 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan utang dengan menjamin pencatatan dan pengungkapan kewajiban sesuai SAP 3. Menjamin kepastian penyelesaian kewajiban daerah.
	Di dalam Melaksanakan Tukar guling aset Pemerintah Daerah harus dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan Penilaian terhadap Nilai aset	Langkah : 1. Penilaian aset oleh penilai independen 2. Analisis kelayakan dan manfaat ekonomi dengan analisis cost-benefit sebelum persetujuan tukar guling 3. Persetujuan DPRD dan transparansi melalui dokumentasi lengkap di setiap tahapan dan publikasi informasi secara transparan sesuai prinsip akuntabilitas 4. Pengawasan dan audit yang dilakukan oleh Inspektorat.	Tujuan : 1. Menjamin tidak terjadinya kerugian keuangan daerah 2. Memastikan nilai tukar aset setara dan wajar 3. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset daerah 4. Menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset 5. Menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.
	Kerjasama dengan pelabuhan (tanpa bantuan APBD) merupakan kewenangan bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Pemerintah kota samarinda (Kerjasama dengan pihak ketiga)	Langkah : 1. Identifikasi skema pembiayaan non APBD 2. Kajian kelayakan dan aspek hukum dengan penyusunan feasibility study dan analisi risiko 3. Model bagi hasil dan kontribusi PAD 4. Pengawasan dan evaluasi	Tujuan : 1. Mengoptimalkan potensi dengan pembiayaan non APBD 2. Meningkatkan PAD melalui skema kerjasama yang produktif 3. Mempercepat pengembangan infrastruktur strategis kota
	Perlu adanya perbaharui wewenang dan kebijakan serta sinkronkan data terkait aset dan keuangan daerah.	Langkah : 1. Melakukan review regulasi internal terkait kewenangan pengelolaan aset dan keuangan daerah 2. Menyusun atau memperbarui SOP pengelolaan aset dan	Tujuan : 1. Memperjelas kewenangan dan menegaskan pembagian tugas dan fungsi antar perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset 2. Menyempurnakan kebijakan



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		keuangan 3. Mengintegrasikan sistem informasi keuangan & aset daerah 4. Melakukan monitoring serta evaluasi atas implementasi kebijakan yang ada.	pengelolaan keuangan dan aset 3. Mewujudkan sinkronisasi data aset dan keuangan 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi untuk mendukung penyajian laporan yang andal dan sesuai SAP.
	Masing-masing OPD kembali melakukan pemetaan program kerja yang dimungkinkan dibiayai oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) dan DAU (Dana Alokasi Umum). Terkait DAU dalam rangka desentralisasi dan otonomi daerah, sebelum memasuki Tahun Anggaran 2023 terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Pasal 38A ayat 1 PMK tersebut berbunyi bahwa alokasi DAU setiap daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Khusus DAU yang ditentukan penggunaannya atau dikenal dengan istilah Specific Grant atau DAU earmarked adalah bagian DAU yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang khusus digunakan untuk membiayai penggajian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Dalam arti lain DAU yang ditentukan penggunaannya tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dan/atau program daerah di luar bidang-bidang yang telah ditentukan oleh PMK tersebut.	Langkah : 1. Pemetaan program berbasis sumber pendanaan 2. Optimalisasi DAU SG sesuai dengan alokasinya dan pengendalian agar tidak terjadi penggunaan diluar regulasi dan monitoring realisasi dan pelaporan sesuai juknis 3. Penguatan perencanaan dan sinkronisasi RKPd dan APBD dengan pagu indikatif dan koordinasi intensif lintas SKPD 4. Pengendalian kepatuhan regulasi dengan pelaksanaan reviu oleh APIP dan mitigasi risiko sanksi akibat ketidaksesuaian. 5. Optimalisasi ruang	Tujuan : 1. Memastikan penggunaan DAK dan DAU sesuai ketentuan regulasi 2. Mengurangi tekanan terhadap APBD murni 3. Memperluas ruang fiskal untuk program strategis pemerintah kota samarinda. 4. Mengurangi risiko penggunaan DAU Earmarked yang tidak sesuai peruntukan. 5. Menurunkan risiko potensi kehilangan alokasi DAN akibat proposal kurang siap.
	Mendorong Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan Belanja di APBD bisa berorientasi kepada Skema Stimulus dan pembiayaan proyek multiyears yang bersifat besar dilakukan skema kerjasama dengan Pemerintah Provinsi pada Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah DPRD Kota Samarinda merekomendasikan untuk	Langkah : 1. Reorientasi struktur belanja APBD dengan mendesain belanja berbasis stimulus ekonomi dan peningkatan proporsi belanja yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi 2. Penguatan skema pembiayaan alternatif seperti	Tujuan : 1. Mendorong APBD yang lebih ekspansif dan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi 2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi berbasis indikator RPJMD 3. Memperkuat daya saing Kota Samarinda di tingkat regional dan nasional



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	memberikan pelaporan terperinci terkait capaian, indikator, maupun evaluasi yang lebih terukur berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Samarinda tahun 2025-2029 yang telah diperbaharui, serta memberikan gambaran ringkas dan detail terkait posisi kota Samarinda di tingkat nasional, daya saing antar provinsi, maupun hubungan dengan kabupaten / kota lain di tahun 2025 kedepannya.	mekanisme KPBU 3. Pemetaan posisi daya saing kota dan benchmarking antar kota/kabupaten 4. Pelaporan terukur berbasis RPJMD 2025-2029 berupa penyusunan laporan capaian indikator makro dan sektoral	4. Menjamin kesinambungan pembangunan jangka menengah yang terukur dan terarah
	Pemerintah Kota Samarinda lebih intensif lagi melakukan komunikasi dan pendekatan baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta dukungan politik dari Legislator Provinsi dan DPR RI dalam usaha mendapatkan dukungan pembiayaan pembangunan Kota Samarinda.	Langkah : 1. Penguatan komunikasi dan diplomasi anggaran melalui sinkronisasi program kota samarinda dengan prioritas provinsi dan nasional 2. Penyusunan agenda strategis lobi pembangunan dengan penyusunan proposal teknis dan feasibility study yang komprehensif 3. Penguatan dukungan politik melalui koordinasi intensif dengan legislator provinsi dan pusat dan penguatan komunikasi publik untuk membangun legitimasi program prioritas	Tujuan : 1. Mengurangi belum optimalnya sinkronisasi program kota dengan agenda provinsi dan nasional 2. Mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 3. Memperkuat sinergi pembangunan lintas level pemerintahan
	Untuk mencari kembali mencari formulasi serta sistem penyerapan belanja daerah agar lebih maksimal, sehingga dapat mempercepat perputaran roda perekonomian yang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	Langkah : 1. Perbaikan perencanaan dan penjadwalan anggaran 2. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan pelaksanaan tender dini dan optimalisasi e-procurement dan katalog elektronik 3. Reorientasi belanja produktif dengan meningkatkan proporsi belanja yang memiliki multiplier effect dan sinkronisasi belanja dengan pengendalian inflasi daerah	Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas dan percepatan penyerapan anggaran 2. Mengurangi penumpukan realisasi anggaran di akhir tahun 3. Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Mendorong Pemerintah Kota Samarinda dan Organisasi Perangkat Daerah lebih fokus pada mengelola belanja daerah lebih menitik beratkan pada perencanaan yang tersistematis dan terukur lebih baik sehingga penyelenggaraan Pemerintahan sejalan dengan skala prioritas pembangunan. Orientasi pengelolaan belanja daerah yang dilakukan di tahun 2024 ini sangat baik dilakukan kepada perubahan orientasi dari tercapainya kondisi keberlanjutan menjadi berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat kota Samarinda. Kondisi ini tentu saja akan lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih ekspansif di masa depan sehingga dapat mewujudkan kota Peradaban sesuai yang dicita-citakan bersama.	Langkah : 1. Penguatan Perencanaan berbasis kinerja dengan penerapan indikator output dan outcome yang terukur & penyelarasan RKPD, KUA-PPAS dan APBD dengan skala prioritas 2. Penajaman skala prioritas dengan rasionalisasi pada kegiatan yang kurang berdampak langsung pada masyarakat 3. Penguatan monitoring dan evaluasi dengan penguatan peran inspektorat dalam pengawasan belanja 4. Peningkatan kapasitas perencanaan OPD	Tujuan : 1. Mewujudkan belanja daerah yang efektif, efisien dan tepat sasaran 2. Menggeser orientasi belanja dari sekedar penyerapan menjadi pencapaian kesejahteraan 3. Menjamin penyelenggaraan pemerintah yang selaras dengan prioritas pembangunan 4. Mendukung terwujudnya visi kota samarinda sebagai kota peradaban
	Dukungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Pemegang Saham. Sebagai bank milik daerah di mana pemerintah kota Samarinda merupakan salah satu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar Rp64.925.000.000 /12.985 lembar saham atau 0,85 %. sebagai salah satu pemegang saham sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah kota Samarinda, hal ini guna memperkuat peran Bankaltimtara sebagai Agent of Development yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Kota Samarinda.	Langkah : 1. Penguatan komitmen sebagai pemegang saham dengan penyampaian usulan strategis dan partisipasi aktif dalam RUPS dan monitoring implementasi keputusan RUPS secara berkala 2. Sinkronisasi arah bisnis dengan prioritas daerah untuk mendorong UMKM, infrastruktur dan sektor produksi lokal 3. Optimalisasi kontribusi terhadap PAD	Tujuan : 1. Memperkuat peran Bankaltimtara sebagai Agent of Development di Kota Samarinda 2. Menjaga keberlanjutan dan kesehatan bank 3. Kurangnya penyalarsan antara strategi bisnis bank dengan prioritas pembangunan di kota Samarinda 4. Potensi lemahnya pengawasan atas investasi daerah.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Keberlanjutan Fungsi RKUD. Bankaltimara sebagai bank yang dipercaya memegang Rekening Kas Umum Daerah oleh seluruh Pemerintah Daerah di Kaltim Kaltara telah menjalin sinergi yang baik dengan berbagai perangkat daerah, diharapkan eksistensi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kota Samarinda guna mendukung stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.	Langkah : 1. Penguatan komitmen kebijakan RKUD 2. Penguatan sistem dan digitalisasi melalui integrasi penuh SP2D online, CMS dan pengembangan dashboard monitoring kasda 3. Penguatan sinergi pembangunan dengan dukungan pembiayaan proyek strategis daerah 4. Penguatan tata kelola dan pengawasan melalui monitoring kinerja triwulan dan evaluasi SLA (Service Level Agreement)	Tujuan : 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas RKUD 2. Meminimalkan risiko operasional dan gangguan sistem 3. Mengurangi risiko potensi gangguan layanan pembayaran akibat sistem yang tidak terintegrasi 4. Mengurangi risiko tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi
	Bank Mitra Pemerinta Kota Samarinda dalam Pelayanan Publik dan Penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bankaltimara berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah kota Samarinda dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda dan untuk itu diharapkan seluruh transaksi keuangan daerah pemerintah kota Samarinda dapat dilakukan melalui Bankaltimara selaku pemegang kas daerah.	Langkah : 1. Integrasi sistem penerimaan daerah secara digital (host to host, QRIS, VA) 2. Penguatan kontribusi terhadap PAD dengan mendorong peningkatan laba dan optimalisasi pembagian deviden ke pemkot 3. Perluasan layanan publik berbasis perbankan dengan pengembangan kanal pembayaran layanan publik dan edukasi masyarakat terkait layanan digital perbankan	Tujuan : 1. Optimalisasi PAD 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Penguatan Bankaltimara sebagai mitra strategis



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Optimalisasi Dana Pemerintah Kota Samarinda di Bankaltimtara. Penempatan dana pemerintah daerah di Bankaltimtara sangat penting mengingat bank ini telah banyak melakukan investasi dan inovasi untuk mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik pemerintah daerah terutama bagi pemerintah kota Samarinda, dengan demikian hal ini tidak hanya memperlancar layanan namun juga dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD melalui operasional perbankan dan pembagian dividen bagi pemerintah kota Samarinda selaku salah satu pemegang saham pemerintah daerah.	Langkah : 1. Peningkatan kontribusi terhadap PAD dengan evaluasi berkala dan optimalisasi pembagian dividen 2. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem 3. Penguatan kebijakan penempatan dana dan penertiban rekening untuk konsolidasi	Tujuan : 1. Memaksimalkan kontribusi deviden sebagai salah satu sumber PAD 2. Mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik 3. Mewujudkan sinergi fiskal dan pembangunan daerah secara berkesinambungan
	Dukungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Pemegang Saham. Sebagai bank milik daerah di mana pemerintah kota Samarinda merupakan salah satu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar Rp64.925.000.000 /12.985 lembar saham atau 0,85 %. sebagai salah satu pemegang saham sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah kota Samarinda, hal ini guna memperkuat peran Bankaltimtara sebagai Agent of Development yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Kota Samarinda.	Langkah : 1. Penguatan komitmen sebagai pemegang saham dengan penyampaian usulan strategis dan partisipasi aktif dalam RUPS dan monitoring implementasi keputusan RUPS secara berkala 2. Sinkronisasi arah bisnis dengan prioritas daerah untuk mendorong UMKM, infrastruktur dan sektor produksi lokal 3. Optimalisasi kontribusi terhadap PAD	Tujuan : 1. Memperkuat peran Bankaltimtara sebagai Agent of Development di Kota Samarinda 2. Menjaga keberlanjutan dan kesehatan bank 3. Kurangnya penyelarasan antara strategi bisnis bank dengan prioritas pembangunan di kota Samarinda 4. Potensi lemahnya pengawasan atas investasi daerah.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Keberlanjutan Fungsi RKUD. Bankaltimtara sebagai bank yang dipercaya memegang Rekening Kas Umum Daerah oleh seluruh Pemerintah Daerah di Kaltim Kaltara telah menjalin sinergi yang baik dengan berbagai perangkat daerah, diharapkan eksistensi ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kota Samarinda guna mendukung stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.	Langkah : 1. Penguatan komitmen kebijakan RKUD 2. Penguatan sistem dan digitalisasi melalui integrasi penuh SP2D online, CMS dan pengembangan dashboard monitoring kasda 3. Penguatan sinergi pembangunan dengan dukungan pembiayaan proyek strategis daerah 4. Penguatan tata kelola dan pengawasan melalui monitoring kinerja triwulan dan evaluasi SLA (Service Level Agreement)	Tujuan : 1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas RKUD 2. Meminimalkan risiko operasional dan gangguan sistem 3. Mengurangi risiko potensi gangguan layanan pembayaran akibat sistem yang tidak terintegrasi 4. Mengurangi risiko tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi
	Bank Mitra Pemerinta Kota Samarinda dalam Pelayanan Publik dan Penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bankaltimtara berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah kota Samarinda dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda dan untuk itu diharapkan seluruh transaksi keuangan daerah pemerintah kota Samarinda dapat dilakukan melalui Bankaltimtara selaku pemegang kas daerah.	Langkah : 1. Integrasi sistem penerimaan daerah secara digital (host to host, QRIS, VA) 2. Penguatan kontribusi terhadap PAD dengan mendorong peningkatan laba dan optimalisasi pembagian deviden ke pemkot 3. Perluasan layanan publik berbasis perbankan dengan pengembangan kanal pembayaran layanan publik dan edukasi masyarakat terkait layanan digital perbankan	Tujuan : 1. Optimalisasi PAD 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik 3. Penguatan Bankaltimtara sebagai mitra strategis



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Optimalisasi Dana Pemerintah Kota Samarinda di Bankaltimtara. Penempatan dana pemerintah daerah di Bankaltimtara sangat penting mengingat bank ini telah banyak melakukan investasi dan inovasi untuk mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik pemerintah daerah terutama bagi pemerintah kota Samarinda, dengan demikian hal ini tidak hanya memperlancar layanan namun juga dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD melalui operasional perbankan dan pembagian dividen bagi pemerintah kota Samarinda selaku salah satu pemegang saham pemerintah daerah.	Langkah : 1. Penguatan kerjasama operasional antara lain dalam pemanfaatan layanan cash management system (CMS) oleh OPD, digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah (host to host, QRIS, VA) 2. Optimalisasi pengelolaan kas daerah 3. Sinergi pembangunan daerah melalui integrasi program smart city dengan sistem perbankan digital	Tujuan : 1. Memastikan dana APBD dikelola secara efisien, produktif, dan aman 2. Peningkatan PAD 3. Penguatan likuiditas dan kapasitas intermediasi Bankaltimtara dalam membiayai pembangunan dan sektor produktif 4. Sinergi fiskal dan pembangunan daerah 5. Peningkatan kualitas layanan publik
10.	Peningkatan Anggaran Pengadaan LPJU dan marka jalan tersebar di Kota Samarinda fokus LPJU di daerah Rawan Kejahatan dan rawan kecelakaan dan LPJU akan disesuaikan dengan Anggaran	Langkah : Telah dilakukan Pengadaan dan Pemasangan Jaringan LPJU pada ruas - ruas jalan rawan kejahatan dan rawan kecelakaan, adapun ruas jalan dan volume sebagai berikut : 1. Akses Wisata Budaya Pampang (92 titik); 2. Jl. Cipto Mangunkusumo (78 titik); 3. Jl. Niaga 1 (43 titik); 4. Jl. Bung Tomo (53 titik); 5. Jl. Bojonegoro (20 titik); 6. Jl. Poros Kebon Agung, Lempake (Bankeu) (46 titik); 7. Jl. Cendana (10 titik); 8. Jl. Ulin (26 titik); 9. Jl. Sentosa (29 titik); 10. Jl. KH. Ahmad Dahlan (12 titik); 11. Jl. Sultan Alimudin (13 titik); 12. Jl. AW. Syahrane (43 titik); 13. Jl. Gerilya (12 titik); 14. Jl. KH. Mas Mansyur (35 titik); 15. Jl. Batu Besaung (73 titik); 16. Jl. Sultan Sulaiman (57 titik); 17. Jl. Gelatik (19 titik); 18. Jl. Belatuk (28 titik); 19. Jl. Jend. Sudirman (16 titik); 20. Jl. Ir. H. Nussyirwan Ismail (152 titik); 21. Jl. HAM. Ardans (153 titik); 22. Jl. Lempake Tepian (38 titik); 23. Jl. Diponegoro, Palaran (60 titik); 24. Lampu Sorot Jemb. Achmad Amins (104 titik);	Tujuan : - Terpenuhi penerangan jalan umum pada ruas-ruas rawan kejahatan dan rawan kecelakaan yang telah dipasang LPJU; - Peningkatan Keamanan Lingkungan, mengurangi potensi tindak kriminalitas di area rawan kejahatan melalui penyediaan penerangan jalan yang memadai; - Memastikan terpenuhinya kebutuhan penerangan lampu jalan umum (LPJU) secara merata di ruas jalan rawan kejahatan dan rawan kecelakaan; - Meningkatkan kenyamanan pada ruas jalan yang dianggap rawan kejahatan dan rawan kecelakaan.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		25. Rehabilitasi Jaringan Kabel dan LPJU Jl. Mayor Ngoedio (Peti Kemas Palaran) (104 titik). Dengan jumlah total 1.316 titik LPJU terpasang.	
	Pengawasan dan penindakan Parkir Liar dan Optimalisasi PAD/ Pendapatan Asli daerah parkir yang masih terjadi kebocoran. Dan Lebih dirincikan lagi untuk target PAD dan realisasi dari Parkir.	Langkah : 1. Pengawasan dan Penindakan berkelanjutan dengan melibatkan instansi terkait Seperti satpol pp dan pihak kepolisian 2. Mengoptimalkan retribusi secara non tunai di masing-masing titik dengan sistem aplikasi wa blast tagihan parkir kepada wajib retribusi	Berkurangnya jukir liar dan meningkatnya PAD
	Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk tegas terhadap Mall dan pusat Perbelanjaan dalam pengelolaan parkirnya karena menyangkut Pendapatan Asli Daerah.	Langkah : 1. Kewajiban bagi pihak Mall, Rumah Sakit dan Tempat Khusus Parkir lainnya untuk mengurus izin Penyelenggaraan Parkir melalui OSS dan terverifikasi dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda 2. Penyediaan Area Drop off bagi pengunjung serta parkir gratis 5-10 menit pertama 3. Sosialisasi agar pengunjung dan karyawan memarkirkan kendaraannya ke dalam Mall 4. Menerapkan kewajiban penyediaan sistem pembayaran non tunai dan tidak menerima tunai serta menerapkan tarif maksimal bagi pengunjung yang melakukan pembayaran secara tunai.	Tujuan : 1. Mall, Rumah Sakit dan tempat khusus parkir lainnya Memiliki izin resmi penyelenggaraan parkir 2. Memberikan kenyamanan bagi pengunjung dengan peningkatan penyediaan fasilitas parkir yang sesuai aturan perizinan parkir 3. Meningkatkan transparansi pendapatan parkir karena pembayaran non tunai yang sudah terintegrasi melalui sistem aplikasi
	Pengusaha Wajib punya tempat parkir dan dikoordinasi dengan Dinas Perhubungan.	Langkah : 1. Mengundang pemilik usaha agar dapat mengatur dan menata parkir dengan menyediakan ruang parkir yang memadai 2. Penindakan terhadap pelanggaran parkir terutama pelataran toko yang berubah menjadi tempat usaha	Tujuan : Berkurangnya kemacetan yang diakibatkan penggunaan tepi jalan untuk ruang parkir
	Perlunya pembenahan dan perbaikan manajemen pengelolaan perparkiran dalam kota Samarinda yang lebih baik lagi karena jasa retribusi parkir dan pajak parkir belum maksimal menyumbang PAD. Sehingga perlu ditingkatkan dan diperlukan pendekatan lebih intensif terhadap program inovasi-inovasi pajak daerah dan retribusi daerah	Langkah : 1. Penerapan elektronifikasi perparkiran baik di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir yang dikelola pemerintah 2. Pembentukan UPTD Perparkiran 3. Penambahan titik Lokasi parkir Okupansi 4. Sistem pembayaran parkir	Tujuan : 1. Penerapan system elektronik perparkiran sudah dilaksanakan di beberapa titik percontohan 2. Pembentukan UPTD Parkir dalam tahap pengajuan dan sudah melalui Kajian 3. Penambahan titik Lokasi parkir guna peningkatan PAD 4. Membiasakan pemilik



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	(sesuai amanah UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang mana memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dan paling penting dari potensi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009.	secara non tunai	kendaraan untuk membayar secara non tunai guna mengurangi Tingkat kebocoran PAD
11.	Program kedigitalisasian pada pelayanan pemerintah kota Samarinda masih belum maksimal sesuai keinginan kebijakan strategis Walikota, dimana penguatan Kota Samarinda sebagai Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sistem informasi serta berbasis pada SDG's berdasarkan penjabaran visi walikota yang menginginkan kota Samarinda pada perkembangannya sesuai dengan arah pembangunan 5 (lima) tahun ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan. Sebagai kota yang berbasis kota cerdas dan modern masih terlihat belum maksimalnya penggunaan aplikasi pelayanan bagi masyarakat yang dibuat oleh Pemerintah kota Samarinda oleh masyarakat seperti pelayanan dasar digitalisasi e-KTP, SAMARINDA SANTER, SMART RT, Pembayaran Air Bersih, retribusi Sampah dan pembayaran retribusi dengan konsep e-parkir.	Optimalisasi Pemanfaatan Data Layanan Digital Langkah : Mengoptimalkan pemanfaatan data dari seluruh aplikasi layanan publik sebagai dasar pengambilan kebijakan melalui dashboard analitik terpadu untuk mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pelayanan publik. Peningkatan Kualitas dan Dampak Layanan Digital Langkah : Memfokuskan pengembangan layanan digital pada peningkatan kualitas layanan end-to-end berbasis kebutuhan dan pengalaman pengguna, sehingga digitalisasi tidak hanya berorientasi pada jumlah aplikasi, tetapi pada dampak nyata bagi masyarakat. Penguatan Tata Kelola, SDM, dan Keamanan Sistem Informasi Langkah : Memperkuat tata kelola TIK melalui peningkatan kapasitas SDM, standarisasi sistem, interoperabilitas antar OPD, serta pengamanan data dan sistem informasi pemerintah daerah secara berkelanjutan. Penguatan Tata Kelola dan Standarisasi Sistem Informasi Langkah : Menetapkan standar pengembangan aplikasi, interoperabilitas data, keamanan informasi, dan pengelolaan infrastruktur TIK agar seluruh sistem informasi pemerintah	Tujuan : 1. Meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan berbasis data Mengatasi belum optimalnya pemanfaatan data layanan digital sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas dan manfaat nyata layanan digital bagi masyarakat Mengatasi rendahnya dampak dan pemanfaatan aplikasi layanan publik akibat belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. 3. Mewujudkan tata kelola TIK yang terintegrasi, aman, dan berkelanjutan Mengatasi fragmentasi sistem, keterbatasan kapasitas SDM, serta risiko keamanan data dalam penyelenggaraan layanan digital pemerintah daerah.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		daerah saling terhubung dan berkelanjutan. Pengembangan Super APP (samagov) Langkah : Mengembangkan Super App SAMA-GOV sebagai platform layanan digital terpadu Pemerintah Kota Samarinda yang menggantikan aplikasi Samarinda Santer, dengan mengintegrasikan seluruh aplikasi dan layanan public lintas OPD ke dalam satu aplikasi tunggal. Super App ini dirancang untuk menyederhanakan akses layanan bagi masyarakat, meningkatkan interoperabilitas sistem, memperkuat pemanfaatan satu data, serta mendukung peningkatan kualitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan public secara end-to-end dalam kerangka smart city dan tata kelola pemerintahan digital yang berkelanjutan.	
12.	Melakukan koordinasi dan evaluasi kembali terhadap kemitraan dengan pihak ketiga yang menggunakan dana milik pemkot samarinda untuk dapat dimaksimalkan dalam penyaluran ke masyarakat Kota Samarinda.	Langkah : 1. Rutin menghadiri rapat koordinasi TPKAD tahun 2025 sebanyak 4 kali yang diselenggarakan Bagian Ekonomi Setda Kota Samarinda. 2. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi lapangan, kepada pelaku usaha penerima manfaat program Kredit Bertuah. 3. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha Mikro di 10 Kecamatan terkait program Kredit Bertuah (cara dan proses)	Tujuan : Tidak Ada
13.	Terkait penyertaan modal milik Pemerintah Kota Samarinda di Bank Kaltimara, maka meminta kepada Pemerintah Kota Samarinda kembali melakukan peningkatan modal sangat diperlukan untuk tahun kedepannya, terutama peningkatan modal yang digunakan untuk mengucurkan kembali kredit usaha produktif seperti Program Kredit Bertuah (berusaha, beruntung, dan berkah) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda atau program-program Perbankan milik	Belum ada penambahan penyertaan modal	-



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Bankaltimtara yang dapat dirasakan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat kota Samarinda.		
	Peran BUMD lebih didorong untuk mampu mengedepankan mendapatkan pendapatan yang baik dengan memaksimalkan pelayanan dasar mereka ke masyarakat.	Langkah : Rapat Koordinasi Monev BUMD setiap triwulan	Tujuan : Untuk mengetahui realisasi target pendapatan dan penyelesaian permasalahan pelayanan kepada masyarakat
	Melakukan koordinasi dan evaluasi kembali terhadap kemitraan dengan pihak ketiga yang menggunakan dana milik pemkot samarinda untuk dapat dimaksimalkan dalam penyaluran ke masyarakat Kota Samarinda.	Langkah : Rapat koordinasi dan evaluasi TPKAD untuk Program Kredit Bertuah	Tujuan : Untuk mengetahui besaran realisasi Kredit Bertuah kepada UMKM
14.	Mereview kembali kerjasama Pemerintah Kota Samarinda dan pihak ketiga yang bertujuan membantu percepatan pembangunan dan pelayanan dasar ke masyarakat untuk dapat dievaluasi kembali terhadap kinerja mereka kepada Pemerintah Kota Samarinda.	Dilaksanakan melalui penerapan mekanisme pemungutan retribusi yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan. Langkah : Selama tahun 2024, tindak lanjut kerja sama difokuskan pada penguatan koordinasi operasional, penyesuaian mekanisme pemungutan, serta monitoring pelaksanaan di lapangan guna memastikan pemungutan retribusi parkir berjalan tertib, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi pendapatan daerah.	Tujuan : Pelaksanaan kerja sama ini ditujukan untuk menertibkan pengelolaan parkir pada area pelayanan Perumdam Tirta Kencana serta meningkatkan penerimaan daerah dari sektor retribusi parkir. Perumdam Tirta Kencana menyediakan lokasi dan mendukung pengaturan operasional di area loket pelayanan, sementara Pemerintah Kota Samarinda melalui perangkat daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta penatausahaan hasil pemungutan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	Dukungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai Pemegang Saham. Sebagai bank milik daerah di mana pemerintah kota Samarinda merupakan salah satu pemegang saham dengan kepemilikan sebesar Rp64.925.000.000 /12.985 lembar saham atau 0,85 %. sebagai salah satu pemegang saham sangat dibutuhkan dukungan dan komitmen pemerintah kota Samarinda, hal ini guna memperkuat peran Bankaltimtara sebagai Agent of Development yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan di Kota Samarinda.	Langkah : 1. Penguatan komitmen sebagai pemegang saham dengan penyampaian usulan strategis dan partisipasi aktif dalam RUPS dan monitoring implementasi keputusan RUPS secara berkala 2. Sinkronisasi arah bisnis dengan prioritas daerah untuk mendorong UMKM, infrastruktur dan sektor produksi lokal 3. Optimalisasi kontribusi terhadap PAD	Tujuan : 1. Memperkuat peran Bankaltimtara sebagai Agent of Development di Kota Samarinda 2. Menjaga keberlanjutan dan kesehatan bank 3. Kurangnya penyelelarasan antara starategi bisnis bank dengan prioritas pembangunan di kota Samarinda 4. Potensi lemahnya pengawasan atas investasi daerah.
	Keberlanjutan Fungsi RKUD. Bankaltimtara sebagai bank yang dipercaya memegang Rekening Kas Umum Daerah oleh seluruh Pemerintah Daerah di Kaltim Kaltara telah menjalin sinergi yang baik dengan berbagai perangkat daerah, diharapkan eksistensi ini	Langkah : 1. Penguatan komitmen kebijakan RKUD 2. Penguatan sistem dan digitalisasi melalui integrasi penuh SP2D online, CMS dan pengembangan dashboard monitoring kasda	Tujuan : 1. Meningkatkan fektivitas, efisiensi dan akuntabilitas RKUD 2. Meminimalkan risiko operasional dan gangguan sistem 3. Mengurangi risiko potensi



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	dapat terus dijaga dan ditingkatkan oleh pemerintah kota Samarinda guna mendukung stabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah lebih optimal.	3. Penguatan sinergi pembangunan dengan dukungan pembiayaan proyek strategis daerah 4. Penguatan tata kelola dan pengawasan melalui monitoring kinerja triwulan dan evaluasi SLA (Service Level Agreement)	gangguan layanan pembayaran akibat sistem yang tidak terintegrasi 4. Mengurasi risiko tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi
	Bank Mitra Pemerintah Kota Samarinda dalam Pelayanan Publik dan Penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bankaltimtara berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah kota Samarinda dalam menjalankan aktivitas pelayanan publik dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda dan untuk itu diharapkan seluruh transaksi keuangan daerah pemerintah kota Samarinda dapat dilakukan melalui Bankaltimtara selaku pemegang kas daerah.	Langkah : 1. Integrasi sistem penerimaan daerah secara digital (host to host, QRIS, VA) 2. Penguatan kontribusi terhadap PAD dengan mendorong peningkatan laba dan optimalisasi pembagian deviden ke pemkot 3. Perluasan layanan publik berbasis perbankan dengan pengembangan kanal pembayaran layanan publik dan edukasi masyarakat terkait layanan digital perbankan	Tujuan : 1. Optimalisasi PAD 2. Peningkatan kualitas pelayanan public 3. Penguatan Bankaltimtara sebagai mitra strategis
	Penguatan Modal Bank. Penguatan struktur permodalan dipandang sebagai salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan dan keberlanjutan operasional bank oleh karena itu dukungan dari seluruh pemegang saham termasuk pemerintah kota Samarinda dalam upaya peningkatan modal sangat diperlukan untuk tahun kedepannya, terutama peningkatan modal yang digunakan untuk mengucurkan kembali kredit usaha produktif seperti Program Kredit Bertuah (berusaha, beruntung, dan berkah) untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Samarinda atau program-program Perbankan milik Bankaltimtra yang dapat dirasakan manfaatnya lebih luas bagi masyarakat kota Samarinda.	Langkah : 1. Ikut berperan aktif dalam melanjutkan Program Kredit Bertuah 2. Melaksanakan program kerja dinas berupa pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dan kualitas produk kepada para pelaku usaha mikro 3. Melaksanakan program kerja dinas berupa pemberian bantuan peralatan produksi bagi pelaku usaha mikro dan IKM	Tujuan : 1. Tersedianya bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro (566 Pelaku usaha mikro tahun 2025) 2. Meningkatnya Kapasitas SDM Pelaku usaha Mikro (sebanyak 900 Orang tahun 2025) 3. Memfasilitasi peningkatan kualitas produk UMKM (Desain Kemasan / packaging 21 Produk, Parcel 50 Produk, halal 20 produk, Merk 80 produk tahun 2025) 4. Meningkatnya produksi produk Pelaku Usaha Mikro dan Pelaku IKM dengan pemberian alat produksi (46 Pelaku usaha tahun 2025)
	Optimalisasi Dana Pemerintah Kota Samarinda di Bankaltimtara. Penempatan dana pemerintah daerah di Bankaltimtara sangat penting mengingat bank ini telah banyak melakukan investasi dan inovasi untuk mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik pemerintah daerah terutama bagi pemerintah kota Samarinda, dengan demikian hal ini tidak hanya memperlancar	Langkah : 1. Peningkatan kontribusi terhadap PAD dengan evaluasi berkala dan optimalisasi pembagian deviden 2. Penguatan digitalisasi dan integrasi sistem 3. Penguatan kebijakan penempatan dana dan penertiban rekening untuk konsolidasi	Tujuan : 1. Memaksimalkan kontribusi deviden sebagai salah satu sumber PAD 2. Mendukung kelancaran operasional dan pelayanan public 3. Mewujudkan sinergi fiskal dan pembangunan daerah secara berkesinambungan



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	layanan namun juga dapat berkontribusi dalam peningkatan PAD melalui operasional perbankan dan pembagian dividen bagi pemerintah kota Samarinda selaku salah satu pemegang saham pemerintah daerah.		
	Dukungan Program CSR Bankaltimara. Program CSR Bankaltimara harus bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak dan kedepannya lebih dan ditingkatkan Program CSR-nya, terutama pada peningkatan pengetahuan dan keahlian Sumber Daya Manusia dalam bentuk pelatihan bagi UMKM, pelatihan wirausaha bagi para calon pensiunan ASN dilingkup pemerintah kota Samarinda yang dapat berkerjasama melakukan pelatihan dengan kampus yang ada di Kaltim (misalnya: kerjasama dengan Unmul) ataupun bantuan usaha produktif kepada UMKM dan unit usaha perempuan di kota Samarinda.	Langkah : 1. Melaksanakan kerjasama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Pelatihan Peningkatan Pengetahuan Keahlian Pelaku usaha Manik dan Batik)	Tujuan : Terlaksananya Program Kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal peningkatan Kapasitas SDM Pelaku Usaha Mikro (50 Manik, 50 Batik)
16.	Kerjasama. Dengan banyaknya jalinan kerjasama pada pihak ketiga dan bentuk perjanjian kerjasama pada pihak ketiga harus jelas dan apabila terjadi wanprestasi hak dan kewajiban perusahaan akan mengalami kerugian dan berdampak pada pemerintah kota samarinda selaku pemilik modal.	Langkah : A. Existing Busines 1. Usaha Rusunawa merupakan unit bisnis penyedia hunia layak dan terjangkau yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja dan kelompok pekerja dan kelompok tertentu sesuai kebijakan pemerintah daerah. Perumda Varia Niaga Samarinda berperan dalam pengelolaan Operasional, pemeliharaan bangunan, serta penarikan retribusi /sewa guna memastikan keberlanjutan layanan dan kualitas hunian. • Rusunawa I Jl. Teuku Umar Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang. • Rusunawa II Jl. Teuku Umar Kel. Karang Asam Ulu Kec. Sungai Kunjang • Rusunawa III Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir • Rusunawa IV Jl. Wanyi, Kec. Samarinda Utara. 2. Usaha Divisi Pangan Usaha pangan Mencakup kegiatan distribusi dan perdagangan komoditas pangan strategis guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga di Wilayah Samarinda. Melalui unit usaha ini, Perumda	



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		Tirta Niaga Samarinda berperan sebagai penyangga pasokan pangan daerah serta mendukung program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah. 3. Pergudangan Usaha pergudangan di fokuskan pada penyediaan jasa penyimpanan barang dan logistik bagi pelaku usaha, instansi, serta mitra strategis. Unit ini mendukung kelancaran distribusi barang, khususnya komoditas pangan dan kebutuhan pokok dengan memanfaatkan lokasi startegis dan sistem pengelolaan gudang yang efisien. 4. Assist Kapal. Usaha Assist Kapal menyediakan bantuan penundaan kapal untuk mendukung keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas kapal di perairan dan pelabuhan. B. Develovment Business 1. Bebaya Mart Bebaya Mart merupakan unit usaha ritel yang berfokus pada penyediaan keutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau, kualitas terjamin, serta mendukung distribusi produk lokal dan UMKM Samarinda. 2. Pengembangan usaha ayam frozen Usaha ayam frozen difokuskan pada pengolahan dan distribusi ayam beku yang higienis, halal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran, kafe, serta pasar tardisional dan UMKM di Samarinda. 3. Trading batu bara Trading batu bara dijalankan sebagai kegiatan perdagangan komoditas energy dengan memanfaatkan posisi strategis Samarinda seagai wilayah penyangga pertambangan. 4. Jasa pandu assist kapal. Jasa pandu assist kapal menyediakan layanan pemanduan dan bantuan kapal untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas kapal di wilayah perairan sungai dan pelabuhan.	



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		5. Manufaktur kandang ayam Usahan manufaktur kandang ayam berfokus pada produksi kandang ayam sistem modern untuk mendukung sektor peternakan unggas. 6. Teras Samarinda Merupakan usaha terbaru dari perumda varia tirta niaga samarinda dengan pola kerja sama pemanfaatan guna menambah ruang terbuka hijau di kota samarinda.	
	Penyertaan Modal. Mendorong lagi adanya penyertaan modal pemerintah kota samarinda demi kemajuan perumda varia niaga dan bisnis harus fokus pada satu bidang usaha yang bisa menguntungkan perusahaan dan meningkatkan PAD kota samarinda.	Langkah : Sudah ada Peraturan Daerah nomor 26 Tahun 2002 tentang penyertaan modal. Perumda Varia Niaga Samarinda masih ada slot dana penyertaan modal sesuai data Akuntansi BPKAD Kota Samarinda sebesar Rp 6.769.631.170	Tujuan : Perumdam Varia Niaga Samarinda, memaksimalkan kinerja dengan fokus pada bidang usaha yang bisa memberikan laba sehingga mampu setor PAD sesuai dengan Tata kelola yang baik.
	Teras Samarinda. Pengelolaan teras samarinda akan diserahkan perumda varia niaga dalam hal kebersihan, ketertiban dan keamanan dan sebaiknya diatur dengan regulasi yang jelas dari pemerintah kota Samarinda.	Pengelolaan Teras Samarinda Tahap I dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengoperasian antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Perumda Varia Niaga Samarinda, yang dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman para pihak dalam pengoperasian dan penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Samarinda Langkah : pengelolaan Teras Samarinda mencakup penjaminan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kawasan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengoperasian dan penggunaan aset daerah. Hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian Pengoperasian yang mencakup keseluruhan objek berupa bangunan, fasilitas pendukung, taman, lanskap, area parkir, serta sarana dan prasarana yang terintegrasi dengan Teras Samarinda Tahap I.	Tujuan : 1. Mengoptimalkan pengoperasian dan penggunaan Barang Milik Daerah berupa Teras Samarinda Tahap I agar memberikan manfaat maksimal bagi Pemerintah Kota Samarinda dan Masyarakat, serta untuk menciptakan pengelolaan aset daerah yang tertib, aman, dan berkelanjutan 2. Mengatur dan menegaskan hak dan kewajiban masing-masing dalam pemanfaatan dan pengoperasian aset daerah, termasuk penjaminan pengelolaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kawasan Teras Samarinda sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengoperasian dan penggunaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan dimaksud dilaksanakan melalui mekanisme pembiayaan dan operasional yang terstruktur dan akuntabel, serta didukung dengan dasar hukum pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, termasuk kegiatan periklanan dan bentuk pemanfaatan lainnya 3. Memastikan pengoperasian dan penggunaan Teras



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
			Samarinda Tahap I berjalan sesuai dengan tujuan kemitraan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kota Samarinda dan Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda secara berkala melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset daerah dimaksud, yang hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan tata kelola pengoperasian Teras Samarinda Tahap I secara berkelanjutan
	Rencana Bisnis. Perumdam varia niaga sebaiknya memiliki dokumen Rencana Bisnis yang jelas dan terukur dalam pengembangan bisnis kedepannya.	Langkah : Rencana Bisnis Perumda Varia Niaga Tahun 2021-2026 yaitu: 1. Existing Business a) Unit Usaha Rusunawa b) Usaha Divisi Pangan c) Pergudangan d) Assist Kapal 2. Development Business a) Bebaya Mart b) Pengembangan Usaha Ayam Frozen c) Trading Batu Bara d) Jasa Pandu Assist Kapal e) Manufaktur Kandang Ayam f) Teras Samarinda	Tujuan : Terpenuhinya dokumen rencana bisnis yang terukur
17.	Pemasangan IPA Baru. Mendorong pertambahan IPA baru di beberapa wilayah yang masih rawan kekurangan pasokan air bersih. Kota Samarinda merupakan kota yang berlimpah akan air sungai Mahakam tetapi kekurangan instalasi pipa air bersihnya. Pertambahan IPA baru ini juga mesti disesuaikan dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Salinan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kota Samarinda Tahun 2016-2035 dan dokumen rencana bisnis Perumdam Tirta Kencana tahun 2025 – 2029, target cakupan layanan 100% tercapai pada tahun 2028, dimana kapasitas produksi air bersih di 13 IPA (Instalasi	Langkah : Pembangunan booster dan reservoir untuk Kelurahan yang berada jauh dari sumber air baku sungai Mahakam.	Tujuan : Kelurahan yang jauh dari sumber air baku sungai Mahakam akan mendapatkan air bersih yang layak baik secara kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Pengolahan Air) di Samarinda, dengan total tambahan 2.200 liter per detik selama periode 2025-2029.		
	Kajian Ulang Penundaan Penyertaan Modal dan Asset. Mendorong Pemerintah kota Samarinda kembali melakukan kajian ulang atas penundaan pemberian kembali tentang Penyertaan Modal dan asset bagi Perumdam Tirta Kencana. Pada tahun 2021 bapak walikota Samarinda pernah meminta penundaan tambahan penyertaan modal Rp 50 miliar dan penyertaan modal dalam bentuk aset senilai Rp 940 miliar. Pada saat itu Wali Kota meminta dilakukan konsultasi terlebih dahulu ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengenai penambahan modal baik uang tunai maupun dalam bentuk aset. Penyertaan modal bagi Perumdam Tirta Kencana selama ini banyak digunakan untuk meningkatkan akses air bersih dan penambahan kapasitas produksi air bersih bagi masyarakat Samarinda agar terpenuhi secara lebih baik.	Langkah : Telah ditindaklanjuti sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.	Tujuan : Pemerintah Kota Samarinda telah menetapkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Samarinda kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Samarinda Penyertaan Modal tentang suku bunga dan ketentuan serta persyaratan kredit
	Koordinasi Penambahan Anggaran dengan OPD terkait. Pemerintah kota Samarinda memberikan dukungan penambahan anggaran dana anggaran penambahan pipa sekunder bagi Perumdam Tirta Kencana yang di tempatkan di Dinas PUPR Kota Samarinda.	Langkah : Dinas PUPR akan mengakomodir kebutuhan Perumdam Tirta Kencana sesuai dengan usulan dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) dan Rencana Bisnis PDAM Kota Samarinda	Tujuan : Kota Samarinda memiliki capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) air minum layak 100% pada Tahun 2029
	Perencanaan Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan. Perumdam Tirta Kencana dapat secara teratur melakukan perencanaan secara baik terkait pemeliharaan jalur pipa, Infrastruktur Intake dan Instalasi Pengolahan Air yang dikelolanya sehingga dapat mengurangi dampak kerusakan yang bisa ditekan seminimal mungkin.	Langkah : Koordinasi dengan pihak Perumdam Tirta Kencana terkait maintenance untuk jalur pipa, intake dan IPA yang ada di Kota Samarinda.	Tujuan : Mengurangi NRW yang ada di Kota Samarinda



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	Apresiasi Kinerja Perumdam Tirta Kencana. DPRD kota Samarinda memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian selama tiga tahun berturut-turut yakni sejak 2011 hingga 2014, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Samarinda pernah berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas kinerja keuangan perusahaan daerah milik pemerintah kota setempat tersebut. Dan, pada tahun 2023 lewat penilaian BPKP perwakilan Kaltim bahwa BUMD dengan pengelolaan korporasi baik diperoleh Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Adapun indikator penilaian terhadap aktivitas-aktivitas pengawasan penting pada tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik" sebagai berikut : a. Bimbingan teknis penyusunan infrastruktur penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda; dan b. Assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) tahun 2022 pada Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Sehingga diharapkan prestasi kinerja ini dapat ditingkatkan lebih baik lagi kedepannya.	Langkah : Berupaya meningkatkan kinerja, koordinasi dan bersinergi dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat.	Tujuan : Memberikan peningkatan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
18.	Regulasi Internal. Pemkot bisa memberikan dorongan ASN dan Non ASN pada Dinas untuk bisa melakukan pinjaman ASN dan Non ASN di Bank BPR.	PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah menindaklanjuti sebagai berikut: Langkah : - Memiliki produk kredit untuk ASN dan non ASN dengan suku bunga yang terjangkau serta persyaratan yang mudah. - Secara rutin dan berkesinambungan melaksanakan sosialisasi produk kredit kepada ASN dan non ASN ke instansi baik dilingkungan Pemerintah Kota maupun Provinsi	Tujuan : - Surat Keputusan Direksi nomor 016/BPR-SK/X/2025 tentang suku bunga dan ketentuan serta persyaratan kredit - Jumlah nasabah jenis kredit Profesi (ASN dan non ASN) per 31 Desember 2025 berjumlah 99 nasabah dan jumlah instansi berjumlah 37
	Penyertaan Modal. Mendorong lagi adanya penyertaan modal Pemerintah Kota Samarinda demi kemajuan Perumda BPR dan bisnis harus fokus pada satu	Langkah : Faktor Permodalan Permodalan merupakan faktor penting bagi BPR untuk mendukung	Tujuan : Telah dipenuhi



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	bidang usaha yang bisa menguntungkan perusahaan dan meningkatkan PAD Kota Samarinda	pengembangan usaha maupun menyerap resiko, berikut data bank posisi TW II Tahun 2025 ; - Modal Inti sebesar RP. 23.981 Milyar berada diatas ketentuan penyedia modal inti minimum. - Rasio modal terhadap ATMR sebesar 93.60% berada diatas ketentuan rasio permodalan terhadap ATMR, yaitu 12.00%. Rasio modal inti terhadap ATMR sebesar 92.50% berada diatas ketentuan rasio modal inti terhadap ATMR, yaitu 8.00%. - Rasio modal terhadap ATMR berada diatas limit toleransi resiko yang ditetapkan dalam kebijakan manajemen resiko, sehingga BPR masih memiliki kemampuan dalam menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. 2. Faktor likuiditas Pengelolaan likuiditas dan fungsi intermediasi tercermin dari rasio-rasio likuiditas berikut data Bank posisi TW II Tahun 2025; - Rasio alat likuid terhadap hutang lancar (Cash Ratio) sebesar 28.30% - Rasio kredit terhadap dana yang diterima (LDR) sebesar 82.55%. Dari Dua faktor rasio di atas, dapat disimpulkan; 1) Bahwa rasio permodalan PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dalam kategori sehat, berada diatas nilai minimum sehingga BPR, masih mampu memberikan kontribusi berupa peningkatan profitabilitas dengan peningkatan penyaluran dana melalui ekspansi kredit. 2) Bahwa PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) dilihat dari cash Ratio dan LDR memiliki Idle Money dengan posisi sehat dan	



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		sesuai ketentuan, sehingga masih memiliki ekspansi penyaluran dana dan likuiditas yang memadai; 3) Pada tahun 2025 PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) belum merencanakan untuk penambahan modal mengingat rasio 2 faktor tersebut masih terpenuhi; 4) Core bisnis PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) adalah penyaluran dana/kredit, maka strategi bisnis yang juga telah termuat dalam RKA 2025 adalah menambah jenis produk kredit seperti pelayuran kredit kelompok, kredit kontraktor, kredit KPR dan pembelian rumah dan/atau Tanah, melakukan kerjasama antar instansi dilingkungan Pemkot Samarinda seperti Dinas Perdagangan Dinas Koperasi, UKM & Perindustrian, Dinas Perikanan, dan Dinas Peternakan Kota Samarinda melalui pemberian akses permodalan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha binaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan diiringi dengan peningkatan potensi kontribusi PAD kepada Pemerintah Kota Samarinda 5) Apabila Kedepannya PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) mendapatkan penambahan modal dari Pemerintah Kota Samarinda selaku pemilik maka Bank Samarinda akan siap untuk mengelolanya sesuai dengan strategi bisnis yang akan disampaikan untuk disetujui oleh Wali Kota Samarinda dalam Rencana Bisnis Bank.	
	Evaluasi Kinerja Keuangan. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Perumda BPR Samarinda terutama dari sisi kinerja keuangan BPR, seperti CAR, BOPO, ROA, ROE, dan NII/TA, karena kinerja keuangan BPR dipengaruhi oleh berbagai faktor	Langkah : Evaluasi Kinerja Keuangan Bank secara rutin dan merupakan kewajiban sesuai ketentuan regulasi telah dilakukan oleh Dewan komisaris PT. Bank BPR Samarinda (Perseroda) serta hasilnya disampaikan pada	Tujuan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2024 tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPRS milik Pemerintah Daerah. 2. POJK nomor



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
	seperti kekuatan pasar, intensitas pinjaman Bank, ukuran Bank, resiko, kualitas manajemen, dan nilai pemegang saham.	pemegang saham melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Otoritas Jasa keuangan secara berkala yang termuat pada laporan hasil realisasi pengawasan secara semester	15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS
	Pembenahan manajemen. Mendorong untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut, BPR perlu terus meningkatkan kualitas manajemen, efisiensi operasional, dan kemampuan dalam menarik nasabah.	Langkah : Dalam rangka peningkatan kinerja PT.BPR Bank Samarinda (Perseroda) telah menyusun strategi Bisnis ke depannya yang telah termuat dalam rencana kerja Anggaran tahun 2025 yang telah disampaikan dan disetujui pada tanggal 9 Desember 2024 oleh Pemegang Saham dan juga pada OJK dan dalam Rencana Anggaran tersebut telah memuat strategi peningkatan kualitas manajemen. Efisiensi Operasional seperti Bank Samarinda melakukan investasi dengan system digitalisasi sehingga dapat meminimalkan penggunaan kertas (Go Green) dan menekan biaya, perubahan hari kerja dan layanan yang semula 6 HK menjadi 5 HK dan lain sebagainya. Kemampuan dalam menarik nasabah, telah dilaksanakan Bank Samarinda seperti: - Penghimpunan dana, menambah produk tabungan yaitu Tabungan SiPesut bagi pelajar dan mengoptimalkan produk tabungan lainnya serta Deposito dengan suku bunga yang menarik dan kemudahan layanan pick up service bagi nasabah. - Penyaluran dana, penambahan jenis kredit, yaitu kredit kontraktor, jenis KPR dan pembelian rumah/tanah pengoptimalkan layanan kredit dengan proses dan syarat dan mudah serta bunga yang bersaing dan terjangkau untuk seluruh jenis baik kredit umum, UMKM, kredit kepada ASN, non ASN, PPPK, Karyawan BUMD, BLUD dan produk kredit lainnya yang dimiliki oleh Bank Samarinda.	Tujuan : - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2024 tentang Pengelolaan BPR milik Pemerintah Daerah dan BPRS milik Pemerintah Daerah. - POJK nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS



NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2024	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang Diselesaikan
		c. Penyediaan layanan Payment Point Online Bank seperti Pembayaran Tagihan Listrik, Air, PBB, BPKS, Pengisian Pulsa dan lain sebagainya.	



**PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA**



BAB IV

**CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN**

L K P J T a h u n 2 0 2 5



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang ditugas – Pembantuan

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Pusat/Provinsi

Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Kementerian Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun 2021 dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah:

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Samarinda memperoleh Tugas Pembantuan dari Badan Pangan Nasional Republik Indonesia melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda sebagaimana dirincikan pada tabel berikut:



Tabel 4. 1 Tugas Pembantuan yang Dilaksanakan

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Badan Pangan Nasional / Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan	DIPA – 125.01.3.690714/2025 Tanggal 07 Maret 2025	Program : Ketersediaan Akses dan Konsumsi Berkualitas								
			Kegiatan : Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan								
			Klasifikasi Rincian Output : Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)								
			Rincian Output : Kelompok Masyarakat yang terfasilitasi Penganekaragaman Pangan								
			Komponen : Rumah Pangan B2SA								
			Sub Komponen : Kegiatan Rumah Pangan B2SA Samarinda	Jl Kurnia Makmur RT 24 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	30.000.000	30.000.000	100,00	1,00	100,00	



4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Pemerintah Kota Samarinda tidak memberikan tugas pembantuan urusan pemerintahan kepada pemerintah di bawahnya karena di Kota Samarinda tidak ada unsur Desa.

4.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 2 Permasalahan dan Upaya dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH
1.	Program : Ketersediaan Akses dan Konsumsi Berkualitas	1. Ketersediaan bahan baku (singkong dan pisang) yang berkualitas pada wilayah setempat yang belum kontinuitas 2. Kenaikan harga minyak goreng 3. Kelangkaan bahan bakar gas	1. Bahan baku adalah dengan mencari bahan baku diluar wilayah (Loa Janan Ilir), agar produksi tetap berjalan mengingat permintaan yang tinggi. 2. Untuk kelangkaan bahan bakar gas dengan mengurangi produksi yang biasanya 2 kali produksi dalam seminggu menjadi 1 kali produksi saja.
	Kegiatan : Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan		
	Komponen Kegiatan : Rumah Pangan B2SA		



PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA



BAB V

PENUTUP

L K P J T a h u n 2 0 2 5



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Samarinda Tahun 2025 bertujuan untuk menyajikan gambaran informasi yang komprehensif mengenai capaian pelaksanaan program dan kegiatan secara jelas, terukur dan transparan selama periode tahun anggaran 2025 sebagai penilaian utama terhadap efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2025 merupakan dokumen laporan atas implementasi program kerja pemerintah daerah yang mencakup penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan, tugas umum pemerintahan, serta tugas pembantuan selama satu tahun anggaran. Secara konstitusional, LKPJ Wali Kota Samarinda Tahun 2025 disusun dengan merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024. Ketentuan ini merupakan elaborasi teknis atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mengatur mengenai mekanisme pelaporan serta evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif.

Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mengoptimalkan pembangunan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan secara optimal, sehingga mampu mengakselerasi peningkatan kualitas pembangunan di berbagai sektor. Keberhasilan tersebut divalidasi oleh capaian nilai Indikator Kerja Utama yang memenuhi target strategis. Penyelenggaraan pemerintahan yang optimal merupakan hasil dari dedikasi dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Samarinda, DPRD, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan yang senantiasa bergerak selaras menjalankan perannya masing-masing secara bertanggung jawab sesuai koridor kewenangan yang ditetapkan.



Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa setiap dinamika pembangunan yang belum terlaksana dengan maksimal merupakan suatu ruang perbaikan yang memerlukan penanganan komprehensif. Berdasarkan pencapaian pembangunan yang telah disampaikan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama. Guna meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Daerah sangat terbuka terhadap saran dan masukan konstruktif yang disampaikan oleh DPRD. Sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas pada tahun mendatang. Semoga dokumen ini menjadi instrumen evaluasi yang efektif demi meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Samarinda menjadi kota yang semakin maju dan sejahtera di masa yang akan datang.



Samarinda, 16 Maret 2026

WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN



PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA



LAMPIRAN

L K P J T a h u n 2 0 2 5



LAMPIRAN

Lampiran 1 Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025

Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.585.883.214.489,00	1.453.328.508.317,89	2.489.604.712.031,00	2.169.859.790.118,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	759.666.951.272,00	712.461.580.826,61	354.852.819.700,00	292.195.227.303,00	0	0	0	0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	758.734.825.022,00	711.793.959.846,61	354.722.169.700,00	292.122.707.303,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	533.624.583.074,00	362.180.072.790,61	5.272.135.000,00	4.765.752.150,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.837.000,00	120.783.250,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.572.000,00	62.678.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.965.750,00	21.579.750,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.670.250,00	31.103.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.629.000,00	5.422.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	520.211.289.192,00	353.159.186.026,61	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	516.123.984.192,00	349.537.708.367,61	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.039.430.000,00	3.573.627.659,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.875.000,00	47.850.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.000.000,00	45.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00	45.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.365.271.187,00	1.909.077.646,00	3.709.662.500,00	3.223.609.650,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	250.000.000,00	249.334.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.350.000,00	0	3.699.662.500,00	3.223.609.650,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	730.000.000,00	682.745.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	832.921.187,00	580.254.124,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	94.735.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000,00	302.008.922,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.756.404.295,00	4.327.779.516,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.278.346.675,00	1.104.699.416,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	445.000.000,00	260.550.100,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.033.057.620,00	2.962.530.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.963.781.400,00	2.617.746.352,00	1.562.472.500,00	1.542.142.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	276.348.550,00	178.853.127,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.296.750,00	260.288.228,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	446.308.600,00	183.170.001,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.950.827.500,00	1.995.434.996,00	1.562.472.500,00	1.542.142.500,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	145.960.822.248,00	152.317.596.251,00	348.565.985.900,00	286.942.877.986,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	66.167.340.048,00	80.232.164.324,00	157.309.969.400,00	112.445.211.027,00	0	0	0	0
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	608.246.250,00	302.785.332,00	5.213.671.000,00	2.587.200.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	108.489.250,00	37.629.000,00	390.056.000,00	389.000.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	96.060.000,00	27.626.500,00	274.000.000,00	273.749.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	49.971.250,00	33.624.000,00	200.000.000,00	198.844.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	902.590.000,00	68.931.000,00	3.208.396.700,00	2.055.060.700,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	87.627.625,00	22.750.000,00	161.186.500,00	160.414.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	73.750.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel Sekolah	102.737.223,00	0	19.129.400.000,00	18.040.879.623,00	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16.630.000,00	16.264.800,00	133.200.000,00	0	0	0	0	0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	412.987.050,00	376.190.550,00	40.800.200,00	37.573.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	18.850.000,00	13.520.000,00	6.150.000,00	0	0	0	0	0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	463.212.700,00	88.163.774,00	65.000.000,00	17.815.500,00	0	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	474.014.625,00	470.634.476,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	54.690.706.875,00	74.970.848.483,00	37.541.285.000,00	22.351.367.119,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	21.685.000,00	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	43.369.000,00	1.611.120,00	256.083.000,00	255.675.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	134.743.625,00	39.260.000,00	363.527.000,00	363.281.000,00	0	0	0	0
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	83.000.000,00	14.400.000,00	17.000.000,00	0	0	0	0	0
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	436.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	541.519.000,00	492.481.700,00	33.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	449.950.000,00	400.401.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.417.877.000,00	1.276.816.464,00	38.100.000.000,00	26.156.398.700,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	423.822.500,00	220.818.500,00	5.124.115.000,00	3.694.936.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	147.975.625,00	146.419.625,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.524.796.000,00	485.088.000,00	45.077.099.000,00	33.906.672.250,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	774.938.750,00	721.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	61.190.700,00	0	1.976.000.000,00	1.956.344.635,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	57.953.040.375,00	55.249.137.828,00	175.530.029.200,00	164.402.273.334,00	0	0	0	0
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.486.154.500,00	1.198.042.575,00	53.000.000.000,00	52.245.136.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	167.465.500,00	44.440.918,00	408.248.000,00	398.000.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	77.387.500,00	31.672.679,00	329.818.000,00	0	0	0	0	0
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100.744.500,00	55.177.848,00	548.000.000,00	527.055.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Laboratorium	73.920.000,00	69.222.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	73.920.000,00	69.999.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Fasilitas Parkir	680.000,00	680.000,00	73.240.000,00	0	0	0	0	0
Pembangunan Kantin Sekolah	73.920.000,00	680.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	552.039.250,00	222.402.383,00	6.940.568.150,00	6.015.235.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	225.340.000,00	147.838.500,00	5.228.710.050,00	5.174.378.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	5.850.000,00	5.850.000,00	80.058.100,00	79.919.450,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	326.584.250,00	43.289.041,00	773.760.000,00	398.402.497,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel Sekolah	129.590.000,00	127.965.969,00	32.601.600.000,00	31.794.144.353,00	0	0	0	0
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	66.395.000,00	66.268.719,00	332.800.000,00	193.470.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	26.558.950,00	26.091.789,00	1.649.900.000,00	1.168.700.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	544.917.500,00	544.892.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	669.830.250,00	603.760.561,00	54.775.000,00	54.129.000,00	0	0	0	0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	411.812.000,00	109.000.000,00	20.000.000,00	19.910.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	373.930.250,00	175.053.685,00	103.406.000,00	0	0	0	0	0
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.322.925.675,00	49.723.564.636,00	16.254.155.000,00	10.038.008.627,00	0	0	0	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	212.350.500,00	200.085.097,00	95.900.000,00	53.600.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	145.402.500,00	145.077.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.498.400.000,00	1.284.062.718,00	49.499.000.000,00	48.978.622.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	224.363.000,00	216.760.000,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	42.455.000,00	19.543.600,00	213.912.900,00	212.832.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	120.104.250,00	117.715.610,00	7.122.178.000,00	7.050.731.407,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.161.734.125,00	9.428.802.835,00	13.463.089.500,00	9.181.551.513,00	0	0	0	0
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	260.134.500,00	174.662.518,00	2.429.550.000,00	2.026.237.271,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel PAUD	33.796.500,00	0	419.000.000,00	218.014.480,00	0	0	0	0
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	22.357.300,00	0	123.529.200,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan PAUD	23.600.000,00	23.479.000,00	182.400.000,00	179.087.400,00	0	0	0	0
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	24.750.000,00	21.660.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	258.906.500,00	242.368.706,00	62.500.000,00	52.498.775,00	0	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	636.339.000,00	209.715.640,00	137.625.000,00	76.820.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Dana BOP PAUD	8.452.584.450,00	6.042.531.478,00	742.060.300,00	576.011.040,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.615.000,00	2.485.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Mebel Sekolah	77.250.000,00	10.441.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	44.500.000,00	43.300.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	412.722.750,00	368.154.200,00	1.800.000,00	0	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	21.740.000,00	7.740.000,00	53.260.000,00	52.154.400,00	0	0	0	0
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	51.458.000,00	38.756.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Kelas Baru	21.860.000,00	21.819.000,00	235.640.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan infrastruktur TIK	1.375.000,00	1.365.500,00	23.625.000,00	23.475.000,00	0	0	0	0
Penataan Ruang/Sudut Baca	7.100.000,00	3.219.000,00	42.900.000,00	42.750.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	19.840.000,00	19.819.500,00	230.160.000,00	0	0	0	0	0
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	299.072.625,00	297.345.100,00	0	0	0	0	0	0
Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	152.918.000,00	147.658.503,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	21.740.000,00	7.740.000,00	53.260.000,00	52.040.000,00	0	0	0	0
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	50.000.000,00	38.446.000,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	9.580.000,00	1.830.000,00	90.420.000,00	90.081.400,00	0	0	0	0
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	49.437.500,00	44.137.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	577.070.500,00	366.410.000,00	2.516.310.000,00	504.577.069,00	0	0	0	0
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000,00	197.710.073,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	21.740.000,00	7.740.000,00	53.260.000,00	53.170.100,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	621.168.000,00	495.605.500,00	4.824.780.000,00	4.005.025.568,00	0	0	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	97.824.000,00	12.917.618,00	1.182.250.000,00	1.176.684.110,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	446.514.500,00	372.005.499,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	21.740.000,00	7.740.000,00	53.260.000,00	52.924.900,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.678.707.700,00	7.407.491.264,00	2.262.897.800,00	913.842.112,00	0	0	0	0
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	448.637.500,00	448.637.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	165.839.250,00	57.948.052,00	6.550.000,00	0	0	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	401.010.000,00	352.178.728,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.755.370.950,00	5.496.611.489,00	279.600.000,00	270.510.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	22.615.000,00	602.748.495,00	0	41.940.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	3.870.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50.000.000,00	45.670.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10.680.000,00	10.598.000,00	39.320.000,00	0	0	0	0	0
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	32.000.000,00	30.800.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.574.000,00	6.575.000,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000,00	5.153.500,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	44.625.000,00	35.985.000,00	5.000.000,00	4.925.000,00	0	0	0	0
Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	46.116.000,00	25.990.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	26.000.000,00	3.270.000,00	274.000.000,00	273.329.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	298.900.000,00	228.985.000,00	1.493.167.800,00	217.438.112,00	0	0	0	0
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	29.600.000,00	22.470.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	21.740.000,00	0	53.260.000,00	52.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	146.000.000,00	0	54.000.000,00	53.700.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	16.605.168.700,00	16.114.076.792,00	374.470.000,00	287.212.167,00	0	0	0	0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	16.510.486.200,00	16.025.694.292,00	374.470.000,00	287.212.167,00	0	0	0	0
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	81.136.250,00	74.165.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	16.385.397.200,00	15.912.821.792,00	374.470.000,00	287.212.167,00	0	0	0	0
Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	42.452.750,00	38.707.500,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	94.682.500,00	88.382.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	94.682.500,00	88.382.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.544.251.000,00	181.182.214.013,00	509.578.800,00	126.865.000,00	0	0	0	0
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	62.544.251.000,00	181.182.214.013,00	509.578.800,00	126.865.000,00	0	0	0	0
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	59.493.045.000,00	178.538.665.727,00	127.450.000,00	126.865.000,00	0	0	0	0
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.051.206.000,00	2.643.548.286,00	382.128.800,00	0	0	0	0	0
UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif	662.643.750,00	451.538.480,00	100.650.000,00	42.650.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	662.643.750,00	451.538.480,00	100.650.000,00	42.650.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	662.643.750,00	451.538.480,00	100.650.000,00	42.650.000,00	0	0	0	0
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	662.643.750,00	451.538.480,00	100.650.000,00	42.650.000,00	0	0	0	0
UPT Sanggar Kegiatan Belajar	269.482.500,00	216.082.500,00	30.000.000,00	29.870.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	269.482.500,00	216.082.500,00	30.000.000,00	29.870.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	269.482.500,00	216.082.500,00	30.000.000,00	29.870.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	269.482.500,00	216.082.500,00	30.000.000,00	29.870.000,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	459.576.599.624,00	441.709.305.269,28	56.888.480.738,00	44.658.854.402,00	0	0	0	0
Dinas Kesehatan Kota Samarinda	335.067.736.881,00	321.017.850.095,39	53.002.292.981,00	41.290.307.329,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.104.050.671,00	186.807.528.044,00	411.381.995,00	141.856.750,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.991.000,00	148.361.190,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.391.000,00	115.540.056,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.366.000,00	10.559.130,00	36.000.000,00	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.234.000,00	22.262.004,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	181.366.241.912,00	178.284.041.617,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168.084.873.912,00	165.483.076.768,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13.226.368.000,00	12.745.964.849,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	55.000.000,00	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.459.500,00	1.092.414.596,00	19.231.995,00	15.234.750,00	0	0	0	0
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	19.231.995,00	15.234.750,00	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	500.000.000,00	222.723.000,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	344.209.500,00	246.988.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	656.250.000,00	622.703.596,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.957.500,00	232.460.998,00	148.330.000,00	126.622.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	9.207.454,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	55.000.000,00	34.220.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.670.000,00	16.590.000,00	93.330.000,00	92.402.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.000.000,00	51.240.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.787.500,00	55.594.900,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	14.939.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	92.000.000,00	49.071.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37.500.000,00	35.818.044,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	271.140.000,00	250.140.000,00	193.820.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.960.000,00	243.960.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.180.000,00	6.180.000,00	93.820.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.743.260.759,00	6.260.756.787,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.333.260.759,00	5.107.466.887,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.000.000,00	45.595.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.298.000.000,00	1.107.694.900,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720.000.000,00	539.352.856,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.000.000,00	115.416.050,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000,00	249.876.824,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Mebel	100.000.000,00	14.340.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	64.883.940,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	44.902.642,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	49.933.400,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	140.438.121.210,00	130.624.498.984,39	52.590.910.986,00	41.148.450.579,00	0	0	0	0
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	19.119.892.109,00	18.156.593.225,00	49.278.033.836,00	38.158.928.080,00	0	0	0	0
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	985.827.500,00	619.840.000,00	32.142.206.290,00	26.619.730.940,00	0	0	0	0
Pembangunan Puskesmas	543.354.000,00	528.823.285,00	9.794.052.046,00	6.602.947.400,00	0	0	0	0
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	241.160.000,00	226.834.500,00	1.958.840.000,00	1.902.143.500,00	0	0	0	0
Pengembangan Puskesmas	147.026.000,00	117.543.000,00	2.200.232.800,00	390.687.700,00	0	0	0	0
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	264.784.800,00	232.047.000,00	135.215.200,00	120.309.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	8.625.527.809,00	8.338.932.660,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	295.048.000,00	285.393.300,00	203.257.500,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	192.212.000,00	153.253.508,00	2.799.630.000,00	2.495.109.540,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	500.000.000,00	491.453.258,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Rumah Sakit	162.000.000,00	132.281.059,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	7.000.000.000,00	6.887.006.655,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	81.880.000,00	63.870.000,00	0	0	0	0	0	0
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	81.072.000,00	79.315.000,00	16.600.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	121.087.778.601,00	112.298.569.133,39	3.312.877.150,00	2.989.522.499,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.894.972.313,00	2.425.521.862,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88.390.000,00	88.389.884,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.135.383.250,00	1.046.148.896,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	212.543.500,00	211.556.652,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.603.317.250,00	1.339.438.575,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	2.119.409.679,00	788.436.050,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	419.617.750,00	309.170.495,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.867.166.129,00	1.647.176.616,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2.434.281.800,00	2.216.549.536,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	569.714.500,00	387.674.216,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	577.072.500,00	445.254.700,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	34.145.000,00	34.020.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	50.000.000,00	49.968.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	50.000.000,00	38.598.179,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	14.808.032.676,00	13.405.838.379,00	147.925.598,00	18.249.300,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	283.640.714,00	250.460.343,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.550.047.000,00	1.554.478.476,00	30.850.000,00	30.850.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.989.568.000,00	3.932.281.906,00	1.710.000.000,00	1.690.530.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	45.361.000,00	43.089.000,00	2.475.000,00	2.474.999,00	0	0	0	0
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	982.777.500,00	683.164.250,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	328.746.500,00	186.481.300,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	49.837.000,00	49.837.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	50.000.000,00	49.991.800,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6.379.269.856,00	1.807.960.134,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	66.433.533.600,00	70.740.779.476,39	0	0	0	0	0	0
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	36.366.000,00	36.365.800,00	0	0	0	0	0	0
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	195.612.000,00	53.811.900,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	460.332.000,00	396.684.190,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4.138.363.901,00	2.909.692.095,00	1.402.000.000,00	1.247.418.200,00	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	2.308.585.183,00	1.931.119.070,00	19.626.552,00	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	230.134.000,00	57.720.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	60.781.000,00	60.755.600,00	0	0	0	0	0	0
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	37.500.000,00	37.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	48.300.000,00	51.999.850,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3.063.687.000,00	2.512.721.341,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	300.000.000,00	289.415.330,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	86.875.000,00	86.714.350,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	114.675.000,00	92.104.082,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	49.740.000,00	49.699.800,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	48.241.000,00	23.602.337,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	48.241.000,00	23.602.337,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	182.209.500,00	145.734.289,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	49.469.500,00	27.430.556,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	38.151.851,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	82.740.000,00	80.151.882,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	279.721.000,00	278.330.415,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	90.940.000,00	90.435.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	49.495.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	40.940.000,00	40.940.000,00	0	0	0	0	0	0
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	138.781.000,00	137.895.415,00	0	0	0	0	0	0
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	38.781.000,00	38.500.415,00	0	0	0	0	0	0
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	50.000.000,00	49.395.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	666.909.000,00	347.168.829,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	135.338.000,00	92.283.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	135.338.000,00	92.283.000,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk	175.789.000,00	92.173.394,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	175.789.000,00	92.173.394,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000,00	46.397.350,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	50.000.000,00	46.397.350,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	47.673.000,00	25.194.200,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	47.673.000,00	25.194.200,00	0	0	0	0	0	0
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	258.109.000,00	91.120.885,00	0	0	0	0	0	0
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	258.109.000,00	91.120.885,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.578.935.000,00	2.960.323.823,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.650.000,00	46.849.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	48.650.000,00	46.849.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000,00	39.999.950,00	0	0	0	0	0	0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	40.000.000,00	39.999.950,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	2.490.285.000,00	2.873.474.873,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kabupaten/Kota								
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.490.285.000,00	2.873.474.873,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Air Putih	1.665.000.000,00	1.606.108.306,00	85.000.000,00	73.832.660,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.415.000.000,00	1.356.638.306,00	85.000.000,00	73.832.660,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.415.000.000,00	1.356.638.306,00	85.000.000,00	73.832.660,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.415.000.000,00	1.356.638.306,00	85.000.000,00	73.832.660,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.470.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.470.000,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.470.000,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Bengkuring	1.542.000.000,00	1.527.204.291,00	108.000.000,00	79.336.100,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.292.000.000,00	1.277.507.491,00	108.000.000,00	79.336.100,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.292.000.000,00	1.277.507.491,00	108.000.000,00	79.336.100,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.292.000.000,00	1.277.507.491,00	108.000.000,00	79.336.100,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.696.800,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.696.800,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.696.800,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Harapan Baru	1.085.000.000,00	1.050.713.227,00	165.000.000,00	164.984.305,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	835.000.000,00	832.845.746,00	165.000.000,00	164.984.305,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	835.000.000,00	832.845.746,00	165.000.000,00	164.984.305,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	835.000.000,00	832.845.746,00	165.000.000,00	164.984.305,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	217.867.481,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	217.867.481,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	217.867.481,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Juanda	960.000.000,00	1.223.284.042,72	100.000.000,00	70.718.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	710.000.000,00	973.966.906,72	100.000.000,00	70.718.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	710.000.000,00	973.966.906,72	100.000.000,00	70.718.000,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	710.000.000,00	973.966.906,72	100.000.000,00	70.718.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.317.136,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.317.136,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.317.136,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Kampung Baqa	2.602.000.000,00	2.559.720.197,00	124.000.000,00	61.943.294,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.352.000.000,00	2.309.724.715,00	124.000.000,00	61.943.294,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.352.000.000,00	2.309.724.715,00	124.000.000,00	61.943.294,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.352.000.000,00	2.309.724.715,00	124.000.000,00	61.943.294,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.995.482,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.995.482,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.995.482,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Lempake	2.902.500.000,00	3.021.336.141,00	147.500.000,00	257.929.615,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.700.000.000,00	2.861.693.569,00	100.000.000,00	210.429.914,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.700.000.000,00	2.861.693.569,00	100.000.000,00	210.429.914,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.700.000.000,00	2.861.693.569,00	100.000.000,00	210.429.914,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	202.500.000,00	159.642.572,00	47.500.000,00	47.499.701,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	202.500.000,00	159.642.572,00	47.500.000,00	47.499.701,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Operasional Pelayanan Puskesmas	202.500.000,00	159.642.572,00	47.500.000,00	47.499.701,00	0	0	0	0
UPT Puskesmas Loa Bakung	250.000.000,00	248.858.049,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	248.858.049,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.858.049,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	248.858.049,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Mangkupalas	250.000.000,00	224.842.750,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	224.842.750,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	224.842.750,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	224.842.750,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Palaran	3.100.000.000,00	3.046.689.008,00	250.000.000,00	181.993.079,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.000.000,00	2.796.706.703,00	250.000.000,00	181.993.079,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.850.000.000,00	2.796.706.703,00	250.000.000,00	181.993.079,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.850.000.000,00	2.796.706.703,00	250.000.000,00	181.993.079,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.982.305,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.982.305,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.982.305,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Pasundan	250.000.000,00	232.702.750,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	232.702.750,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	232.702.750,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	232.702.750,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Remaja	250.000.000,00	248.027.452,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	248.027.452,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.027.452,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	248.027.452,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Sambutan	250.000.000,00	249.951.675,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.951.675,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.951.675,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.951.675,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Segiri	2.233.000.000,00	2.080.323.476,00	217.000.000,00	192.886.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.983.000.000,00	1.830.677.769,00	217.000.000,00	192.886.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.983.000.000,00	1.830.677.769,00	217.000.000,00	192.886.000,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.983.000.000,00	1.830.677.769,00	217.000.000,00	192.886.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.645.707,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.645.707,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.645.707,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Sungai Kapih	204.800.000,00	204.493.750,00	45.200.000,00	45.199.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	204.800.000,00	204.493.750,00	45.200.000,00	45.199.999,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204.800.000,00	204.493.750,00	45.200.000,00	45.199.999,00	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	204.800.000,00	204.493.750,00	45.200.000,00	45.199.999,00	0	0	0	0
UPT Puskesmas Sungai Siring	1.230.000.000,00	1.175.063.042,00	20.000.000,00	17.983.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	980.000.000,00	951.560.648,00	20.000.000,00	17.983.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	980.000.000,00	951.560.648,00	20.000.000,00	17.983.000,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	980.000.000,00	951.560.648,00	20.000.000,00	17.983.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	223.502.394,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	223.502.394,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	223.502.394,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Sempaja	250.000.000,00	211.135.829,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	211.135.829,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	211.135.829,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	211.135.829,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Sidomulyo	2.163.000.000,00	2.379.327.547,00	37.000.000,00	84.742.950,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.913.000.000,00	2.175.126.373,00	37.000.000,00	84.742.950,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.913.000.000,00	2.175.126.373,00	37.000.000,00	84.742.950,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.913.000.000,00	2.175.126.373,00	37.000.000,00	84.742.950,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	204.201.174,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	204.201.174,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	204.201.174,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Temindung	3.045.000.000,00	2.767.459.069,95	155.000.000,00	154.393.375,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.795.000.000,00	2.518.525.321,95	155.000.000,00	154.393.375,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	2.795.000.000,00	2.518.525.321,95	155.000.000,00	154.393.375,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.795.000.000,00	2.518.525.321,95	155.000.000,00	154.393.375,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	248.933.748,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.933.748,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	248.933.748,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Wonorejo	1.568.000.000,00	1.539.939.701,51	182.000.000,00	54.259.901,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.318.000.000,00	1.291.014.434,51	182.000.000,00	54.259.901,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.318.000.000,00	1.291.014.434,51	182.000.000,00	54.259.901,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.318.000.000,00	1.291.014.434,51	182.000.000,00	54.259.901,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	248.925.267,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.925.267,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	248.925.267,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Trauma Center	3.330.000.000,00	3.316.196.319,90	220.000.000,00	218.683.491,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.080.000.000,00	3.079.334.196,90	220.000.000,00	218.683.491,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.080.000.000,00	3.079.334.196,90	220.000.000,00	218.683.491,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.080.000.000,00	3.079.334.196,90	220.000.000,00	218.683.491,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	236.862.123,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	236.862.123,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	236.862.123,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Makroman	1.120.000.000,00	1.104.834.482,00	30.000.000,00	26.472.843,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	870.000.000,00	857.570.347,00	30.000.000,00	26.472.843,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	870.000.000,00	857.570.347,00	30.000.000,00	26.472.843,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	870.000.000,00	857.570.347,00	30.000.000,00	26.472.843,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	247.264.135,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	247.264.135,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	247.264.135,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Bantuas	740.250.000,00	881.134.381,00	109.750.000,00	88.877.297,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	560.000.000,00	700.896.985,00	40.000.000,00	19.127.300,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	560.000.000,00	700.896.985,00	40.000.000,00	19.127.300,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	560.000.000,00	700.896.985,00	40.000.000,00	19.127.300,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	180.250.000,00	180.237.396,00	69.750.000,00	69.749.997,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	180.250.000,00	180.237.396,00	69.750.000,00	69.749.997,00	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	180.250.000,00	180.237.396,00	69.750.000,00	69.749.997,00	0	0	0	0
UPT Puskesmas Bukuan	1.380.000.000,00	1.364.279.405,00	70.000.000,00	69.788.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.130.000.000,00	1.125.264.405,00	70.000.000,00	69.788.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.130.000.000,00	1.125.264.405,00	70.000.000,00	69.788.000,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.130.000.000,00	1.125.264.405,00	70.000.000,00	69.788.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	239.015.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	239.015.000,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	239.015.000,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Lok Bahu	1.169.362.243,00	1.238.913.882,00	30.637.757,00	36.346.766,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	919.362.243,00	990.267.601,00	30.637.757,00	36.346.766,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	919.362.243,00	990.267.601,00	30.637.757,00	36.346.766,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	919.362.243,00	990.267.601,00	30.637.757,00	36.346.766,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	248.646.281,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	248.646.281,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	248.646.281,00	0	0	0	0	0	0
UPT Puskesmas Samarinda Kota	1.350.000.000,00	1.347.717.880,69	50.000.000,00	19.915.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.100.000.000,00	1.098.548.110,69	50.000.000,00	19.915.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.100.000.000,00	1.098.548.110,69	50.000.000,00	19.915.000,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.100.000.000,00	1.098.548.110,69	50.000.000,00	19.915.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	250.000.000,00	249.169.770,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	249.169.770,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	250.000.000,00	249.169.770,00	0	0	0	0	0	0
UPT Karang Asam	1.490.000.000,00	1.589.791.908,65	260.000.000,00	216.784.670,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.300.000.000,00	1.401.711.908,65	200.000.000,00	156.784.670,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	1.300.000.000,00	1.401.711.908,65	200.000.000,00	156.784.670,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.300.000.000,00	1.401.711.908,65	200.000.000,00	156.784.670,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	190.000.000,00	188.080.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000,00	188.080.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Puskesmas	190.000.000,00	188.080.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0
RSUD IA. MOEIS	84.098.000.000,00	78.339.706.921,47	1.100.000.000,00	996.447.068,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.900.000.000,00	78.339.706.921,47	1.100.000.000,00	996.447.068,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	83.900.000.000,00	78.339.706.921,47	1.100.000.000,00	996.447.068,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	83.900.000.000,00	78.339.706.921,47	1.100.000.000,00	996.447.068,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	198.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	198.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	198.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
UPT Instalasi Farmasi	69.900.000,00	62.246.353,00	30.100.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	69.900.000,00	62.246.353,00	30.100.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.900.000,00	62.246.353,00	30.100.000,00	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	69.900.000,00	62.246.353,00	30.100.000,00	0	0	0	0	0
Labkesda Kota Samarinda	3.961.050.500,00	5.849.453.336,00	350.000.000,00	255.029.660,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.750.000.000,00	5.752.025.836,00	350.000.000,00	255.029.660,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan BLUD	3.750.000.000,00	5.752.025.836,00	350.000.000,00	255.029.660,00	0	0	0	0
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.750.000.000,00	5.752.025.836,00	350.000.000,00	255.029.660,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	211.050.500,00	97.427.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	211.050.500,00	97.427.500,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	211.050.500,00	97.427.500,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	215.143.627.173,00	162.370.178.687,00	1.924.880.012.422,00	1.685.383.864.924,00	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	199.267.579.673,00	149.231.206.781,00	1.906.290.762.047,00	1.667.316.210.514,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.594.328.121,00	26.949.245.419,00	4.711.638.750,00	4.328.830.595,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	503.143.800,00	484.255.043,00	78.550.000,00	76.300.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	314.180.700,00	313.140.200,00	78.550.000,00	76.300.000,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	68.887.300,00	68.570.607,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.075.800,00	69.439.800,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	33.104.436,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.502.840.868,00	22.213.246.834,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.621.785.868,00	17.600.038.138,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.832.055.000,00	4.564.482.196,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.000.000,00	48.726.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	59.363.300,00	53.153.308,00	0	0	0	0	0	0
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	29.654.900,00	25.559.499,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	29.708.400,00	27.593.809,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.138.116.550,00	907.588.438,00	977.318.750,00	961.409.395,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	47.971.980,00	47.971.980,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.480.000,00	102.480.000,00	977.318.750,00	961.409.395,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.697.500,00	91.562.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	256.829.350,00	254.347.735,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	21.965.000,00	21.650.962,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	616.172.720,00	389.575.761,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.935.000,00	78.934.992,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.935.000,00	78.934.992,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.707.149.893,00	1.658.493.698,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	913.569.893,00	896.266.698,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.580.000,00	762.227.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.604.778.710,00	1.553.573.106,00	3.655.770.000,00	3.291.121.200,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.168.700,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	967.395.010,00	917.555.606,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	277.535.000,00	277.337.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	358.680.000,00	358.680.000,00	3.655.770.000,00	3.291.121.200,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.756.370.000,00	6.037.548.485,00	116.668.109.375,00	104.039.819.400,00	0	0	0	0
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.065.025.000,00	3.876.332.820,00	98.362.629.375,00	85.915.742.250,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	0	0	2.299.748.250,00	2.245.113.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	486.000.000,00	66.250.270,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	2.000.000.000,00	1.635.445.140,00	0	0	0	0	0	0
Operasi dan Pemeliharaan Sungai	231.525.000,00	227.829.620,00	0	0	0	0	0	0
Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	500.000.000,00	499.651.870,00	0	0	0	0	0	0
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	1.543.000.000,00	1.272.773.060,00	0	0	0	0	0	0
Normalisasi/Restorasi Sungai	304.500.000,00	174.382.860,00	798.000.000,00	688.200.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Polder/Kolam Retensi	0	0	13.036.542.625,00	13.035.923.100,00	0	0	0	0
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0	0	47.096.996.000,00	41.104.201.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Tanggul Sungai	0	0	1.102.362.500,00	1.098.843.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	0	0	315.625.000,00	119.321.100,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	0	0	2.329.658.250,00	2.288.767.400,00	0	0	0	0
Pembangunan Polder/Kolam Retensi	0	0	30.383.834.250,00	24.362.169.550,00	0	0	0	0
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	0	0	999.862.500,00	973.204.100,00	0	0	0	0
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.691.345.000,00	2.161.215.665,00	18.305.480.000,00	18.124.077.150,00	0	0	0	0
Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	1.504.912.500,00	1.456.944.600,00	0	0	0	0
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	9.503.912.500,00	9.388.850.050,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	0	2.550.875.000,00	2.534.733.500,00	0	0	0	0
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	374.220.000,00	371.975.570,00	4.625.780.000,00	4.624.149.000,00	0	0	0	0
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	750.000.000,00	541.145.986,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	551.250.000,00	545.419.000,00	0	0	0	0	0	0
Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	795.375.000,00	702.675.109,00	120.000.000,00	119.400.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	220.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	499.698.000,00	498.670.100,00	101.594.906.500,00	89.813.025.950,00	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	499.698.000,00	498.670.100,00	101.594.906.500,00	89.813.025.950,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	499.698.000,00	498.670.100,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	2.467.557.000,00	1.247.797.050,00	0	0	0	0
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	39.649.170.500,00	31.034.310.250,00	0	0	0	0
Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	1.991.106.000,00	1.600.472.350,00	0	0	0	0
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0	0	57.487.073.000,00	55.930.446.300,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	15.921.116.030,00	12.677.201.646,00	54.745.335.500,00	30.725.095.665,00	0	0	0	0
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	15.921.116.030,00	12.677.201.646,00	54.745.335.500,00	30.725.095.665,00	0	0	0	0
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0	0	25.586.061.500,00	20.025.922.750,00	0	0	0	0
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	247.349.500,00	246.152.750,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	149.627.000,00	148.935.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.430.000.000,00	1.427.970.526,00	0	0	0	0	0	0
Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0	0	2.086.898.500,00	501.825.650,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	14.094.139.530,00	10.854.142.770,00	27.072.375.500,00	10.197.347.265,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	643.570.000,00	637.113.100,00	11.543.962.500,00	8.912.781.550,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	643.570.000,00	637.113.100,00	11.543.962.500,00	8.912.781.550,00	0	0	0	0
Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	249.536.000,00	249.044.300,00	0	0	0	0
Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0	741.144.500,00	410.771.750,00	0	0	0	0
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	249.536.000,00	233.212.300,00	0	0	0	0
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	0	0	1.036.984.500,00	661.905.550,00	0	0	0	0
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0	984.468.000,00	529.118.800,00	0	0	0	0
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	0	0	699.557.000,00	374.301.600,00	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	94.320.000,00	92.298.800,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	0	0	7.582.736.500,00	6.454.427.250,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	549.250.000,00	544.814.300,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	5.589.712.880,00	4.270.066.858,00	553.545.473.724,00	531.342.034.162,00	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.589.712.880,00	4.270.066.858,00	553.545.473.724,00	531.342.034.162,00	0	0	0	0
Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	0	499.862.500,00	495.236.450,00	0	0	0	0
Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	0	0	1.471.113.500,00	1.469.308.500,00	0	0	0	0
Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	0	0	369.218.344.099,00	348.858.841.206,00	0	0	0	0
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	0	0	182.356.153.625,00	180.518.648.006,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	5.589.712.880,00	4.270.066.858,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	120.997.621.000,00	83.668.705.383,00	464.647.441.590,00	392.222.813.956,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	120.997.621.000,00	83.668.705.383,00	464.647.441.590,00	392.222.813.956,00	0	0	0	0
Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	710.912.500,00	710.702.650,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0	0	5.101.184.500,00	3.891.633.790,00	0	0	0	0
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	157.327.500,00	155.555.400,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	117.697.768.000,00	80.436.100.632,00	459.546.257.090,00	388.331.180.166,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2.431.613.000,00	2.366.346.701,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	749.047.000,00	747.462.600,00	10.455.371.000,00	10.279.307.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	749.047.000,00	747.462.600,00	10.455.371.000,00	10.279.307.000,00	0	0	0	0
Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	67.480.000,00	66.230.000,00	10.455.371.000,00	10.279.307.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	681.567.000,00	681.232.600,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	10.498.482.392,00	6.285.594.278,00	588.094.613.108,00	495.369.173.346,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	10.498.482.392,00	6.285.594.278,00	588.094.613.108,00	495.369.173.346,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	5.499.233.642,00	4.069.343.828,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Jalan	0	0	300.637.813.731,00	248.022.476.778,00	0	0	0	0
Rekonstruksi Jalan	0	0	26.055.114.800,00	24.852.505.973,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Rutin Jembatan	0	0	699.500.000,00	236.345.600,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Jembatan	0	0	48.000.000.000,00	47.233.999.700,00	0	0	0	0
Pembangunan Jembatan	0	0	9.393.392.500,00	6.414.138.200,00	0	0	0	0
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	4.999.248.750,00	2.216.250.450,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi Jalan	0	0	109.707.100.000,00	98.156.025.395,00	0	0	0	0
Pembangunan Terowongan/Tunnel	0	0	93.601.692.077,00	70.453.681.700,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.370.900.000,00	3.263.443.425,00	201.910.000,00	201.410.890,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	2.369.076.500,00	2.368.488.725,00	74.000.000,00	73.813.890,00	0	0	0	0
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	2.369.076.500,00	2.368.488.725,00	74.000.000,00	73.813.890,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	502.454.500,00	502.027.200,00	75.915.000,00	75.902.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	53.250.000,00	53.010.600,00	75.915.000,00	75.902.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	377.838.500,00	377.653.300,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	71.366.000,00	71.363.300,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	499.369.000,00	392.927.500,00	51.995.000,00	51.695.000,00	0	0	0	0
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	99.975.500,00	99.657.700,00	51.995.000,00	51.695.000,00	0	0	0	0
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	399.393.500,00	293.269.800,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	4.646.734.250,00	4.196.155.487,00	82.000.000,00	81.918.000,00	0	0	0	0
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.696.289.500,00	1.557.565.397,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	421.965.000,00	398.136.797,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	494.100.000,00	472.295.900,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	603.681.000,00	578.000.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	176.543.500,00	109.132.200,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.227.419.000,00	1.206.568.824,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.227.419.000,00	1.206.568.824,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	446.242.250,00	421.157.405,00	82.000.000,00	81.918.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	78.586.000,00	75.938.088,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	367.656.250,00	345.219.317,00	82.000.000,00	81.918.000,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.276.783.500,00	1.010.863.861,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	242.500.000,00	221.343.400,00	0	0	0	0	0	0
Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	178.151.000,00	144.603.281,00	0	0	0	0	0	0
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	169.000.000,00	154.346.500,00	0	0	0	0	0	0
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	467.636.500,00	320.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	219.496.000,00	169.770.680,00	0	0	0	0	0	0
UPT Pengelolaan Air dan Limbah Domestik	1.274.230.000,00	831.866.850,00	1.136.770.000,00	1.024.693.200,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.274.230.000,00	831.866.850,00	1.136.770.000,00	1.024.693.200,00	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.274.230.000,00	831.866.850,00	1.136.770.000,00	1.024.693.200,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	710.582.400,00	597.263.950,00	1.026.100.000,00	978.673.200,00	0	0	0	0
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	563.647.600,00	234.602.900,00	110.670.000,00	46.020.000,00	0	0	0	0
UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.353.189.500,00	1.156.674.705,00	13.266.058.375,00	13.243.843.001,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.353.189.500,00	1.156.674.705,00	13.266.058.375,00	13.243.843.001,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.353.189.500,00	1.156.674.705,00	13.266.058.375,00	13.243.843.001,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Rutin Jalan	1.353.189.500,00	1.156.674.705,00	13.266.058.375,00	13.243.843.001,00	0	0	0	0
UPTD Pemeliharaan Saluran Drainase dan Irigasi	13.248.628.000,00	11.150.430.351,00	4.186.422.000,00	3.799.118.209,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	13.248.628.000,00	11.150.430.351,00	4.186.422.000,00	3.799.118.209,00	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	13.248.628.000,00	11.150.430.351,00	4.186.422.000,00	3.799.118.209,00	0	0	0	0
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	13.248.628.000,00	11.150.430.351,00	4.186.422.000,00	3.799.118.209,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60.974.201.910,00	55.789.819.436,00	140.225.103.610,00	136.978.183.700,00	0	0	0	0
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda	60.974.201.910,00	55.789.819.436,00	140.225.103.610,00	136.978.183.700,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.444.159.436,00	13.313.283.581,00	638.843.000,00	255.009.500,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	280.836.012,00	178.929.150,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132.823.012,00	102.470.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	35.692.500,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	22.196.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.013.000,00	18.570.150,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.673.004.231,00	9.874.785.808,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.188.526.231,00	7.558.424.550,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.434.478.000,00	2.266.935.758,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.425.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	128.280.000,00	121.462.682,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128.280.000,00	121.462.682,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	591.839.964,00	547.618.085,00	388.843.000,00	9.859.500,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000,00	49.942.800,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.100.000,00	24.100.000,00	378.983.500,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.114.900,00	2.100.000,00	9.859.500,00	9.859.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	63.745.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	194.492.975,00	177.215.550,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	231.532.089,00	230.514.735,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.824.100,00	480.880.000,00	172.000.000,00	167.150.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	422.204.100,00	359.840.000,00	122.000.000,00	117.150.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.620.000,00	121.040.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	935.939.743,00	898.291.514,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	431.724.743,00	419.271.514,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	504.215.000,00	479.020.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.270.435.386,00	1.211.316.342,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.680.000,00	29.918.588,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	636.357.386,00	587.951.954,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.398.000,00	182.254.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	97.000.000,00	92.260.800,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	320.000.000,00	318.931.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.104.027.680,00	1.787.856.035,00	1.715.000.000,00	1.387.931.200,00	0	0	0	0
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	895.292.900,00	761.900.070,00	0	0	0	0	0	0
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	199.455.750,00	190.715.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	49.891.000,00	46.085.700,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	49.816.000,00	1.520.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	197.289.175,00	190.853.270,00	0	0	0	0	0	0
Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	199.227.175,00	198.364.300,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	99.914.750,00	86.527.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	99.699.050,00	47.834.300,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	149.252.500,00	76.560.000,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	49.792.500,00	9.520.000,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	99.460.000,00	67.040.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	703.794.430,00	609.166.965,00	1.575.000.000,00	1.248.071.200,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	399.715.000,00	307.443.000,00	0	0	0	0	0	0
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	304.079.430,00	301.723.965,00	1.575.000.000,00	1.248.071.200,00	0	0	0	0
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	355.687.850,00	340.229.000,00	140.000.000,00	139.860.000,00	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	53.919.750,00	49.444.250,00	44.000.000,00	43.956.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	199.323.350,00	198.327.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	102.444.750,00	92.457.750,00	96.000.000,00	95.904.000,00	0	0	0	0
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	12.278.837.504,00	12.234.355.251,00	8.764.168.000,00	8.750.563.000,00	0	0	0	0
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.697.499.504,00	1.675.215.660,00	44.750.000,00	31.145.000,00	0	0	0	0
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1.376.453.834,00	1.370.492.557,00	0	0	0	0	0	0
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	32.957.500,00	32.276.131,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	48.157.500,00	41.965.670,00	0	0	0	0	0	0
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	173.625.670,00	165.202.822,00	44.750.000,00	31.145.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	66.305.000,00	65.278.480,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	10.581.338.000,00	10.559.139.591,00	8.719.418.000,00	8.719.418.000,00	0	0	0	0
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	4.996.528.000,00	4.995.169.420,00	0	0	0	0	0	0
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	28.855.500,00	27.962.930,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	381.233.000,00	371.369.386,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	708.145.500,00	703.634.980,00	5.222.363.000,00	5.222.363.000,00	0	0	0	0
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	4.139.998.500,00	4.137.907.055,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	326.577.500,00	323.095.820,00	3.497.055.000,00	3.497.055.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	10.822.054.500,00	10.818.381.981,00	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	10.822.054.500,00	10.818.381.981,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	5.730.113.500,00	5.727.782.723,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	5.043.883.500,00	5.043.210.608,00	0	0	0	0	0	0
Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	48.057.500,00	47.388.650,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	20.325.122.790,00	17.635.942.588,00	129.107.092.610,00	126.584.680.000,00	0	0	0	0
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	20.325.122.790,00	17.635.942.588,00	129.107.092.610,00	126.584.680.000,00	0	0	0	0
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	996.036.300,00	884.886.300,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	14.301.453.000,00	11.933.351.300,00	107.095.193.610,00	104.639.468.000,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	170.411.100,00	115.998.448,00	0	0	0	0	0	0
Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	197.237.800,00	196.182.800,00	19.719.547.000,00	19.652.910.000,00	0	0	0	0
Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	4.469.311.090,00	4.357.990.240,00	2.284.352.000,00	2.284.302.000,00	0	0	0	0
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	190.673.500,00	147.533.500,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	72.945.656.012,00	67.730.330.783,00	10.801.391.320,00	10.338.587.790,00	0	0	0	0
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Samarinda	33.309.128.483,00	30.999.135.067,00	2.844.905.000,00	2.612.630.185,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.045.170.983,00	27.933.702.936,00	1.943.900.000,00	1.729.229.983,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.675.250,00	198.935.828,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.114.250,00	116.830.664,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.269.000,00	37.040.700,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.292.000,00	45.064.464,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.450.912.683,00	25.510.636.092,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.336.597.679,00	14.672.872.075,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	11.073.225.004,00	10.796.758.008,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.090.000,00	41.006.009,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350.000.000,00	300.240.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	350.000.000,00	300.240.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.331.440,00	228.194.836,00	1.898.440.000,00	1.687.889.980,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.324.700,00	12.318.193,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.560.000,00	50.339.995,00	1.898.440.000,00	1.687.889.980,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.890.000,00	17.858.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.136.240,00	48.327.019,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.997.529,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.420.500,00	87.354.100,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.540.000,00	101.380.000,00	45.460.000,00	41.340.003,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	96.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	4.540.000,00	4.540.000,00	45.460.000,00	41.340.003,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.465.610,00	491.698.712,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.685.610,00	225.028.712,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.780.000,00	266.670.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.210.246.000,00	1.102.617.468,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	220.000.000,00	187.153.800,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	715.396.000,00	646.480.568,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.850.000,00	24.416.021,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.631.690,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	94.935.389,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.263.957.500,00	3.065.432.131,00	901.005.000,00	883.400.202,00	0	0	0	0
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.690.933.750,00	2.515.795.794,00	901.005.000,00	883.400.202,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	219.107.875,00	212.917.800,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	447.544.750,00	384.895.105,00	50.250.000,00	50.249.950,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	272.602.625,00	239.514.079,00	0	0	0	0	0	0
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	98.233.750,00	97.355.075,00	29.870.000,00	29.569.988,00	0	0	0	0
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	51.111.250,00	46.907.002,00	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.257.393.750,00	1.227.610.994,00	92.500.000,00	92.499.908,00	0	0	0	0
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	269.096.375,00	263.308.977,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	51.183.375,00	18.626.762,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	24.660.000,00	24.660.000,00	728.385.000,00	711.080.356,00	0	0	0	0
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	477.085.750,00	456.819.791,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	114.841.750,00	114.458.600,00	0	0	0	0	0	0
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	313.550.000,00	293.753.987,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48.694.000,00	48.607.204,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	95.938.000,00	92.816.546,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	95.938.000,00	92.816.546,00	0	0	0	0	0	0
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda	27.037.360.856,00	25.285.904.298,00	5.620.313.620,00	5.577.331.110,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.860.672.476,00	23.495.972.801,00	950.774.000,00	931.573.188,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	137.989.000,00	120.003.120,00	43.000.000,00	42.990.300,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.423.000,00	90.537.670,00	43.000.000,00	42.990.300,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.502.000,00	19.389.450,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.064.000,00	10.076.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.995.027.769,00	20.195.143.880,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.849.788.322,00	17.058.769.161,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.019.153.447,00	3.013.907.879,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	126.086.000,00	122.466.840,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	261.500.000,00	244.840.000,00	119.600.000,00	111.500.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	261.500.000,00	244.840.000,00	119.600.000,00	111.500.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.805.460,00	208.200.500,00	244.974.000,00	237.899.833,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	53.022.000,00	52.630.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.380.000,00	16.380.000,00	234.974.000,00	227.899.839,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	10.000.000,00	9.999.994,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.500.000,00	41.277.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.829.260,00	30.791.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	7.700.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.074.200,00	59.422.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.380.000,00	56.954.420,00	543.200.000,00	539.183.055,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.580.000,00	40.154.420,00	410.000.000,00	409.867.500,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	11.310.000,00	11.310.000,00	88.690.000,00	88.134.555,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.490.000,00	5.490.000,00	44.510.000,00	41.181.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	566.820.247,00	515.369.745,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	337.820.247,00	325.749.745,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.000.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.000.000,00	152.620.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.598.150.000,00	2.155.461.136,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	444.912.917,00	405.522.496,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.538.037.083,00	1.153.591.940,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97.200.000,00	83.150.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	424.000.000,00	419.239.400,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	94.000.000,00	93.957.300,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.176.688.380,00	1.789.931.497,00	4.669.539.620,00	4.645.757.922,00	0	0	0	0
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.429.292.250,00	1.231.964.043,00	4.480.845.750,00	4.457.369.388,00	0	0	0	0
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	188.568.000,00	166.495.584,00	0	0	0	0	0	0
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	399.000.000,00	397.528.289,00	0	0	0	0	0	0
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	543.100.000,00	397.015.720,00	4.900.000,00	4.899.648,00	0	0	0	0
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.391.250,00	8.700.000,00	18.453.750,00	16.021.740,00	0	0	0	0
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	82.900.000,00	81.257.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	86.774.000,00	81.451.660,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	110.559.000,00	99.515.790,00	4.457.492.000,00	4.436.448.000,00	0	0	0	0
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	97.362.000,00	73.461.600,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	48.336.000,00	29.213.400,00	0	0	0	0	0	0
Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	49.026.000,00	44.248.200,00	0	0	0	0	0	0
Investigasi Kejadian Kebakaran	52.000.000,00	32.358.995,00	0	0	0	0	0	0
Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	52.000.000,00	32.358.995,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	461.000.000,00	344.768.379,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	100.000.000,00	84.668.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	91.000.000,00	79.870.579,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	270.000.000,00	180.229.800,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	137.034.130,00	107.378.480,00	188.693.870,00	188.388.534,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	50.000.000,00	24.997.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	67.235.000,00	62.678.720,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	19.799.130,00	19.702.260,00	188.693.870,00	188.388.534,00	0	0	0	0
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda	12.599.166.673,00	11.445.291.418,00	2.336.172.700,00	2.148.626.495,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.349.401.401,00	7.557.230.361,00	56.372.500,00	42.690.000,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.098.500,00	109.813.907,00	12.500.000,00	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.584.500,00	96.902.900,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.675.000,00	3.277.007,00	12.500.000,00	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.677.000,00	9.634.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.162.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.925.026.698,00	6.434.682.991,00	13.300.000,00	12.970.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.271.217.698,00	5.815.019.101,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	631.328.000,00	599.555.333,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.481.000,00	20.108.557,00	13.300.000,00	12.970.000,00	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	49.987.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	49.987.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128.177.500,00	119.584.807,00	20.572.500,00	19.730.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.923.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.427.500,00	0	20.572.500,00	19.730.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	8.735.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	16.947.500,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.250.000,00	73.979.307,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	10.000.000,00	9.990.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	10.000.000,00	9.990.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	387.098.703,00	309.250.198,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	229.098.703,00	157.200.198,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.000.000,00	152.050.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	605.000.000,00	533.911.458,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	480.000.000,00	425.040.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	49.045.308,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.827.650,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.998.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.249.765.272,00	3.888.061.057,00	2.279.800.200,00	2.105.936.495,00	0	0	0	0
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	237.657.500,00	235.211.720,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	237.657.500,00	235.211.720,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.271.182.547,00	2.156.001.229,00	387.600.000,00	219.211.001,00	0	0	0	0
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	164.618.000,00	162.250.460,00	4.500.000,00	4.450.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	101.508.050,00	90.438.272,00	159.700.000,00	153.946.000,00	0	0	0	0
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	169.943.000,00	166.473.434,00	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	183.919.500,00	176.048.100,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	144.544.497,00	126.890.500,00	223.400.000,00	60.815.001,00	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	90.161.000,00	72.749.727,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	195.689.000,00	193.139.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	222.902.000,00	197.097.090,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	807.515.500,00	789.271.871,00	0	0	0	0	0	0
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	190.382.000,00	181.642.375,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	653.172.325,00	522.104.052,00	1.815.200.200,00	1.811.873.499,00	0	0	0	0
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	49.351.500,00	21.707.000,00	24.050.000,00	23.050.000,00	0	0	0	0
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	60.997.475,00	43.457.965,00	21.750.200,00	21.139.999,00	0	0	0	0
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	158.834.250,00	147.958.410,00	1.730.000.000,00	1.729.137.499,00	0	0	0	0
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	261.787.625,00	255.045.091,00	33.400.000,00	32.846.000,00	0	0	0	0
Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	75.859.625,00	38.582.377,00	6.000.000,00	5.700.001,00	0	0	0	0
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	46.341.850,00	15.353.209,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.087.752.900,00	974.744.056,00	77.000.000,00	74.851.995,00	0	0	0	0
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	60.437.500,00	59.098.137,00	0	0	0	0	0	0
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	148.715.900,00	59.312.260,00	40.000.000,00	37.999.995,00	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	73.262.000,00	71.925.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	141.755.500,00	137.858.834,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	529.325.000,00	518.581.310,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	134.257.000,00	127.968.515,00	37.000.000,00	36.852.000,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	17.576.178.498,00	13.267.293.316,00	1.956.904.241,00	305.071.999,00	0	0	0	0
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	17.576.178.498,00	13.267.293.316,00	1.956.904.241,00	305.071.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.101.008.739,00	7.409.323.840,00	1.543.904.241,00	210.331.000,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	278.185.360,00	234.206.009,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.652.360,00	150.252.360,00	38.000.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.293.000,00	32.641.920,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.081.000,00	39.072.729,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.159.000,00	12.239.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.177.132.146,00	6.230.794.430,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.052.139.146,00	5.280.521.835,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.077.659.000,00	937.782.264,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.334.000,00	12.490.331,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	38.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	38.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	265.784.551,00	236.724.536,00	349.675.000,00	98.800.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.927.270,00	22.960.250,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.071.000,00	10.920.000,00	344.475.000,00	98.800.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.854.540,00	30.059.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	98.947.450,00	88.854.169,00	5.200.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	8.065.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.484.291,00	75.866.117,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	249.020.000,00	123.565.000,00	1.114.229.241,00	70.875.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.020.000,00	22.310.000,00	750.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	43.770.000,00	26.895.000,00	212.750.000,00	70.875.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.230.000,00	74.360.000,00	151.479.241,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.033.122,00	154.143.485,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.033.122,00	143.013.485,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.000.000,00	11.130.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	713.853.560,00	391.390.380,00	12.000.000,00	10.656.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.409.050,00	132.306.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.781.810,00	28.385.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	39.780.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	157.390.000,00	93.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97.272.700,00	97.078.980,00	12.000.000,00	10.656.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.040.829.200,00	1.524.259.237,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.040.829.200,00	1.524.259.237,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.427.577.200,00	1.164.264.855,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	171.471.000,00	97.699.402,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	372.373.000,00	212.417.980,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	69.408.000,00	49.877.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.790.150.000,00	1.887.445.753,00	339.500.000,00	24.300.000,00	0	0	0	0
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantai Sosial	1.047.205.750,00	683.224.829,00	300.000.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Permakanan	328.587.000,00	230.794.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sandang	54.876.000,00	20.155.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Alat Bantu	175.000.000,00	142.873.955,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	153.510.000,00	113.274.665,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	68.295.000,00	28.835.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	22.375.000,00	6.508.459,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Layanan Kedaruratan	163.000.000,00	118.522.750,00	300.000.000,00	0	0	0	0	0
Pemberian Layanan Rujukan	81.562.750,00	22.261.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.742.944.250,00	1.204.220.924,00	39.500.000,00	24.300.000,00	0	0	0	0
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	61.312.000,00	57.562.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Layanan Kedaruratan	94.375.000,00	31.467.424,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Permakanan	699.504.000,00	482.238.107,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sandang	275.000.000,00	269.296.720,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Alat Bantu	119.431.250,00	73.136.139,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	120.000.000,00	93.311.329,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	27.850.000,00	20.552.915,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	61.530.000,00	40.288.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	206.178.250,00	92.362.540,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Layanan Rujukan	52.346.250,00	22.881.250,00	24.500.000,00	24.300.000,00	0	0	0	0
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25.417.500,00	21.124.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.525.895.559,00	1.976.023.754,00	15.000.000,00	14.949.999,00	0	0	0	0
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.525.895.559,00	1.976.023.754,00	15.000.000,00	14.949.999,00	0	0	0	0
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	548.265.000,00	321.478.708,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.727.819.559,00	1.566.221.150,00	15.000.000,00	14.949.999,00	0	0	0	0
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	249.811.000,00	88.323.896,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.118.295.000,00	470.240.732,00	58.500.000,00	55.491.000,00	0	0	0	0
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.047.472.375,00	416.877.057,00	48.000.000,00	46.500.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Makanan	502.736.000,00	204.970.319,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Sandang	359.600.000,00	56.025.920,00	0	0	0	0	0	0
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.010.500,00	93.157.145,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Dukungan Psikososial	91.125.875,00	62.723.673,00	48.000.000,00	46.500.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	70.822.625,00	53.363.675,00	10.500.000,00	8.991.000,00	0	0	0	0
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	70.822.625,00	53.363.675,00	10.500.000,00	8.991.000,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	430.772.570.468,00	401.596.537.028,00	59.239.679.246,00	53.040.006.101,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	14.192.318.088,00	13.739.497.270,00	329.759.300,00	327.507.621,00	0	0	0	0
Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda	14.192.318.088,00	13.739.497.270,00	329.759.300,00	327.507.621,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.329.041.463,00	8.976.583.829,00	138.484.300,00	138.413.300,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.940.000,00	156.882.167,00	33.100.000,00	33.085.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.138.000,00	107.863.750,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.421.000,00	23.863.350,00	18.100.000,00	18.100.000,00	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.381.000,00	25.155.067,00	15.000.000,00	14.985.000,00	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.844.469.016,00	6.578.544.860,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.703.870.641,00	5.560.455.517,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.109.355.000,00	987.233.533,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.243.375,00	30.855.810,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.224.575,00	207.023.269,00	105.384.300,00	105.328.300,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.585.000,00	52.495.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.075.000,00	4.075.000,00	86.925.000,00	86.869.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.540.700,00	11.540.000,00	18.459.300,00	18.459.300,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	29.955.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	39.735.375,00	39.609.650,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000,00	21.570.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	9.532.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.688.500,00	38.246.619,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.039.701.622,00	986.363.140,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.329.000,00	3.320.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	742.658.597,00	691.793.140,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.144.025,00	86.680.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.570.000,00	204.570.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.078.706.250,00	1.047.770.393,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	176.370.000,00	167.222.464,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	71.606.250,00	57.173.846,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	258.580.000,00	255.674.553,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	522.150.000,00	517.783.180,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	49.916.350,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	80.497.000,00	72.277.500,00	39.100.000,00	39.099.999,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	80.497.000,00	72.277.500,00	39.100.000,00	39.099.999,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	80.497.000,00	72.277.500,00	39.100.000,00	39.099.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	868.484.875,00	841.930.278,00	75.625.000,00	74.524.343,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	684.253.375,00	678.287.902,00	32.625.000,00	32.624.343,00	0	0	0	0
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	74.131.000,00	70.428.002,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	3.375.000,00	3.360.000,00	32.625.000,00	32.624.343,00	0	0	0	0
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	606.747.375,00	604.499.900,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49.535.000,00	47.358.050,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49.535.000,00	47.358.050,00	0	0	0	0	0	0
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	74.642.375,00	57.836.666,00	30.000.000,00	28.900.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	74.642.375,00	57.836.666,00	30.000.000,00	28.900.000,00	0	0	0	0
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.054.125,00	58.447.660,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0	0	0
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	60.054.125,00	58.447.660,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	532.756.875,00	508.118.800,00	68.050.000,00	68.049.979,00	0	0	0	0
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	294.731.500,00	274.250.066,00	25.700.000,00	25.699.999,00	0	0	0	0
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	48.152.500,00	35.960.350,00	0	0	0	0	0	0
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	89.139.250,00	83.168.640,00	10.350.000,00	10.350.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	57.173.500,00	56.623.210,00	15.350.000,00	15.349.999,00	0	0	0	0
Perluasan Kesempatan Kerja	100.266.250,00	98.497.866,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	238.025.375,00	233.868.734,00	42.350.000,00	42.349.980,00	0	0	0	0
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	50.000.000,00	49.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	50.417.875,00	49.989.024,00	22.350.000,00	22.350.000,00	0	0	0	0
Job Fair/Bursa Kerja	137.607.500,00	133.979.710,00	20.000.000,00	19.999.980,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.381.537.875,00	3.340.586.863,00	8.500.000,00	7.420.000,00	0	0	0	0
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	99.914.125,00	95.224.542,00	8.500.000,00	7.420.000,00	0	0	0	0
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	51.820.125,00	48.475.958,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	48.094.000,00	46.748.584,00	8.500.000,00	7.420.000,00	0	0	0	0
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	3.281.623.750,00	3.245.362.321,00	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	126.686.000,00	113.800.295,00	0	0	0	0	0	0
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	82.423.500,00	78.822.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	21.753.500,00	19.258.150,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	138.826.375,00	130.848.676,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.911.934.375,00	2.902.632.800,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.038.137.162,00	10.934.829.150,00	287.095.000,00	266.124.302,00	0	0	0	0
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda	9.205.549.162,00	8.285.906.480,00	108.059.000,00	103.198.500,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.815.067.829,00	6.934.417.989,00	104.434.000,00	99.573.500,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	203.263.500,00	198.096.080,00	28.000.000,00	27.972.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89.690.000,00	87.958.280,00	23.000.000,00	22.977.000,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.723.500,00	36.709.800,00	5.000.000,00	4.995.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.960.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.850.000,00	23.468.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.345.511.752,00	5.769.760.381,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.968.319.752,00	5.403.369.312,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	327.192.000,00	316.432.209,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.958.860,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.108.000,00	143.344.032,00	16.434.000,00	15.540.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	15.609.000,00	15.540.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.988.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.393.000,00	28.815.500,00	825.000,00	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00	14.997.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.715.000,00	83.543.532,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	309.687.577,00	45.000.000,00	60.000.000,00	56.061.500,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	31.440.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.687.577,00	13.560.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	50.000.000,00	46.900.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	10.000.000,00	9.161.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	326.497.000,00	298.096.795,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	176.497.000,00	149.944.795,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	150.000.000,00	148.152.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.000.000,00	380.120.701,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	99.761.336,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	24.292.351,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	250.000.000,00	246.067.014,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	391.297.833,00	371.326.020,00	0	0	0	0	0	0
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	131.058.833,00	121.543.020,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	64.466.833,00	57.024.360,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	37.922.000,00	35.927.500,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	28.670.000,00	28.591.160,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	36.857.000,00	34.077.000,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	36.857.000,00	34.077.000,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	223.382.000,00	215.706.000,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.775.000,00	36.768.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	185.607.000,00	178.937.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	253.862.000,00	249.603.260,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0	0	0	0
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	182.465.000,00	179.753.840,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	160.381.000,00	157.730.540,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	22.084.000,00	22.023.300,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.397.000,00	69.849.420,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.581.000,00	28.526.200,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24.767.000,00	24.733.420,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.049.000,00	16.589.800,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	184.545.500,00	184.382.201,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	84.545.500,00	84.408.750,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.277.500,00	37.147.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.268.000,00	47.261.750,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.973.451,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.973.451,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	46.453.000,00	45.984.520,00	0	0	0	0	0	0
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.453.000,00	45.984.520,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	46.453.000,00	45.984.520,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	297.272.000,00	289.915.990,00	0	0	0	0	0	0
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	159.059.000,00	154.784.540,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	67.145.000,00	64.744.780,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	91.914.000,00	90.039.760,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	138.213.000,00	135.131.450,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	38.121.000,00	37.503.880,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.500.000,00	18.388.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.492.000,00	45.285.210,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.100.000,00	33.954.360,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	217.051.000,00	210.276.500,00	0	0	0	0	0	0
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	111.874.000,00	106.926.500,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	111.874.000,00	106.926.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105.177.000,00	103.350.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	105.177.000,00	103.350.000,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	2.832.588.000,00	2.648.922.670,00	179.036.000,00	162.925.802,00	0	0	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	594.614.000,00	573.048.410,00	135.036.000,00	119.691.302,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	511.250.000,00	490.351.600,00	18.400.000,00	8.480.400,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	511.250.000,00	490.351.600,00	18.400.000,00	8.480.400,00	0	0	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	83.364.000,00	82.696.810,00	116.636.000,00	111.210.902,00	0	0	0	0
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	83.364.000,00	82.696.810,00	116.636.000,00	111.210.902,00	0	0	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.237.974.000,00	2.075.874.260,00	44.000.000,00	43.234.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.237.974.000,00	2.075.874.260,00	44.000.000,00	43.234.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	348.932.000,00	299.215.760,00	44.000.000,00	43.234.500,00	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	1.889.042.000,00	1.776.658.500,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	3.118.051.402,00	3.014.798.535,00	77.089.400,00	74.216.000,00	0	0	0	0
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	3.118.051.402,00	3.014.798.535,00	77.089.400,00	74.216.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	143.043.250,00	131.749.534,00	28.000.000,00	27.661.200,00	0	0	0	0
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	143.043.250,00	131.749.534,00	28.000.000,00	27.661.200,00	0	0	0	0
Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	8.764.125,00	8.654.146,00	28.000.000,00	27.661.200,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	48.279.125,00	47.910.042,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86.000.000,00	75.185.346,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.292.830.572,00	2.238.476.742,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0	0	0	0
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.186.300.185,00	1.141.855.353,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	132.905.000,00	132.753.140,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	38.364.750,00	38.209.253,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	60.604.000,00	57.627.995,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	322.148.500,00	302.842.520,00	0	0	0	0	0	0
Pemantauan Stok Pangan	24.989.000,00	24.941.323,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	21.039.500,00	20.987.038,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	43.226.935,00	37.166.559,00	0	0	0	0	0	0
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	482.576.000,00	468.364.492,00	20.000.000,00	19.980.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	60.446.500,00	58.963.033,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	769.476.387,00	768.867.669,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	713.792.387,00	713.341.249,00	0	0	0	0	0	0
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	55.684.000,00	55.526.420,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	337.054.000,00	327.753.720,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	44.438.750,00	42.050.550,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	247.029.250,00	240.511.020,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	45.586.000,00	45.192.150,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	543.385.480,00	539.210.570,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	29.070.790,00	25.395.490,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	29.070.790,00	25.395.490,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	514.314.690,00	513.815.080,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	472.736.790,00	472.529.180,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	41.577.900,00	41.285.900,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	138.792.100,00	105.361.689,00	9.089.400,00	6.574.800,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	138.792.100,00	105.361.689,00	9.089.400,00	6.574.800,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	64.237.750,00	34.963.352,00	6.000.000,00	3.485.400,00	0	0	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	45.737.000,00	45.704.127,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	28.817.350,00	24.694.210,00	3.089.400,00	3.089.400,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	4.891.504.575,00	2.499.749.111,00	30.881.418.000,00	27.056.415.647,00	0	0	0	0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda	4.891.504.575,00	2.499.749.111,00	30.881.418.000,00	27.056.415.647,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.324.000,00	76.466.788,00	0	0	0	0	0	0
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.324.000,00	76.466.788,00	0	0	0	0	0	0
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.324.000,00	76.466.788,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	3.822.767.500,00	1.733.363.576,00	29.861.418.000,00	26.192.172.216,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.822.767.500,00	1.733.363.576,00	29.861.418.000,00	26.192.172.216,00	0	0	0	0
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.182.000,00	88.952.832,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.728.585.500,00	1.644.410.744,00	29.861.418.000,00	26.192.172.216,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	312.986.950,00	222.816.573,00	281.000.000,00	261.519.000,00	0	0	0	0
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	312.986.950,00	222.816.573,00	281.000.000,00	261.519.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	249.993.000,00	202.103.548,00	281.000.000,00	261.519.000,00	0	0	0	0
Pemanfaatan Tanah Kosong	62.993.950,00	20.713.025,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	555.426.125,00	467.102.174,00	739.000.000,00	602.724.431,00	0	0	0	0
Penerbitan Izin Membuka Tanah	555.426.125,00	467.102.174,00	739.000.000,00	602.724.431,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	555.426.125,00	467.102.174,00	739.000.000,00	602.724.431,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	108.958.114.967,00	99.915.144.486,00	8.482.830.570,00	7.574.842.751,00	0	0	0	0
Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	93.276.996.397,00	88.973.844.971,00	3.345.810.570,00	2.642.699.751,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.065.870.873,00	59.933.056.310,00	658.824.285,00	642.065.931,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.182.000,00	172.854.261,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	99.963.000,00	99.242.261,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.918.500,00	35.614.500,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.018.500,00	33.715.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.282.000,00	4.282.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	59.865.814.853,00	57.692.449.571,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.154.519.252,00	12.845.449.476,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.657.074.601,00	44.792.938.095,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54.221.000,00	54.062.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	23.806.400,00	23.630.584,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	23.806.400,00	23.630.584,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.233.000,00	128.981.402,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	131.233.000,00	128.981.402,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.904.350,00	378.503.367,00	628.824.285,00	612.065.931,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.084.000,00	4.947.750,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.920.000,00	52.920.000,00	628.824.285,00	612.065.931,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.497.500,00	30.980.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	123.473.200,00	115.704.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.367.500,00	8.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.562.150,00	165.501.617,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.421.045,00	315.196.439,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	820.821.045,00	284.356.439,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.600.000,00	30.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.560.509.225,00	1.221.440.686,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	378.694.375,00	313.575.792,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	646.780.000,00	482.775.894,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	269.326.250,00	169.716.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.768.600,00	38.044.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	223.940.000,00	217.329.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.053.206.000,00	1.024.706.502,00	0	0	0	0	0	0
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	715.349.500,00	702.450.002,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	568.825.000,00	561.416.402,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	146.524.500,00	141.033.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	337.856.500,00	322.256.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	337.856.500,00	322.256.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.272.203.965,00	2.199.094.982,00	726.538.785,00	717.010.849,00	0	0	0	0
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.814.691.465,00	1.746.285.640,00	714.538.785,00	705.189.349,00	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	312.967.000,00	306.535.712,00	37.000.000,00	36.949.999,00	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	229.347.750,00	202.111.815,00	49.987.500,00	49.829.250,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	75.857.300,00	75.169.792,00	6.250.200,00	6.000.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	74.105.000,00	74.003.132,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	201.033.000,00	191.813.714,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	239.993.500,00	239.780.865,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	95.650.000,00	94.568.461,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	585.737.915,00	562.302.149,00	609.301.085,00	600.410.100,00	0	0	0	0
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	168.509.000,00	166.602.265,00	12.000.000,00	11.821.500,00	0	0	0	0
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	168.509.000,00	166.602.265,00	12.000.000,00	11.821.500,00	0	0	0	0
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	289.003.500,00	286.207.077,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan remediasi	49.900.000,00	49.392.330,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan rehabilitasi	210.067.500,00	209.602.457,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	29.036.000,00	27.212.290,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.752.206.600,00	3.304.226.722,00	1.921.272.500,00	1.244.603.001,00	0	0	0	0
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	3.752.206.600,00	3.304.226.722,00	1.921.272.500,00	1.244.603.001,00	0	0	0	0
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	178.944.000,00	162.705.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.450.904.600,00	3.032.680.422,00	857.985.000,00	183.747.000,00	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	38.910.000,00	38.906.500,00	889.806.500,00	887.480.001,00	0	0	0	0
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	58.448.000,00	44.934.800,00	173.481.000,00	173.376.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	228.848.000,00	228.288.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyimpanan sementara Limbah B3	91.299.500,00	91.045.500,00	0	0	0	0	0	0
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	91.299.500,00	91.045.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	137.548.500,00	137.242.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	137.548.500,00	137.242.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	188.264.500,00	183.488.707,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	188.264.500,00	183.488.707,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	57.524.000,00	52.981.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	31.569.500,00	31.336.707,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	99.171.000,00	99.171.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	299.797.000,00	299.786.134,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	299.797.000,00	299.786.134,00	0	0	0	0	0	0
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	72.082.500,00	72.075.634,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	198.204.000,00	198.202.000,00	0	0	0	0	0	0
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	29.510.500,00	29.508.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	466.309.500,00	465.834.716,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	466.309.500,00	465.834.716,00	0	0	0	0	0	0
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	466.309.500,00	465.834.716,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	339.690.500,00	339.689.940,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	339.690.500,00	339.689.940,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	70.108.500,00	70.108.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	91.257.500,00	91.257.500,00	0	0	0	0	0	0
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	178.324.500,00	178.323.940,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.610.599.459,00	20.995.672.958,00	39.175.000,00	39.019.970,00	0	0	0	0
Pengelolaan Sampah	21.610.599.459,00	20.995.672.958,00	39.175.000,00	39.019.970,00	0	0	0	0
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	350.592.000,00	348.347.651,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	53.520.000,00	53.520.000,00	0	0	0	0	0	0
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	20.702.588.459,00	20.090.205.726,00	39.175.000,00	39.019.970,00	0	0	0	0
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	503.899.000,00	503.599.581,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A	15.681.118.570,00	10.941.299.515,00	5.137.020.000,00	4.932.143.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.681.118.570,00	10.941.299.515,00	5.137.020.000,00	4.932.143.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Sampah	15.681.118.570,00	10.941.299.515,00	5.137.020.000,00	4.932.143.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	15.681.118.570,00	10.941.299.515,00	5.137.020.000,00	4.932.143.000,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.348.514.687,00	16.472.801.386,00	721.320.000,00	718.081.270,00	0	0	0	0
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda	17.348.514.687,00	16.472.801.386,00	721.320.000,00	718.081.270,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.971.793.533,00	13.128.426.732,00	440.870.000,00	440.631.270,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	207.951.000,00	207.909.000,00	20.000.000,00	19.998.870,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	112.814.000,00	112.772.000,00	20.000.000,00	19.998.870,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.715.000,00	47.715.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.422.000,00	47.422.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.939.932.988,00	10.188.346.416,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.064.002.988,00	8.386.357.977,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.875.930.000,00	1.801.988.439,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.864.927.845,00	1.857.929.762,00	420.870.000,00	420.632.400,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.475,00	19.995.475,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.810.000,00	43.920.000,00	420.870.000,00	420.632.400,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.546.886.870,00	1.544.731.596,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.235.500,00	217.282.691,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.940.000,00	606.132.899,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	18.086.579,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	588.940.000,00	588.046.320,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.041.700,00	268.108.655,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.848.300,00	66.886.028,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	28.169.600,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.000.000,00	64.875.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	108.193.400,00	108.178.027,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	956.206.650,00	945.588.504,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	956.206.650,00	945.588.504,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	350.615.650,00	349.508.587,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	605.591.000,00	596.079.917,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	843.798.000,00	836.116.217,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Pencatatan Sipil	843.798.000,00	836.116.217,00	0	0	0	0	0	0
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	284.450.000,00	277.280.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	559.348.000,00	558.836.217,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	1.440.396.504,00	1.427.805.502,00	280.450.000,00	277.450.000,00	0	0	0	0
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	243.298.600,00	239.778.822,00	241.150.000,00	238.150.000,00	0	0	0	0
Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	46.514.000,00	46.451.500,00	241.150.000,00	238.150.000,00	0	0	0	0
Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	196.784.600,00	193.327.322,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.122.097.904,00	1.116.053.704,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0	0	0	0
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	415.177.500,00	411.662.000,00	39.300.000,00	39.300.000,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	446.620.404,00	444.134.704,00	0	0	0	0	0	0
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	260.300.000,00	260.257.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000,00	71.972.976,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	75.000.000,00	71.972.976,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	136.320.000,00	134.864.431,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Profil Kependudukan	136.320.000,00	134.864.431,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	136.320.000,00	134.864.431,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.017.545.625,00	2.406.714.365,00	214.522.500,00	176.831.500,00	0	0	0	0
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda	3.017.545.625,00	2.406.714.365,00	214.522.500,00	176.831.500,00	0	0	0	0
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	367.599.750,00	235.943.000,00	79.400.000,00	77.824.000,00	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	367.599.750,00	235.943.000,00	79.400.000,00	77.824.000,00	0	0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	176.252.500,00	98.661.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	191.347.250,00	137.282.000,00	79.400.000,00	77.824.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.649.945.875,00	2.170.771.365,00	135.122.500,00	99.007.500,00	0	0	0	0
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.649.945.875,00	2.170.771.365,00	135.122.500,00	99.007.500,00	0	0	0	0
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	335.565.250,00	166.010.447,00	33.000.000,00	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	153.693.500,00	130.542.500,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	236.413.000,00	119.541.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.924.274.125,00	1.754.677.418,00	102.122.500,00	99.007.500,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16.807.752.318,00	15.860.882.710,00	450.164.000,00	307.138.000,00	0	0	0	0
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda	16.807.752.318,00	15.860.882.710,00	450.164.000,00	307.138.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.955.720.218,00	7.552.960.201,00	101.140.000,00	19.045.000,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	243.723.000,00	243.487.936,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	142.223.000,00	142.192.200,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	49.880.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.915.736,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.518.346.769,00	5.171.372.245,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.585.582.769,00	4.415.186.864,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	882.764.000,00	706.185.581,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.999.800,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000,00	54.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	279.944.000,00	279.712.738,00	10.000.000,00	9.375.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.000.000,00	25.999.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	10.000.000,00	9.375.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	99.842.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	112.000.000,00	111.990.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.600.000,00	3.576.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.344.000,00	38.304.838,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.800.000,00	11.800.000,00	91.140.000,00	9.670.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.800.000,00	11.800.000,00	91.140.000,00	9.670.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.433.924,00	501.845.607,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.237.574,00	150.769.256,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	351.196.350,00	351.076.351,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.472.525,00	1.290.741.675,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	296.800.025,00	296.800.025,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.202.500,00	296.637.650,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	284.160.000,00	274.114.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	433.310.000,00	423.190.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.128.124.050,00	1.055.447.400,00	0	0	0	0	0	0
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	537.324.050,00	516.257.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	150.000.000,00	135.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	100.000.000,00	99.883.350,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	46.625.000,00	46.625.000,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	49.250.000,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	13.909.050,00	13.909.050,00	0	0	0	0	0	0
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	50.000.000,00	48.490.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	1.790.000,00	900.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	75.000.000,00	71.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	590.800.000,00	539.190.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	92.700.000,00	92.700.000,00	0	0	0	0	0	0
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	169.400.000,00	169.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	101.000.000,00	65.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain	47.000.000,00	46.100.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	50.000.000,00	35.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	40.700.000,00	40.190.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.690.161.050,00	3.329.028.685,00	284.024.000,00	273.093.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	718.596.000,00	675.665.000,00	110.524.000,00	108.305.000,00	0	0	0	0
Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana	26.476.000,00	26.476.000,00	73.524.000,00	71.305.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	163.000.000,00	150.000.000,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	199.120.000,00	192.460.000,00	0	0	0	0	0	0
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	127.000.000,00	105.750.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	63.000.000,00	63.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	140.000.000,00	137.979.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	281.500.000,00	218.150.000,00	93.500.000,00	93.500.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	6.500.000,00	6.280.000,00	93.500.000,00	93.500.000,00	0	0	0	0
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100.000.000,00	97.060.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	100.000.000,00	46.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	75.000.000,00	68.410.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.984.665.050,00	1.741.813.685,00	80.000.000,00	71.288.000,00	0	0	0	0
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	58.665.000,00	55.765.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.354.541.000,00	1.215.584.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	91.000.000,00	76.648.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	28.712.000,00	21.610.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	16.861.900,00	16.782.000,00	80.000.000,00	71.288.000,00	0	0	0	0
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	80.506.000,00	80.470.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	72.371.000,00	72.370.600,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.000.000,00	77.032.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesertaan KB Pria	58.104.000,00	37.606.560,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	42.039.150,00	30.119.150,00	0	0	0	0	0	0
Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	81.865.000,00	57.825.475,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	705.400.000,00	693.400.000,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	75.000.000,00	73.960.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Terpadu Kampung KB	100.000.000,00	90.430.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	430.400.000,00	429.010.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.033.747.000,00	3.923.446.424,00	65.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1.579.117.000,00	1.522.514.624,00	65.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100.000.000,00	98.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	106.090.000,00	105.747.375,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	77.500.000,00	77.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	119.200.000,00	119.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	572.000.000,00	571.940.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	138.710.000,00	86.040.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100.000.000,00	99.760.000,00	0	0	0	0	0	0
Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	6.770.000,00	6.770.000,00	0	0	0	0	0	0
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100.000.000,00	99.490.000,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	11.070.000,00	10.720.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	87.500.000,00	87.486.600,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	35.246.000,00	35.196.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	68.361.000,00	67.196.849,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	7.370.000,00	7.370.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	49.300.000,00	49.297.800,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.454.630.000,00	2.400.931.800,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.000.000,00	74.720.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	48.400.000,00	48.392.800,00	0	0	0	0	0	0
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	100.000.000,00	87.080.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	868.430.000,00	853.599.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.362.800.000,00	1.337.140.000,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	105.900.867.609,00	102.810.578.099,00	9.880.186.376,00	9.720.647.073,00	0	0	0	0
Dinas Perhubungan Kota Samarinda	104.127.326.609,00	101.230.208.939,00	8.981.992.376,00	8.829.623.187,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	53.199.148.609,00	51.545.036.397,00	1.147.601.000,00	1.128.186.240,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	221.556.000,00	218.803.730,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	138.829.500,00	138.281.000,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.152.750,00	39.868.471,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.573.750,00	40.654.259,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.612.515.282,00	22.180.654.992,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.228.934.305,00	15.108.087.564,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.336.912.227,00	7.025.916.593,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.668.750,00	46.650.835,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	37.680.939,00	35.291.487,00	0	0	0	0	0	0
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	18.802.514,00	17.571.971,00	0	0	0	0	0	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	18.878.425,00	17.719.516,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	772.904.698,00	750.139.615,00	697.166.000,00	690.064.800,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.080.400,00	61.071.386,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.036.000,00	63.036.000,00	697.166.000,00	690.064.800,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.940.000,00	27.940.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	356.692.150,00	356.534.762,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.770.000,00	43.770.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.386.148,00	197.787.467,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.060.575.000,00	991.430.988,00	450.435.000,00	438.121.440,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.011.075.000,00	941.930.988,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	49.500.000,00	49.500.000,00	450.435.000,00	438.121.440,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.314.308.790,00	26.203.766.418,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.202.528.790,00	26.092.266.418,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	111.780.000,00	111.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.179.607.900,00	1.164.949.167,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	848.744.900,00	834.890.551,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.624.000,00	139.285.040,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	191.239.000,00	190.773.576,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	48.706.794.250,00	47.560.294.524,00	5.073.623.376,00	5.054.953.734,00	0	0	0	0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	42.655.637.573,00	42.603.037.354,00	4.444.072.376,00	4.428.036.518,00	0	0	0	0
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	76.430.000,00	48.773.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	40.189.760.528,00	40.189.037.512,00	3.343.848.514,00	3.343.848.514,00	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100.000.000,00	99.600.989,00	400.000.000,00	398.547.189,00	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	2.289.447.045,00	2.265.625.853,00	700.223.862,00	685.640.815,00	0	0	0	0
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3.332.656.302,00	2.401.650.684,00	542.451.000,00	539.930.401,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3.332.656.302,00	2.401.650.684,00	542.451.000,00	539.930.401,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.901.520.000,00	1.768.763.697,00	21.000.000,00	20.971.230,00	0	0	0	0
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.427.588.000,00	1.420.000.152,00	21.000.000,00	20.971.230,00	0	0	0	0
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	214.602.500,00	186.016.257,00	0	0	0	0	0	0
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	60.600.000,00	55.101.363,00	0	0	0	0	0	0
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	198.729.500,00	107.645.925,00	0	0	0	0	0	0
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	49.607.500,00	46.003.401,00	49.500.000,00	49.432.185,00	0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	49.607.500,00	46.003.401,00	49.500.000,00	49.432.185,00	0	0	0	0
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	428.269.750,00	419.450.115,00	16.600.000,00	16.583.400,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	234.117.500,00	233.648.145,00	16.600.000,00	16.583.400,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	129.716.000,00	128.547.510,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	64.436.250,00	57.254.460,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.181.000,00	89.190.966,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	90.181.000,00	89.190.966,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.368.625,00	111.412.475,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	113.368.625,00	111.412.475,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.553.500,00	120.785.832,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	135.553.500,00	120.785.832,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	2.221.383.750,00	2.124.878.018,00	2.760.768.000,00	2.646.483.213,00	0	0	0	0
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota	80.605.500,00	7.645.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	80.605.500,00	7.645.000,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.814.000,00	138.145.648,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	138.814.000,00	138.145.648,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	496.835.000,00	494.990.994,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	496.835.000,00	494.990.994,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1.505.129.250,00	1.484.096.376,00	2.760.768.000,00	2.646.483.213,00	0	0	0	0
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	193.260.000,00	191.590.917,00	103.228.000,00	71.457.804,00	0	0	0	0
Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	389.253.250,00	386.153.119,00	2.528.940.000,00	2.485.486.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	733.528.000,00	730.427.380,00	0	0	0	0	0	0
Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	189.088.000,00	175.924.960,00	128.600.000,00	89.539.409,00	0	0	0	0
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	1.773.541.000,00	1.580.369.160,00	898.194.000,00	891.023.886,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.773.541.000,00	1.580.369.160,00	898.194.000,00	891.023.886,00	0	0	0	0
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.773.541.000,00	1.580.369.160,00	898.194.000,00	891.023.886,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	253.231.000,00	240.494.869,00	722.050.000,00	717.356.616,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	190.728.000,00	187.994.995,00	0	0	0	0	0	0
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	14.000.000,00	13.987.937,00	86.000.000,00	85.558.800,00	0	0	0	0
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	52.170.000,00	52.133.874,00	28.556.000,00	26.973.000,00	0	0	0	0
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	74.000.000,00	64.514.000,00	26.000.000,00	25.959.570,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.189.412.000,00	1.021.243.485,00	35.588.000,00	35.175.900,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	35.739.209.602,00	33.082.015.600,00	1.762.911.700,00	1.303.253.340,00	0	0	0	0
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	35.739.209.602,00	33.082.015.600,00	1.762.911.700,00	1.303.253.340,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.340.666.120,00	10.428.813.290,00	282.582.500,00	273.504.000,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	258.446.900,00	244.494.375,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.782.500,00	131.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.199.000,00	40.697.745,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.947.000,00	37.495.660,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.518.400,00	34.800.970,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.731.087.802,00	9.086.208.005,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.067.448.802,00	7.664.026.166,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.613.639.000,00	1.377.341.156,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	44.840.683,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	45.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.000.000,00	45.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.094.232,00	351.629.201,00	282.582.500,00	273.504.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.143.700,00	8.850.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.885.000,00	20.582.500,00	282.582.500,00	273.504.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70.071.000,00	57.449.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.087.100,00	84.784.300,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	31.000.000,00	30.907.750,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.907.432,00	149.055.151,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.087.641,00	316.923.131,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.307.641,00	137.611.519,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.780.000,00	179.311.612,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.949.545,00	383.638.578,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	341.613.545,00	294.846.078,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33.601.000,00	16.795.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.735.000,00	71.997.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.750.863.750,00	4.703.152.501,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.750.863.750,00	4.703.152.501,00	0	0	0	0	0	0
Relasi Media	4.246.693.750,00	4.233.595.026,00	0	0	0	0	0	0
Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	45.903.000,00	41.590.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Informasi Publik	99.256.750,00	97.606.750,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	88.085.000,00	87.345.500,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	46.696.000,00	33.748.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	65.200.000,00	65.009.017,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	35.454.250,00	35.439.208,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Konten	88.550.000,00	88.550.000,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	35.025.000,00	20.269.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	19.647.679.732,00	17.950.049.809,00	1.480.329.200,00	1.029.749.340,00	0	0	0	0
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.647.679.732,00	17.950.049.809,00	1.480.329.200,00	1.029.749.340,00	0	0	0	0
Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	131.179.800,00	128.939.268,00	59.919.200,00	56.016.150,00	0	0	0	0
Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	948.540.000,00	928.526.200,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	3.632.228.000,00	2.891.171.799,00	842.800.000,00	841.629.390,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	2.585.910.000,00	2.521.884.000,00	445.000.000,00	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3.814.205.000,00	2.952.277.792,00	122.000.000,00	121.558.800,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	641.697.000,00	634.794.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.738.145.932,00	7.737.865.500,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	155.774.000,00	154.590.750,00	10.610.000,00	10.545.000,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	18.079.936.856,00	16.909.008.768,00	474.614.000,00	359.637.665,00	0	0	0	0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	18.079.936.856,00	16.909.008.768,00	474.614.000,00	359.637.665,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.069.070.606,00	14.919.190.151,00	423.279.000,00	309.588.390,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	234.219.000,00	219.609.337,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139.488.000,00	131.068.081,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.581.000,00	41.511.294,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.074.000,00	46.056.398,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.076.000,00	973.564,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.479.020.599,00	9.971.289.965,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.352.488.599,00	8.946.721.547,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.078.544.000,00	976.880.319,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.988.000,00	47.688.099,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	305.400.707,00	303.548.872,00	207.279.000,00	109.344.390,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.759.000,00	14.744.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.828.500,00	13.719.000,00	207.279.000,00	109.344.390,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.648.000,00	36.133.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.813.900,00	41.791.215,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.052.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.299.307,00	188.161.657,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.738.142,00	23.730.000,00	216.000.000,00	200.244.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	23.738.142,00	23.730.000,00	216.000.000,00	200.244.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.037.816.768,00	1.708.132.733,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	889.619.808,00	559.954.033,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.148.196.960,00	1.148.178.700,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.948.875.390,00	2.652.879.244,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	241.905.544,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.161.890,00	196.075.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.495.713.500,00	2.214.898.200,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	82.602.750,00	81.872.634,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.602.750,00	81.872.634,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	82.602.750,00	81.872.634,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	114.309.625,00	113.376.685,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	114.309.625,00	113.376.685,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	114.309.625,00	113.376.685,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	286.945.000,00	282.439.880,00	24.550.000,00	24.350.000,00	0	0	0	0
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	286.945.000,00	282.439.880,00	24.550.000,00	24.350.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	123.835.000,00	123.327.650,00	0	0	0	0	0	0
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	163.110.000,00	159.112.230,00	24.550.000,00	24.350.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	182.861.000,00	174.612.968,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	182.861.000,00	174.612.968,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	182.861.000,00	174.612.968,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	390.370.000,00	388.054.781,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	390.370.000,00	388.054.781,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	390.370.000,00	388.054.781,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	583.059.125,00	580.016.714,00	26.595.000,00	25.509.465,00	0	0	0	0
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	583.059.125,00	580.016.714,00	26.595.000,00	25.509.465,00	0	0	0	0
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	122.148.375,00	121.383.720,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	74.091.000,00	72.708.234,00	25.695.000,00	25.509.465,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	83.862.500,00	83.841.990,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	109.761.750,00	109.759.250,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	193.195.500,00	192.323.520,00	900.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	370.718.750,00	369.444.955,00	190.000,00	189.810,00	0	0	0	0
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	370.718.750,00	369.444.955,00	190.000,00	189.810,00	0	0	0	0
Pengembangan Usaha Mikro	235.952.000,00	235.483.891,00	0	0	0	0	0	0
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	134.766.750,00	133.961.064,00	190.000,00	189.810,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	21.528.275.882,00	18.648.487.073,00	460.317.000,00	263.219.350,00	0	0	0	0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	21.528.275.882,00	18.648.487.073,00	460.317.000,00	263.219.350,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.711.322.332,00	16.160.216.482,00	452.817.000,00	255.726.850,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209.481.650,00	208.033.903,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.517.000,00	75.409.900,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.208.000,00	36.958.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.972.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.756.650,00	45.694.003,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.841.271.271,00	11.141.985.259,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.649.318.271,00	10.108.693.419,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.191.953.000,00	1.033.291.840,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000,00	28.680.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	90.000.000,00	28.680.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perundang-Undangan								
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.113.947.500,00	1.040.469.630,00	250.352.000,00	140.657.290,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.000.000,00	149.999.098,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.840.000,00	8.840.000,00	151.160.000,00	62.950.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.808.000,00	45.800.000,00	99.192.000,00	77.707.290,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	79.650.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	551.910.000,00	533.700.950,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	24.455.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	52.000.000,00	26.165.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.389.500,00	171.859.582,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.810.000,00	23.810.000,00	174.790.000,00	87.408.060,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	12.370.000,00	12.370.000,00	87.630.000,00	87.408.060,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.440.000,00	11.440.000,00	87.160.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.070.582.911,00	3.045.952.878,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	577.679.811,00	577.644.178,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.000.000,00	143.770.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.327.903.100,00	2.324.538.700,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.312.229.000,00	671.284.812,00	27.675.000,00	27.661.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	200.000.000,00	167.615.298,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	222.000.000,00	186.545.880,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Mebel	75.000.000,00	16.140.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	290.000.000,00	102.386.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	525.229.000,00	198.597.134,00	27.675.000,00	27.661.500,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.125.845.950,00	1.022.729.997,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi- dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	267.823.800,00	175.945.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	90.407.000,00	67.485.000,00	0	0	0	0	0	0
Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berdasarkan Risiko	177.416.800,00	108.460.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	858.022.150,00	846.784.997,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	268.792.100,00	264.645.482,00	0	0	0	0	0	0
Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	273.938.300,00	270.336.170,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	315.291.750,00	311.803.345,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	802.045.600,00	762.826.112,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	802.045.600,00	762.826.112,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	714.776.000,00	685.312.367,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	87.269.600,00	77.513.745,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	481.202.000,00	341.094.339,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	481.202.000,00	341.094.339,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	244.301.000,00	159.419.020,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	99.247.000,00	71.542.765,00	0	0	0	0	0	0
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	137.654.000,00	110.132.554,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.982.000,00	114.705.868,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150.982.000,00	114.705.868,00	0	0	0	0	0	0
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	47.360.000,00	43.194.605,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	57.894.000,00	53.592.235,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Penanaman Modal	45.728.000,00	17.919.028,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	256.878.000,00	246.914.275,00	7.500.000,00	7.492.500,00	0	0	0	0
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.878.000,00	246.914.275,00	7.500.000,00	7.492.500,00	0	0	0	0
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	256.878.000,00	246.914.275,00	7.500.000,00	7.492.500,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	51.703.839.538,00	49.926.153.805,00	2.972.160.000,00	2.822.125.064,00	0	0	0	0
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	51.040.251.538,00	49.283.452.220,00	2.917.760.000,00	2.822.125.064,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.893.575.576,00	17.722.507.053,00	547.810.000,00	510.346.995,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.789.500,00	210.391.937,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	85.158.000,00	83.445.077,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.743.000,00	19.678.360,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.440.000,00	30.120.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.448.500,00	77.148.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.152.685.476,00	13.500.408.529,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.011.771.476,00	9.633.481.967,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.015.914.000,00	3.743.683.483,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	125.000.000,00	123.243.079,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	444.791.000,00	434.406.745,00	358.635.000,00	321.196.995,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.900.000,00	22.495.260,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.427.500,00	15.877.500,00	358.635.000,00	321.196.995,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.832.500,00	114.991.620,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.725.000,00	58.187.745,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.000.000,00	58.825.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.906.000,00	164.029.620,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.780.000,00	10.780.000,00	189.175.000,00	189.150.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	10.780.000,00	10.780.000,00	189.175.000,00	189.150.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.917.030.000,00	2.458.854.146,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.259.500.000,00	1.801.324.146,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	657.530.000,00	657.530.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.155.499.600,00	1.107.665.696,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	298.499.600,00	287.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	140.641.816,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	482.000.000,00	480.276.880,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	198.827.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.628.230.287,00	3.404.889.540,00	0	0	0	0	0	0
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.240.433.287,00	3.020.087.340,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota	557.250.687,00	552.110.070,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	296.597.500,00	295.089.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	1.821.651.100,00	1.619.004.439,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	379.777.500,00	371.472.431,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	185.156.500,00	182.410.900,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	387.797.000,00	384.802.200,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	288.547.000,00	286.548.200,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	99.250.000,00	98.254.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	26.451.164.000,00	26.207.055.913,00	2.039.400.000,00	2.004.271.070,00	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.081.161.875,00	5.062.449.275,00	1.918.000.000,00	1.884.972.750,00	0	0	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	3.477.768.875,00	3.464.610.756,00	1.918.000.000,00	1.884.972.750,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	1.603.393.000,00	1.597.838.519,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.288.512.375,00	6.274.346.345,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2.588.236.875,00	2.578.256.650,00	0	0	0	0	0	0
Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	3.700.275.500,00	3.696.089.695,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	11.468.284.750,00	11.430.899.419,00	0	0	0	0	0	0
Seleksi Atlet Daerah	914.491.000,00	913.598.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	9.870.380.000,00	9.867.930.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	683.413.750,00	649.371.419,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.024.537.500,00	1.934.002.174,00	121.400.000,00	119.298.320,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	1.149.277.500,00	1.138.693.950,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	875.260.000,00	795.308.224,00	121.400.000,00	119.298.320,00	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.588.667.500,00	1.505.358.700,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	248.275.000,00	176.570.600,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	98.454.500,00	92.220.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	465.296.000,00	462.219.800,00	0	0	0	0	0	0
Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	776.642.000,00	774.348.300,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.067.281.675,00	1.948.999.714,00	330.550.000,00	307.506.999,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.067.281.675,00	1.948.999.714,00	330.550.000,00	307.506.999,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	307.416.500,00	244.961.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	360.222.050,00	358.253.456,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	196.666.200,00	192.193.100,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	901.077.425,00	893.813.658,00	0	0	0	0	0	0
Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	66.096.500,00	65.684.500,00	315.550.000,00	292.506.999,00	0	0	0	0
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	235.803.000,00	194.094.000,00	0	0	0	0	0	0
UPT Gor Segiri	663.588.000,00	642.701.585,00	54.400.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAAN	663.588.000,00	642.701.585,00	54.400.000,00	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	663.588.000,00	642.701.585,00	54.400.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	663.588.000,00	642.701.585,00	54.400.000,00	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1.215.959.000,00	849.413.149,00	0	0	0	0	0	0
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	1.215.959.000,00	849.413.149,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.215.959.000,00	849.413.149,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.215.959.000,00	849.413.149,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	61.815.000,00	55.389.465,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	138.225.000,00	120.490.434,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	806.919.000,00	489.809.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	159.250.000,00	136.474.600,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektorial Sesuai Standar	49.750.000,00	47.249.150,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	479.566.750,00	414.487.010,00	8.500.000,00	0	0	0	0	0
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda	479.566.750,00	414.487.010,00	8.500.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	479.566.750,00	414.487.010,00	8.500.000,00	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	443.483.250,00	383.705.310,00	8.500.000,00	0	0	0	0	0
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	43.700.000,00	35.548.910,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.919.000,00	15.418.360,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	84.972.250,00	80.662.300,00	8.500.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	298.892.000,00	252.075.740,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	36.083.500,00	30.781.700,00	0	0	0	0	0	0
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.083.500,00	30.781.700,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.094.260.700,00	1.050.317.076,00	539.800.000,00	509.994.399,00	0	0	0	0
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda	2.094.260.700,00	1.050.317.076,00	539.800.000,00	509.994.399,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	891.976.350,00	513.802.489,00	62.500.000,00	62.498.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	394.262.730,00	267.258.300,00	0	0	0	0	0	0
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	285.501.865,00	226.625.650,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	108.760.865,00	40.632.650,00	0	0	0	0	0	0
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	398.563.620,00	148.594.190,00	62.500.000,00	62.498.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	253.135.215,00	85.453.460,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	145.428.405,00	63.140.730,00	62.500.000,00	62.498.000,00	0	0	0	0
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.150.000,00	97.949.999,00	0	0	0	0	0	0
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	99.150.000,00	97.949.999,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	462.276.350,00	226.849.328,00	269.300.000,00	267.097.401,00	0	0	0	0
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	462.276.350,00	226.849.328,00	269.300.000,00	267.097.401,00	0	0	0	0
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	55.687.500,00	42.990.463,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	335.190.000,00	150.822.893,00	269.300.000,00	267.097.401,00	0	0	0	0
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	71.398.850,00	33.035.972,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	364.334.000,00	163.832.180,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	140.455.500,00	107.224.180,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	74.021.500,00	51.812.000,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Cagar Budaya	66.434.000,00	55.412.180,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	223.878.500,00	56.608.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelindungan Cagar Budaya	73.982.250,00	12.993.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Cagar Budaya	149.896.250,00	43.615.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	375.674.000,00	145.833.079,00	196.000.000,00	180.398.998,00	0	0	0	0
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	375.674.000,00	145.833.079,00	196.000.000,00	180.398.998,00	0	0	0	0
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	71.874.000,00	65.903.079,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	75.000.000,00	66.470.000,00	25.000.000,00	24.999.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	228.800.000,00	13.460.000,00	171.000.000,00	155.399.998,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	12.501.183.082,00	12.037.449.076,00	1.345.276.400,00	1.230.052.122,00	0	0	0	0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	12.501.183.082,00	12.037.449.076,00	1.345.276.400,00	1.230.052.122,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.993.482.832,00	10.543.166.152,00	820.026.400,00	710.187.986,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	182.641.125,00	182.495.430,00	28.450.000,00	27.075.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	96.521.125,00	96.520.840,00	28.450.000,00	27.075.000,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.964.625,00	41.819.590,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.155.375,00	44.155.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.005.864.729,00	8.577.476.065,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.380.830.504,00	7.022.512.267,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.557.077.000,00	1.487.006.573,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	67.957.225,00	67.957.225,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	98.995.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	98.995.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.264.600,00	195.698.075,00	401.100.000,00	294.699.992,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.159.600,00	13.856.130,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	401.100.000,00	294.699.992,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88.610.000,00	78.547.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63.495.000,00	63.294.445,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.840.000,00	69.420.000,00	390.159.400,00	388.095.994,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	29.200.000,00	28.780.000,00	142.000.000,00	141.999.994,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.640.000,00	40.640.000,00	248.159.400,00	246.096.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.762.696,00	896.983.732,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	512.700.196,00	506.921.232,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	390.062.500,00	390.062.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.109.682,00	522.097.850,00	317.000,00	317.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	178.671.000,00	175.141.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.094.600,00	70.070.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	173.339.082,00	173.259.850,00	317.000,00	317.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	79.005.000,00	78.627.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.437.624.500,00	1.425.511.051,00	485.000.000,00	481.288.136,00	0	0	0	0
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.162.090.500,00	1.153.232.528,00	485.000.000,00	481.288.136,00	0	0	0	0
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	49.421.750,00	49.309.497,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.982.000,00	16.066.000,00	30.000.000,00	27.930.003,00	0	0	0	0
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	388.954.000,00	386.048.700,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	47.829.875,00	47.539.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	50.864.750,00	50.863.828,00	200.000.000,00	198.898.140,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	44.020.000,00	43.775.447,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.187.000,00	55.074.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	66.068.500,00	66.054.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	123.827.750,00	123.739.700,00	255.000.000,00	254.459.993,00	0	0	0	0
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	115.679.750,00	114.930.874,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	200.255.125,00	199.829.982,00	0	0	0	0	0	0
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	275.534.000,00	272.278.523,00	0	0	0	0	0	0
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.385.000,00	2.381.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	51.100.625,00	50.875.125,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	84.387.500,00	83.664.475,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	137.660.875,00	135.357.923,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	70.075.750,00	68.771.873,00	40.250.000,00	38.576.000,00	0	0	0	0
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70.075.750,00	68.771.873,00	40.250.000,00	38.576.000,00	0	0	0	0
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	17.344.750,00	17.344.750,00	40.250.000,00	38.576.000,00	0	0	0	0
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	52.731.000,00	51.427.123,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	1.157.532.625,00	1.024.210.359,00	351.715.000,00	329.919.997,00	0	0	0	0
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda	1.157.532.625,00	1.024.210.359,00	351.715.000,00	329.919.997,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	728.027.125,00	616.388.371,00	242.350.000,00	224.119.995,00	0	0	0	0
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	380.393.500,00	279.751.211,00	234.550.000,00	224.119.995,00	0	0	0	0
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	87.327.000,00	87.095.789,00	9.550.000,00	8.740.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	52.965.250,00	52.965.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	93.388.250,00	93.384.462,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	146.713.000,00	46.305.960,00	225.000.000,00	215.379.995,00	0	0	0	0
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	186.760.125,00	184.852.040,00	0	0	0	0	0	0
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	92.925.125,00	92.170.680,00	0	0	0	0	0	0
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	93.835.000,00	92.681.360,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	160.873.500,00	151.785.120,00	7.800.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	66.470.250,00	62.902.760,00	7.800.000,00	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	94.403.250,00	88.882.360,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	361.779.750,00	340.250.495,00	98.800.000,00	95.615.000,00	0	0	0	0
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	118.323.125,00	112.752.500,00	20.800.000,00	19.775.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	35.102.375,00	30.532.000,00	18.000.000,00	17.300.000,00	0	0	0	0
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	83.220.750,00	82.220.500,00	2.800.000,00	2.475.000,00	0	0	0	0
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	66.116.000,00	65.612.755,00	23.000.000,00	22.075.000,00	0	0	0	0
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	66.116.000,00	65.612.755,00	23.000.000,00	22.075.000,00	0	0	0	0
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	99.793.750,00	98.039.382,00	35.000.000,00	33.845.000,00	0	0	0	0
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	54.814.375,00	53.860.713,00	20.000.000,00	18.900.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	44.979.375,00	44.178.669,00	15.000.000,00	14.945.000,00	0	0	0	0
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	77.546.875,00	63.845.858,00	20.000.000,00	19.920.000,00	0	0	0	0
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	42.020.000,00	42.019.358,00	17.000.000,00	16.970.000,00	0	0	0	0
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	35.526.875,00	21.826.500,00	3.000.000,00	2.950.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	67.725.750,00	67.571.493,00	10.565.000,00	10.185.002,00	0	0	0	0
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	67.725.750,00	67.571.493,00	10.565.000,00	10.185.002,00	0	0	0	0
Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	67.725.750,00	67.571.493,00	10.565.000,00	10.185.002,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	89.775.359.935,00	83.455.076.795,00	25.663.979.759,00	20.654.177.812,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13.380.863.086,00	12.843.002.064,00	13.955.614.710,00	9.382.038.246,00	0	0	0	0
Dinas Perikanan Kota Samarinda	13.380.863.086,00	12.843.002.064,00	13.955.614.710,00	9.382.038.246,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.675.192.346,00	8.203.178.293,00	318.095.450,00	312.733.246,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	201.866.000,00	198.615.934,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.141.000,00	115.816.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.518.000,00	35.779.083,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.847.000,00	37.660.851,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.360.000,00	9.360.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.286.506.717,00	5.936.744.058,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.710.702.717,00	5.408.735.923,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	525.804.000,00	478.009.635,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.998.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	384.622.090,00	380.876.138,00	318.095.450,00	312.733.246,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.485.040,00	38.412.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.450.000,00	35.450.000,00	318.095.450,00	312.733.246,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.031.800,00	64.244.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.363.250,00	78.513.200,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.292.000,00	164.256.938,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.968.151,00	148.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	154.968.151,00	148.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978.417.040,00	887.512.013,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	423.497.040,00	353.849.013,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	554.920.000,00	533.663.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	668.812.348,00	650.930.150,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.150.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	408.181.848,00	394.435.130,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.660.000,00	31.630.020,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	161.013.000,00	158.072.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24.807.500,00	24.793.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.073.125.740,00	3.045.919.079,00	12.627.019.260,00	8.068.884.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/	1.773.773.740,00	1.768.732.857,00	12.627.019.260,00	8.068.884.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kota								
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	40.000.000,00	39.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.369.963.740,00	1.368.937.907,00	12.606.019.260,00	8.047.884.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	363.810.000,00	359.954.950,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.194.237.000,00	1.176.790.722,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	73.226.000,00	72.577.680,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	73.110.000,00	72.919.320,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	1.047.901.000,00	1.031.293.722,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	105.115.000,00	100.395.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	105.115.000,00	100.395.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	968.194.000,00	937.613.692,00	982.500.000,00	972.671.000,00	0	0	0	0
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.685.000,00	60.066.336,00	0	0	0	0	0	0
Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	60.685.000,00	60.066.336,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	178.037.000,00	159.383.900,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	56.870.000,00	46.784.900,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	51.167.000,00	47.344.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	70.000.000,00	65.255.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	729.472.000,00	718.163.456,00	982.500.000,00	972.671.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.610.000,00	39.168.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	161.941.000,00	161.329.552,00	982.500.000,00	972.671.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.975.000,00	26.672.308,00	0	0	0	0	0	0
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	245.387.000,00	243.332.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	174.275.000,00	170.653.556,00	0	0	0	0	0	0
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	77.284.000,00	77.008.040,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	139.051.000,00	136.841.000,00	28.000.000,00	27.750.000,00	0	0	0	0
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	139.051.000,00	136.841.000,00	28.000.000,00	27.750.000,00	0	0	0	0
Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	139.051.000,00	136.841.000,00	28.000.000,00	27.750.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	525.300.000,00	519.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	525.300.000,00	519.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	525.300.000,00	519.450.000,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.419.455.662,00	6.027.030.585,00	195.400.000,00	163.647.300,00	0	0	0	0
Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda	6.419.455.662,00	6.027.030.585,00	195.400.000,00	163.647.300,00	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.427.785.500,00	1.380.359.707,00	88.000.000,00	57.764.400,00	0	0	0	0
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	436.577.450,00	419.508.100,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	436.577.450,00	419.508.100,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	897.292.450,00	867.607.009,00	88.000.000,00	57.764.400,00	0	0	0	0
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	429.223.900,00	414.680.059,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	468.068.550,00	452.926.950,00	88.000.000,00	57.764.400,00	0	0	0	0
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	93.915.600,00	93.244.598,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota	93.915.600,00	93.244.598,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.622.771.775,00	1.599.782.810,00	0	0	0	0	0	0
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.622.771.775,00	1.599.782.810,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	71.363.925,00	67.081.760,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.330.720.000,00	1.313.097.900,00	0	0	0	0	0	0
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	220.687.850,00	219.603.150,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.686.679.437,00	1.408.168.840,00	107.400.000,00	105.882.900,00	0	0	0	0
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Bereksprei, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	193.964.100,00	185.272.540,00	107.400.000,00	105.882.900,00	0	0	0	0
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	193.964.100,00	185.272.540,00	107.400.000,00	105.882.900,00	0	0	0	0
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1.492.715.337,00	1.222.896.300,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	235.344.100,00	199.111.260,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Sistem Pemasaran	551.579.550,00	427.303.020,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	165.951.212,00	147.881.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	142.621.950,00	100.595.780,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	397.218.525,00	348.005.240,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.682.218.950,00	1.638.719.228,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.682.218.950,00	1.638.719.228,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	323.321.450,00	297.999.518,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	568.531.000,00	551.579.943,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	133.286.000,00	132.335.327,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	607.080.500,00	606.972.440,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	50.000.000,00	49.832.000,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	29.019.796.244,00	27.191.669.192,00	1.215.492.500,00	869.829.421,00	0	0	0	0
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	29.019.796.244,00	27.191.669.192,00	1.215.492.500,00	869.829.421,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.375.394.509,00	22.579.546.466,00	124.187.500,00	122.750.065,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	213.706.500,00	204.927.861,00	16.500.000,00	16.488.495,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.368.500,00	123.679.161,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.156.000,00	33.508.000,00	11.500.000,00	11.488.500,00	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.704.000,00	39.358.700,00	5.000.000,00	4.999.995,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.478.000,00	8.382.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21.185.267.021,00	20.471.456.384,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.595.609.906,00	19.074.614.734,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.573.365.000,00	1.382.859.535,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.292.115,00	13.982.115,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.100.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	99.100.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.747.615,00	208.853.200,00	107.687.500,00	106.261.570,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.498.500,00	7.495.925,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	107.687.500,00	106.261.570,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	19.980.000,00	18.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.053.725,00	54.224.885,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.963.000,00	11.880.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.252.390,00	117.252.390,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	923.741.448,00	879.290.945,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	474.173.448,00	429.815.945,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	449.568.000,00	449.475.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.931.925,00	715.918.076,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.435.500,00	24.423.350,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	432.465.425,00	424.583.726,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53.290.000,00	46.570.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.741.000,00	220.341.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.889.978.991,00	1.535.270.964,00	801.000.000,00	535.821.951,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	954.992.741,00	740.857.627,00	796.000.000,00	530.821.956,00	0	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	90.401.500,00	84.900.356,00	536.000.000,00	520.837.506,00	0	0	0	0
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	864.591.241,00	655.957.271,00	260.000.000,00	9.984.450,00	0	0	0	0
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	509.554.000,00	381.044.307,00	5.000.000,00	4.999.995,00	0	0	0	0
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	62.404.500,00	61.993.700,00	0	0	0	0	0	0
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	144.336.000,00	134.590.607,00	5.000.000,00	4.999.995,00	0	0	0	0
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	65.182.000,00	34.828.500,00	0	0	0	0	0	0
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	237.631.500,00	149.631.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	29.322.750,00	29.046.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	14.526.000,00	14.368.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	14.796.750,00	14.677.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	46.646.750,00	35.245.780,00	0	0	0	0	0	0
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	15.093.000,00	15.067.280,00	0	0	0	0	0	0
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	16.870.250,00	16.661.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	14.683.500,00	3.517.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	349.462.750,00	349.077.250,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	35.959.000,00	35.959.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	218.750.750,00	218.368.250,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	94.753.000,00	94.750.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.618.053.950,00	996.126.227,00	102.700.000,00	102.699.414,00	0	0	0	0
Pengembangan Prasarana Pertanian	793.456.200,00	190.374.981,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	587.841.200,00	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	205.615.000,00	190.374.981,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Prasarana Pertanian	824.597.750,00	805.751.246,00	102.700.000,00	102.699.414,00	0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	50.000.000,00	42.974.579,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	49.980.000,00	42.570.682,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	99.658.750,00	96.618.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	280.651.000,00	280.626.000,00	0	0	0	0	0	0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	74.960.000,00	74.364.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	269.348.000,00	268.597.985,00	102.700.000,00	102.699.414,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	614.359.625,00	597.831.795,00	25.625.000,00	20.064.000,00	0	0	0	0
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	272.541.125,00	261.840.900,00	16.600.000,00	16.439.000,00	0	0	0	0
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	51.422.875,00	46.445.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	44.944.500,00	44.831.100,00	0	0	0	0	0	0
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176.173.750,00	170.564.300,00	16.600.000,00	16.439.000,00	0	0	0	0
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	35.861.250,00	35.831.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	21.906.250,00	21.881.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Peredaran Produk Hewan	13.955.000,00	13.950.000,00	3.625.000,00	3.625.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	72.024.500,00	71.935.450,00	5.400.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	72.024.500,00	71.935.450,00	5.400.000,00	0	0	0	0	0
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	233.932.750,00	228.224.445,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	21.819.000,00	21.690.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	79.061.500,00	78.936.445,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	133.052.250,00	127.598.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	197.597.375,00	186.935.080,00	85.080.000,00	14.950.000,00	0	0	0	0
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	197.597.375,00	186.935.080,00	85.080.000,00	14.950.000,00	0	0	0	0
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	74.557.875,00	73.525.905,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0	0	0	0
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	43.506.500,00	42.382.750,00	81.180.000,00	11.050.000,00	0	0	0	0
Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	79.533.000,00	71.026.425,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	138.389.000,00	124.736.800,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	74.639.000,00	68.103.300,00	0	0	0	0	0	0
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	41.811.000,00	36.175.300,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	32.828.000,00	31.928.000,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	30.756.000,00	30.630.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	30.756.000,00	30.630.500,00	0	0	0	0	0	0
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	32.994.000,00	26.003.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	21.386.250,00	21.383.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	11.607.750,00	4.620.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.186.022.794,00	1.171.221.860,00	76.900.000,00	73.543.991,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.186.022.794,00	1.171.221.860,00	76.900.000,00	73.543.991,00	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	680.174.000,00	666.814.115,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	449.597.294,00	448.370.534,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	56.251.500,00	56.037.211,00	76.900.000,00	73.543.991,00	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	39.098.029.208,00	35.602.403.489,00	10.282.472.549,00	10.223.663.415,00	0	0	0	0
Dinas Perdagangan Kota Samarinda	37.933.591.511,00	34.564.966.671,00	10.109.218.335,00	10.050.418.208,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.868.948.011,00	27.708.363.613,00	814.303.575,00	765.093.497,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000,00	296.108.423,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.000.000,00	149.085.924,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	48.504.217,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.503.212,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.015.070,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.522.158.795,00	17.550.898.780,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.205.042.181,00	11.889.751.207,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.267.116.614,00	5.611.471.186,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	49.676.387,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	42.399.000,00	42.057.239,00	0	0	0	0	0	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	42.399.000,00	42.057.239,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	428.449.300,00	389.608.327,00	643.237.075,00	594.344.419,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.706.000,00	2.530.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.160.000,00	25.160.000,00	608.370.075,00	561.518.609,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	137.440.000,00	101.260.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.043.500,00	56.223.001,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	148.628.500,00	148.547.017,00	0	0	0	0	0	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	56.471.300,00	55.888.309,00	34.867.000,00	32.825.810,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.487.465.116,00	6.805.740.084,00	82.362.000,00	82.362.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.721.352.116,00	1.400.004.588,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.766.113.000,00	5.405.735.496,00	82.362.000,00	82.362.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.088.475.800,00	2.623.950.760,00	88.704.500,00	88.387.078,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	281.536.000,00	176.390.393,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.336.919.800,00	2.179.184.852,00	88.704.500,00	88.387.078,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000,00	42.974.515,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	426.220.000,00	225.401.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	255.312.350,00	219.891.919,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	52.485.100,00	50.828.519,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	52.485.100,00	50.828.519,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	93.376.000,00	76.972.271,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	93.376.000,00	76.972.271,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	109.451.250,00	92.091.129,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	109.451.250,00	92.091.129,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.334.258.900,00	5.287.412.605,00	8.995.293.760,00	8.986.550.781,00	0	0	0	0
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5.235.118.275,00	5.189.236.105,00	8.995.293.760,00	8.986.550.781,00	0	0	0	0
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.944.701.875,00	4.899.704.047,00	6.766.343.760,00	6.758.815.000,00	0	0	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	290.416.400,00	289.532.058,00	2.228.950.000,00	2.227.735.781,00	0	0	0	0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	99.140.625,00	98.176.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	99.140.625,00	98.176.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	578.589.000,00	478.718.681,00	164.746.000,00	163.950.000,00	0	0	0	0
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	559.501.000,00	459.787.955,00	164.746.000,00	163.950.000,00	0	0	0	0
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	275.869.000,00	191.489.129,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	283.632.000,00	268.298.826,00	164.746.000,00	163.950.000,00	0	0	0	0
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.088.000,00	18.930.726,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi	19.088.000,00	18.930.726,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	213.836.250,00	209.317.032,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	213.836.250,00	209.317.032,00	0	0	0	0	0	0
Pameran Dagang Nasional	176.490.250,00	175.161.032,00	0	0	0	0	0	0
Pameran Dagang Lokal	37.346.000,00	34.156.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	436.882.000,00	436.387.036,00	134.875.000,00	134.823.930,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	436.882.000,00	436.387.036,00	134.875.000,00	134.823.930,00	0	0	0	0
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	436.882.000,00	436.387.036,00	134.875.000,00	134.823.930,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	245.765.000,00	224.875.785,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	245.765.000,00	224.875.785,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	193.120.500,00	192.711.916,00	0	0	0	0	0	0
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	52.644.500,00	32.163.869,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pasar Segiri	131.062.647,00	129.508.697,00	77.160.234,00	77.151.227,00	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	131.062.647,00	129.508.697,00	77.160.234,00	77.151.227,00	0	0	0	0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	131.062.647,00	129.508.697,00	77.160.234,00	77.151.227,00	0	0	0	0
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	131.062.647,00	129.508.697,00	77.160.234,00	77.151.227,00	0	0	0	0
UPT Metrologi	807.650.675,00	681.080.988,00	96.093.980,00	96.093.980,00	0	0	0	0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	807.650.675,00	681.080.988,00	96.093.980,00	96.093.980,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	807.650.675,00	681.080.988,00	96.093.980,00	96.093.980,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	807.650.675,00	681.080.988,00	96.093.980,00	96.093.980,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
UPTD Pasar Pagi	225.724.375,00	226.847.133,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	225.724.375,00	221.929.133,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	225.724.375,00	221.929.133,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	225.724.375,00	221.929.133,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	0	4.918.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	0	4.918.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	0	4.918.000,00	0	0	0	0	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.857.215.735,00	1.790.971.465,00	15.000.000,00	14.999.430,00	0	0	0	0
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda	1.857.215.735,00	1.790.971.465,00	15.000.000,00	14.999.430,00	0	0	0	0
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.312.581.610,00	1.274.564.608,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.312.581.610,00	1.274.564.608,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	167.248.000,00	165.135.568,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	281.604.375,00	279.482.727,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	292.358.000,00	274.747.781,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	571.371.235,00	555.198.532,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	216.752.875,00	198.470.788,00	0	0	0	0	0	0
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	216.752.875,00	198.470.788,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	130.161.125,00	112.822.536,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	86.591.750,00	85.648.252,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	327.881.250,00	317.936.069,00	15.000.000,00	14.999.430,00	0	0	0	0
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	327.881.250,00	317.936.069,00	15.000.000,00	14.999.430,00	0	0	0	0
Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	94.728.000,00	86.996.652,00	0	0	0	0	0	0
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	172.532.375,00	171.471.985,00	15.000.000,00	14.999.430,00	0	0	0	0
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	60.620.875,00	59.467.432,00	0	0	0	0	0	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	233.448.139.784,00	221.151.020.382,00	42.459.595.819,00	40.245.829.290,00	0	0	0	0
SEKRETARIAT DAERAH	110.255.372.748,00	101.164.639.520,00	31.134.390.528,00	28.929.020.999,00	0	0	0	0
Sekretariat Daerah Kota Samarinda	110.255.372.748,00	101.164.639.520,00	31.134.390.528,00	28.929.020.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.844.996.962,00	82.411.687.350,00	7.821.339.384,00	5.687.411.855,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	382.335.100,00	348.353.100,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	183.046.000,00	151.396.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	51.289.100,00	50.489.100,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.375.000,00	43.943.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	19.750.000,00	19.430.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	19.750.000,00	19.715.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44.375.000,00	44.060.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	19.750.000,00	19.320.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.667.127.666,00	33.694.722.603,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	29.988.913.639,00	28.051.060.575,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.539.970.890,00	5.528.242.018,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	138.243.137,00	115.420.010,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.500.000,00	37.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	32.000.000,00	31.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.500.000,00	5.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.405.120.358,00	7.948.271.621,00	1.577.100.074,00	542.489.805,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	490.316.500,00	419.208.681,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.130.000,00	292.581.100,00	933.080.200,00	264.571.799,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	90.470.000,00	87.868.000,00	644.019.874,00	277.918.006,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.944.380.000,00	2.873.253.018,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	448.820.000,00	312.611.372,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.614.530.000,00	1.418.199.714,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.509.473.858,00	2.544.549.736,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.204.850.000,00	4.723.887.005,00	2.822.512.924,00	1.757.988.050,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.845.680.000,00	4.413.072.005,00	1.400.000.000,00	1.279.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	253.300.000,00	209.475.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Mebel	65.340.000,00	65.340.000,00	1.018.897.924,00	329.406.250,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.400.000,00	14.400.000,00	129.500.000,00	84.558.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.130.000,00	21.600.000,00	274.115.000,00	65.023.800,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.943.215.400,00	18.186.049.967,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.574.444.900,00	3.295.324.421,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.590.930.000,00	6.299.550.850,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.777.840.500,00	8.591.174.696,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.892.286.978,00	4.274.952.628,00	3.421.726.386,00	3.386.934.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.332.500.000,00	1.041.678.208,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.204.000.000,00	847.587.215,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	723.620.000,00	595.522.470,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	251.508.000,00	112.676.431,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.510.670.000,00	1.140.018.792,00	3.421.726.386,00	3.386.934.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	869.988.978,00	537.469.512,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.013.456.650,00	2.246.331.643,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	667.553.950,00	224.791.493,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	442.385.000,00	379.420.150,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	103.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.800.517.700,00	1.642.120.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Kerumahaan Sekreteriat Daerah	2.434.976.048,00	2.103.577.450,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	731.088.048,00	709.422.300,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	551.373.000,00	525.913.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekreteriat Daerah	1.152.515.000,00	868.241.650,00	0	0	0	0	0	0
Penataan Organisasi	835.567.762,00	828.415.334,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	386.512.402,00	380.102.652,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	142.560.000,00	142.294.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	61.274.482,00	61.197.212,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	41.044.000,00	40.962.600,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	204.176.878,00	203.858.870,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	8.028.561.000,00	8.020.125.999,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Keprotokolan	3.090.000.000,00	3.087.702.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3.290.000.000,00	3.289.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.648.561.000,00	1.642.503.999,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.199.222.207,00	14.828.102.670,00	23.148.051.144,00	23.139.459.144,00	0	0	0	0
Administrasi Tata Pemerintahan	1.830.430.736,00	1.450.385.986,00	30.000.000,00	21.780.000,00	0	0	0	0
Penataan Administrasi Pemerintahan	273.984.736,00	166.148.446,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Administrasi Wilayah	1.481.721.000,00	1.245.547.540,00	30.000.000,00	21.780.000,00	0	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	74.725.000,00	38.690.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	10.341.882.614,00	9.540.104.354,00	111.600.000,00	111.228.000,00	0	0	0	0
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.965.535.380,00	7.188.821.626,00	111.600.000,00	111.228.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1.019.249.500,00	1.006.449.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.220.470.862,00	1.212.057.062,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	77.228.000,00	74.483.596,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	59.398.872,00	58.293.070,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.069.888.250,00	1.037.779.868,00	23.006.451.144,00	23.006.451.144,00	0	0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	239.049.430,00	234.391.443,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Bantuan Hukum	713.437.070,00	686.206.675,00	23.006.451.144,00	23.006.451.144,00	0	0	0	0
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	117.401.750,00	117.181.750,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	2.957.020.607,00	2.799.832.462,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.065.077.734,00	1.928.537.037,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	703.008.973,00	689.523.625,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	188.933.900,00	181.771.800,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.211.153.579,00	3.924.849.500,00	165.000.000,00	102.150.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.217.083.205,00	1.196.304.112,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	159.422.058,00	156.497.348,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	760.767.747,00	755.812.964,00	0	0	0	0	0	0
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	220.570.900,00	208.511.300,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	76.322.500,00	75.482.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.366.310.564,00	1.186.852.560,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	246.759.844,00	205.279.342,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	605.628.250,00	534.442.748,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	513.922.470,00	447.130.470,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.383.714.940,00	1.326.048.833,00	165.000.000,00	102.150.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	616.281.000,00	598.774.013,00	150.000.000,00	89.600.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	341.967.000,00	330.173.220,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	425.466.940,00	397.101.600,00	15.000.000,00	12.550.000,00	0	0	0	0
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	244.044.870,00	215.643.995,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	50.961.500,00	50.961.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	32.065.875,00	32.065.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	161.017.495,00	132.617.495,00	0	0	0	0	0	0
SEKRETARIAT DPRD	123.192.767.036,00	119.986.380.862,00	11.325.205.291,00	11.316.808.291,00	0	0	0	0
Sekretariat DPRD Kota Samarinda	123.192.767.036,00	119.986.380.862,00	11.325.205.291,00	11.316.808.291,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	83.583.621.336,00	81.562.663.753,00	11.325.205.291,00	11.316.808.291,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.652.500,00	155.492.053,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	160.194.500,00	106.331.073,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	75.000.000,00	38.114.580,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.458.000,00	11.046.400,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.296.625.283,00	10.640.782.079,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.460.334.427,00	6.881.083.388,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.767.910.356,00	3.710.750.045,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	68.380.500,00	48.948.646,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.622.746.375,00	5.409.460.613,00	1.662.717.500,00	1.661.342.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.692.750,00	61.690.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.710.000,00	70.710.000,00	1.454.957.000,00	1.453.582.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.570.000,00	79.570.000,00	207.760.500,00	207.760.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.696.500.000,00	2.663.504.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	350.650.625,00	266.168.025,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	332.710.000,00	246.078.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.624.065.000,00	1.616.357.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.848.000,00	405.383.088,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.229.019.500,00	1.223.907.500,00	5.528.490.000,00	5.521.946.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.790.000,00	50.790.000,00	4.269.590.000,00	4.269.590.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.069.522.000,00	1.064.410.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	62.800.000,00	62.800.000,00	826.900.000,00	826.900.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.517.500,00	6.517.500,00	52.500.000,00	52.500.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	0	0	37.500.000,00	37.500.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Aset Tak Berwujud	18.360.000,00	18.360.000,00	142.000.000,00	141.456.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.030.000,00	21.030.000,00	200.000.000,00	194.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.584.872.658,00	8.360.253.052,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.374.238.346,00	2.362.557.452,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	404.540.000,00	404.540.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.806.094.312,00	5.593.155.600,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.409.720.730,00	3.148.337.384,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	690.681.800,00	687.984.838,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.604.250,00	59.039.248,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	563.140.000,00	558.373.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.440.269.680,00	1.236.025.839,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	621.025.000,00	571.914.459,00	0	0	0	0	0	0
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35.392.176.040,00	35.326.264.469,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.721.846.040,00	34.693.421.040,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	540.020.000,00	540.019.987,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	130.310.000,00	92.823.442,00	0	0	0	0	0	0
Layanan Administrasi DPRD	17.770.808.250,00	17.298.166.603,00	4.133.997.791,00	4.133.519.791,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Fraksi DPRD	217.268.000,00	170.914.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	14.660.355.000,00	14.273.424.781,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	2.853.185.250,00	2.813.827.822,00	4.133.997.791,00	4.133.519.791,00	0	0	0	0
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.609.145.700,00	38.423.717.109,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	623.092.000,00	530.660.110,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	9.324.500,00	4.054.073,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	261.224.000,00	179.518.744,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	12.603.500,00	10.179.765,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	331.365.000,00	331.359.028,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	8.575.000,00	5.548.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan Kebijakan Anggaran	130.374.500,00	130.269.711,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan KUA dan PPAS	33.594.850,00	33.575.096,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	23.619.800,00	23.599.171,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan APBD	21.864.000,00	21.851.570,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan APBD Perubahan	23.073.150,00	23.047.014,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan Laporan Semester	6.820.000,00	6.818.449,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	21.402.700,00	21.378.411,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	119.143.000,00	118.967.430,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	17.364.000,00	17.314.746,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	17.653.500,00	17.622.680,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15.118.000,00	15.111.472,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	18.728.500,00	18.709.088,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10.068.000,00	10.058.282,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	20.968.000,00	20.927.593,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Penggunaan Anggaran	10.322.000,00	10.312.281,00	0	0	0	0	0	0
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8.921.000,00	8.911.288,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kapasitas DPRD	22.725.073.900,00	21.724.125.122,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendalaman Tugas DPRD	1.618.159.000,00	1.569.580.857,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.275.300.000,00	1.270.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	579.600.000,00	574.100.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	15.555.400,00	12.123.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Program Kerja DPRD	11.459.500,00	422.500,00	0	0	0	0	0	0
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	19.225.000.000,00	18.296.998.365,00	0	0	0	0	0	0
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	15.909.438.300,00	15.852.386.916,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	18.607.000,00	16.106.758,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Reses	6.795.666.500,00	6.792.638.415,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	9.095.164.800,00	9.043.641.743,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	10.680.000,00	10.677.225,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Kode Etik DPRD	10.680.000,00	10.677.225,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Tugas DPRD	91.344.000,00	56.630.595,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.534.500,00	7.033.091,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	12.817.000,00	5.315.240,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	11.867.000,00	6.574.764,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	29.245.000,00	23.841.700,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	22.880.500,00	13.865.800,00	0	0	0	0	0	0
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	240.480.942.452,00	216.867.954.947,45	102.256.254.449,00	98.682.013.634,00	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	0	0
PERENCANAAN	39.826.028.195,00	37.715.769.720,00	2.380.846.933,00	2.309.606.508,00	0	0	0	0
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	39.826.028.195,00	37.715.769.720,00	2.380.846.933,00	2.309.606.508,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.880.528.465,00	24.719.460.193,00	2.380.846.933,00	2.309.606.508,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	308.948.000,00	303.523.850,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	190.024.000,00	187.289.900,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.604.000,00	68.967.080,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.320.000,00	47.266.870,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.986.631.862,00	12.441.939.264,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.612.956.141,00	11.265.418.790,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.299.675.721,00	1.102.552.465,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	74.000.000,00	73.968.009,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000,00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.117.860.000,00	993.641.227,00	1.339.225.333,00	1.291.511.511,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	95.000.000,00	79.248.439,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	141.000.000,00	136.456.130,00	1.339.225.333,00	1.291.511.511,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.360.000,00	106.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	210.000.000,00	208.549.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	463.500.000,00	364.649.160,00	0	0	0	0	0	0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000,00	98.737.998,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	541.590.000,00	487.307.318,00	1.041.621.600,00	1.018.094.997,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	264.600.000,00	212.522.356,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.500.000,00	205.500.000,00	155.000.000,00	150.900.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	61.920.000,00	60.314.962,00	746.191.600,00	728.039.997,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.570.000,00	8.970.000,00	140.430.000,00	139.155.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.728.755.944,00	1.584.949.289,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	653.408.000,00	594.418.478,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.075.347.944,00	990.530.811,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.996.742.659,00	8.708.099.245,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	611.956.409,00	475.825.285,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.000.000,00	65.740.015,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.000.000,00	176.236.300,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.815.300.000,00	7.747.062.355,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	278.486.250,00	243.235.290,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	10.142.513.743,00	9.514.984.317,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	3.192.876.450,00	2.979.205.483,00	0	0	0	0	0	0
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	995.792.100,00	901.267.126,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	472.264.250,00	465.199.631,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Konsultasi Publik	167.024.900,00	165.311.900,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	179.075.250,00	175.004.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	349.234.125,00	343.841.225,00	0	0	0	0	0	0
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	239.303.500,00	185.364.658,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	790.182.325,00	743.216.443,00	0	0	0	0	0	0
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.642.559.500,00	1.546.125.548,00	0	0	0	0	0	0
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	574.901.500,00	558.895.812,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1.067.658.000,00	987.229.736,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.307.077.793,00	4.989.653.286,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	4.275.486.500,00	4.084.117.332,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	43.760.000,00	35.837.500,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	987.831.293,00	869.698.454,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.802.985.987,00	3.481.325.210,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2.146.185.000,00	1.896.101.620,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	268.766.000,00	224.701.971,00	0	0	0	0	0	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55.659.000,00	53.855.183,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	55.659.000,00	27.937.553,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	658.858.000,00	605.726.210,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	593.569.500,00	499.636.521,00	0	0	0	0	0	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.805.000,00	50.060.236,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	53.463.000,00	46.271.205,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	403.405.500,00	387.912.741,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	976.124.750,00	937.739.985,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	187.777.500,00	179.547.108,00	0	0	0	0	0	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	70.210.000,00	69.033.400,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	69.794.000,00	68.553.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	74.666.500,00	71.710.200,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	291.570.000,00	288.093.777,00	0	0	0	0	0	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	68.316.500,00	65.991.500,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	62.357.750,00	57.116.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	151.432.500,00	137.695.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	680.676.237,00	647.483.605,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	423.645.112,00	402.330.828,00	0	0	0	0	0	0
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	86.570.750,00	82.547.600,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	60.377.250,00	56.693.700,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	110.083.125,00	105.911.477,00	0	0	0	0	0	0
KEUANGAN	171.911.468.784,00	153.175.152.987,45	98.020.157.766,00	94.674.343.051,00	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	0	0
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda	92.774.594.469,00	90.754.986.342,50	88.187.444.828,00	87.546.118.566,00	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.648.707.425,00	63.404.753.448,00	14.432.200.000,00	14.425.651.800,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	440.812.000,00	436.919.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	192.700.000,00	189.326.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	131.490.000,00	131.146.500,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.622.000,00	116.447.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.714.683.628,00	36.820.699.340,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.591.297.749,00	34.784.742.778,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.965.893.879,00	1.878.727.562,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	157.492.000,00	157.229.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	55.591.160,00	44.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.591.160,00	0	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50.000.000,00	44.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.863.422.579,00	5.811.261.607,00	12.000.820.000,00	12.000.132.200,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.159.700.000,00	1.159.598.100,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.180.000,00	99.180.000,00	12.000.820.000,00	12.000.132.200,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	713.909.050,00	713.886.200,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	810.000.000,00	809.870.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.270.000.000,00	2.269.063.200,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.088.129,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	418.545.400,00	397.175.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000,00	357.489.107,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	89.973.287,00	85.570.000,00	2.431.380.000,00	2.425.519.600,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	308.000.000,00	303.040.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.353.287,00	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	86.620.000,00	85.570.000,00	2.123.380.000,00	2.122.479.600,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.980.167.871,00	4.714.750.690,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.463.635,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.726.675.800,00	1.686.919.090,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.268.436,00	138.943.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.108.760.000,00	2.888.888.100,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.504.056.900,00	15.491.102.311,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.055.636.200,00	1.049.360.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.610.000.000,00	1.606.632.146,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Mebel	32.781.810,00	32.745.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.770.099.985,00	1.768.867.180,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	373.181.750,00	373.048.800,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.106.363.500,00	5.104.835.470,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.510.130.080,00	5.509.927.920,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.863.575,00	45.685.395,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.861.428.762,00	6.614.346.128,00	0	0	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.430.825.589,00	2.265.426.634,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	173.990.000,00	171.758.525,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	31.885.400,00	31.150.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	171.426.850,00	166.834.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	232.433.400,00	213.217.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	99.800.000,00	98.398.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	128.443.250,00	117.858.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	236.452.400,00	231.391.546,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	346.312.500,00	324.197.331,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	549.085.789,00	464.748.317,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	460.996.000,00	445.872.915,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.982.778.159,00	1.922.243.530,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.062.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.070.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	200.615.500,00	197.102.849,00	0	0	0	0	0	0
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5.080.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	146.772.000,00	142.279.375,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	610.777.278,00	605.212.490,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	50.236.350,00	49.804.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5.024.800,00	0	0	0	0	0	0	0
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	191.066.435,00	189.997.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	332.068.296,00	321.232.216,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	431.005.000,00	416.615.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.796.228.008,00	1.777.323.051,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	333.411.283,00	332.992.500,00	0	0	0	0	0	0
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	173.679.050,00	173.445.366,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	119.018.775,00	118.724.000,00	0	0	0	0	0	0
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	296.028.300,00	295.512.750,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	109.272.700,00	109.154.400,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	273.312.500,00	269.319.935,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	356.960.000,00	343.775.250,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	134.545.400,00	134.398.850,00	0	0	0	0	0	0
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	0	0
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0	0	0	5.000.000.000,00	1.861.414.542,00	0	0
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	651.597.006,00	649.352.913,00	0	0	0	0	0	0
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	329.457.569,00	328.659.813,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	322.139.437,00	320.693.100,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	21.264.458.282,00	20.735.886.766,50	73.755.244.828,00	73.120.466.766,00	0	0	0	0
Pengelolaan Barang Milik Daerah	21.264.458.282,00	20.735.886.766,50	73.755.244.828,00	73.120.466.766,00	0	0	0	0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1.038.635.317,00	1.030.637.712,50	16.157.400.000,00	16.122.910.775,00	0	0	0	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah	15.296.214.622,00	15.200.776.931,00	2.540.000.000,00	2.518.148.000,00	0	0	0	0
Inventarisasi Barang Milik Daerah	220.025.000,00	216.777.000,00	380.000.000,00	372.289.991,00	0	0	0	0
Pengamanan Barang Milik Daerah	2.385.955.172,00	2.320.120.673,00	54.586.344.828,00	54.016.028.000,00	0	0	0	0
Penilaian Barang Milik Daerah	1.111.842.171,00	1.001.955.617,00	0	0	0	0	0	0
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	369.656.000,00	173.684.636,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	370.050.000,00	339.029.500,00	67.500.000,00	67.250.000,00	0	0	0	0
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	472.080.000,00	452.904.697,00	24.000.000,00	23.840.000,00	0	0	0	0
Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda	76.964.913.140,00	61.209.068.796,95	9.832.712.938,00	7.128.224.485,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	59.514.320.140,00	49.099.290.692,95	8.756.129.938,00	6.890.726.488,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.500.000,00	43.812.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	72.000.000,00	27.362.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.500.000,00	16.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	55.285.815.683,00	46.443.299.765,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	44.286.944.683,00	36.664.284.788,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.998.871.000,00	9.779.014.977,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	291.750.000,00	147.788.377,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	150.000.000,00	23.320.500,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	141.750.000,00	124.467.877,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.333.894.301,00	1.130.639.136,00	4.272.070.000,00	3.390.494.796,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000,00	54.708.523,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.930.000,00	12.840.000,00	4.262.070.000,00	3.390.494.796,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000,00	105.615.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	467.576.051,00	439.627.379,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	20.468.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	8.330.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	506.388.250,00	489.050.234,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.217.500,00	104.710.000,00	1.103.782.500,00	368.266.692,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7.500.000,00	4.520.000,00	342.500.000,00	323.191.692,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	15.247.500,00	14.040.000,00	684.752.500,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	148.470.000,00	86.150.000,00	76.530.000,00	45.075.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.646.144,00	291.820.242,95	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	196.646.144,00	160.540.242,95	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	330.000.000,00	131.280.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.778.496.512,00	937.221.172,00	3.380.277.438,00	3.131.965.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.000.000,00	12.328.250,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	829.706.800,00	455.722.654,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.000.000,00	167.343.710,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	175.000.000,00	53.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	369.722.562,00	209.096.108,00	3.380.277.438,00	3.131.965.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.067.150,00	38.890.450,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	17.450.593.000,00	12.109.778.104,00	1.076.583.000,00	237.497.997,00	0	0	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	17.450.593.000,00	12.109.778.104,00	1.076.583.000,00	237.497.997,00	0	0	0	0
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	383.207.000,00	85.642.996,00	0	0	0	0	0	0
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	714.050.000,00	500.005.828,00	7.400.000,00	5.246.500,00	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	14.804.942.000,00	10.512.696.356,00	1.069.183.000,00	232.251.497,00	0	0	0	0
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	356.457.000,00	258.503.500,00	0	0	0	0	0	0
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	240.243.000,00	172.479.305,00	0	0	0	0	0	0
Penagihan Pajak Daerah	100.000.000,00	600.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	295.000.000,00	219.262.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	296.447.500,00	198.706.583,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	260.246.500,00	161.881.036,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah I	322.977.225,00	156.906.800,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	322.977.225,00	156.906.800,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	322.977.225,00	156.906.800,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	322.977.225,00	156.906.800,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah II	486.225.000,00	190.543.725,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	486.225.000,00	190.543.725,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	486.225.000,00	190.543.725,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	486.225.000,00	190.543.725,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah III	466.139.725,00	366.694.280,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	466.139.725,00	366.694.280,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	466.139.725,00	366.694.280,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	466.139.725,00	366.694.280,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah IV	481.647.225,00	274.234.051,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	481.647.225,00	274.234.051,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	481.647.225,00	274.234.051,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	481.647.225,00	274.234.051,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pendapatan Daerah Wilayah V	414.972.000,00	222.718.992,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	414.972.000,00	222.718.992,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	414.972.000,00	222.718.992,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	414.972.000,00	222.718.992,00	0	0	0	0	0	0
KEPEGAWAIAN	21.061.691.946,00	19.605.279.658,00	1.305.249.750,00	1.285.167.385,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	19.845.035.571,00	18.415.531.228,00	1.207.361.750,00	1.188.163.375,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.777.578.389,00	13.113.355.675,00	773.611.150,00	755.173.379,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.566.110,00	149.299.240,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.474.110,00	61.382.360,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52.576.000,00	41.886.480,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.199.000,00	34.932.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	13.317.000,00	11.098.400,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.057.918.479,00	11.530.640.356,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.022.786.604,00	10.527.882.926,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	997.290.875,00	969.531.450,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	37.841.000,00	33.225.980,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	258.167.800,00	240.612.343,00	287.972.000,00	273.050.879,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.512.000,00	4.966.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.828.000,00	11.630.001,00	287.972.000,00	273.050.879,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	20.470.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.998.800,00	46.636.500,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000,00	8.278.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.829.000,00	148.631.842,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	417.500.000,00	414.600.003,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.500.000,00	354.600.003,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Aset Tak Berwujud	60.000.000,00	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.748.850,00	333.657.995,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.748.850,00	76.137.995,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	266.000.000,00	257.520.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	530.677.150,00	444.545.738,00	485.639.150,00	482.122.500,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	448.997.150,00	364.227.738,00	7.000.000,00	6.937.500,00	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	15.000.000,00	14.700.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	51.680.000,00	51.055.500,00	463.639.150,00	460.485.000,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.262.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	6.067.457.182,00	5.302.175.553,00	433.750.600,00	432.989.996,00	0	0	0	0
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	978.895.457,00	854.252.343,00	160.250.200,00	159.491.998,00	0	0	0	0
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3.062.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	649.092.000,00	585.218.078,00	47.000.000,00	46.775.400,00	0	0	0	0
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	65.904.907,00	49.310.540,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	125.909.750,00	93.187.137,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	82.631.000,00	76.220.976,00	70.000.000,00	69.724.599,00	0	0	0	0
Pengelolaan Data Kepegawaian	52.295.800,00	50.315.612,00	43.250.200,00	42.991.999,00	0	0	0	0
Mutasi dan Promosi ASN	916.342.375,00	707.767.754,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Mutasi ASN	111.306.500,00	107.627.136,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	274.839.875,00	256.488.240,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Promosi ASN	530.196.000,00	343.652.378,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Kompetensi ASN	2.560.952.750,00	2.251.976.777,00	145.000.000,00	144.997.998,00	0	0	0	0
Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	17.148.750,00	8.014.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	451.079.500,00	406.610.812,00	125.000.000,00	124.997.998,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1.008.892.500,00	933.795.937,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	921.407.000,00	763.574.164,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	162.425.000,00	139.981.864,00	0	0	0	0	0	0
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.611.266.600,00	1.488.178.679,00	128.500.400,00	128.500.000,00	0	0	0	0
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	387.881.100,00	362.951.020,00	52.500.400,00	52.500.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	890.282.000,00	859.790.855,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	148.462.500,00	143.841.612,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Disiplin ASN	65.273.000,00	30.713.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	70.513.000,00	62.627.192,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0	0	0	0
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	48.855.000,00	28.255.000,00	0	0	0	0	0	0
UPTD Pengembangan Kompetensi Pegawai	1.216.656.375,00	1.189.748.430,00	97.888.000,00	97.004.010,00	0	0	0	0
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.216.656.375,00	1.189.748.430,00	97.888.000,00	97.004.010,00	0	0	0	0
Pengembangan Kompetensi ASN	1.216.656.375,00	1.189.748.430,00	97.888.000,00	97.004.010,00	0	0	0	0
Pengelolaan Assessment Center	1.216.656.375,00	1.189.748.430,00	97.888.000,00	97.004.010,00	0	0	0	0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.913.604.341,00	4.946.935.703,00	0	0	0	0	0	0
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda	5.913.604.341,00	4.946.935.703,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.913.604.341,00	4.946.935.703,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Kompetensi Teknis	1.857.971.000,00	1.822.327.897,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	42.275.000,00	30.984.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.815.696.000,00	1.791.343.897,00	0	0	0	0	0	0
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.055.633.341,00	3.124.607.806,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	12.560.000,00	12.560.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	93.778.500,00	64.889.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	7.750.000,00	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	7.750.000,00	7.750.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.927.944.841,00	3.025.808.306,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0	0	0	0	0	0
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.768.149.186,00	1.424.816.879,00	550.000.000,00	412.896.690,00	0	0	0	0
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda	1.768.149.186,00	1.424.816.879,00	550.000.000,00	412.896.690,00	0	0	0	0
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.768.149.186,00	1.424.816.879,00	550.000.000,00	412.896.690,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	609.926.125,00	473.729.276,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	111.460.250,00	106.225.918,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	378.746.000,00	291.403.937,00	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	119.719.875,00	76.099.421,00	0	0	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	33.859.250,00	28.955.409,00	250.000.000,00	187.255.890,00	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	33.859.250,00	28.955.409,00	250.000.000,00	187.255.890,00	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	525.837.436,00	479.195.415,00	300.000.000,00	225.640.800,00	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	151.502.375,00	142.696.146,00	0	0	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	53.887.750,00	33.347.000,00	300.000.000,00	225.640.800,00	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	105.121.812,00	98.256.453,00	0	0	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	112.040.437,00	107.675.327,00	0	0	0	0	0	0
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	103.285.062,00	97.220.489,00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	598.526.375,00	442.936.779,00	0	0	0	0	0	0
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	6.547.750,00	5.567.000,00	0	0	0	0	0	0
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	178.318.750,00	89.673.870,00	0	0	0	0	0	0
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	413.659.875,00	347.695.909,00	0	0	0	0	0	0
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	33.936.475.273,00	25.200.727.306,00	7.277.479.000,00	4.414.405.157,00	0	0	0	0
INSPEKTORAT DAERAH	33.936.475.273,00	25.200.727.306,00	7.277.479.000,00	4.414.405.157,00	0	0	0	0
Inspektorat Daerah Kota Samarinda	33.936.475.273,00	25.200.727.306,00	7.277.479.000,00	4.414.405.157,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.528.489.058,00	19.521.549.714,00	7.250.479.000,00	4.389.999.032,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290.264.000,00	228.222.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	167.710.000,00	116.705.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.990.000,00	71.990.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.564.000,00	39.527.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.357.706.263,00	11.872.939.138,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.984.622.513,00	11.543.047.357,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	347.719.000,00	317.238.581,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.364.750,00	12.653.200,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.553.876.202,00	2.206.381.271,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99.220.000,00	64.940.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	261.920.000,00	259.135.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3.132.736.202,00	1.882.306.271,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.282.410.733,00	1.003.780.086,00	3.674.450.000,00	3.087.120.927,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.224.000,00	18.482.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.730.000,00	109.124.979,00	3.674.450.000,00	3.087.120.927,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	406.535.000,00	176.824.700,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	52.740.000,00	52.515.410,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.600.000,00	7.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	86.165.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.261.733,00	447.351.341,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	106.320.000,00	106.116.656,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.545.980.000,00	1.434.283.142,00	3.576.029.000,00	1.302.878.105,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	380.320.000,00	368.525.714,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.125.760.000,00	1.026.037.428,00	400.000.000,00	397.756.705,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.220.000,00	9.220.000,00	94.429.000,00	91.300.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.920.000,00	11.740.000,00	102.300.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.760.000,00	18.760.000,00	2.979.300.000,00	813.821.400,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.227.245.000,00	1.520.411.333,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	349.445.000,00	267.846.217,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	8.015.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.867.800.000,00	1.244.550.116,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.271.006.860,00	1.255.532.244,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	266.797.500,00	201.429.369,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.230.000,00	92.107.720,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.535.000,00	62.730.950,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.055.914.360,00	541.981.205,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	507.530.000,00	357.283.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.209.650.250,00	3.587.017.392,00	27.000.000,00	24.406.125,00	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.987.380.250,00	3.519.477.392,00	27.000.000,00	24.406.125,00	0	0	0	0
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.640.270.000,00	1.449.774.100,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	311.380.000,00	310.870.000,00	0	0	0	0	0	0
Reviu Laporan Kinerja	59.295.000,00	58.410.000,00	0	0	0	0	0	0
Reviu Laporan Keuangan	553.607.250,00	495.331.192,00	27.000.000,00	24.406.125,00	0	0	0	0
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	1.422.828.000,00	1.205.092.100,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	222.270.000,00	67.540.000,00	0	0	0	0	0	0
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	133.710.000,00	22.830.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	88.560.000,00	44.710.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	3.198.335.965,00	2.092.160.200,00	0	0	0	0	0	0
Pendampingan dan Asistensi	3.198.335.965,00	2.092.160.200,00	0	0	0	0	0	0
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	723.910.000,00	612.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	77.820.000,00	36.531.900,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.221.545.965,00	1.393.953.300,00	0	0	0	0	0	0
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	175.060.000,00	48.835.000,00	0	0	0	0	0	0
UNSUR KEWILAYAHAN	427.402.461.501,00	411.131.932.870,00	4.011.564.850,00	3.528.759.794,00	0	0	0	0
KECAMATAN	427.402.461.501,00	411.131.932.870,00	4.011.564.850,00	3.528.759.794,00	0	0	0	0
Kecamatan Palaran	15.804.437.108,00	14.842.738.544,00	274.750.000,00	272.429.997,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.287.013.558,00	12.437.890.536,00	274.180.000,00	271.859.997,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	177.207.875,00	130.023.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	109.460.000,00	71.765.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.597.875,00	34.267.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.150.000,00	23.991.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.007.104.040,00	10.414.751.241,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.815.357.040,00	9.369.502.405,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.149.286.000,00	1.030.742.836,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.461.000,00	14.506.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	120.000.000,00	118.808.484,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	19.550.025,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	99.258.459,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.480.425,00	112.694.000,00	64.500.000,00	64.499.998,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	54.500.000,00	54.499.998,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.420.000,00	7.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.363.925,00	50.916.300,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	1.770.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.696.500,00	43.507.700,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	817.820.000,00	787.329.988,00	209.680.000,00	207.359.999,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	712.820.000,00	692.719.988,00	87.060.000,00	87.060.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	4.610.000,00	112.620.000,00	110.300.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	10.000.000,00	9.999.999,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.000.000,00	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.796.868,00	222.833.865,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.296.868,00	171.333.865,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.000.000,00	39.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	729.604.350,00	651.449.958,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187.691.350,00	152.489.958,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000,00	59.595.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.930.000,00	31.300.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	194.983.000,00	194.983.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000,00	203.082.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.380.888.000,00	2.268.405.008,00	570.000,00	570.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.380.888.000,00	2.268.405.008,00	570.000,00	570.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.380.888.000,00	2.268.405.008,00	570.000,00	570.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.535.550,00	136.443.000,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	56.562.500,00	56.562.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	26.850.000,00	26.850.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Evaluasi Kelurahan	29.712.500,00	29.712.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	79.973.050,00	79.881.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	79.973.050,00	79.881.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Bantuas	1.906.097.591,00	1.879.170.104,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	172.775.000,00	146.172.875,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.775.000,00	146.172.875,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	172.775.000,00	146.172.875,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.733.322.591,00	1.732.997.229,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.685.372.591,00	1.685.103.054,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.049.600.000,00	1.049.525.300,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	635.772.591,00	635.577.754,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	47.950.000,00	47.894.175,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47.950.000,00	47.894.175,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Bukuan	5.631.963.341,00	5.625.322.093,00	25.000.000,00	24.999.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	148.200.000,00	142.570.000,00	25.000.000,00	24.999.999,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.200.000,00	142.570.000,00	25.000.000,00	24.999.999,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	148.200.000,00	142.570.000,00	25.000.000,00	24.999.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.483.763.341,00	5.482.752.093,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.438.450.841,00	5.437.439.593,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.401.000.000,00	3.400.687.253,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.037.450.841,00	2.036.752.340,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.312.500,00	45.312.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.312.500,00	45.312.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Simpang Pasir	3.299.277.841,00	3.262.616.228,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	340.500.000,00	340.500.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	340.500.000,00	340.500.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	340.500.000,00	340.500.000,00	28.000.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.958.777.841,00	2.922.116.228,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.911.265.341,00	2.874.603.728,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.802.800.000,00	1.786.465.787,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.108.465.341,00	1.088.137.941,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	47.512.500,00	47.512.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47.512.500,00	47.512.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Rawa Makmur	6.225.898.409,00	6.199.657.044,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	230.000.000,00	230.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	230.000.000,00	230.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	230.000.000,00	230.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.995.898.409,00	5.969.657.044,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.949.583.909,00	5.926.910.544,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.701.000.000,00	3.690.877.122,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.248.583.909,00	2.236.033.422,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	46.314.500,00	42.746.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46.314.500,00	42.746.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Handil Bakti	4.007.853.136,00	4.007.853.052,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	241.951.500,00	241.951.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	241.951.500,00	241.951.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	241.951.500,00	241.951.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.765.901.636,00	3.765.901.552,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.721.851.636,00	3.721.851.552,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.292.800.000,00	2.292.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.429.051.636,00	1.429.051.552,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.050.000,00	44.050.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.050.000,00	44.050.000,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Ilir	15.547.366.620,00	14.357.742.926,00	338.760.000,00	261.017.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.071.912.620,00	12.984.902.598,00	311.760.000,00	235.500.000,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	169.770.000,00	85.520.200,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	108.800.000,00	61.290.200,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.950.000,00	17.700.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.020.000,00	6.530.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.923.310.826,00	11.230.591.428,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.243.882.826,00	9.766.673.783,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.637.478.000,00	1.442.757.645,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	41.950.000,00	21.160.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.000.000,00	21.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.748.000,00	141.377.760,00	256.760.000,00	230.500.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.300.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.240.000,00	8.240.000,00	246.760.000,00	230.500.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000,00	14.573.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.408.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.600.000,00	17.680.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	10.740.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.000.000,00	80.844.760,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	934.000.000,00	824.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	290.000.000,00	270.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	510.000.000,00	420.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.000.000,00	133.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	397.020.594,00	376.220.369,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	358.020.594,00	345.820.369,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	30.400.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.063.200,00	306.192.841,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	90.012.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	105.429.741,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	42.730.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.063.200,00	38.020.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.309.595.000,00	1.244.939.828,00	27.000.000,00	25.517.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.309.595.000,00	1.244.939.828,00	27.000.000,00	25.517.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.309.595.000,00	1.244.939.828,00	27.000.000,00	25.517.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.859.000,00	127.900.500,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100.000.000,00	67.851.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.000.000,00	40.511.500,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	50.000.000,00	27.340.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	65.859.000,00	60.049.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	65.859.000,00	60.049.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sidomulyo	4.986.805.159,00	4.984.757.115,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	151.078.000,00	151.078.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	151.078.000,00	151.078.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	151.078.000,00	151.078.000,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.835.727.159,00	4.833.679.115,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.790.091.159,00	4.788.382.315,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.006.000.000,00	3.006.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.784.091.159,00	1.782.382.315,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.636.000,00	45.296.800,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.636.000,00	45.296.800,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Selili	4.490.126.705,00	4.488.300.400,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	153.500.000,00	153.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	153.500.000,00	153.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	153.500.000,00	153.500.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.336.626.705,00	4.334.800.400,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.291.184.705,00	4.289.697.600,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.676.000.000,00	2.676.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.615.184.705,00	1.613.697.600,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.442.000,00	45.102.800,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.442.000,00	45.102.800,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sidodamai	4.094.976.636,00	4.041.932.739,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	354.500.000,00	344.529.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	354.500.000,00	344.529.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	354.500.000,00	344.529.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.740.476.636,00	3.697.403.739,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.696.851.636,00	3.661.437.939,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.292.800.000,00	2.285.520.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.404.051.636,00	1.375.917.939,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.625.000,00	35.965.800,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.625.000,00	35.965.800,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Pelita	5.474.874.227,00	5.464.364.232,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	152.400.000,00	150.925.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.400.000,00	150.925.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.400.000,00	150.925.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.322.474.227,00	5.313.439.232,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.276.224.227,00	5.270.619.232,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.281.000.000,00	3.280.970.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.995.224.227,00	1.989.649.232,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	46.250.000,00	42.820.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46.250.000,00	42.820.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sungai Dama	4.033.709.250,00	4.029.371.160,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	179.600.000,00	179.600.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.600.000,00	179.600.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.600.000,00	179.600.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.854.109.250,00	3.849.771.160,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.809.078.250,00	3.808.169.360,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.362.800.000,00	2.362.630.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.446.278.250,00	1.445.539.360,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.031.000,00	41.601.800,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.031.000,00	41.601.800,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Seberang	16.586.079.002,00	15.635.258.838,00	479.920.000,00	470.954.259,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.970.384.254,00	14.042.009.392,00	472.720.000,00	463.974.259,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	200.418.200,00	200.324.953,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	105.058.200,00	105.058.189,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.000.000,00	49.969.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.360.000,00	45.297.764,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.429.660.124,00	11.714.946.582,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.797.470.124,00	10.325.852.165,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.604.696.000,00	1.380.497.501,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.494.000,00	8.596.916,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	142.215.300,00	142.107.500,00	472.720.000,00	463.974.259,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.280.000,00	44.280.000,00	472.720.000,00	463.974.259,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.208.000,00	2.200.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.999.800,00	24.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.727.500,00	45.727.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.037.324.500,00	882.449.988,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	241.324.500,00	191.129.988,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	662.000.000,00	629.820.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.000.000,00	61.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	516.184.130,00	505.846.947,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	449.684.130,00	439.946.947,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	11.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000,00	54.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	644.582.000,00	596.333.422,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.500.000,00	150.751.822,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	114.000.000,00	111.530.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	104.900.000,00	104.900.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	229.182.000,00	229.151.600,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.542.532.748,00	1.520.121.946,00	7.200.000,00	6.980.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.542.532.748,00	1.520.121.946,00	7.200.000,00	6.980.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.542.532.748,00	1.520.121.946,00	7.200.000,00	6.980.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	73.162.000,00	73.127.500,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.818.000,00	10.818.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	10.818.000,00	10.818.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	62.344.000,00	62.309.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	62.344.000,00	62.309.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Baqa	2.958.528.250,00	2.951.623.200,00	11.625.000,00	11.575.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	351.199.750,00	351.093.700,00	11.625.000,00	11.575.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351.199.750,00	351.093.700,00	11.625.000,00	11.575.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	351.199.750,00	351.093.700,00	11.625.000,00	11.575.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.607.328.500,00	2.600.529.500,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.566.385.500,00	2.566.385.500,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.592.800.000,00	1.592.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	973.585.500,00	973.585.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.943.000,00	34.144.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40.943.000,00	34.144.000,00	0	0	0	0	0	0
	2.650.129.386,00	2.631.523.336,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	153.550.000,00	139.777.950,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	153.550.000,00	139.777.950,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	153.550.000,00	139.777.950,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.496.579.386,00	2.491.745.386,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.454.158.886,00	2.454.098.886,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.522.800.000,00	1.522.740.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	931.358.886,00	931.358.886,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	42.420.500,00	37.646.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	42.420.500,00	37.646.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sungai Keledang	4.349.551.193,00	4.323.523.521,00	7.000.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	156.545.750,00	136.955.430,00	7.000.000,00	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.545.750,00	136.955.430,00	7.000.000,00	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.545.750,00	136.955.430,00	7.000.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.193.005.443,00	4.186.568.091,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.153.850.193,00	4.153.208.091,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.580.937.500,00	2.580.540.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.572.912.693,00	1.572.668.091,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	39.155.250,00	33.360.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39.155.250,00	33.360.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Mangkupalas	2.436.688.694,00	2.426.798.430,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	162.800.000,00	162.799.430,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.800.000,00	162.799.430,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.800.000,00	162.799.430,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.273.888.694,00	2.263.999.000,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.229.586.494,00	2.228.244.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.382.737.500,00	1.382.415.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	846.848.994,00	845.829.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.302.200,00	35.755.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.302.200,00	35.755.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Tenun Samarinda	1.802.227.208,00	1.801.791.550,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.422.000,00	163.312.950,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.422.000,00	163.312.950,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.422.000,00	163.312.950,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.638.805.208,00	1.638.478.600,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.598.132.208,00	1.597.824.600,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	979.600.000,00	979.510.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	618.532.208,00	618.314.600,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.673.000,00	40.654.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40.673.000,00	40.654.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Gunung Panjang	1.240.942.384,00	1.240.357.850,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	160.072.000,00	159.971.950,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.072.000,00	159.971.950,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.072.000,00	159.971.950,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.080.870.384,00	1.080.385.900,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.030.870.384,00	1.030.385.900,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	604.600.000,00	604.370.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	426.270.384,00	426.015.900,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Utara	22.782.591.235,00	21.162.595.085,00	386.830.000,00	322.160.304,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.719.160.473,00	19.333.442.424,00	305.280.000,00	241.255.800,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.821.950,00	134.215.625,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	86.226.200,00	77.318.625,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	43.945.750,00	39.537.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.650.000,00	17.360.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.385.157.324,00	17.238.242.822,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.899.665.824,00	15.080.024.771,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.438.928.000,00	2.158.218.051,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46.563.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	86.363.000,00	31.008.862,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86.363.000,00	31.008.862,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.997.075,00	177.284.835,00	124.000.000,00	107.415.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.320.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	124.000.000,00	107.415.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.660.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.570.575,00	22.570.575,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141.606.500,00	118.234.260,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	989.621.000,00	982.969.967,00	146.000.000,00	98.565.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	879.360.000,00	879.359.970,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.461.000,00	68.809.997,00	47.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	10.000.000,00	9.980.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	10.000.000,00	9.990.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.800.000,00	34.800.000,00	69.000.000,00	68.645.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	10.000.000,00	9.950.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.598.700,00	447.963.879,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	421.348.700,00	392.213.879,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	3.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.250.000,00	52.250.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.601.424,00	321.756.434,00	35.280.000,00	35.275.800,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.678.124,00	212.837.335,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.840.000,00	36.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63.083.300,00	63.079.219,00	35.280.000,00	35.275.800,00	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.000.000,00	8.999.880,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.896.310.262,00	1.681.090.743,00	81.550.000,00	80.904.504,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.896.310.262,00	1.681.090.743,00	81.550.000,00	80.904.504,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.896.310.262,00	1.681.090.743,00	81.550.000,00	80.904.504,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	167.120.500,00	148.061.918,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	72.373.500,00	54.081.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	32.987.500,00	16.637.500,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	39.386.000,00	37.444.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	94.747.000,00	93.980.418,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	94.747.000,00	93.980.418,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Tanah Merah	3.787.560.023,00	3.781.345.747,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	156.703.500,00	154.749.911,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.703.500,00	154.749.911,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	156.703.500,00	154.749.911,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.630.856.523,00	3.626.595.836,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.584.625.023,00	3.581.677.836,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.222.800.000,00	2.220.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.361.825.023,00	1.360.757.836,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	46.231.500,00	44.918.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46.231.500,00	44.918.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sempaja Selatan	4.130.613.250,00	4.014.721.316,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175.458.500,00	175.458.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.458.500,00	175.458.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.458.500,00	175.458.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.955.154.750,00	3.839.262.816,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.909.078.250,00	3.793.186.316,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.437.800.000,00	2.365.639.480,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.471.278.250,00	1.427.546.836,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	46.076.500,00	46.076.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	46.076.500,00	46.076.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Lempake	6.175.395.909,00	6.172.981.212,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	181.576.500,00	181.468.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	181.576.500,00	181.468.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	181.576.500,00	181.468.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.993.819.409,00	5.991.513.212,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.949.583.909,00	5.948.435.712,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.701.000.000,00	3.701.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.248.583.909,00	2.247.435.712,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.235.500,00	43.077.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.235.500,00	43.077.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sungai Siring	1.918.824.977,00	1.859.732.793,00	33.000.000,00	32.700.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	324.703.500,00	279.495.000,00	33.000.000,00	32.700.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.703.500,00	279.495.000,00	33.000.000,00	32.700.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	324.703.500,00	279.495.000,00	33.000.000,00	32.700.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.594.121.477,00	1.580.237.793,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.548.145.977,00	1.545.222.376,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	954.600.000,00	954.490.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	593.545.977,00	590.732.376,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.975.500,00	35.015.417,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.975.500,00	35.015.417,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sempaja Utara	5.120.285.887,00	5.110.991.319,00	29.100.000,00	25.300.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	135.166.000,00	133.704.745,00	29.100.000,00	25.300.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	135.166.000,00	133.704.745,00	29.100.000,00	25.300.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	135.166.000,00	133.704.745,00	29.100.000,00	25.300.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.985.119.887,00	4.977.286.574,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.939.544.387,00	4.932.169.657,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.071.000.000,00	3.071.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.868.544.387,00	1.861.169.657,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.575.500,00	45.116.917,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.575.500,00	45.116.917,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sempaja Barat	1.635.367.864,00	1.618.935.717,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.037.500,00	152.994.411,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	154.037.500,00	152.994.411,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	154.037.500,00	152.994.411,00	15.200.000,00	15.200.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.481.330.364,00	1.465.941.306,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.435.919.364,00	1.422.153.306,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	884.600.000,00	883.819.650,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	551.319.364,00	538.333.656,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.411.000,00	43.788.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.411.000,00	43.788.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sempaja Timur	6.412.435.637,00	6.411.755.428,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	193.063.000,00	192.926.291,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.063.000,00	192.926.291,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.063.000,00	192.926.291,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.219.372.637,00	6.218.829.137,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.174.037.137,00	6.174.037.137,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.841.000.000,00	3.841.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.333.037.137,00	2.333.037.137,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.335.500,00	44.792.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.335.500,00	44.792.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Budaya Pampang	953.071.682,00	951.521.705,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	167.576.500,00	167.376.324,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.576.500,00	167.376.324,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	167.576.500,00	167.376.324,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	785.495.182,00	784.145.381,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	740.259.682,00	739.729.681,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	458.900.000,00	458.650.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.359.682,00	281.079.681,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.235.500,00	44.415.700,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.235.500,00	44.415.700,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Ulu	25.414.441.543,00	23.766.934.546,00	402.740.000,00	307.723.999,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.381.640.663,00	20.830.737.654,00	348.690.000,00	253.673.999,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	154.981.222,00	154.193.460,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.472.080,00	100.951.460,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.786.142,00	36.604.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.723.000,00	16.638.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.025.080.757,00	18.737.893.131,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.494.640.757,00	16.594.907.488,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.499.051.000,00	2.111.906.643,00	0	0	0	0	0	0
Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	31.389.000,00	31.079.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,00	79.972.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000,00	79.972.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.517.000,00	137.740.700,00	210.690.000,00	210.679.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.810.000,00	4.810.000,00	205.690.000,00	205.679.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.152.000,00	23.122.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.579.000,00	27.050.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.976.000,00	57.838.700,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.054.543.500,00	990.985.000,00	138.000.000,00	42.994.999,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.324.500,00	249.030.000,00	90.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	722.000.000,00	721.740.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	43.000.000,00	42.994.999,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.219.000,00	20.215.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	435.178.209,00	423.867.341,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	368.178.209,00	356.867.341,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000,00	57.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.339.975,00	306.086.022,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.838.850,00	78.871.785,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	177.000.000,00	176.644.237,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.000.000,00	24.070.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.501.125,00	21.500.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.891.967.880,00	2.795.408.892,00	54.050.000,00	54.050.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.891.967.880,00	2.795.408.892,00	54.050.000,00	54.050.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.891.967.880,00	2.795.408.892,00	54.050.000,00	54.050.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	140.833.000,00	140.788.000,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.000.000,00	69.955.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	40.000.000,00	39.955.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	70.833.000,00	70.833.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	70.833.000,00	70.833.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Teluk Lerong Ilir	3.889.223.409,00	3.887.441.217,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	366.825.000,00	366.325.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.825.000,00	366.325.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	366.825.000,00	366.325.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.522.398.409,00	3.521.116.217,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.472.398.409,00	3.471.116.217,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.152.800.000,00	2.152.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.319.598.409,00	1.318.316.217,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kelurahan Air Putih	7.234.185.212,00	7.229.578.257,00	40.005.450,00	40.005.448,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	179.797.050,00	179.797.050,00	26.555.450,00	26.555.448,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.797.050,00	179.797.050,00	26.555.450,00	26.555.448,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	179.797.050,00	179.797.050,00	26.555.450,00	26.555.448,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.054.388.162,00	7.049.781.207,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.017.838.162,00	7.014.329.936,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.381.000.000,00	4.381.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.636.838.162,00	2.633.329.936,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	36.550.000,00	35.451.271,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	36.550.000,00	35.451.271,00	13.450.000,00	13.450.000,00	0	0	0	0
Kelurahan Jawa	4.818.864.546,00	4.818.641.557,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	166.000.000,00	166.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.000.000,00	166.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.000.000,00	166.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.652.864.546,00	4.652.641.557,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.602.864.546,00	4.602.649.286,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.741.864.546,00	1.741.649.286,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	49.992.271,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.992.271,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sidodadi	6.683.228.364,00	6.682.804.163,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	209.738.000,00	209.445.800,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	209.738.000,00	209.445.800,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	209.738.000,00	209.445.800,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.473.490.364,00	6.473.358.363,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.423.490.364,00	6.423.358.363,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	4.006.000.000,00	4.006.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.417.490.364,00	2.417.358.363,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Air Hitam	4.132.187.633,00	4.131.076.112,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	160.897.500,00	160.897.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.897.500,00	160.897.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.897.500,00	160.897.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.971.290.133,00	3.970.178.612,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.921.290.133,00	3.921.116.341,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.432.800.000,00	2.432.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.488.490.133,00	1.488.316.341,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	49.062.271,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.062.271,00	0	0	0	0	0	0
kelurahan Gunung Kelua	4.680.921.818,00	4.667.712.608,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	152.510.500,00	139.310.300,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.510.500,00	139.310.300,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	152.510.500,00	139.310.300,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.528.411.318,00	4.528.402.308,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.478.411.318,00	4.478.402.308,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.821.000.000,00	2.821.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.657.411.318,00	1.657.402.308,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Dadi Mulya	4.818.864.546,00	4.818.726.946,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	166.000.000,00	166.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.000.000,00	166.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	166.000.000,00	166.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.652.864.546,00	4.652.726.946,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.602.864.546,00	4.602.726.946,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.461.000.000,00	2.460.862.400,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.141.864.546,00	2.141.864.546,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Bukit Pinang	2.669.065.886,00	2.668.914.157,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	164.907.000,00	164.901.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.907.000,00	164.901.500,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.907.000,00	164.901.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.504.158.886,00	2.504.012.657,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.454.158.886,00	2.454.150.386,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.522.800.000,00	1.522.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	931.358.886,00	931.350.386,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	49.862.271,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.862.271,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Sungai Kunjang	21.053.044.828,00	19.804.341.394,00	264.620.000,00	248.023.206,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.317.841.328,00	18.167.199.192,00	257.620.000,00	243.025.206,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.922.000,00	155.455.320,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.154.000,00	83.837.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.099.250,00	47.962.320,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.668.750,00	23.655.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.832.059.076,00	15.942.238.098,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.467.604.576,00	13.758.973.046,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.321.571.000,00	2.140.510.552,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.883.500,00	42.754.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	73.750.000,00	72.885.920,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	73.750.000,00	72.885.920,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.093.200,00	141.785.758,00	184.640.000,00	176.476.006,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.476.000,00	13.392.843,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.660.000,00	6.660.000,00	179.990.000,00	171.966.006,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	350.000,00	340.000,00	4.650.000,00	4.510.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.664.700,00	48.620.500,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.970.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.981.600,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.942.500,00	49.820.815,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	885.170.000,00	867.645.990,00	72.980.000,00	66.549.200,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	260.140.000,00	254.930.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	614.010.000,00	601.890.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	340.000,00	340.000,00	53.660.000,00	51.989.200,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	340.000,00	340.000,00	9.660.000,00	4.900.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	340.000,00	340.000,00	9.660.000,00	9.660.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.805.990,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	527.205.252,00	483.215.987,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	467.205.252,00	427.075.987,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	5.140.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000,00	51.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	681.641.800,00	503.972.119,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.800.000,00	136.011.132,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	293.191.800,00	176.797.798,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.250.000,00	38.102.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	107.300.000,00	106.966.189,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.100.000,00	46.095.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.604.868.000,00	1.515.589.702,00	7.000.000,00	4.998.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.604.868.000,00	1.515.589.702,00	7.000.000,00	4.998.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.604.868.000,00	1.515.589.702,00	7.000.000,00	4.998.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.335.500,00	121.552.500,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	54.827.500,00	46.151.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.827.500,00	26.027.500,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	25.000.000,00	20.124.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	75.508.000,00	75.401.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	75.508.000,00	75.401.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Teluk Lerong Ulu	5.052.167.273,00	5.067.048.429,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	4.486.320,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	4.486.320,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0	4.486.320,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	170.545.500,00	181.760.960,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	170.545.500,00	181.760.960,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	170.545.500,00	181.760.960,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.881.621.773,00	4.880.801.149,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.840.057.773,00	4.839.359.149,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.013.740.000,00	3.013.740.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.826.317.773,00	1.825.619.149,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	41.564.000,00	41.442.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	41.564.000,00	41.442.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Karang Anyar	4.583.546.943,00	4.576.965.604,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	162.661.250,00	160.228.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.661.250,00	160.228.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	162.661.250,00	160.228.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.420.885.693,00	4.416.737.104,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.378.411.318,00	4.374.275.604,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.721.000.000,00	2.721.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.657.411.318,00	1.653.275.604,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	42.474.375,00	42.461.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	42.474.375,00	42.461.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Karang Asam Ulu	4.640.086.151,00	4.628.280.105,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.977.444,00	161.463.814,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.977.444,00	161.463.814,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.977.444,00	161.463.814,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.476.108.707,00	4.466.816.291,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.428.374.738,00	4.419.083.291,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.720.968.750,00	2.720.875.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.707.405.988,00	1.698.208.291,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	47.733.969,00	47.733.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47.733.969,00	47.733.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Karang Asam Ilir	4.241.825.514,00	4.228.570.123,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.002.500,00	160.147.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.002.500,00	160.147.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.002.500,00	160.147.500,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.073.823.014,00	4.068.422.623,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.032.649.858,00	4.027.249.467,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.502.362.500,00	2.502.362.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.530.287.358,00	1.524.886.967,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	41.173.156,00	41.173.156,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	41.173.156,00	41.173.156,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Lok Bahu	6.111.170.171,00	6.108.202.253,00	37.000.000,00	36.800.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	183.258.750,00	180.916.750,00	37.000.000,00	36.800.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	183.258.750,00	180.916.750,00	37.000.000,00	36.800.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	183.258.750,00	180.916.750,00	37.000.000,00	36.800.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.927.911.421,00	5.927.285.503,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.887.357.296,00	5.886.889.003,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.676.000.000,00	3.675.840.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.211.357.296,00	2.211.049.003,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.554.125,00	40.396.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40.554.125,00	40.396.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Loa Buah	2.534.307.717,00	2.523.653.485,00	25.070.000,00	25.070.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	144.375.825,00	135.551.825,00	25.070.000,00	25.070.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	144.375.825,00	135.551.825,00	25.070.000,00	25.070.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	144.375.825,00	135.551.825,00	25.070.000,00	25.070.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.389.931.892,00	2.388.101.660,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.341.899.205,00	2.340.161.473,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.452.792.500,00	1.451.522.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	889.106.705,00	888.638.973,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	48.032.687,00	47.940.187,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	48.032.687,00	47.940.187,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Loa Bakung	10.059.088.682,00	9.940.414.074,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	424.198.000,00	419.756.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.198.000,00	419.756.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	424.198.000,00	419.756.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	9.634.890.682,00	9.520.658.074,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	9.587.653.932,00	9.473.421.324,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.010.490.000,00	5.939.220.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3.577.163.932,00	3.534.201.324,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	47.236.750,00	47.236.750,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	47.236.750,00	47.236.750,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Sambutan	16.000.312.986,00	15.228.550.315,00	208.645.000,00	204.288.772,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.549.439.486,00	13.822.446.237,00	128.470.000,00	125.050.272,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.253.337,00	159.866.694,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.192.750,00	99.566.794,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.129.337,00	40.815.900,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.931.250,00	19.484.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.479.900.838,00	11.890.769.093,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.982.767.838,00	10.650.451.493,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.456.452.000,00	1.199.915.203,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.681.000,00	40.402.397,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72.790.000,00	68.981.821,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72.790.000,00	68.981.821,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	150.903.750,00	129.123.540,00	56.470.000,00	55.110.272,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.990.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.530.000,00	3.530.000,00	46.470.000,00	45.110.272,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.996.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.273.250,00	59.298.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	3.993.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.100.500,00	42.316.540,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	872.500.000,00	841.459.751,00	72.000.000,00	69.940.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	754.500.000,00	723.839.751,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	50.000.000,00	47.940.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	12.000.000,00	12.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108.000.000,00	107.620.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	346.551.561,00	329.676.101,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.051.561,00	278.176.101,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.500.000,00	36.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.540.000,00	402.569.237,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	271.840.000,00	254.452.729,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000,00	30.969.008,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	28.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	78.700.000,00	78.697.500,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.356.011.000,00	1.313.752.578,00	80.175.000,00	79.238.500,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.356.011.000,00	1.313.752.578,00	80.175.000,00	79.238.500,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.356.011.000,00	1.313.752.578,00	80.175.000,00	79.238.500,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	94.862.500,00	92.351.500,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	20.000.000,00	19.892.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10.000.000,00	9.920.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	10.000.000,00	9.972.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	74.862.500,00	72.459.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	74.862.500,00	72.459.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sungai Kapih	3.140.533.841,00	3.135.388.444,00	13.000.000,00	12.237.750,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.227.250,00	165.308.900,00	3.000.000,00	2.802.750,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.227.250,00	165.308.900,00	3.000.000,00	2.802.750,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.227.250,00	165.308.900,00	3.000.000,00	2.802.750,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.972.306.591,00	2.970.079.544,00	10.000.000,00	9.435.000,00	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.936.265.341,00	2.934.314.544,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.802.800.000,00	1.802.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.133.465.341,00	1.131.514.544,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	36.041.250,00	35.765.000,00	10.000.000,00	9.435.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	36.041.250,00	35.765.000,00	10.000.000,00	9.435.000,00	0	0	0	0
Kelurahan Sambutan	4.799.305.421,00	4.795.947.227,00	5.700.000,00	5.605.611,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	157.095.875,00	154.988.000,00	5.700.000,00	5.605.611,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.095.875,00	154.988.000,00	5.700.000,00	5.605.611,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.095.875,00	154.988.000,00	5.700.000,00	5.605.611,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.642.209.546,00	4.640.959.227,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.602.864.546,00	4.602.864.227,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.861.000.000,00	2.861.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.741.864.546,00	1.741.864.227,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	39.345.000,00	38.095.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39.345.000,00	38.095.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Makroman	3.395.393.568,00	3.394.521.060,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	169.362.500,00	169.020.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	169.362.500,00	169.020.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	169.362.500,00	169.020.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.226.031.068,00	3.225.501.060,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.185.201.068,00	3.184.671.060,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.992.475.000,00	1.992.475.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.192.726.068,00	1.192.196.060,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	40.830.000,00	40.830.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	40.830.000,00	40.830.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sindang Sari	1.471.006.636,00	1.468.896.128,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	171.240.500,00	169.750.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	171.240.500,00	169.750.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	171.240.500,00	169.750.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.299.766.136,00	1.299.146.128,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.255.766.136,00	1.255.166.128,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	794.600.000,00	794.180.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	461.166.136,00	460.986.128,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.000.000,00	43.980.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.000.000,00	43.980.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Pulau Atas	1.502.300.148,00	1.500.598.183,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	365.525.625,00	365.244.460,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	365.525.625,00	365.244.460,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	365.525.625,00	365.244.460,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.136.774.523,00	1.135.353.723,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.093.539.523,00	1.092.168.723,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	674.600.000,00	674.600.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	418.939.523,00	417.568.723,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.235.000,00	43.185.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.235.000,00	43.185.000,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Sungai Pinang	17.624.512.113,00	15.382.994.609,00	586.749.000,00	516.234.452,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.295.614.613,00	14.092.915.719,00	400.629.000,00	332.796.650,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157.401.750,00	157.145.447,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.309.500,00	101.147.747,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35.625.750,00	35.531.200,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.466.500,00	20.466.500,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.971.000.715,00	12.160.531.645,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.998.115.590,00	10.418.214.413,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.924.667.000,00	1.694.099.382,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	48.218.125,00	48.217.850,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	56.875.000,00	52.247.996,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.875.000,00	52.247.996,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	189.165.500,00	189.149.275,00	172.634.000,00	160.463.958,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.450.000,00	32.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.410.000,00	5.410.000,00	111.590.000,00	105.189.993,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.956.000,00	35.953.775,00	61.044.000,00	55.273.965,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.500.000,00	11.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.450.000,00	36.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.998.000,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.988.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52.399.500,00	52.399.500,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	814.435.000,00	743.929.993,00	227.995.000,00	172.332.692,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	772.430.000,00	703.424.993,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.410.000,00	6.910.000,00	41.590.000,00	35.020.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	680.000,00	680.000,00	45.320.000,00	39.002.695,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	680.000,00	680.000,00	9.320.000,00	9.280.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.715.000,00	21.715.000,00	42.285.000,00	0	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.520.000,00	10.520.000,00	89.480.000,00	89.029.997,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.396.648,00	351.111.063,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.696.648,00	303.411.063,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.700.000,00	5.700.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.340.000,00	438.800.300,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	315.840.000,00	177.322.730,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.000.000,00	62.080.300,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	24.980.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	212.500.000,00	74.417.270,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.217.148.750,00	1.178.342.515,00	186.120.000,00	183.437.802,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.217.148.750,00	1.178.342.515,00	186.120.000,00	183.437.802,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.217.148.750,00	1.178.342.515,00	186.120.000,00	183.437.802,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	111.748.750,00	111.736.375,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	43.750.000,00	43.748.625,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.562.500,00	28.561.275,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	15.187.500,00	15.187.350,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	67.998.750,00	67.987.750,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	67.998.750,00	67.987.750,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Temindung Permai	4.747.963.932,00	4.747.641.861,00	1.500.000,00	1.387.500,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.753.000,00	163.743.500,00	1.500.000,00	1.387.500,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.753.000,00	163.743.500,00	1.500.000,00	1.387.500,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.753.000,00	163.743.500,00	1.500.000,00	1.387.500,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.584.210.932,00	4.583.898.361,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.540.637.932,00	4.540.328.361,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.451.000.000,00	2.450.969.850,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.089.637.932,00	2.089.358.511,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.573.000,00	43.570.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.573.000,00	43.570.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sungai Pinang Dalam	13.370.868.205,00	13.283.247.624,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	406.843.000,00	374.702.005,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.843.000,00	374.702.005,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	406.843.000,00	374.702.005,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	12.964.025.205,00	12.908.545.619,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12.924.033.955,00	12.868.593.619,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	8.049.200.000,00	8.048.386.600,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4.874.833.955,00	4.820.207.019,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	39.991.250,00	39.952.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39.991.250,00	39.952.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0	0	0
Kelurahan Bandara	3.562.546.371,00	3.526.205.424,00	8.275.000,00	8.270.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	157.250.125,00	132.916.800,00	8.275.000,00	8.270.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.250.125,00	132.916.800,00	8.275.000,00	8.270.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	157.250.125,00	132.916.800,00	8.275.000,00	8.270.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.405.296.246,00	3.393.288.624,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.360.001.796,00	3.358.311.824,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.082.692.500,00	2.081.370.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.277.309.296,00	1.276.941.824,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.294.450,00	34.976.800,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.294.450,00	34.976.800,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Gunung Lingai	2.962.747.614,00	2.955.334.553,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	164.789.500,00	163.589.300,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.789.500,00	163.589.300,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.789.500,00	163.589.300,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.797.958.114,00	2.791.745.253,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.753.612.114,00	2.748.790.753,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.627.800.000,00	1.623.950.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.125.812.114,00	1.124.840.753,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.346.000,00	42.954.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.346.000,00	42.954.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Mugirejo	5.147.692.651,00	5.136.207.594,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	164.224.750,00	164.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.224.750,00	164.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	164.224.750,00	164.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.983.467.901,00	4.972.207.594,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.939.121.901,00	4.927.904.594,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.070.681.250,00	3.070.453.600,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.868.440.651,00	1.857.450.994,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.346.000,00	44.303.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.346.000,00	44.303.000,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Samarinda Kota	15.018.128.800,00	13.538.719.603,00	189.795.600,00	185.413.501,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.640.593.175,00	12.337.551.525,00	88.840.000,00	87.554.000,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	161.576.587,00	151.595.884,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.867.000,00	95.567.259,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.234.587,00	33.047.625,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.475.000,00	22.981.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.784.651.449,00	10.568.909.644,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.420.732.949,00	9.540.441.019,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.318.856.000,00	987.853.625,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.062.500,00	40.615.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.076.000,00	100.025.584,00	44.250.000,00	43.554.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.500.000,00	16.500.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.750.000,00	5.750.000,00	44.250.000,00	43.554.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.470.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.050.000,00	17.435.350,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	7.244.337,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	43.776.000,00	43.625.897,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	752.910.000,00	739.299.993,00	44.590.000,00	44.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	697.500.000,00	693.139.993,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	40.750.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	5.410.000,00	5.410.000,00	44.590.000,00	44.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.824.139,00	259.347.503,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	221.824.139,00	220.347.503,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.000.000,00	39.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574.555.000,00	518.372.917,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.955.000,00	68.860.517,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	128.400.000,00	123.924.400,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.000.000,00	43.608.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272.200.000,00	271.980.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.242.075.100,00	1.079.334.298,00	92.000.000,00	88.910.001,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.242.075.100,00	1.079.334.298,00	92.000.000,00	88.910.001,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.242.075.100,00	1.079.334.298,00	92.000.000,00	88.910.001,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	135.460.525,00	121.833.780,00	8.955.600,00	8.949.500,00	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	61.520.650,00	50.944.280,00	8.955.600,00	8.949.500,00	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	25.000.000,00	20.091.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	36.520.650,00	30.853.280,00	8.955.600,00	8.949.500,00	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	73.939.875,00	70.889.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	73.939.875,00	70.889.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Karang Mumus	3.581.999.046,00	3.564.244.396,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158.202.250,00	144.396.300,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	158.202.250,00	144.396.300,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	158.202.250,00	144.396.300,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.423.796.796,00	3.419.848.096,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.385.171.796,00	3.382.175.796,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.082.800.000,00	2.081.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.302.371.796,00	1.300.725.796,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	38.625.000,00	37.672.300,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	38.625.000,00	37.672.300,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Pelabuhan	3.112.166.541,00	3.094.765.900,00	12.859.800,00	12.659.800,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	163.573.200,00	148.016.302,00	7.859.800,00	7.659.800,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.573.200,00	148.016.302,00	7.859.800,00	7.659.800,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163.573.200,00	148.016.302,00	7.859.800,00	7.659.800,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.948.593.341,00	2.946.749.598,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.911.265.341,00	2.909.513.588,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.802.800.000,00	1.802.510.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.108.465.341,00	1.107.003.588,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	37.328.000,00	37.236.010,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	37.328.000,00	37.236.010,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Kelurahan Pasar Pagi	2.062.164.091,00	2.052.991.684,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	362.202.000,00	355.113.800,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	362.202.000,00	355.113.800,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	362.202.000,00	355.113.800,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.699.962.091,00	1.697.877.884,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.660.372.591,00	1.658.563.384,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.024.600.000,00	1.024.600.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	635.772.591,00	633.963.384,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	39.589.500,00	39.314.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	39.589.500,00	39.314.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Bugis	2.516.223.159,00	2.468.574.160,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	168.397.000,00	168.381.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.397.000,00	168.381.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	168.397.000,00	168.381.500,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.347.826.159,00	2.300.192.660,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.304.705.659,00	2.257.080.660,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.432.800.000,00	1.403.005.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	871.905.659,00	854.075.660,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.120.500,00	43.112.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.120.500,00	43.112.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sungai Pinang Luar	4.469.552.705,00	4.104.149.924,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	160.368.000,00	141.015.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.368.000,00	141.015.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	160.368.000,00	141.015.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.309.184.705,00	3.963.134.924,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	4.266.184.705,00	3.929.074.924,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.651.000.000,00	2.441.000.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.615.184.705,00	1.488.074.924,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.000.000,00	34.060.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.000.000,00	34.060.000,00	0	0	0	0	0	0
Kecamatan Loa Janan Ilir	17.840.762.164,00	15.047.136.228,00	323.300.000,00	262.453.196,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.784.039.211,00	13.256.915.908,00	207.800.000,00	147.629.098,00	0	0	0	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.427.250,00	62.200.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58.353.250,00	31.440.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.074.000,00	5.760.000,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.602.248.870,00	11.434.469.408,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.124.700.370,00	10.186.948.339,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.433.550.000,00	1.214.679.069,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.998.500,00	32.842.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	66.167.500,00	63.829.493,00	0	0	0	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.167.500,00	63.829.493,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	214.790.500,00	172.047.000,00	44.600.000,00	36.649.999,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	3.632.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.400.000,00	0	44.600.000,00	36.649.999,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	7.015.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.000.000,00	28.910.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	89.000.000,00	75.130.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.640.500,00	57.360.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	820.887.500,00	765.380.360,00	133.200.000,00	80.979.099,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	806.890.000,00	765.380.360,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Mebel	0	0	17.500.000,00	7.379.100,00	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	35.000.000,00	23.599.999,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13.997.500,00	0	35.700.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	45.000.000,00	40.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	361.767.591,00	319.314.884,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	311.767.591,00	281.234.884,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.000.000,00	38.080.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	608.750.000,00	439.674.763,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.750.000,00	63.280.468,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	180.000.000,00	103.176.595,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.000.000,00	28.560.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	174.370.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	110.000.000,00	70.287.700,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.926.474.953,00	1.721.175.320,00	91.875.000,00	91.199.098,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.926.474.953,00	1.721.175.320,00	91.875.000,00	91.199.098,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.926.474.953,00	1.721.175.320,00	91.875.000,00	91.199.098,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.248.000,00	69.045.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	73.935.000,00	34.835.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50.435.000,00	34.835.000,00	23.625.000,00	23.625.000,00	0	0	0	0
Evaluasi Kelurahan	23.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	56.313.000,00	34.210.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	56.313.000,00	34.210.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Simpang Tiga	3.792.119.315,00	3.733.776.533,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175.720.906,00	152.118.625,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.720.906,00	152.118.625,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.720.906,00	152.118.625,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.616.398.409,00	3.581.657.908,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.572.398.409,00	3.569.788.408,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.252.800.000,00	2.252.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.319.598.409,00	1.316.988.408,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	44.000.000,00	11.869.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	44.000.000,00	11.869.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Tani Aman	2.574.093.898,00	2.532.612.968,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.386.625,00	141.347.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	161.386.625,00	141.347.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	161.386.625,00	141.347.500,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.412.707.273,00	2.391.265.468,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.366.932.273,00	2.364.220.468,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.477.800.000,00	1.476.260.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	889.132.273,00	887.960.468,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	45.775.000,00	27.045.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	45.775.000,00	27.045.000,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Sengkotek	2.592.432.273,00	2.586.495.555,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	175.500.000,00	171.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.500.000,00	171.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	175.500.000,00	171.000.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.416.932.273,00	2.415.495.555,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.366.932.273,00	2.365.496.055,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1.452.800.000,00	1.452.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	914.132.273,00	912.696.055,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	50.000.000,00	49.999.500,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000,00	49.999.500,00	0	0	0	0	0	0
Kelurahan Harapan Baru	5.492.064.387,00	5.477.086.387,00	11.870.000,00	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	372.472.000,00	360.592.000,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	372.472.000,00	360.592.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	372.472.000,00	360.592.000,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.119.592.387,00	5.116.494.387,00	11.870.000,00	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.089.544.387,00	5.089.544.387,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.221.000.000,00	3.221.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.868.544.387,00	1.868.544.387,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	30.048.000,00	26.950.000,00	11.870.000,00	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30.048.000,00	26.950.000,00	11.870.000,00	0	0	0	0	0
Kelurahan Rapak Dalam	3.565.672.796,00	3.547.258.796,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.648.000,00	152.461.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	161.648.000,00	152.461.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	161.648.000,00	152.461.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.404.024.796,00	3.394.797.796,00	0	0	0	0	0	0
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.360.171.796,00	3.360.171.796,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.082.800.000,00	2.082.800.000,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.277.371.796,00	1.277.371.796,00	0	0	0	0	0	0
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	43.853.000,00	34.626.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	43.853.000,00	34.626.000,00	0	0	0	0	0	0
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	23.257.272.841,00	21.537.074.238,00	67.275.000,00	59.718.745,00	0	0	0	0
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23.257.272.841,00	21.537.074.238,00	67.275.000,00	59.718.745,00	0	0	0	0
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	23.257.272.841,00	21.537.074.238,00	67.275.000,00	59.718.745,00	0	0	0	0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.772.669.311,00	7.431.171.202,00	67.275.000,00	59.718.745,00	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	120.192.500,00	105.938.530,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.508.500,00	49.508.500,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.053.500,00	22.345.985,00	0	0	0	0	0	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.630.500,00	34.084.045,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.255.121.345,00	5.973.061.482,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.189.393.845,00	4.969.335.493,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.020.594.000,00	962.176.405,00	0	0	0	0	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45.133.500,00	41.549.584,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	160.000.000,00	148.940.000,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00	59.940.000,00	0	0	0	0	0	0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000,00	89.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.130.488,00	193.220.324,00	48.605.000,00	42.411.187,00	0	0	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.144.638,00	17.112.996,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.395.000,00	5.395.000,00	44.605.000,00	38.604.997,00	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	5.883.000,00	4.000.000,00	3.806.190,00	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.500.000,00	17.449.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.340.850,00	42.187.718,00	0	0	0	0	0	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.000.000,00	11.542.000,00	0	0	0	0	0	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93.750.000,00	93.650.610,00	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.124.000,00	58.140.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.124.000,00	58.140.000,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Mebel	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	488.413.366,00	476.009.089,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	160.978,00	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.604.638,00	5.092.849,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.647.750,00	22.018.200,00	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	453.000.000,00	448.898.040,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	491.687.612,00	475.861.777,00	8.670.000,00	7.307.558,00	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.502.250,00	237.299.130,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.260.000,00	18.577.440,00	0	0	0	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.925.362,00	219.985.207,00	8.670.000,00	7.307.558,00	0	0	0	0
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	3.813.860.000,00	3.314.519.652,00	0	0	0	0	0	0
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3.813.860.000,00	3.314.519.652,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	278.500.000,00	244.153.788,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.340.000,00	1.312.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	123.169.000,00	102.838.260,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan Paskibraka	3.334.651.000,00	2.891.510.744,00	0	0	0	0	0	0
Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	76.200.000,00	74.704.860,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.028.287.905,00	4.818.978.585,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	5.028.287.905,00	4.818.978.585,00	0	0	0	0	0	0
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3.963.467.905,00	3.779.036.905,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	911.996.000,00	889.933.393,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	152.824.000,00	150.008.287,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	220.130.375,00	199.625.489,00	0	0	0	0	0	0
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	220.130.375,00	199.625.489,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	118.671.500,00	109.413.849,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	101.458.875,00	90.211.640,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.139.995.250,00	1.066.706.321,00	0	0	0	0	0	0
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.139.995.250,00	1.066.706.321,00	0	0	0	0	0	0



Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
	Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100.453.250,00	85.293.374,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.039.542.000,00	981.412.947,00	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.282.330.000,00	4.706.072.989,00	0	0	0	0	0	0
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5.282.330.000,00	4.706.072.989,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3.863.480.000,00	3.830.066.250,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	83.950.000,00	54.926.000,00	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1.334.900.000,00	821.080.739,00	0	0	0	0	0	0



2025

PEMERINTAH
KOTA SAMARINDA